



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor 66 Tahun 2023
tentang

RPD

(Rencana Pembangunan Daerah)

Kabupaten Purwakarta

Tahun

2024-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, TAHUN 2022



bappelitbangda.purwakartakab.go.id/



bappedakabpurwakarta@gmail.com



(0264) 8307463



Jl. Gandanegara No. 25, Kab. Purwakarta



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 66 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah (RPD), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 – 2026;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
24. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RPD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan

kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD;

(2) Tujuan disusunnya RPD ini untuk :

- a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta;
- d. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
- e. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
- f. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
- g. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- h. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RPD meliputi :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah / Penjabat (Pj.) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Purwakarta;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan RPD;
 - b. Pelaksanaan RPD;
 - c. Hasil RPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Maret 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 66

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 66

Tanggal : 30 Maret 2023

Tentang : Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR GRAFIK | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-4 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-9 |
| 1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional | I-9 |
| 1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat | I-9 |
| 1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah | I-10 |
| 1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RTRW Kabupaten Purwakarta | I-10 |
| 1.3.5 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta | I-12 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-14 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | I-15 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM | II-1 |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... | II-1 |
| 2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah | II-1 |
| 2.1.2 Topografi | II-5 |
| 2.1.3 Klimatologi | II-6 |
| 2.1.4 Geologi | II-6 |
| 2.1.5 Hidrologi | II-7 |
| 2.1.6 Penggunaan Lahan | II-8 |

| | | |
|-------|--|--------|
| 2.1.7 | Demografi | II-9 |
| 2.1.8 | Potensi Pengembangan Wilayah | II-10 |
| 2.1.9 | Wilayah Rawan Bencana | II-58 |
| 2.2 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-66 |
| 2.2.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... | II-66 |
| 2.2.2 | Fokus Kesejahteraan Sosial | II-87 |
| 2.2.3 | Fokus Seni Budaya dan Olahraga | II-90 |
| 2.2.4 | Fokus Penanganan Dampak Pandemi Covid-19..... | II-91 |
| 2.3 | Aspek Pelayanan Umum | II-93 |
| 2.3.1 | Fokus Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... | II-93 |
| 2.3.2 | Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.... | II-121 |
| 2.3.3 | Fokus Urusan Pilihan..... | II-169 |
| 2.3.4 | Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung | II-194 |
| 2.3.5 | Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | II-201 |
| 2.3.6 | Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan | II-216 |
| 2.3.7 | Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan | II-219 |
| 2.3.8 | Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Umum | II-238 |
| 2.3.9 | Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 .. | II-242 |
| 2.4 | Aspek Daya Saing Daerah | II-246 |
| 2.4.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.. | II-248 |
| 2.4.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II-249 |
| 2.4.3 | Fokus Iklim Berinvestasi | II-250 |
| 2.4.4 | Fokus Sumber Daya Manusia | II-250 |
| 2.5 | Capaian Kinerja RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018 - 2023 | II-252 |
| 2.6 | Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)..... | II-257 |
| 2.7 | Analisis Daya Tampung dan Daya Dukung KLHS..... | II-260 |
| 2.7.1 | Daya Dukung Lingkungan | II-261 |
| 2.7.2 | Daya Tampung Lingkungan | II-262 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 2.7.3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | II-263 |
| 2.8 | Kerjasama Daerah | II-272 |
| 2.9 | Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..... | II-278 |
| BAB III | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... | III-1 |
| 3.1 | Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-1 |
| 3.1.1 | Kinerja Pelaksanaan APBD | III-2 |
| 3.1.1.1 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | III-2 |
| 3.1.1.2 | Pengelolaan Belanja Daerah. | III-7 |
| 3.1.1.3 | Pengelolaan Pembiayaan Daerah | III-13 |
| 3.1.2 | Neraca Daerah..... | III-19 |
| 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ... | III-28 |
| 3.2.1 | Proporsi Penggunaan Anggaran | III-33 |
| 3.2.2 | Analisis Pembiayaan Daerah | III-34 |
| 3.3 | Kerangka Pendanaan | III-37 |
| 3.3.1 | Proyeksi Pendapatan dan Belanja | III-38 |
| 3.3.2 | Penghitungan Kerangka Pendanaan ... | III-43 |
| BAB IV | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH | IV-1 |
| 4.1 | Permasalahan Pembangunan | IV-1 |
| 4.1.1 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | IV-1 |
| 4.1.2 | Aspek Pelayanan Umum..... | IV-6 |
| 4.1.3 | Aspek Daya Saing Daerah | IV-22 |
| 4.2 | Isu Strategis | IV-24 |
| 4.2.1 | Isu Strategis Internasional..... | IV-24 |
| 4.2.2 | Isu Strategis Nasional..... | IV-28 |
| 4.2.3 | Isu Strategis Regional..... | IV-33 |
| 4.2.4 | Isu Strategis Lokal..... | IV-50 |
| 4.2.5 | Penetapan Isu Strategis..... | IV-83 |
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-1 |
| 5.1 | Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 | V-1 |
| 5.2 | Tujuan dan Sasaran | V-2 |
| 5.3 | Keselarasan RPD dengan Dokumen Perencanaan | V-10 |

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS | VI-1 |
| | 6.1 Strategi | VI-1 |
| | 6.2 Arah Kebijakan | VI-12 |
| | 6.3 Prioritas Pembangunan | VI-25 |
| | 6.4 Program Pembangunan | VI-38 |
| BAB VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... | VII-1 |
| BAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | VIII-1 |
| BAB IX | PENUTUP | IX-1 |
| | 9.1 Kaidah Pelaksanaan..... | IX-1 |
| | 9.2 Pedoman Transisi..... | IX-2 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta ... | II-4 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | II-10 |
| Tabel 2.3 | Daftar Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasarkan Jenisnya Di Kabupaten Purwakarta | II-47 |
| Tabel 2.4 | Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Purwakarta | II-59 |
| Tabel 2.5 | Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Purwakarta..... | II-61 |
| Tabel 2.6 | Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan ... | II-62 |
| Tabel 2.7 | Kriteria Dan Lokasi Kawasan Bencana | II-62 |
| Tabel 2.8 | Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Bencana | II-64 |
| Tabel 2.9 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | II-67 |
| Tabel 2.10 | Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022 | II-67 |
| Tabel 2.11 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019-2022 | II-71 |
| Tabel 2.12 | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah), Tahun 2019-2022 | II-71 |
| Tabel 2.13 | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2022 .. | II-72 |
| Tabel 2.14 | Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022 | II-72 |
| Tabel 2.15 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022 | II-73 |
| Tabel 2.16 | Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022 | II-74 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.17 | Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | II-75 |
| Tabel 2.18 | Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022..... | II-76 |
| Tabel 2.19 | Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | II-77 |
| Tabel 2.20 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022 | II-78 |
| Tabel 2.21 | Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2022 | II-79 |
| Tabel 2.22 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | II-80 |
| Tabel 2.23 | Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022 | II-81 |
| Tabel 2.24 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | II-83 |
| Tabel 2.25 | Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022 | II-84 |
| Tabel 2.26 | Capaian Indek Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023 | II-85 |
| Tabel 2.27 | Persandingan Indek Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022 | II-85 |
| Tabel 2.28 | Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 | II-86 |
| Tabel 2.29 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | II-88 |
| Tabel 2.30 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mengembangkan Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | II-90 |
| Tabel 2.31 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-93 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.32 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-96 |
| Tabel 2.33 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-101 |
| Tabel 2.34 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-110 |
| Tabel 2.35 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-112 |
| Tabel 2.36 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-119 |
| Tabel 2.37 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-121 |
| Tabel 2.38 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-123 |
| Tabel 2.39 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-125 |
| Tabel 2.40 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-126 |
| Tabel 2.41 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-127 |
| Tabel 2.42 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-131 |
| Tabel 2.43 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-134 |
| Tabel 2.44 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-137 |
| Tabel 2.45 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-142 |
| Tabel 2.46 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-144 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.47 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-147 |
| Tabel 2.48 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-151 |
| Tabel 2.49 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-155 |
| Tabel 2.50 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Statistik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-158 |
| Tabel 2.51 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-159 |
| Tabel 2.52 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-161 |
| Tabel 2.53 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-163 |
| Tabel 2.54 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kearsipan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-165 |
| Tabel 2.55 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-169 |
| Tabel 2.56 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pariwisata di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-174 |
| Tabel 2.57 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-175 |
| Tabel 2.58 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-184 |
| Tabel 2.59 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perindustrian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-188 |
| Tabel 2.60 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Transmigrasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-192 |
| Tabel 2.61 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-194 |
| Tabel 2.62 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022 | II-199 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.63 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perencanaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-202 |
| Tabel 2.64 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keuangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-205 |
| Tabel 2.65 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepegawaian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-210 |
| Tabel 2.66 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-214 |
| Tabel 2.67 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-215 |
| Tabel 2.68 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengelolaan Perbatasan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-216 |
| Tabel 2.69 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengawasan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-217 |
| Tabel 2.70 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-220 |
| Tabel 2.71 | Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022..... | II-239 |
| Tabel 2.72 | Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022..... | II-243 |
| Tabel 2.73 | Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022..... | II-243 |
| Tabel 2.74 | Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022..... | II-244 |
| Tabel 2.75 | Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022..... | II-245 |
| Tabel 2.76 | Hasil Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022..... | II-245 |
| Tabel 2.77 | Hasil Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2022..... | II-246 |
| Tabel 2.78 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023..... | II-250 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.79 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | II-250 |
| Tabel 2.80 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Iklim Berinvestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | II-251 |
| Tabel 2.81 | Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023 | II-251 |
| Tabel 2.82 | Capaian dan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 | II-254 |
| Tabel 2.83 | Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta | II-263 |
| Tabel 2.84 | Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem | II-263 |
| Tabel 2.85 | Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 | II-265 |
| Tabel 2.86 | Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 | II-271 |
| Tabel 2.87 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 | II-272 |
| Tabel 2.88 | Laporan Kegiatan Kerjasama Daerah Kabupaten Purwakarta | II-273 |
| Tabel 2.89 | Kinerja BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 | II-280 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-5 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-10 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-13 |
| Tabel 3.4 | Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 | III-16 |
| Tabel 3.5 | Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021..... | III-22 |
| Tabel 3.6 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 | III-33 |
| Tabel 3.7 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 | III-35 |
| Tabel 3.8 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021..... | III-35 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 3.9 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021..... | III-36 |
| Tabel 3.10 | Proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 | III-40 |
| Tabel 3.11 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 | III-44 |
| Tabel 3.12 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta | III-44 |
| Tabel 3.13 | Belanja Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta | III-45 |
| Tabel 3.14 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026..... | III-48 |
| Tabel 4.1 | Telaahan RPJMD/RPD Daerah Lain | IV-45 |
| Tabel 4.2 | Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial | IV-60 |
| Tabel 4.3 | Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi | IV-64 |
| Tabel 4.4 | Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan..... | IV-67 |
| Tabel 4.5 | Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan | IV-74 |
| Tabel 4.6 | Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta | IV-79 |
| Tabel 5.1 | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 | V-3 |
| Tabel 5.2 | Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 | V-8 |
| Tabel 5.3 | Keselarasn Indikator Makro RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 | V-11 |
| Tabel 5.4 | Keselarasn Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026..... | V-12 |
| Tabel 5.5 | Keselarasn Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024..... | V-14 |
| Tabel 5.6 | Keselarasn Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026..... | V-17 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| Tabel 6.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Purwakarta | VI-3 |
| Tabel 6.2 | Tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VI-12 |
| Tabel 6.3 | Arah Kebijakan Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VI-19 |
| Tabel 6.4 | Keselarasan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VI-25 |
| Tabel 6.5 | Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 | VI-35 |
| Tabel 6.6 | Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026..... | VI-36 |
| Tabel 6.7 | Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VI-38 |
| Tabel 6.8 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VI-104 |
| Tabel 7.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 Kabupaten Purwakarta..... | VII-3 |
| Tabel 7.2 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta | VII-5 |
| Tabel 8.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VIII-4 |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Makro Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VIII-6 |
| Tabel 8.3 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 | VIII-22 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-------|
| Gambar 1.1 | Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya | I-13 |
| Gambar 2.1 | Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta..... | II-1 |
| Gambar 2.2 | Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta .. | II-2 |
| Gambar 2.3 | Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya | II-65 |
| Gambar 4.1 | Visi, Misi, Arahana Presiden dan 7 Agenda Pembangunan..... | IV-30 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------|--|-------|
| Grafik 2.1 | Luas Wilayah Kab. Purwakarta menurut Kecamatan | II-5 |
| Grafik 2.2 | Pertumbuhan Ekonomi | II-67 |
| Grafik 2.3 | Persandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten wilayah perbatasan..... | II-68 |
| Grafik 2.4 | Inflasi Kabupaten Purwakarta | II-76 |
| Grafik 2.5 | Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat..... | II-77 |
| Grafik 2.6 | Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta.... | II-78 |
| Grafik 2.7 | Jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan kabupaten purwakarta | II-78 |
| Grafik 2.8 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta | II-82 |
| Grafik 2.9 | Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten wilayah perbatasan | II-82 |
| Grafik 2.10 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta | II-83 |
| Grafik 2.11 | Indeks Gini Kabupaten Purwakarta | II-85 |
| Grafik 2.12 | Persandingan Indeks Gini Kabupaten Purwakarta dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten wilayah perbatasan | II-86 |
| Grafik 2.13 | Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta | II-87 |
| Grafik 3.1 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-5 |
| Grafik 3.2 | Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-6 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Grafik 3.3 | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-11 |
| Grafik 3.4 | Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-12 |
| Grafik 3.5 | Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-14 |
| Grafik 3.6 | Komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhannya terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 .. | III-15 |
| Grafik 3.7 | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 | III-34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024, sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Purwakarta akan ada masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Purwakarta tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut

akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022.

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; (4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk penerapan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 didasarkan dengan mempedomani pada visi misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 Tahap Keempat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan

daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun melalui proses tahapan, analisis, konsultasi publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah, RPD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan rencana pembangunan daerah kepada seluruh masyarakat.
2. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2029 selesai disusun.
3. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
4. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.
5. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
6. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian dan evaluasi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah

- Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memperhatikan RPJMN 2020-2024, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan provinsi, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPD.

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purwakarta. Penjabaran Renstra PD termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

Selanjutnya, dokumen RPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD setiap tahun.

1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan RTRW Kabupaten Purwakarta

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031.

Penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta mempedomani RTRW Kabupaten Purwakarta melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW pada periode berkenaan. RPD yang disusun diharapkan selaras dan

mengadaptasi rencana yang dimuat dalam RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Dalam hal ini, penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011–2031. Dasar pemikirannya adalah RPJMD/RPD menjadi bagian dari penyelenggaraan RTRW agar kesesuaian pola dan struktur ruang di setiap wilayah dapat diwujudkan melalui penyesuaian antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah, pada periode berkenaan untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis penataan ruang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) baik secara vertikal maupun horizontal. SPPR dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW, dengan menyelaraskan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dalam kaitannya dengan penyesuaian Dokumen RPD dan RTRW, dokumen SPPR ini menjadi instrumen yang dapat dipergunakan dalam melakukan sinkronisasi antara program dalam dokumen RPD agar selaras dengan program pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTRW. Dengan demikian, program-program pembangunan yang bersifat spasial dapat memiliki lokus yang jelas dan berbasis ruang.

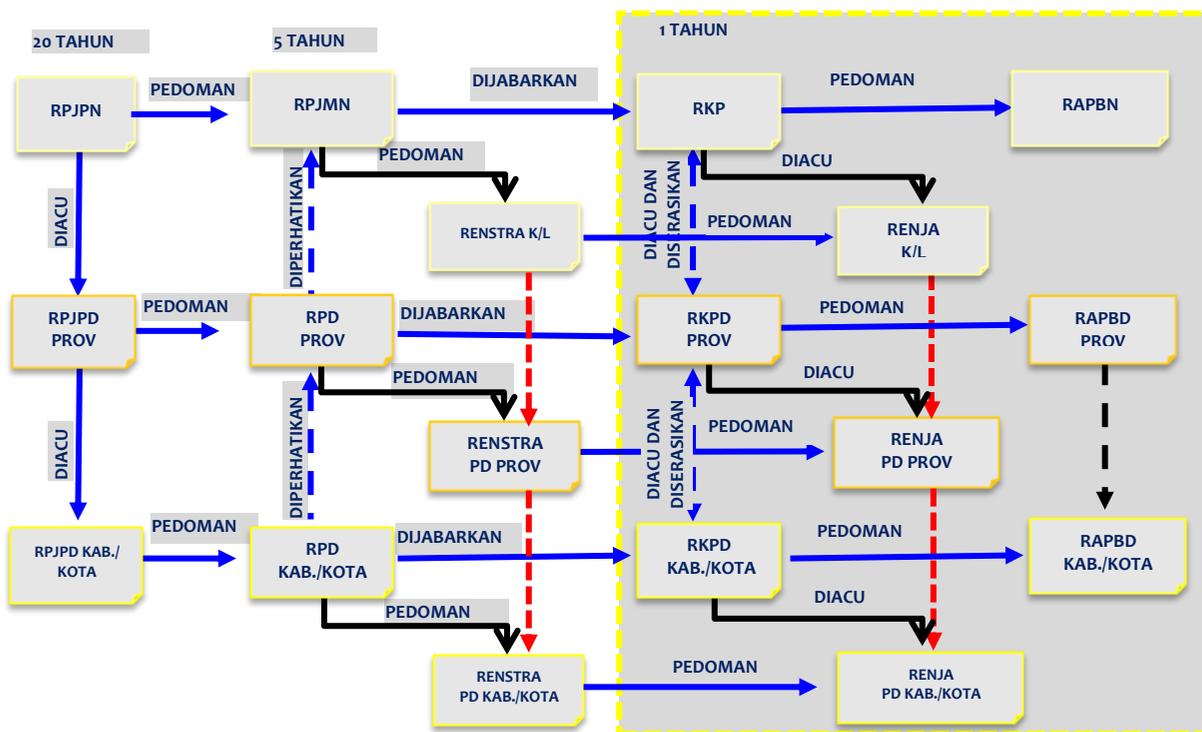
1.3.5 Hubungan RPD Kabupaten Purwakarta Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Penyusunan RPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Untuk itu agar terjadi keterkaitan dan keselarasan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, maka perlu dilakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Keselarasan tersebut meliputi visi, misi, tujuan, isu strategis, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pemangku pembangunan yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain keterkaitan dan keselarasan tersebut, RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 juga harus menjadi pedoman dan selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan rencana tahunan RKPD.

Adapun hubungan RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah Lainnya



Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan rancangan arah pembangunan daerah 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah, dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
2. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta;
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;
6. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
7. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Dokumen RPD.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, Bab ini memuat hasil RPJMD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's).

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan dengan menyelaraskan pada Visi dan Misi RPJPD.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang. Selanjutnya ditetapkan Program Pembangunan Daerah yang akan menunjang

pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahunnya.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi pada saat RPD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

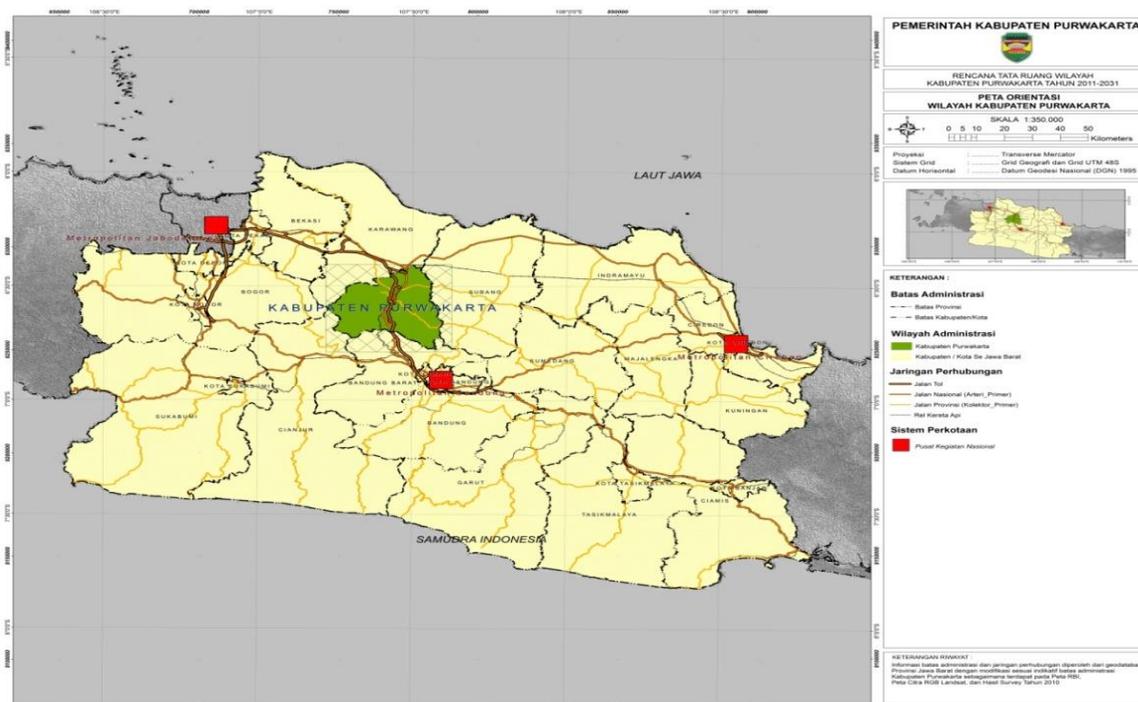
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Peta orientasi Kabupaten Purwakarta disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

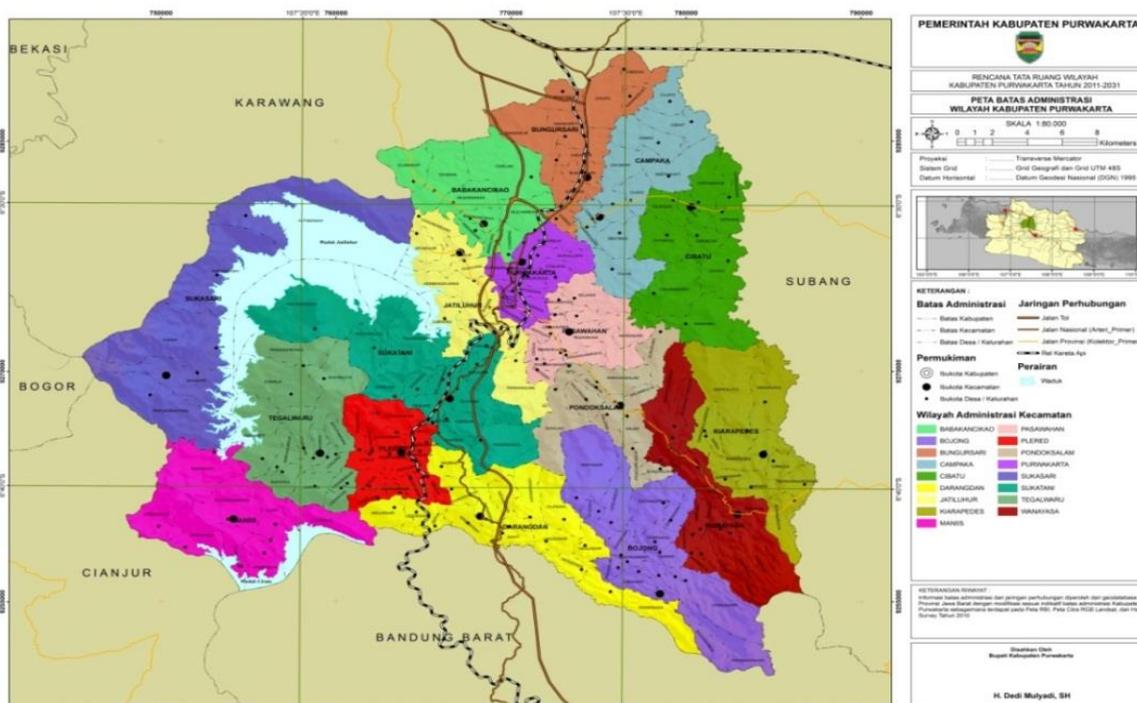
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor;

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 hektar (971,72 km²) atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 508 dusun, 1.155 Rukun Warga (RW), dan 3.622 Rukun Tetangga (RT).

Secara Administrasi, luas dan batas wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2

Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian

Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 mdpl.

Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.

Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat ditanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.

Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan

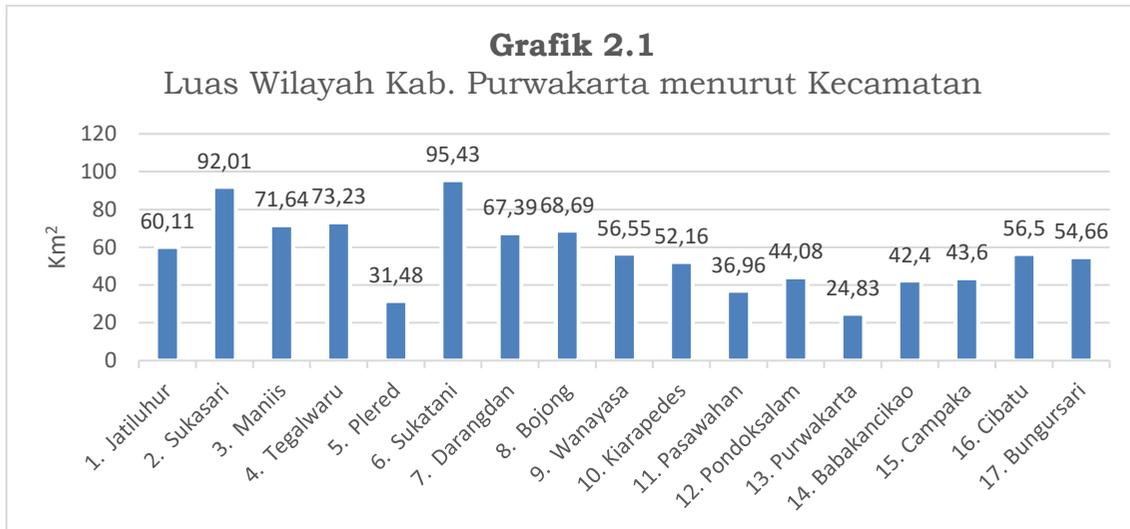
secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi antar sektor pembangunan daerah lainnya. Luas Wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.1

Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

| KECAMATAN | LUAS WILAYAH | | JUMLAH DESA/ KELURAHAN |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| | Km ² | % | |
| 1. Jatiluhur | 60,11 | 6,19 | 10 |
| 2. Sukasari | 92,01 | 9,47 | 5 |
| 3. Maniis | 71,64 | 7,37 | 8 |
| 4. Tegalwaru | 73,23 | 7,54 | 13 |
| 5. Plered | 31,48 | 3,24 | 16 |
| 6. Sukatani | 95,43 | 9,82 | 14 |
| 7. Darangdan | 67,39 | 6,94 | 15 |
| 8. Bojong | 68,69 | 7,07 | 14 |
| 9. Wanayasa | 56,55 | 5,82 | 15 |
| 10. Kiarapedes | 52,16 | 5,37 | 10 |
| 11. Pasawahan | 36,96 | 3,80 | 12 |
| 12. Pondok salam | 44,08 | 4,54 | 11 |
| 13. Purwakarta | 24,83 | 2,56 | 10 |
| 14. Babakancikao | 42,40 | 4,36 | 9 |
| 15. Campaka | 43,60 | 4,49 | 10 |
| 16. Cibatuh | 56,50 | 5,81 | 10 |
| 17. Bungursari | 54,66 | 5,63 | 10 |
| JUMLAH | 971,72 | 100,00 | 192 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Sukatani merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kabupaten Purwakarta yaitu seluas 95,43 km² atau 9,82%, sedangkan Kecamatan Purwakarta merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 24,83 km² atau 2,56%. Untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16 desa, sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 5 desa.

2.1.2 Topografi

Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) wilayah, berdasarkan relief buminya yaitu:

1. Wilayah Pegunungan. Wilayah ini terletak di tenggara dengan ketinggian 1.100 sd 2.036 m dpl, meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
2. Wilayah Perbukitan dan Danau. Wilayah ini terletak di barat laut dengan ketinggian 500 sd 1.000 m dpl, meliputi 33,8% dari total luas wilayah.
3. Wilayah Daratan. Wilayah ini terletak di utara dengan ketinggian 35 sd 499 m dpl, meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang unik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar/daratan di tengah dan utara. Di Purwakarta

juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai salah satu tenaga pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik untuk daerah Jawa Bali.

2.1.3 Klimatologi

Purwakarta beriklim panas yang terbagi atas zona panas dan zona sedang, berkisar antara 22°-32° C pada siang hari 17°-26° C pada malam hari. Secara agroklimat, Purwakarta berada di daerah lembab permanen (1-4 bulan basah/tahun dengan curah hujan 100 mm/bulan). jumlah bulan kering rata-rata 1-3 bulan/tahun. Curah hujan antara 1.413 mm - 4.501 mm/tahun, dengan curah hujan rata-rata 3.039 mm/tahun. curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember. Kondisi ini biasa terjadi di Kecamatan Wanayasa (4.501 mm). Hari hujan paling banyak adalah 148 hari. Mengenai resevoir atau resapan air, Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa sumber mata air yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan air. Diantaranya terdapat di Gunung Sanggabuana, Gunung Parang, serta Pasir Katungandak di wilayah Kecamatan Wanayasa dan Pasir Madang di Kecamatan Campaka. Selain itu, zona air tanah dari ukuran sedang sampai dangkal terdapat di wilayah Sungai Cikao di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Plered dan Kecamatan Campaka. Untuk zona air tanah ukuran dalam, terdapat di wilayah Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Wanayasa. Untuk air genangan antara lain adalah Bendungan Ir. H. Djuanda dan sebagian area Bendungan Cirata.

2.1.4 Geologi

Kondisi geologi daerah Purwakarta terdiri dari batuan sedimen klastik, berupa batu gamping (kapur), batu lempung, batu pasir dan batuan vulkanik seperti tuf, breksi vulkanik, batuan beku terobosan, batu lempung napalan, konglomerat dan napal. Untuk jenis batuan beku terobosan meliputi andesit, diorite, vetrofir, basal dan gabro. Batuan ini umumnya bertebaran di bagian barat daya wilayah Kabupaten Purwakarta. Jenis Batuan napal atau batu pasir kuarsam merupakan batuan yang tertua di wilayah Kabupaten Purwakarta yang sebarannya terdapat di tepi Bendungan Jatiluhur (Bendungan Ir. H Djuanda).

Sedangkan batu lempung yang usianya lebih muda (miosen) tersebar di sekitar wilayah barat laut dan bagian timur Kabupaten Purwakarta

berikut endapan bekas gunung api tua yang berasal dari gunung Burangrang dan Gunung Sunda, yaitu berupa tuf, lava andesit basaltitis, breksi vulkanik dan lahar. Pada bagian permukaan batuan itu terdapat endapan hasil erupsi gunung api muda yang meliputi batu pasir, lahar, lapili, breksi lava basal, aglomerat tufan, pasir tufa, lapili dan laca scoria.

Berdasarkan kondisi dan jenis batuan di atas, maka di wilayah Kabupaten Purwakarta terdapat kandungan geologi berupa batu kali batu andesit, batu gamping (kapur), tanah lempung, pasir, pasir kuarsa, pasir batu (sirtu), tras, fosfat, barit dan batu gips. Sebagian besar jenis tanah adalah tanah latosol dan sebagian kecil adalah tanah aluvial, andosol, grumosol, litosol, podsolik dan regosol. Berdasarkan potensi yang dipaparkan di atas telah mendorong munculnya kegiatan pertambangan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta berada pada cekungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dengan kemiringan 0-40% dan DAS Cilamaya. Hal itu sangat berpengaruh pada hidrologi dan sistem drainase daerah Purwakarta. Pada cekungan itu dibangun Bendungan Ir. H. Djuanda di Jatiluhur (7.757 ha.) dan Cirata (1.182 ha.), yang berfungsi sebagai "flow control", irigasi, pembangkit tenaga listrik, juga sebagai sumber air minum DKI Jakarta. Luas kedua bendungan tersebut setara dengan 9,19% luas wilayah Kabupaten Purwakarta. Pembangunan bendungan tersebut dimungkinkan oleh keberadaan sejumlah sungai.

2.1.5 Hidrologi

Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup, sungai-sungai di Kabupaten Purwakarta adalah (1) Sungai Cilamaya yang merupakan Induk Sungai (orde 1 di DAS) dengan panjang 62 Km, lebar rata-rata 30 m, dan debit air 366 m³/detik. Sungai Cilamaya ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu antara lain: Sungai Ciracas, Sungai Cijambe, Sungai Cisaat, Sungai Cibongas, Sungai Cilandak, dll. (2) Sungai Cikao, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang sungai 45 km, lebar 40 m. Sungai Cikao terdiri dari beberapa sungai orde 2 DAS, yaitu antara lain: Sungai Cigintung, Sungai Cigadung, Sungai Cikembang, Sungai Cicadas, Sungai Cigajah, Sungai Cisitu, Sungai Cibingbin, Sungai Cigorogoy, Sungai Ciledug, Sungai Citajur, Sungai Cigalugur, Sungai Cinangka, dll. (3) Sungai Cilangkap, yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 16

km, lebar 4 m. Sungai ini mempunyai orde 2 di DAS yaitu Sungai Cioray dan Sungai Cijalu. (4) Sungai Ciampel yang merupakan Induk Sungai (orde 1 DAS) dengan panjang 14 km dan lebar sungai 4 m. Sungai Ciampel ini mempunyai orde 2 di DAS, yaitu Sungai Cikapuk, Sungai Sumurbeunying, Sungai Cilabuh, Sungai Ciwaru dan Sungai Cikantong.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Secara umum intensitas pemanfaatan lahan Kabupaten Purwakarta didominasi oleh permukiman dan perumahan, hal ini menunjukkan sebagian besar wilayah ini telah bersifat urban. Penggunaan lahan untuk kegiatan perumahan dan permukiman termasuk penggunaan yang paling dominan dalam pemanfaatan lahan terbangun kegiatannya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

- Perumahan/permukiman yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang lazim disebut perkampungan. Perumahan penduduk secara individual ini tersebar, dari bentuk, ukuran kavling, sempadan bangunan maupun lokasinya. Penempatan perumahan individual relatif kurang ada kesamaan. sehingga terkesan tidak teratur.
- Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara masal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas yang umumnya disebut kompleks perumahan.

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus rapat, Orientasi akses perumahan penduduk umumnya memanfaatkan jaringan jalan utama kota. Perumahan di kawasan pusat kota relatif banyak terkelompok pada kawasan 'dalam' dengan jaringan jalan penghubung atau jalan lingkungan yang relatif sempit dan berupa gang, serta kepadatannya sudah relatif tinggi.

Kondisi orientasi akses yang tetap memanfaatkan jalan utama kota sebagai akses pergerakan lokal memudahkan timbulnya kemacetan lalu lintas di jalan utama. Sedangkan kompleks perumahan pada umumnya

pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan.

Sebaran perumahan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, sebagian besar berada di Kecamatan Purwakarta dan penyebarannya cukup besar seperti di Kelurahan Nagrikaler, Kelurahan Munjuljaya, Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Tegalmunjul dan Desa Citalang. Pembangunan dan pengembangan perumahan di Kecamatan Purwakarta masih terus berlangsung sampai saat ini, baik yang di kerjakan oleh pengembang besar maupun yang berskala kecil.

2.1.7 Demografi

Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Purwakarta tercermin dari jumlah Penduduk Purwakarta. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai sebanyak 852.521 jiwa. Sedangkan Hasil Sensus Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2020 mencapai sebanyak 997.869 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022, jumlah penduduk Purwakarta tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen.

Data jumlah penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada perbedaan, hal ini dikarenakan tidak samanya indikator yang digunakan, misalnya BPS tidak menghitung penduduk yang tidak berada di Kabupaten Purwakarta minimal selama 6 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menghitung penduduk tersebut selama masih mempunyai KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga. Dalam Dokumen RPD ini kami menggunakan data dari BPS, dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk dari BPS menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berbagai indikator makro pembangunan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional/pusat.

Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (ribu) | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun | | | |
|---------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 1 | Jatiluhur | 69,94 | 73,95 | 75,1 | 76,51 | 2,22 | 1,73 | 1,16 | 1,87 |
| 2 | Sukasari | 15,9 | 17,26 | 17,53 | 17,85 | 1,35 | 1,73 | 2,07 | 1,87 |
| 3 | Maniis | 33,09 | 36,05 | 36,49 | 37,06 | 1,31 | 1,41 | 1,63 | 1,55 |
| 4 | Tegalwaru | 50,37 | 53,18 | 54,05 | 55,11 | 1,4 | 1,82 | 2,18 | 1,96 |
| 5 | Plered | 79,35 | 83,43 | 84,57 | 86,01 | 2,57 | 1,56 | 1,84 | 1,7 |
| 6 | Sukatani | 72,71 | 76,91 | 78,18 | 79,73 | 2,3 | 1,84 | 2,21 | 1,98 |
| 7 | Darangdan | 68,39 | 70,89 | 71,95 | 73,26 | 1,33 | 1,68 | 1,99 | 1,82 |
| 8 | Bojong | 49,25 | 53 | 53,78 | 54,74 | 1,04 | 1,65 | 1,96 | 1,79 |
| 9 | Wanayasa | 41,65 | 43,3 | 43,67 | 44,19 | 0,77 | 1,04 | 1,14 | 1,18 |
| 10 | Kiarapedes | 27,6 | 28,39 | 28,85 | 29,41 | 0,21 | 1,81 | 2,17 | 1,95 |
| 11 | Pasawahan | 47,66 | 49,46 | 50,33 | 51,38 | 1,07 | 1,95 | 2,36 | 2,09 |
| 12 | Pondoksalam | 30 | 30,73 | 31,14 | 31,66 | 0,64 | 1,51 | 1,77 | 1,65 |
| 13 | Purwakarta | 174,74 | 179,23 | 180,3 | 181,96 | 1,33 | 0,78 | 0,8 | 0,92 |
| 14 | Babakancikao | 55,98 | 59,91 | 61,16 | 62,64 | 1,84 | 3,76 | 2,8 | 2,42 |
| 15 | Campaka | 45,91 | 50,34 | 51,27 | 52,39 | 1,74 | 0,57 | 2,47 | 2,17 |
| 16 | Cibatu | 31,2 | 31,27 | 31,66 | 32,16 | 0,63 | 1,43 | 1,67 | 1,58 |
| 17 | Bungursari | 56,36 | 60,57 | 61,44 | 62,52 | 1,12 | 1,62 | 1,92 | 1,76 |
| JUMLAH | | 950,1 | 997,87 | 1.011,47 | 1.028,57 | 1,35 | 1,54 | 1,82 | 1,69 |

Sumber : BPS, Purwakarta Dalam Angka 2023

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 memuat kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- (1) Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) dengan strategi meliputi:
 - a. menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);

- b. mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - c. mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan industri; dan
 - d. merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.
- (2) Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten dengan strategi meliputi:
- a. menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - c. mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten;
 - e. mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran, dan perangkutan produk pertanian.
- (3) Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - c. mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten;
 - d. mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - f. membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- (4) Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan PKW, PKL, PKLp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;
 - b. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- (5) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global dengan strategi meliputi:
- a. memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - c. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - d. meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
 - f. merehabilitasi kawasan bekas pertambangan.
- (6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;

- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas :

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem pusat kegiatan terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

(1) Sistem perkotaan terdiri atas:

- a. penetapan sistem pusat kegiatan, terdiri atas :
 - 1. PKW berada di Cikopo-Cikampek Kecamatan Bungursari .
 - 2. PKL meliputi:
 - a. Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kecamatan Plered; dan
 - c. Kecamatan Wanayasa.
 - 3. PKLp meliputi:
 - a. Kecamatan Cibatu; dan
 - b. Sawit berada di Kecamatan Darangdan.
 - 4. PPK meliputi:
 - a. Kecamatan Babakancikao;

- b. Kecamatan Campaka;
- c. Kecamatan Jatiluhur;
- d. Kecamatan Sukatani;
- e. Kecamatan Tegalwaru;
- f. Kecamatan Maniis;
- g. Kecamatan Sukasari;
- h. Kecamatan Pasawahan;
- i. Kecamatan Pondoksalam
- j. Kecamatan Bojong;
- k. Kecamatan Kiarapedes; dan
- l. Kecamatan Bungursari.

b. fungsi pelayanan pusat kegiatan.

1. PKW Cikampek-Cikopo dengan fungsi pelayanan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland);
2. PKL Purwakarta, Plered, dan Wanayasa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri kecil, dan pariwisata;
3. PKLp Cibatu dan Sawit-Darangdan dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan industri perdagangan dan jasa; dan
4. PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

(2) Sistem perdesaan berupa PPL dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala antar desa meliputi:

- a. Desa Cijunti berada di Kecamatan Campaka;
- b. Desa Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
- c. Desa Depok berada di Kecamatan Darangdan;
- d. Desa Cianting dan Tajursindang berada di Kecamatan Sukatani;
- e. Desa Cisarua dan Sukahaji berada di Kecamatan Tegalwaru;
- f. Desa Taringgul Tonggoh berada di Kecamatan Wanayasa;
- g. Desa Pasawahan Anyar berada di Kecamatan Pasawahan;
- h. Desa Margaluyu berada di Kecamatan Kiarapedes; dan
- i. Desa Cikeris berada di Kecamatan Bojong.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Sistem Prasarana Utama berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - (1) Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdiri atas :
 1. jaringan jalan terdiri atas:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan berupa pemantapan jalan bebas hambatan Cikampek-Padalarang;
 - b. jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas batas Kab. Karawang/Purwakarta-Sadang (Cikampek-Sadang);
 2. ruas Sadang-batas Kota Purwakarta;
 3. ruas Jalan Veteran;
 4. ruas Jalan Jend. Sudirman;
 5. ruas Jalan R.E. Martadinata;
 6. ruas Jalan Basuki Rachmat;
 7. ruas batas Kota Purwakarta-Cisomang (batas Bandung Barat);
 8. ruas Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga;
 9. ruas Jalan Ibrahim;
 10. ruas Jalan Jend. A. Yani; dan
 11. ruas Jalan raya Ciganea.
 - c. jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (KP-2) meliputi:
 1. ruas Jalan Sadang-Batas Purwakarta/Subang;
 2. ruas Jalan Simpang Purwakarta-Jatiluhur;
 3. ruas Jalan Basuki Rachmat;
 4. ruas Jalan Kapten Halim;
 5. ruas Jalan Purwakarta-Wanayasa;
 6. ruas Jalan Wanayasa;
 7. ruas Jalan Wanayasa-Batas Purwakarta/Subang;

8. ruas Jalan Batas Purwakarta /Karawang (Curug)-Purwakarta; dan
 9. ruas Jalan Pahlawan.
- d. jaringan jalan kabupaten terdiri atas :
1. jalan kolektor sekunder meliputi:
 - a. ruas Jalan Cikopo-Cilandak;
 - b. ruas Jalan Cibatu-Cibukamanah;
 - c. ruas Jalan Cibukamanah-Babakan (Wanayasa);
 - d. ruas Jalan Wanayasa-Sawit;
 - e. ruas Jalan Cianting-Warungjeruk;
 - f. ruas Jalan Cilegong-Sukasari;
 - g. ruas Jalan Sukasari-Cijati;
 - h. ruas Jalan Citeko-Ciramahilir;
 - i. ruas Jalan Cibungur-Cikaobandung; dan
 - j. ruas Jalan Cilalawi-Panyindangan.
 2. jalan lokal
 - 1 Warungjeruk - Parungkalong
 - 2 Ciganea - Sulukuning
 - 3 Nanggaleng - Halte Cisomang
 - 4 Darangdan - Nanggaleng
 - 5 Linggasari - Pasanggrahan
 - 6 Plered - Nanggaleng
 - 7 Purwakarta - Cimaung
 - 8 Tegalmunjul - Warungkadu
 - 9 Cilandak - Cibukamanah
 - 10 Pasarminggu - Benteng
 - 11 Cirende - Batudatar
 - 12 Bojongbarat - Cibingbin
 - 13 Gandasoli - Halteu Cisomang
 - 14 Cibogohilir - Gandasoli
 - 15 Cikubang - Kiarapedes
 - 16 Sukadami - Taringgullandeu
 - 17 Sawahkulon - Cidahu
 - 18 Citalang - Munjul
 - 19 Legokhuhi - Pareang/Kiarapedes

- 20 Cikeris - Pondokbungur/Pondoksalam
- 21 Nangerang - Sindangpanon
- 22 Cipeundeuy - Cileunca - Kertasari
- 23 Garokgek - Ciracas
- 24 Benteng - Cirende
- 25 Citalang - Cilangkap
- 26 Anjun - Liunggunung
- 27 Simpang - Warungkadu
- 28 Cibukamanah - Kadubandeng
- 29 Bojong - Pasanggrahan
- 30 Bojongloa - Rawasari
- 31 Cisair - Sumurugul
- 32 Karang Sari - Mekarsari
- 33 Margasari - Cikolotok
- 34 Wanayasa - Cileungsing
- 35 Sukadami - SLTP 3 Wanayasa
- 36 Cianting - SLTP 2
- 37 Kadumekar - Maracang
- 38 Sulukuning - Cisolada
- 39 Hegarmanah - Babakancikao
- 40 Ciasem - Cicadas
- 41 Cijaya - Kampung Duren
- 42 Jatimulya - Pasarminggu
- 43 Cikaliung - Munjul
- 44 Sindangpanon - Ciawi
- 45 Pasanggrahan - Cilanggohar
- 46 Gembong - Lebakanyar
- 47 Pasarkihiang - Cihuni
- 48 Sasakbeusi - Mekargalih
- 49 Pasirangka - Rawabolang
- 50 Pasawahan - Pasawahan Kidul
- 51 Cilalawi - Liunggunung
- 52 Taringgul - Pasirtaringgul
- 53 Cileunca - Sukajadi (Ex TMMD)
- 54 Sumpersari - Kiarapedes
- 55 Pameungpeuk- Cibeber

- 56 Ciomas - Warungkadu
- 57 Margasari - Madrasah
- 58 Conggeang -Narogtog
- 59 Cinangka -Polseksus
- 60 Bojong/ Pangkalan - Nangewer
- 61 Jatijajar - Cibodas
- 62 Cikopak/Sadang -Ciwareng
- 63 Cihideung - Mulyamekar
- 64 Cibodas - Karangmukti
- 65 Salammulya - Galudra
- 66 Dangdeur - Bungursari
- 67 Cikumpay - Cijaya
- 68 Cibatu - Pasirmalang
- 69 Pasanggrahan - Tajur
- 70 Cijanggot - Cislada
- 71 Pusakamuya - Pasirmuncang
- 72 Margaluyu - Garokgek
- 73 Cilalawi - Cipicung
- 74 Jl. Pesantren Nurul Hidayah-Cikopak
- 75 Rawa Bebek - Pelita / Cilegong
- 76 Sodong - Kuta Batu
- 77 Cibodas - Sukatani
- 78 Ali Ramdan - Kopi
- 79 Cibodas - Bungursari
- 80 Jln. Desa Cijunti-Campaka
- 81 Jln. Stasiun - Bungursari
- 82 Kmp Sawah - Cilangkap
- 83 Cilalawak - Cikao Bandung
- 84 Ciirateun - Bongas
- 85 Jln. Minang Modern - Cikopo
- 86 Cikeris -Pasanggrahan
- 87 Pesantren Cikeris - Pasanggrahan
- 88 Cilalawi -Pasirmunjul
- 89 Sawit Kaler - Cilingga
- 90 Cilingga - Cileunca./ Kerta Sari
- 91 Bojong Barat -Nangewer

- 92 Gandasoli -Cilangkap
- 93 Batu Tumpang - Cisarua
- 94 Sempur - Gunung Hejo
- 95 Sindangsari - Liunggunung
- 96 Citeko -Cibinong
- 97 Simpang -Sukamulya
- 98 Ciakar - Batu Tumpang
- 99 Warung Jeruk - Galumpit
- 100 Sukatani - Gunung Sembung
- 101 Gunungputri - Perkebunan
- 102 Ciramagirang -Ciramahilir
- 103 Sukahaji - Warungjeruk
- 104 Sukatani - Malangnengah
- 105 Kembangkuning - Cibinong
- 106 Nagrak - Palingihan
- 107 Kembangkuning - Cikuya
- 108 Sadang - Cibungur / BIC
- 109 Cibening -Dangdeur
- 110 Cibungur - Dangdeur
- 111 Sirnagalih -Cikurba
- 112 Sukajaya - Cijantung
- 113 Darangdan - Sirnamanah
- 114 Citamiang - Gunung Karung
- 115 Cidahu - Cijati
- 116 Sukamanah -Cimanggu
- 117 Citamiang - Sirnagalih
- 118 Cijantung - Parakan Lima
- 119 Cinangka -Situ Kamojing
- 120 Munjuljaya - Cirende
- 121 Cileutak -Warungkandang
- 122 Pasar Minggu -Cikumpay/Cimahi
- 123 Cibatuh -Cibukamanah
- 124 Ds. Simpang - Pasanggrahan
- 125 Selaawi-Warungkadu - Cirende
- 126 Pasawahan - Margasari /Waung Kadu
- 127 Cidahu - Ciherang

- 128 Parakansalam-Tanjungsari-Pondok Bungur
- 129 Kiara Pedes / Pareang - Kadubandeng
- 130 Kiara Pedes - Mekarjaya / Ciseureuh
- 131 Babakan -Pameungpeuk
- 132 Wanasari - Gandasoli
- 133 Sukadami - Cikadu
- 134 Pusakamuya - Parakan Ceuri
- 135 Ciparungsari - Tanjung Garut
- 136 Bojong Timur - Depok
- 137 Cijolang - Cotak
- 138 Neglasari - Cilingga
- 139 Neglasari - Sukamanah
- 140 Linggasari - Cilingga
- 141 Sukatani - Chek Dam
- 142 Sukatani - Jatijajar
- 143 Sawit - Sadarkarya
- 144 Pasawahan - Salapiyah
- 145 Pasangrahan - Cihanjavar
- 146 Pasir Angin - Pojok
- 147 Nangewer - Cisomang
- 148 Cihuni - Margasari
- 149 Kertajaya - Ciirateun
- 150 Sawahkulon - Situ
- 151 Sukadami - Ciawi
- 152 Cibodas - Sukaati / Jomin
- 153 Cikopo - Cibodas - Karangmukti
- 154 Ciracas - Cilutung
- 155 Campakasari - Benteng
- 156 Benteng - Cirangkong
- 157 Cipinang - Cikadu
- 158 Buana Indah - Cigelam
- 159 Citeko Kaler - Liung Gunung
- 160 Kiarapedes - Ciracas
- 161 Rancadarah - Gurudug
- 162 Sukamulya - Cisarua
- 163 Gandasoli - Kiarapedes

- 164 Sukamaju - Cipicung
- 165 Cibukamanah - Gandawari
- 166 Nagrog - Cisair
- 167 Situ - Cisaray
- 168 Situ - Tanjungsari
- 169 Sempur - Babakan Simpang
- 170 Tajursindang - Panyindangan
- 171 Dangdeur - Cigelam
- 172 Cijunti - Menuju SLTP 4
- 173 Cijunti - Babakan Cirebon
- 174 Citeko - Liunggunung/Gunung Aseupan

Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan di wilayah kabupaten meliputi:

- a. pembangunan jalan bebas hambatan Cikopo-Palimanan;
- b. pembukaan gerbang tol Babakancikao, Sawit, dan Sukatani;
- c. pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri Cilangkap Kecamatan Babakancikao ke Simpang Susun Sadang Kecamatan Bungursari;
- d. pembangunan jalan akses kawasan peruntukan industri Kembanguning Kecamatan Jatiluhur ke Simpang Susun Ciganea.
- e. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Timur Luar menghubungkan ruas jalan Cikopo-Cilandak, Cibatu-Cibukamanah, Cibukamanah-Babakan (Wanayasa);
- f. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Timur Dalam menghubungkan Cimaung-Cigembong-Parakanlima-Cijantung; dan
- g. peningkatan jalan dan jembatan pada ruas Lingkar Barat menghubungkan Cibungur-Babakancikao-Cikaobandung-Kutamanah-Kertamanah-Ciririp-Sukasari-Parungbanteng-Sukamukti-Cijati.

2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 - a. pengembangan terminal meliputi:
 1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di PKW Cikopo;
 2. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Purwakarta;
 3. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - a. Terminal Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
 - b. Terminal Darangdan berada di Kecamatan Darangdan;
 - c. Terminal Citeko berada di Kecamatan Plered; dan
 - d. Terminal Simpang berada di Kecamatan Purwakarta.
 4. pengembangan terminal penumpang tipe C berupa Terminal Ciganea berada di Kecamatan Jatiluhur.
 - b. penempatan alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa jembatan timbang berada di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari.
 - c. pengembangan perlengkapan jalan terutama pada jaringan jalan perkotaan dan jaringan jalan strategis meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. rambu pendahulu penunjuk jurusan;
 3. marka parkir;
 4. marka jalan;
 5. zebra cross (jalur penyeberangan);
 6. cermin tikungan; dan
 7. penerangan jalan umum.

3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. Jaringan trayek antar kota antar provinsi melayani perkotaan Purwakarta dengan kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Jaringan trayek antar kota dalam provinsi melayani perkotaan Purwakarta ke kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Barat meliputi:
 1. Purwakarta-Bandung;
 2. Purwakarta-Subang;
 3. Purwakarta-Karawang;
 4. Purwakarta-Bekasi;
 5. Purwakarta-Bogor; dan
 6. Purwakarta-Cianjur.

- b. jaringan transportasi perkotaan terdiri atas:
 - (1) Jaringan trayek angkutan kota melayani pergerakan penduduk dalam wilayah kabupaten meliputi:
 1. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Sudirman-Jl.RE.Martadinata-Jl.Kapt.Halim-l.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Ipik.Gandamanah-Sadang;
 2. Sadang-Jl.IpikGandamanah-Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.RE.Martadinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Veteran-Sadang;
 3. Ciganea-Jl.Pemuda-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Siliwangi-Jl.KK.Singawinata-Jl.Jend.Sudirman-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Ibrahim.S-Jl.Jend.A.Yani-Jl.Basuki.Rahmat-Ciganea;
 4. Ciganea-Jl.Pemuda-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Jend.Sudirman-

- Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-Simpang-
Jl.Kap.Halim-Jl.Basuki.Rahmat-Ciganea;
5. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Ibrahim.S-
Jl.A.Yani-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Pramuka-Ciganea-
Jl.Basuki.Rahmat-Jl.RE.Martadinata-Jl.Sudirman-
Jl.Veteran-Sadang;
 6. Sadang-Jl.Veteran-Jl.Jend.Sudirman-
Jl.RE.Martadinata-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.Pramuka-
Ciganea-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-Jl.Ibrahim.S-
Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Veteran-Sadang;
 7. Cilangkap-Jl.Industri-Jl.Taman.Pahlawan-
Jl.Jend.Sudirman-Jl.KK.Singawinata-Jl.Kapt.Halim-
Simpang-Jl.Kapt.Halim-Jl.Basuki.Rahmat-Jl.A.Yani-
Jl.Ibrahim.S-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Industri-Cilangkap;
 8. Cilangkap-Jl.Industri-Jl.Taman.Pahlawan-Jl.Kopi-
Perum.Griyamukti-Jl.Baru-Jl.Kemuning-
Jl.Ipik.Gandamanah-Jl.Kol.Rahmat-Warungkadu-
Pasawahan; dan
 9. Ciganea-Cilegong-Jatiluhur-Service PP.
- (2) Jaringan trayek angkutan perdesaan melayani pergerakan penduduk antara perkotaan Purwakarta dengan ibukota kecamatan di wilayah kabupaten meliputi:
1. Cikopo-Campaka-Cibatu-Kiarapedes-Wanayasa;
 2. Purwakarta-Sukatani-Jatiluhur-Plered-Tegalwaru-
Maniis;
 3. Ciganea-Ubrug;
 4. Ciganea-Sukatani-Plered;
 5. Ciganea-Cilegong-Cikaobandung;
 6. Simpang-Pasawahan-Wanayasa;
 7. Simpang-Taringgullandeh-Ciheulang;
 8. Simpang-Pasawahan-Ciherang;
 9. Sadang-Wanakerta (Perum BIC);
 10. Sadang-Ciparungsari;
 11. Sadang-Cisantri-Tanjunggarut;
 12. Terminal Plered-Simpang-Warungjeruk;
 13. Terminal Plered-Cilangkap-Warungjeruk;

14. Plered-Sawit-Bojong-Wanayasa;
 15. Terminal Plered-Cisomang;
 16. Babakancikao-Cilangkap-Curug;
 17. Simpang-Wanawali;
 18. Plered-Maniis; dan
 19. Terminal Ciganea-Jatiluhur-Sukasari
- (3) Jaringan trayek angkutan perbatasan melayani pergerakan penduduk antara perbatasan Purwakarta dengan perbatasan di wilayah kabupaten lain meliputi:
1. Terminal Wanayasa - Sagalaherang - Jalancagak di Kabupaten Subang;
 2. Simpang - Pasawahan - Wanayasa - Sagalaherang di Kabupaten Subang;
 3. Sadang - Cipeundeuy - Pabuaran di Kabupaten Subang;
 4. Plered - Cipeundeuy di Kabupaten Bandung Barat; dan
 5. Plered - Cikalong Kulon di Kabupaten Cianjur.
- b. sistem jaringan perkeretaapian meliputi:
1. peningkatan jalur Kereta Api lintas Cikampek-Purwakarta-Darangdan;
 2. peningkatan jalur Kereta Api Cisomang-Cikadongdong;
 3. pengembangan terminal peti kemas di Cibungur;
 4. pembangunan *shortcut* (jalan pintas) jalur kereta api lintas Cibungur-Tanjungrasa;
 5. pembangunan jalur ganda parsial lintas Purwakarta-Ciganea;
 6. penyediaan rambu pengaman pada perlintasan sebidang; dan
 7. penataan lingkungan stasiun berupa penataan jalan masuk, parkir stasiun, ruang tunggu penumpang, pergudangan, drainase, gedung, fasilitas jasa dan perdagangan serta pemeliharaan fasilitas pengoperasian kereta api meliputi:
 - a. Stasiun Purwakarta berada di Kecamatan Purwakarta;
 - b. Stasiun Plered berada di Kecamatan Plered;
 - c. Stasiun Cibungur berada di Kecamatan Bungursari;
 - d. Stasiun Sukatani berada di Kecamatan Sukatani;
 - e. Stasiun Cisomang berada di Kecamatan Darangdan;
 - f. Stasiun Sadang berada di Kecamatan Babakancikao; dan

- g. Stasiun Ciganea berada di Kecamatan Jatiluhur.

- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) terdiri atas:
 - 1. penetapan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - 2. rehabilitasi dermaga berada di Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata; dan
 - 3. peningkatan kualitas dan jumlah sarana angkutan penyeberangan berada di Waduk Jatiluhur.

Sistem Prasarana Lainnya terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi terdiri atas:
 - 1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi melewati Kecamatan Cibatu-Campaka-Purwakarta-Babakancikao-Jatiluhur.
 - 2. Pembangkit tenaga listrik dan gardu induk meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Waduk Jatiluhur berada di Kecamatan Jatiluhur dan Waduk Cirata di Kecamatan Maniis;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berada di Kecamatan Bojong, Kiarapedes dan Wanayasa; dan
 - c. Gardu Induk (GI) meliputi:
 - 1. Kecamatan Campaka dengan kapasitas daya 120 (seratus dua puluh) Mega Volt Ampere;
 - 2. Kecamatan Purwakarta dengan kapasitas daya 120 (seratus dua puluh) Mega Volt Ampere;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur (Waduk Jatiluhur) dengan kapasitas daya 145 (seratus empat puluh lima) Mega Volt Ampere; dan
 - 4. Kecamatan Maniis (Waduk Cirata) dengan kapasitas daya 1.150 (seribu seratus lima puluh) Mega Volt Ampere.
- 3. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) Kilo Volt meliputi:
 - 1. Kecamatan Maniis;
 - 2. Kecamatan Sukasari;
 - 3. Kecamatan Tegalwaru,
 - 4. Kecamatan Campaka;
 - 5. Kecamatan Bungursari; dan

6. Kecamatan Babakancikao.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Tegalwaru;
 2. Kecamatan Plered;
 3. Kecamatan Sukatani;
 4. Kecamatan Jatiluhur,
 5. Kecamatan Purwakarta; dan
 6. Kecamatan Campaka.
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao; dan
 3. Kecamatan Jatiluhur.
 - d. peningkatan dan pengembangan jaringan distribusi listrik berupa pemerataan pelayanan listrik di seluruh desa dalam wilayah kabupaten; dan
 - e. pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten.
4. Jaringan prasarana energi lainnya meliputi:
- a. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
 1. Kecamatan Campaka;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Bungursari;
 4. Kecamatan Sukatani;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Wanayasa;
 7. Kecamatan Jatiluhur; dan
 8. Kecamatan Purwakarta.
 - b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebar di wilayah kabupaten.

- b. sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan serat optik berada di koridor Cikopo-Sawit dan wilayah perkotaan;
 - 2. pengembangan dan peningkatan Sambungan Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel (RK) berada di kawasan perkotaan;
 - 3. pengembangan jaringan kabel dan nirkabel (seluler) ke seluruh pelosok desa; dan
 - 4. pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel (selular) melalui pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama di seluruh wilayah kabupaten.

- c. sistem jaringan sumber daya air mengacu pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis pada wilayah sungai terdiri atas:
 - 1. Pengelolaan sungai, waduk, dan situ meliputi:
 - a. pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari Wilayah Sungai (WS) Citarum sebagai WS lintas provinsi.
 - b. pengelolaan sungai-sungai lintas kabupaten meliputi:
 - 1. Sungai Citarum; dan
 - 2. Sungai Cilamaya;
 - c. pengelolaan sungai-sungai dalam wilayah kabupaten meliputi :
 - 1. Sungai Cikao;
 - 2. Sungai Cilangkap;
 - 3. Sungai Ciampel;
 - 4. Sungai Ciherang;
 - 5. Sungai Cilalawi; dan
 - 6. sungai-sungai yang ada di wilayah kota.
 - d. pemeliharaan waduk meliputi:
 - 1. Waduk Jatiluhur; dan
 - 2. Waduk Cirata.
 - e. pemeliharaan situ meliputi:
 - 1. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
 - 2. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;
 - 3. Situ Cigangsa berada di Kecamatan Campaka;
 - 4. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
 - 5. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;

6. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
 7. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
 8. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.
2. Sistem jaringan irigasi berupa pengelolaan Daerah Irigasi (D.I) terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah meliputi:
 1. D.I. Selatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 11.052 (sebelas ribu lima puluh dua) hektar; dan
 2. D.I. Tarum Timur 2 dengan luas kurang lebih 118 (seratus delapan belas) hektar.
 - b. Daerah Irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 1. D.I. Pundong dengan luas kurang lebih 1.111 (seribu seratus sebelas) hektar;
 2. D.I. Cisomang dengan luas kurang lebih 2.117 (dua ribu seratus tujuh belas) hektar;
 3. D.I. Pondoksalam dengan luas kurang lebih 1.553 (seribu lima ratus lima puluh tiga) hektar; dan
 4. D.I. Wanayasa dengan luas kurang lebih 1.074 (seribu tujuh puluh empat) hektar.
 - c. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten meliputi :
 1. D.I. Nangerang Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 250 Hektar
 2. D.I. Pasir Kadal Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 75 Hektar
 3. D.I. Cibingbin Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 171 Hektar
 4. D.I. Cilembang Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 350 Hektar
 5. D.I. Leuwi Kadu Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 17 Hektar
 6. D.I. Cigansa Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 157 Hektar
 7. D.I. Cilandak Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 100 Hektar
 8. D.I. Cikamar Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 160 Hektar

9. D.I. Cisaat Kecamatan Campaka dengan luas kurang lebih 138 Hektar
10. D.I. Cibodas Kecamatan Cibatu dengan luas kurang lebih 76 Hektar
11. D.I. Cikawung Kecamatan Cibatu dengan luas kurang lebih 180 Hektar
12. D.I. Nangewer Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 375 Hektar
13. D.I. Citukang Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 50 Hektar
14. D.I. Ciwangun Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 145 Hektar
15. D.I. Cihamerang Kecamatan Darangdan dengan luas kurang lebih 42 Hektar
16. D.I. Cikao Kecamatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 192 Hektar
17. D.I. Cilegong Kecamatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 80 Hektar
18. D.I. Cikembang Kecamatan Jatiluhur dengan luas kurang lebih 80 Hektar
19. D.I. Garokgek 1 Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 100 Hektar
20. D.I. Garokgek 2 Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 50 Hektar
21. D.I. Garokgek 3 Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 250 Hektar
22. D.I. Cipanas Leuweung Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 150 Hektar
23. D.I. Cipawada Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 300 Hektar
24. D.I. Ciloji Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 160 Hektar
25. D.I. Cibulakan Kecamatan Kiarapedes dengan luas kurang lebih 150 Hektar
26. D.I. Cihuni Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 31 Hektar

27. D.I. Ciherang 1 Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 30 Hektar
28. D.I. Ciherang 2 Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 50 Hektar
29. D.I. Ciater 1. Ki Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 33 Hektar
30. D.I. Ciater 2. Ki Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 65 Hektar
31. D.I. Ciater Kecamatan Pasawahan dengan luas kurang lebih 40 Hektar
32. D.I. Cigandasoli Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 70 Hektar
33. D.I. Cicalibur 1 Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 10 Hektar
34. D.I. Cicalibur 2 Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 40 Hektar
35. D.I. Cicalibur 3 Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 50 Hektar
36. D.I. Cisadang Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 25 Hektar
37. D.I. Cibogo Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 50 Hektar
38. D.I. Plered Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 60 Hektar
39. D.I. Cidadapan Kecamatan Plered dengan luas kurang lebih 25 Hektar
40. D.I. Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 205 Hektar
41. D.I. Gengereng Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 68 Hektar
42. D.I. Pundong Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 299 Hektar
43. D.I. Leuwi Urug Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 70 Hektar
44. D.I. Cikajar Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 64 Hektar

45. D.I. Ciseuti Kecamatan Pondoksalam dengan luas kurang lebih 85 Hektar
46. D.I. Cisagu 1 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 56 Hektar
47. D.I. Cisagu 2 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 30 Hektar
48. D.I. Cisagu 3 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 50 Hektar
49. D.I. Cisagu 4 Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 160 Hektar
50. D.I. Cilalawi Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 25 Hektar
51. D.I. Cinusa Kecamatan Sukatani dengan luas kurang lebih 140 Hektar
52. D.I. Cigalumpit Kecamatan Tegalwaru dengan luas kurang lebih 100 Hektar
53. D.I. Jelegong Kecamatan Tegalwaru dengan luas kurang lebih 50 Hektar
54. D.I. Cipedang Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 150 Hektar
55. D.I. Nagrog Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 50 Hektar
56. D.I. Sumurugul Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 50 Hektar
57. D.I. Cijamban Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 250 Hektar
58. D.I. Ciburial Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 118 Hektar
59. D.I. Cimalang Nengah Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 60 Hektar
60. D.I. Citengah 2 Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 30 Hektar
61. D.I. Cipurut Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 40 Hektar
62. D.I. Rancabali Kecamatan Wanayasa dengan luas kurang lebih 50 Hektar

63. D.I. Citengah 1 Kecamatan Wanyasa dengan luas kurang lebih 30 Hektar

3. Prasarana air baku untuk air minum dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan dan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air dan daerah resapan air;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya;
 - c. optimalisasi pemanfaatan potensi air baku; dan
 - d. pembangunan waduk-waduk kecil.
4. Pengendalian daya rusak air meliputi:
 - a. normalisasi sungai;
 - b. pengerukan sungai;
 - c. optimalisasi Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata;
 - d. optimalisasi sumur resapan;
 - e. penghijauan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- d. sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri atas:
 - (1) Sistem jaringan penyediaan dan pengelolaan air minum meliputi:
 - a. pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani daerah yang belum terlayani meliputi:
 1. Kecamatan Bungursari;
 2. Kecamatan Cibatu;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Pondoksalam;
 5. Kecamatan Tegalwaru;
 6. Kecamatan Sukasari;
 7. Kecamatan Sukatani;
 8. Kecamatan Bojong; dan
 9. Kecamatan Maniis.
 - b. peningkatan kapasitas produksi air minum dan menurunkan kehilangan air meliputi:
 1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao;

3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Kiarapedes.
- c. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi meliputi:
1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Babakancikao;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Kiarapedes.
- d. peningkatan cakupan pelayanan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. pengembangan sistem penyediaan air minum dengan pelibatan peran masyarakat;
- f. optimalisasi pelanggan dan jaringan eksisting dengan memanfaatkan sumber air baru;
- g. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali meliputi:
1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Darangdan; dan
 4. Kecamatan Plered.
- h. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan;
- i. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum; dan
- j. pembangunan IPA (instalasi pengolahan air) di Kecamatan Plered.
- (2) Pengembangan jaringan drainase meliputi:
- a. pembangunan dan perbaikan sistem saluran drainase di setiap jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer);

- b. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman;
 - c. perencanaan drainase terpadu dengan jaringan jalan; dan
 - d. pembangunan saluran drainase skala tersier di PPK;
 - e. pemeliharaan saluran drainase;
 - f. perbaikan dan normalisasi saluran drainase;
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelolaan drainase.
- (3) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga;
 - b. optimalisasi Tempat Pemrosesan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Ciklotok dengan sistem sanitary landfill di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan;
 - c. pemantauan dan evaluasi tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan di sumber penghasil sampah;
 - e. pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, meliputi reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang);
 - f. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan; dan
 - g. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola persampahan.
- (4) Pengelolaan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;
 - b. penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;

- c. penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan mandi cuci kakus umum;
 - d. penanganan limbah secara off site dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air limbah (IPAL) Komunal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
 - e. penanganan limbah tinja dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao;
 - f. menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan
 - h. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.
- (5) Pengelolaan limbah cair dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu untuk kegiatan industri besar dan menengah meliputi:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur,
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Campaka; dan
 - 6. Kecamatan Sukatani.
 - b. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 terpadu di kawasan peruntukan industri.
- (6) Pengembangan evakuasi bencana alam terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana terdiri atas :
 - 1. jalan poros desa; dan
 - 2. jalan kolektor.
 - b. Ruang evakuasi bencana diarahkan berada di:
 - 1. balai desa/kelurahan;
 - 2. lapangan terbuka;
 - 3. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan; dan
 - 4. bangunan fasilitas umum lainnya.

Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (early warning system) yang memadai.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 49,58 (empat puluh sembilan koma lima delapan) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
- b. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Kawasan Lindung terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bojong; dan
- b. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 31.695,4 (tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bojong;
- b. Kecamatan Darangdan;
- c. Kecamatan Kiarapedes;
- d. Kecamatan Wanayasa; dan
- e. Kecamatan Pondoksalam.

Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas:

- a. sempadan sungai berada di sepanjang aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten meliputi:
 1. Sungai Cilamaya;
 2. Sungai Cikao;
 3. Sungai Cilangkap;
 4. Sungai Ciampel;
 5. Sungai Citarum;
 6. Sungai Ciherang; dan
 7. Sungai Cilalawi.
- b. kawasan sekitar situ, danau atau waduk meliputi:
 1. Waduk Cirata meliputi:
 - a. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - b. Kecamatan Maniis.
 2. Waduk Ir. Juanda (Jatiluhur) meliputi:
 - a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Sukasari; dan
 - c. Kecamatan Tegalwaru.
 3. Situ Cibeber berada di Kecamatan Wanayasa;
 4. Situ Cibodas berada di Kecamatan Bungursari;

5. Situ Cigansa berada di Kecamatan Campaka;
 6. Situ Cikamar berada di Kecamatan Campaka;
 7. Situ Wanayasa berada di Kecamatan Wanayasa;
 8. Situ Buleud berada di Kota Purwakarta;
 9. Situ Cisaat berada di Kecamatan Campaka; dan
 10. Situ Cikumpay berada di Kecamatan Campaka.
- c. kawasan sekitar mata air tersebar di wilayah kabupaten.
- d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 2.293 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar atau 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam berupa hutan konservasi Cagar Alam Burangrang dengan luas kurang lebih 2.677,3 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Kiarapedes;
 2. Kecamatan Bojong; dan
 3. Kecamatan Wanayasa.
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terletak di pusat perkotaan Purwakarta dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar meliputi:
 1. Makam Syech Baing Yusuf; dan
 2. Gedung Negara Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II.

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Babakancikao.

- b. kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:
1. Waduk Jatiluhur meliputi:
 - a. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 - c. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
 - d. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
 2. Waduk Cirata meliputi:
 - a. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
 - e. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
 - f. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
 - g. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan karst dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Jatiluhur; dan
 3. Kecamatan Maniis.
- b. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:
 1. kawasan rawan letusan gunung berapi dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar terletak di bagian selatan kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Wanayasa; dan
 - b. Kecamatan Bojong.
 2. kawasan rawan gerakan tanah dengan luas kurang lebih 14.047,5 (empat belas ribu empat puluh tujuh koma lima) hektar meliputi:
 - a. Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
 - c. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
 - d. Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;

- e. Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
- f. Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
- g. Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
- h. Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatuh;
- i. Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
- j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Kawasan Lindung Lainnya berupa kawasan perlindungan terhadap plasma nutfah eksitu di Kawasan Jatiluhur-Sanggabuana dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar berada di Kecamatan Sukasari.

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.237 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Campaka;
 - 2. Kecamatan Cibatuh;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur;
 - 4. Kecamatan Kiarapedes;
 - 5. Kecamatan Maniis;
 - 6. Kecamatan Plered;
 - 7. Kecamatan Pondoksalam;
 - 8. Kecamatan Sukasari;
 - 9. Kecamatan Sukatani; dan
 - 10. Kecamatan Tegalwaru.

- b. kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 14.270 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Bojong;
 2. Kecamatan Campaka;
 3. Kecamatan Cibatu;
 4. Kecamatan Cibungur;
 5. Kecamatan Darangdan;
 6. Kecamatan Jatiluhur;
 7. Kecamatan Kiarapedes;
 8. Kecamatan Maniis;
 9. Kecamatan Plered;
 10. Kecamatan Pondoksalam;
 11. Kecamatan Purwakarta;
 11. Kecamatan Bungursari
 12. Kecamatan Sukasari;
 13. Kecamatan Sukatani; dan
 14. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri atas:

- a. kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 10.071 (sepuluh ribu tujuh puluh satu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Purwakarta;
 2. Kecamatan Bungursari;
 3. Kecamatan Pasawahan;
 4. Kecamatan Campaka;
 5. Kecamatan Plered;
 6. Kecamatan Darangdan;
 7. Kecamatan Wanayasa; dan
 8. Kecamatan Pondoksalam.

kawasan budidaya tanaman pangan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.972 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:

1. Kecamatan Purwakarta;
2. Kecamatan Pasawahan;
3. Kecamatan Campaka;

4. Kecamatan Plered;
 5. Kecamatan Darangdan; dan
 6. Kecamatan Pondoksalam.
- b. kawasan budidaya hortikultura dengan luas kurang lebih 6.287 (enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Wanayasa;
 2. Kecamatan Plered;
 3. Kecamatan Campaka;
 4. Kecamatan Sukatani;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Pondoksalam;
 7. Kecamatan Bojong;
 8. Kecamatan Maniis;
 9. Kecamatan Kiarapedes;
 10. Kecamatan Bungursari;
 11. Kecamatan Darangdan; dan
 12. Kecamatan Tegalwaru.
- c. kawasan budidaya perkebunan dengan luas kurang lebih 13.388 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Kiarapedes;
 2. Kecamatan Sukatani;
 3. Kecamatan Plered;
 4. Kecamatan Maniis;
 5. Kecamatan Darangdan;
 6. Kecamatan Campaka;
 7. Kecamatan Cibatu;
 8. Kecamatan Bungursari;
 9. Kecamatan Wanayasa; dan
 10. Kecamatan Bojong.
- d. kawasan budidaya peternakan dengan luas kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) hektar terdiri atas:
1. ternak ruminansia besar skala perusahaan dengan jenis hewan sapi potong, sapi perah, dan kerbau meliputi:

- a. Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Kecamatan Maniis;
 - c. Kecamatan Sukatani;
 - d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Kiarapedes;
 - f. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - g. Kecamatan Pasawahan
2. ternak ruminansia kecil skala perusahaan dengan jenis hewan kambing dan domba meliputi:
 - a. Kecamatan Darangdan;
 - b. Kecamatan Bojong;
 - c. Kecamatan Wanayasa;
 - d. Kecamatan Pondok Salam;
 - e. Kecamatan Jatiluhur; dan
 - f. Kecamatan Pasawahan
3. pembibitan ternak unggas meliputi:
 - a. Kecamatan Sukatani;
 - b. Kecamatan Darangdan;
 - c. Kecamatan Bojong;
 - d. Kecamatan Wanayasa; dan
 - e. Kecamatan Kiarapedes.
4. ternak unggas komersial meliputi:
 - a. Kecamatan Pondoksalam;
 - b. Kecamatan Pasawahan;
 - c. Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Kecamatan Maniis;
 - e. Kecamatan Sukasari;
 - f. Kecamatan Sukatani; dan
 - g. Kecamatan Jatiluhur.

Kawasan Peruntukan Perikanan terdiri atas:

- a. kawasan perikanan tangkap diarahkan pada badan air terdiri atas:
 1. waduk meliputi:
 - a. Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Kecamatan Sukasari; dan

- d. Kecamatan Maniis.
 2. situ meliputi:
 - a. Kecamatan Bungursari;
 - b. Kecamatan Campaka;
 - c. Kecamatan Wanayasa; dan
 - d. Kecamatan Purwakarta.
 3. sungai tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
-
- b. kawasan budidaya perikanan dengan luas kurang lebih 8.192 (delapan ribu seratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatiluhur;
 2. Kecamatan Sukatani;
 3. Kecamatan Darangdan;
 4. Kecamatan Pondoksalam;
 5. Kecamatan Pasawahan;
 6. Kecamatan Bojong;
 7. Kecamatan Maniis;
 8. Kecamatan Plered; dan
 9. Kecamatan Wanayasa.

Kawasan Peruntukan Pertambangan terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Sukatani.
- b. kawasan pertambangan mineral non logam meliputi :
 1. Kecamatan Plered;
 2. Kecamatan Sukatani; dan
 3. Kecamatan Tegalwaru.
- c. kawasan pertambangan batuan meliputi:
 1. Kecamatan Plered;
 2. Kecamatan Sukatani;
 3. Kecamatan Tegalwaru;
 4. Kecamatan Jatiluhur;
 5. Kecamatan Campaka;
 6. Kecamatan Cibatu;
 7. Kecamatan Kiarapedes;
 8. Kecamatan Babakancikao; dan
 9. Kecamatan Bungursari.

- d. kawasan pertambangan migas meliputi:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes; dan
 - 2. Kecamatan Cibatu.
- e. kawasan pertambangan panas bumi meliputi:
 - 1. Kecamatan Kiarapedes;
 - 2. Kecamatan Wanayasa; dan
 - 3. Kecamatan Bojong.

Kawasan Peruntukan Industri meliputi :

- a. kawasan peruntukan industri besar dan menengah dengan luas kurang lebih 7.848 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Babakancikao;
 - 2. Kecamatan Bungursari;
 - 3. Kecamatan Jatiluhur,
 - 4. Kecamatan Cibatu;
 - 5. Kecamatan Campaka;
 - 6. Kecamatan Sukatani;
 - 7. Kecamatan Plered;
 - 8. Kecamatan Tegalwaru; dan
 - 9. Kecamatan Maniis.
- b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan Peruntukan Pariwisata dengan luas kurang lebih 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar terdiri atas:

- a. pariwisata alam;
- b. pariwisata budaya; dan
- c. pariwisata buatan.

Tabel 2.3

Daftar Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasarkan Jenisnya Di Kabupaten Purwakarta

| No | Kecamatan | Nama Obyek/ Kawasan Wisata | Jenis/Klasifikasi | Daya Tarik |
|----|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Purwakarta | Situ Buleud | pariwisata alam | Situ/ Alam, Taman kota, arena jogging |
| | | Pabrik kain songket | pariwisata buatan | Kerajinan/ cinderamata |
| | | Gedung Negara | pariwisata budaya | Bangunan sejarah |
| | | Gedung Karesidenan | pariwisata budaya | Bangunan sejarah |
| | | Makam Baing Yusuf | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Mesjid Agung | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Rumah Kuno Citalang | pariwisata budaya | Bangunan kuno |
| | | Sanggar Seni | pariwisata budaya | Kesenian Daerah; Atraksi wisata |
| 2 | Jatiluhur | Pariwisata Jatiluhur | pariwisata alam | Danau/PLTA |
| | | Bumi Satelit Indosat | pariwisata buatan | Teknologi; Satelit komunikasi |
| | | Agro Wisata Ubrug | pariwisata alam | Perikanan |
| | | Makam Wali Kuning | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 3 | Sukasari | Makam Mbah Panyingkiran | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Mbah Guha Pangatikan | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Mbah Kota Kembang | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 4 | Campaka | Situ Cikumpay | pariwisata alam | Situ/Perkebunan |
| | | Makam Panembahan Gunung Jatiwangi | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Cakrabuana | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 5 | Cibatu | Makam Mbah Cakrayuda | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Mbah Parung | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 6 | Bungursari | Situ Kamojing | pariwisata alam | Situ |
| | | Bukit Indah Purwakarta | pariwisata buatan | Kota Industri |
| 7 | Babakan Cikao | Makam Ibu Cikao | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 8 | Plered | Sentra Keramik Plered | pariwisata buatan | Kerajinan cinderamata |
| | | Makam Mbah Sumadhita Anggatuda | pariwisata budaya | Ziarah religius |

| No | Kecamatan | Nama Obyek/ Kawasan Wisata | Jenis/Klasifikasi | Daya Tarik |
|----|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Makam Balung Tunggal | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Dalem Kuwa | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Mama Sempur | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Curug Gandasoli | pariwisata alam | Air terjun |
| 9 | Tegalwaru | Panorama Galumpit | pariwisata alam | Panorama alam; rekreasi air |
| | | Gunung Parang | pariwisata alam | Gunung/Alam ; Panjat Tebing |
| 10 | Sukatani | Gunung Cupu | pariwisata alam | Gunung/Alam; Mendaki |
| | | Pusat Penjualan Makanan Khas | pariwisata buatan | Cinderamata/kerajinan |
| 11 | Maniis | PLTA Cirata | pariwisata buatan | PLTA; Turbin/teknologi |
| | | Agro Wisata Maniis | pariwisata alam | Agro wisata/Alam; Jaring terbung |
| 12 | Darangdan | Makam Cotak | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 13 | Wanayasa | Situ Wanayasa | pariwisata alam | Situ/panorama alam |
| | | Curug Cipurut | pariwisata alam | Air Terjun/panorama |
| | | Agro Wisata Manggis | pariwisata alam | Agro Wisata; Perkebunan Manggis |
| | | Makam Dalem Santri | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| 14 | Kiarapedes | Makam Serpong | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Makam Eyang Parta Kusuma | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Agro Wisata Golden Melon | pariwisata alam | Agro wisata; Perkebunan Manggis |
| | | Air Panas Ciracas | pariwisata alam | Sumber Air Panas/ Panorama |
| | | Guha Garacina | pariwisata alam | Guha/sejarah |
| 15 | Bojong | Agro Wisata Perkebunan Teh | pariwisata alam | Perkebunan Teh; Agro Wisata/Alam |
| | | Kampung Cikeris | pariwisata budaya | Desa wisata |
| 16 | Pondoksalam | Makam Mbah Garda | pariwisata budaya | Ziarah religius |
| | | Ranca Darah | pariwisata alam | Perkemahan |

Sumber : Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Kawasan Peruntukan Permukiman dengan luas kurang lebih 13.751 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar terdiri atas:

- a. kawasan permukiman perkotaan tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 8.845 (delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) hektar.

- b. kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 4.906 (empat ribu sembilan ratus enam) hektar.

Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. kawasan latihan militer angkatan darat dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar berada di Desa Kertamanah Kecamatan Sukasari;
- b. kawasan markas militer angkatan darat meliputi:
 1. Resimen Artileri Medan 2/Divisi Infanteri 1/Kostrad di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari; dan
 2. Batalyon Artileri Medan 9 Pasopati di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta;
- c. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) 0619 di Jl.Kol.Kornel Singawinata Kecamatan Purwakarta;
- d. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) tersebar di setiap ibukota kecamatan;
- e. kantor Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta di Jl. Veteran Kecamatan Purwakarta; dan
- f. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) tersebar di setiap ibukota kecamatan.

Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten berupa Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi berupa KSP Koridor Purwakarta-Padalarang.

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta sumber daya alam.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
1. KSK Perkotaan Cibatu;
 2. KSK Perkotaan Sawit-Darangdan;
 3. KSK Agropolitan Tenggara Purwakarta di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes;
 4. KSK Wisata Gunung Parang di Kecamatan Tegalwaru;
 5. KSK Ternak Besar Barat Daya Purwakarta;
 6. KSK Sadang;
 7. KSK Minapolitan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondoksalam, dan Kecamatan Darangdan; dan
 8. KSK Perkotaan Hijau Koridor Darangdan, Bojong dan Wanayasa.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. KSK Jatiluhur; dan
 2. KSK Cirata.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
1. KSK Kerajinan dan bahan bangunan keramik di Kecamatan Plered; dan
 2. KSK Situ Buleud.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
 - a) menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;
 - b) meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c) meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal

untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.

2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a) meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
 - b) mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c) meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d) meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e) menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f) pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya- Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;

- b) mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
- c) mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
- d) mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
- e) mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
- f) mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
- g) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
- h) mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
- i) mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;
- j) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
- k) meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk

serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.

4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
 - a) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b) membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c) meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d) mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e) mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h) mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i) meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j) meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
 - k) mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l) mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
 - a) mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b) mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c) melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d) merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e) memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f) meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
 - g) pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
 - a) merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b) mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c) pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;

- d) mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a) meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b) menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c) mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d) mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.
8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
 - b) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan

sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan

- c) strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, memuat arahan kebijakan penataan ruang yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Jaringan Jalan Bebas Hambatan antara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan kota-kota di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di:
 1. Jakarta-Cikampek;
 2. Jakarta-Cikampek II elevated;
 3. Tangerang-Merak;
 4. Jatiasih-Setu-Purwakarta (koridor Jatiasih-Cipularang-Sadang);
dan
 5. Ciawi-Sukabumi;
- ❖ Sumber air berupa air permukaan pada situ, danau, embung atau waduk berada di dalam dan di luar Kawasan Jabodetabek-Punjur yang terdiri atas:

Waduk Jatiluhur di Kecamatan Kutamanah dan Kecamatan Sukasari pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang berada di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
- ❖ Unit produksi air minum yang melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ditetapkan di dalam maupun di luar Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi:
 1. SPAM Regional Cisadane pada Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
 2. SPAM Regional Ciawi pada Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 3. SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 di Kecamatan Jatiluhur pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat; dan
 4. SPAM Regional Karian pada Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana (KRB) pada daerah Purwakarta berdasarkan data yang didapatkan dari RTRW Kabupaten Purwakarta dan Badan Geologi Kementerian ESDM yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana kegagalan waduk, kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, dan kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatiluhur; dan
 2. Kecamatan Babakancikao.

- b. kawasan rawan bencana kegagalan waduk berupa air limpasan waduk terdiri atas:
 1. Waduk Jatiluhur meliputi:
 - a. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur;
 - b. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur;
 - c. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan
 - d. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao.
 2. Waduk Cirata meliputi:
 - a. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru;
 - b. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru;
 - c. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
 - d. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru;
 - e. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru;
 - f. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan
 - g. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan.

Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung api adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi. Kriteria lokasi Kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Kawasan berupa lembah yang dapat

menjadi daerah terlanda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun.

Lokasi Kawasan rawan letusan gunung api terletak di Kecamatan Wanayasa dan Bojong dengan luas kurang lebih 1 Ha. Rencana penanganan kawasan rawan letusan gunung api dilakukan melalui pengembangan *escape road* mitigasi bencana, serta penyusunan Rencana Rencana Rinci dan *zoning regulation* kawasan mitigasi bencana, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, serta Program penanganan mitigasi bencana.

Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang cukup memiliki potensi bencana gempa yang cukup besar. Hal ini dikarenakan terdapatnya sesar aktif pada bagian selatan terdapat Sesar Cimandiri dan Lembang di bagian utara yaitu Sesar Baribis. Hal ini membuat hampir 78% berada pada Kawasan Rawan Bencana Menengah dengan intensitas VII-VIII MMI. Sisanya adalah KRB Tinggi pada Kecamatan Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes.

Tabel 2.4

Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Purwakarta

| Kelas | Keterangan | Luas (Ha) | Kecamatan | Persentase (%) |
|--------------------------------|---|-----------|---|----------------|
| Kawasan Rawan Bencana Menengah | Kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan intensitas VII-VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>). | 71.617,23 | Seluruh Kecamatan | 77,96 |
| Kawasan Rawan Bencana Tinggi | Kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi kuat dengan skala intensitas lebih dari VIII MMI (<i>Modified Mercalli Intensity</i>). | 20.249,63 | Maniis, Sukasari, Darangdan, Babakancikao, Bojong, Wanayasa, Kiarapedes | 22,04 |

Sumber: Badan Geologi

Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Kriteria lokasi Kawasan rawan gerakan tanah Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Lokasi Kawasan rawan gerakan tanah dengan luas 14.047 Ha meliputi:

1. Desa Cisalada dan Parakanlima berada di Kecamatan Jatiluhur;
2. Desa Margaluyu dan Mekarjaya berada di Kecamatan Kiarapedes;
3. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi berada di Kecamatan Wanayasa;
4. Desa Nagrak berada di Kecamatan Darangdan;
5. Desa Ciramahilir dan Citamiang berada di Kecamatan Maniis;
6. Desa Bojong Barat berada di Kecamatan Bojong;
7. Desa Pasanggrahan berada di Kecamatan Bojong;
8. Desa Cibukamanah dan Wanawali berada di Kecamatan Cibatu;
9. Desa Tegalwaru berada di Kecamatan Tegalwaru; dan
10. Desa Pasirmunjul dan Cijantung berada di Kecamatan Sukatani.

Untuk mewujudkan penataan Kawasan rawan gerakan tanah membutuhkan upaya pengembangan *escape road* (jalur penyelamatan), Penyusunan Rencana Rinci dan *Zoning Regulation* Kawasan rawan gerakan tanah, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan program penanganan mitigasi bencana.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah pada Kabupaten Purwakarta didominasi lebih dari setengah wilayahnya adalah KRB menengah yang hampir tersebar diseluruh kecamatan. Kawasan dengan potensi gerakan tanah tinggi hanya kurang dari 10% dan beberapa berada pada bagian Selatan hingga bagian tengah, Tenggara dan Barat. Sedangkan Kawasan dengan kerentanan rendah sampai sangat rendah memiliki persentase masing-masing 27,45% dan 12,66%. Kawasan ini cukup banyak tersebar di bagian utara Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.5

Persebaran Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Purwakarta

| Kelas | Keterangan | Luas (Ha) | Kecamatan | Persentase (%) |
|---------------|--|-----------|--|----------------|
| Sangat Rendah | Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. | 11.670,28 | Babakancikao, Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta, Tegalwaru, Maniis | 12,66 |
| Rendah | Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. | 25.310,29 | Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Pondoksalam | 27,45 |
| Menengah | Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. | 47.677,32 | Seluruh Kecamatan di Purwakarta, hanya sedikit pada Kecamatan Campaka dan Bungursari | 51,70 |
| Tinggi | Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat | 7.559,46 | Sukasari, Tegal waru, Sukatani, Maniis, Plered Darangdan, Pasawahan, Pondoksalam, Bojong, Wanayasa | 8,20 |

Sumber: Badan Geologi

Tabel 2.6

Antara Kawasan Rawan Bencana Gempa dengan Peruntukkan Permukiman Perkotaan

| Kecamatan | Kelas | Luas (Ha) |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| Babakancikao | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 1218,998400 |
| Bojong | Kawasan Rawan Bencana Tinggi | 238,488460 |
| Bungursari | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 1391,025600 |
| Campaka | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 292,289090 |
| Cibatu | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 117,518920 |
| Darangdan | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 25,276698 |
| Darangdan | Kawasan Rawan Bencana Tinggi | 522,027860 |
| Jatiluhur | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 959,190100 |
| Kiarapedes | Kawasan Rawan Bencana Tinggi | 40,836198 |
| Maniis | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 112,294550 |
| Maniis | Kawasan Rawan Bencana Tinggi | 5,335957 |
| Pasawahan | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 542,988790 |
| Plered | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 302,468970 |
| Pondoksalam | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 109,986170 |
| Purwakarta | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 1583,489300 |
| Sukasari | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 12,141346 |
| Sukatani | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 395,611030 |
| Tegalwaru | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 148,682990 |
| Wanayasa | Kawasan Rawan Bencana Menengah | 36,621561 |
| Wanayasa | Kawasan Rawan Bencana Tinggi | 198,792000 |

Sumber: Hasil Pengolahan Peta Revisi RTRW Kabupaten Purwakarta, 2018

Berdasarkan Kawasan Rawan Bencana diatas, maka dapat dilihat kriteria dan lokasi setiap komponen serta arahan kebijakan pengelolaan kawasan pada Tabel dibawah

Tabel 2.7

Kriteria Dan Lokasi Kawasan Bencana

| Fungsi | Kriteria | Lokasi |
|---------------------------------------|--|---|
| Kawasan rawan banjir | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah dataran banjir ▪ Daerah sempadan sungai ▪ Daerah cekungan | Kawasan rawan banjir seluas 155 hektar di: a. Kecamatan Jatiluhur; b. Kecamatan Babakancikao. |
| Kawasan rawan bencana kegagalan waduk | Kawasan yang mendapatkan dampak ketika terjadi hal-hal diluar perkiraan teknis pada Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata | Kegagalan Waduk Jatiluhur: 1. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur; 2. Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur; |

| Fungsi | Kriteria | Lokasi |
|----------------------------------|---|--|
| | | 3. Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur; dan 4. Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao. Kegagalan Waduk Cirata: 1. Desa Warungjeruk Kecamatan Tegalwaru; 2. Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru; 3. Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru; 4. Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru; 5. Desa Karoya Kecamatan Tegalwaru; 6. Desa Gandasoli Kecamatan Plered; dan 7. Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan. |
| Kawasan rawan letusan gunung api | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; ▪ Kawasan di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau ▪ Kawasan berupa lembah yang dapat menjadi daerah terlenda awan panas, aliran lahar, lava, lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. | Kecamatan Wanayasa, Bojong Dengan luas 1 Ha |
| Kawasan rawan gerakan tanah | Kawasan dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. | Dengan luas 14.047 Ha terletak di a. Desa Cislada dan Parakanlima di Kecamatan Jatiluhur; b. Desa Margaluyu dan Mekarjaya di Kecamatan Kiarapedes; c. Desa Taringgul Tonggoh dan Ciawi di Kecamatan Wanayasa; d. Desa Nagrak di Kecamatan Darangdan; e. Desa Ciramahilir dan Citamiang di Kecamatan Maniis; f. Desa Bojong Barat di Kecamatan Bojong; g. Desa Pasanggrahan di Kecamatan Bojong; |

| Fungsi | Kriteria | Lokasi |
|---------------|-----------------|--|
| | | h. Desa Cibukamanah dan Wanawali di Kecamatan Cibatu; i. Desa Tegalwaru di Kecamatan Tegalwaru; dan j. Desa Pasirmunjul dan Cijantung di Kecamatan Sukatani. |

Sumber : Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Tabel 2.8

Arahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Bencana

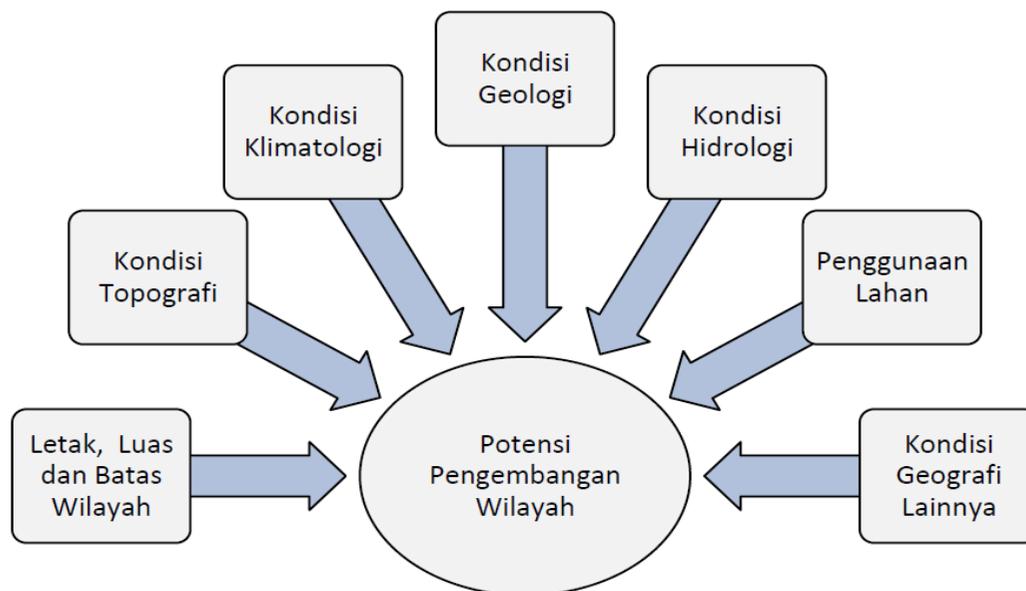
| Fungsi | Arahan Kebijakan |
|----------------------------------|--|
| Kawasan rawan letusan gunung api | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan Mitigasi Bencana • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang • Program penanganan mitigasi bencana |
| Kawasan rawan gerakan tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Rencana Rinci dan Zoning regulation Kawasan rawan gerakan tanah • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang • Program penanganan mitigasi bencana |

Sumber : Keppres No. 32/1990, SK Menhut No. 419/Kpts II/1999, Perda No. 2/1996, PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Hasil Rencana, 2010

Secara umum, gambaran kerangka pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung di Kabupaten Purwakarta dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian Kabupaten Purwakarta tidak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta mengalami perlambatan di banding tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda yang membuat perekonomian dunia, nasional dan daerah baik provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Purwakarta mengakibatkan laju perekonomian tersebut meranggak turun sangat signifikan pada angka -2,13 persen. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta beranjak mulai naik kembali ke angka 3,42 persen dan 5,24 persen.

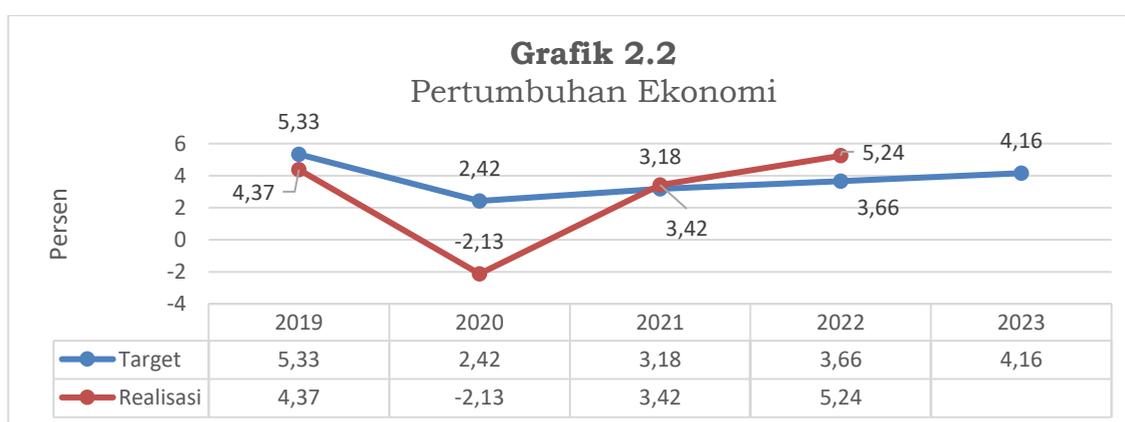
Adapun data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.9

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|---------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,33 | 4,37 | 2,42 | -2,13 | 3,18 | 3,42 | 3,66 | 5,24 | 4,16 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

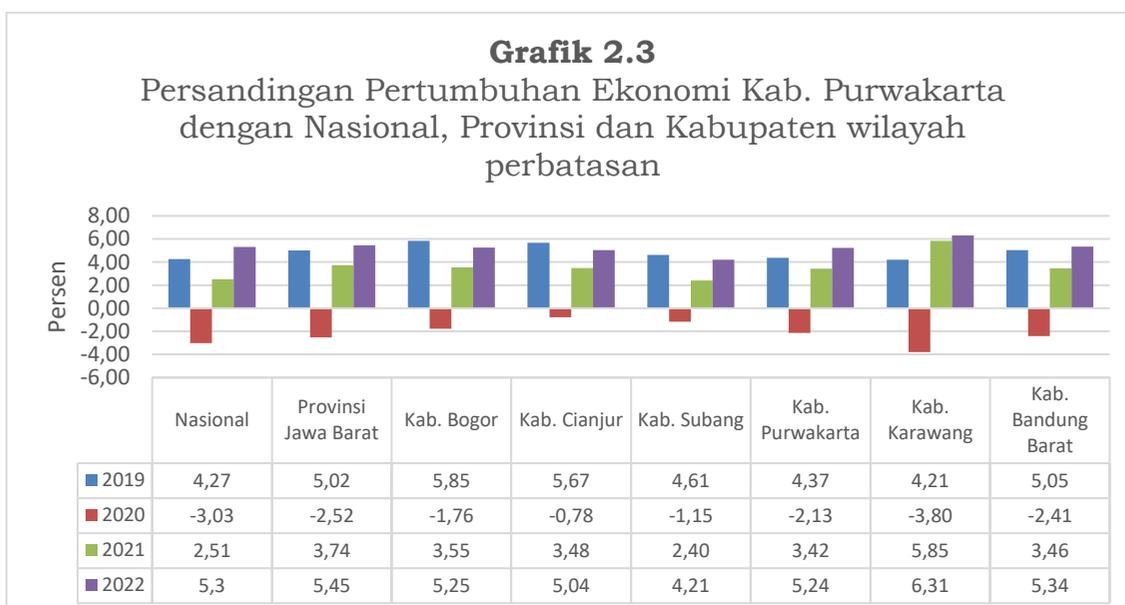
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.10

Persandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

| No. | Pertumbuhan Ekonomi / Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 (Persen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|-------|------|------|
| 1 | Nasional | 4,27 | -3,03 | 2,51 | 5,30 |
| 2 | Provinsi Jawa Barat | 5,02 | -2,52 | 3,74 | 5,45 |
| 3 | Kab. Bogor | 5,85 | -1,76 | 3,55 | 5,25 |
| 4 | Kab. Cianjur | 5,67 | -0,78 | 3,48 | 5,04 |
| 5 | Kab. Subang | 4,61 | -1,15 | 2,40 | 4,21 |
| 6 | Kab. Purwakarta | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 |
| 7 | Kab. Karawang | 4,21 | -3,80 | 5,85 | 6,31 |
| 8 | Kab. Bandung Barat | 5,05 | -2,41 | 3,46 | 5,34 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

b. Produk Domestik Regional Bruto

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan,

sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n- 1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah),
Tahun 2019-2022

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2 720,79 | 2 726,05 | 2 770,71 | 2 862,68 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 31,59 | 30,91 | 33,49 | 33,2 |
| C | Industri Pengolahan | 26 974,84 | 26 205,23 | 27 126,57 | 28 884,82 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 279,6 | 274,22 | 306,12 | 314,04 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13,15 | 14,84 | 16,27 | 16,64 |
| F | Konstruksi | 3 247,02 | 3 081,79 | 3 243,27 | 3 293,70 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5 665,63 | 5 393,40 | 5 506,10 | 5 717,88 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1 060,28 | 1 029,85 | 1 037,98 | 1 091,34 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 574,21 | 556,41 | 561,28 | 595,94 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 988,61 | 1 265,58 | 1 345,83 | 1 406,78 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1 046,73 | 1 053,51 | 1 125,29 | 1 124,97 |
| L | Real Estat | 636,8 | 638,17 | 698,51 | 736,1 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 214,89 | 202,6 | 219,43 | 240,03 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 522,5 | 499,32 | 488,12 | 480,35 |
| P | Jasa Pendidikan | 1 005,91 | 1 065,31 | 1 080,25 | 1 103,42 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 227,64 | 225,61 | 240,38 | 251,87 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 1 068,02 | 1 030,44 | 1 040,55 | 1 139,61 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 46 278,21 | 45 293,24 | 46 840,15 | 49 293,37 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.12

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah),
Tahun 2019-2022

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4 582,19 | 4 650,21 | 4 650,04 | 5 006,21 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 43,44 | 43,07 | 47,94 | 49,2 |
| C | Industri Pengolahan | 38 714,75 | 38 224,62 | 40 769,59 | 44 561,10 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 450,52 | 441,74 | 502,83 | 520,9 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 21,73 | 24,63 | 27,16 | 28,08 |
| F | Konstruksi | 5 166,05 | 4 926,75 | 5 342,72 | 5 640,50 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8 122,54 | 7 828,29 | 8 048,88 | 8 492,28 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1 687,67 | 1 669,51 | 1 720,99 | 1 892,07 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 762,19 | 745,1 | 778,21 | 855,08 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 968,79 | 1 241,29 | 1 293,62 | 1 314,43 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1 675,07 | 1 680,88 | 1 824,62 | 1 982,94 |
| L | Real Estat | 867,31 | 875,85 | 961,5 | 1 024,64 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 327,99 | 316,27 | 343,89 | 380,77 |

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 903,63 | 868,07 | 856,85 | 841,98 |
| P | Jasa Pendidikan | 1 521,95 | 1 651,87 | 1 715,10 | 1 782,21 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 333,17 | 337,35 | 363,37 | 386,03 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 1 560,51 | 1 526,09 | 1 530,92 | 1 710,50 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 67 709,51 | 67 051,58 | 70 778,25 | 76 468,93 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.13

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2022

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,15 | 0,19 | 1,64 | 3,32 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | -0,08 | -2,13 | 8,32 | -0,85 |
| C | Industri Pengolahan | 3,09 | -2,85 | 3,52 | 6,48 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,28 | -1,92 | 11,63 | 2,58 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,74 | 12,8 | 9,63 | 2,31 |
| F | Konstruksi | 5,88 | -5,09 | 5,24 | 1,55 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,52 | -4,8 | 2,09 | 3,85 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,48 | -2,87 | 0,79 | 5,14 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,65 | -3,1 | 0,88 | 6,17 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,67 | 28,02 | 6,34 | 4,53 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,01 | 0,65 | 6,81 | -0,03 |
| L | Real Estat | 9,3 | 0,22 | 9,46 | 5,38 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 9,23 | -5,72 | 8,31 | 9,39 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,24 | -4,44 | -2,24 | -1,59 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,24 | 5,9 | 1,4 | 2,14 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,38 | -0,89 | 6,54 | 4,78 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 8,09 | -3,52 | 0,98 | 9,52 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.14

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2022

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,77 | 6,94 | 6,57 | 6,55 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| C | Industri Pengolahan | 57,18 | 57,01 | 57,6 | 58,27 |

| LAPANGAN USAHA | | TAHUN | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,67 | 0,66 | 0,71 | 0,68 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| F | Konstruksi | 7,63 | 7,35 | 7,55 | 7,38 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12 | 11,68 | 11,37 | 11,11 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2,49 | 2,49 | 2,43 | 2,47 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,13 | 1,11 | 1,1 | 1,12 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,43 | 1,85 | 1,83 | 1,72 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,47 | 2,51 | 2,58 | 2,59 |
| L | Real Estat | 1,28 | 1,31 | 1,36 | 1,34 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,5 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,33 | 1,29 | 1,21 | 1,1 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,25 | 2,46 | 2,42 | 2,33 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,5 |
| R, S, T, U | Jasa lainnya | 2,3 | 2,28 | 2,16 | 2,24 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Adapun ringkasan data capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta secara garis besar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.15

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) | 46 278,21 | 45 293,24 | 46 840,15 | 49 293,37 |
| 2. | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | 67 709,51 | 67 051,58 | 70 778,25 | 76 468,93 |
| 3. | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 |
| 4. | Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada wilayah perbatasan dengan Kab. Purwakarta, maka dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.16

Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dengan Kab./Kota di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

| Uraian | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) | Kab. Purwakarta | 46 278,21 | 45 293,24 | 46 840,15 | 49 293,37 |
| | Kab. Karawang | 163 732,48 | 157 849,53 | 166 941,49 | 177 470,89 |
| | Kab. Subang | 28 672,90 | 28 344,32 | 28 960,89 | 30 181,58 |
| | Kab. Bandung Barat | 31 398,35 | 30 640,41 | 31 701,79 | 33 393,29 |
| | Kab. Cianjur | 32 039,32 | 31 790,76 | 32 897,52 | 34 556,40 |
| | Kab. Bogor | 156 876,01 | 154 113,60 | 159 589,55 | 167 966,18 |
| Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | Kab. Purwakarta | 67 709,51 | 67 051,58 | 70 778,25 | 76 468,93 |
| | Kab. Karawang | 230 021,38 | 225 063,63 | 243 713,20 | 268 228,78 |
| | Kab. Subang | 40 790,68 | 40 148,32 | 42 292,91 | 46 110,40 |
| | Kab. Bandung Barat | 47 180,08 | 46 478,90 | 48 764,31 | 52 921,29 |
| | Kab. Cianjur | 46 957,85 | 47 528,97 | 50 137,65 | 53 988,97 |
| | Kab. Bogor | 237 227,08 | 235 887,26 | 248 892,48 | 267 743,69 |
| Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) | Kab. Purwakarta | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 |
| | Kab. Karawang | 4,21 | -3,80 | 5,85 | 6,31 |
| | Kab. Subang | 4,61 | -1,15 | 2,40 | 4,21 |
| | Kab. Bandung Barat | 5,05 | -2,41 | 3,46 | 5,34 |
| | Kab. Cianjur | 5,67 | -0,78 | 3,48 | 5,04 |
| | Kab. Bogor | 5,85 | -1,76 | 3,55 | 5,25 |
| Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) | Kab. Purwakarta | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Kab. Karawang | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Kab. Subang | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Kab. Bandung Barat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Kab. Cianjur | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Kab. Bogor | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

c. Inflasi

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah.

Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

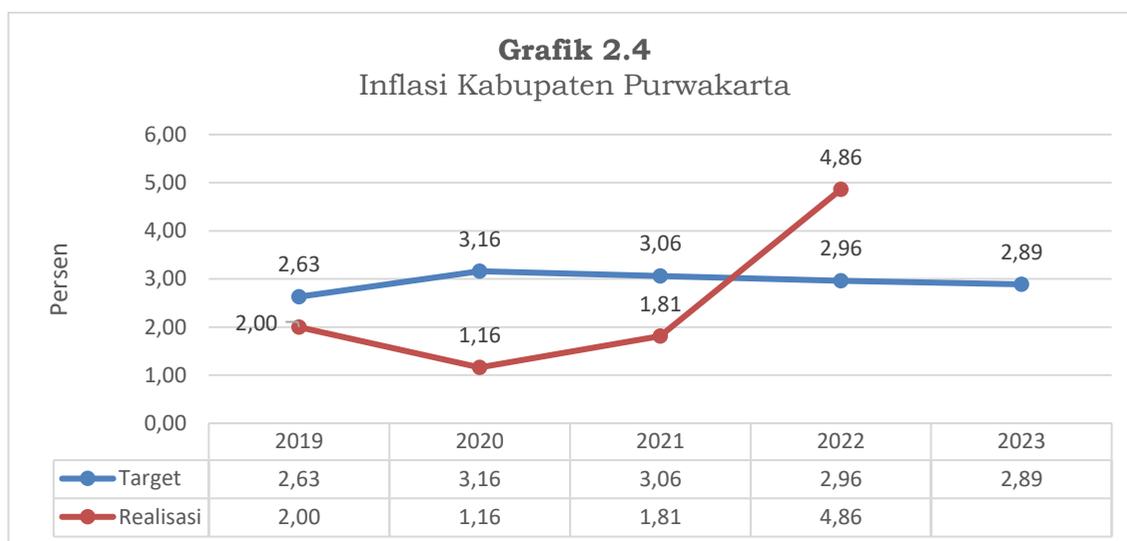
Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 mengacu pada pengukuran di Kota Cirebon, dimana dapat dilihat sesuai daftar tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.17

Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Inflasi | Persen | 2,63 | 2,00 | 3,16 | 1,16 | 3,06 | 1,81 | 2,96 | 4,86 | 2,89 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

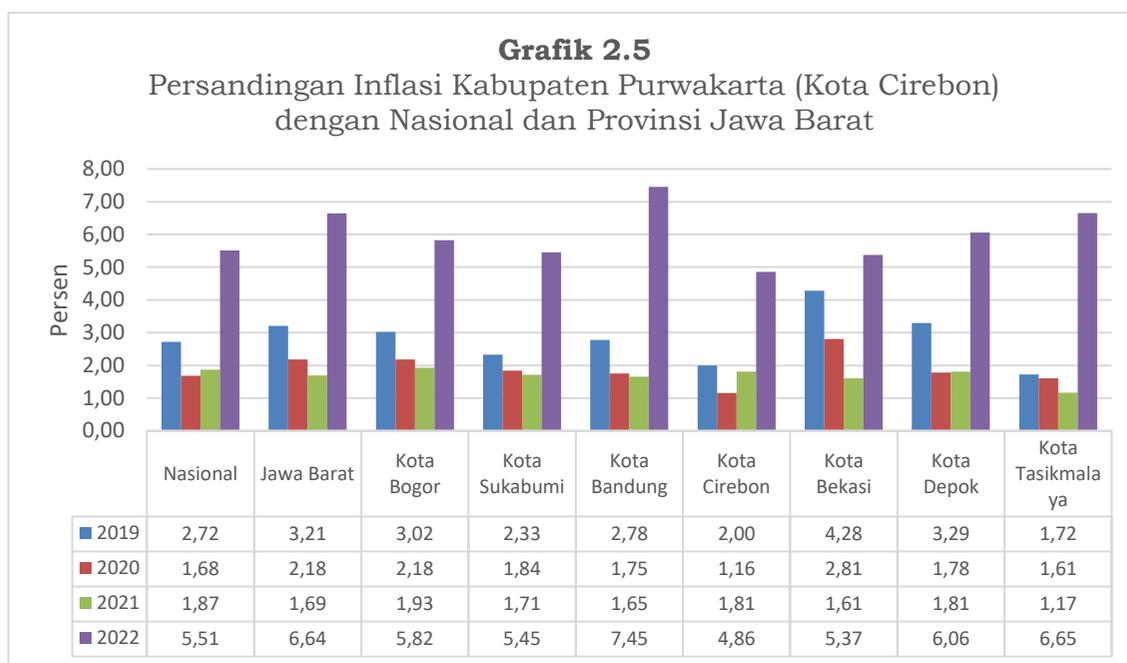
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.18

Persandingan Inflasi Kabupaten Purwakarta (Kota Cirebon) dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

| No. | Inflasi (persen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------------------|------|------|------|------|
| 1 | Nasional | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 5,51 |
| 2 | Jawa Barat | 3,21 | 2,18 | 1,69 | 6,64 |
| 3 | Kota Bogor | 3,02 | 2,18 | 1,93 | 5,82 |
| 4 | Kota Sukabumi | 2,33 | 1,84 | 1,71 | 5,45 |
| 5 | Kota Bandung | 2,78 | 1,75 | 1,65 | 7,45 |
| 6 | Kota Cirebon | 2,00 | 1,16 | 1,81 | 4,86 |
| 7 | Kota Bekasi | 4,28 | 2,81 | 1,61 | 5,37 |
| 8 | Kota Depok | 3,29 | 1,78 | 1,81 | 6,06 |
| 9 | Kota Tasikmalaya | 1,72 | 1,61 | 1,17 | 6,65 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023

d. Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak.

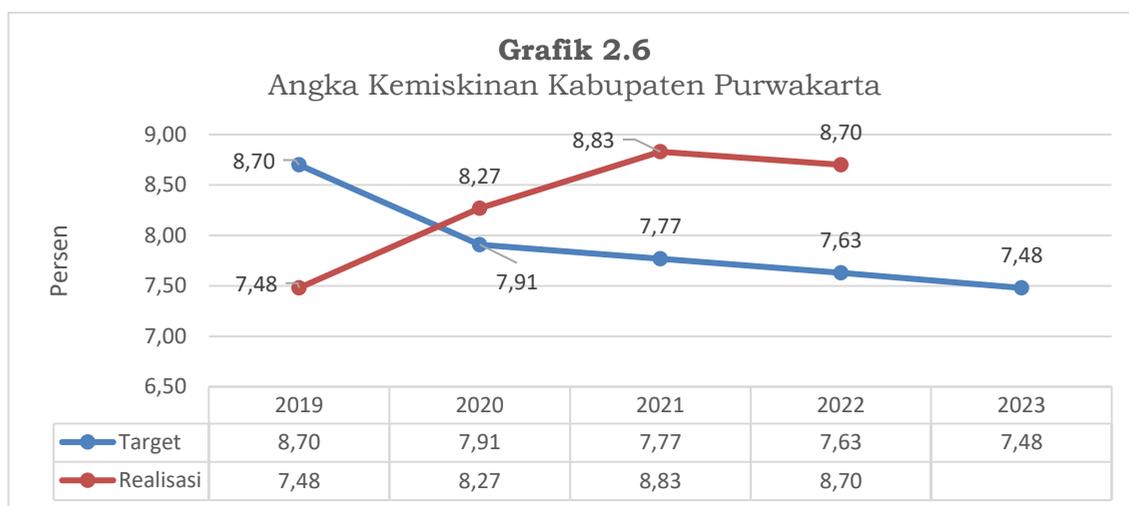
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.19

Angka Kemiskinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Angka Kemiskinan | Persen | 8,70 | 7,48 | 7,91 | 8,27 | 7,77 | 8,83 | 7,63 | 8,70 | 7,48 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



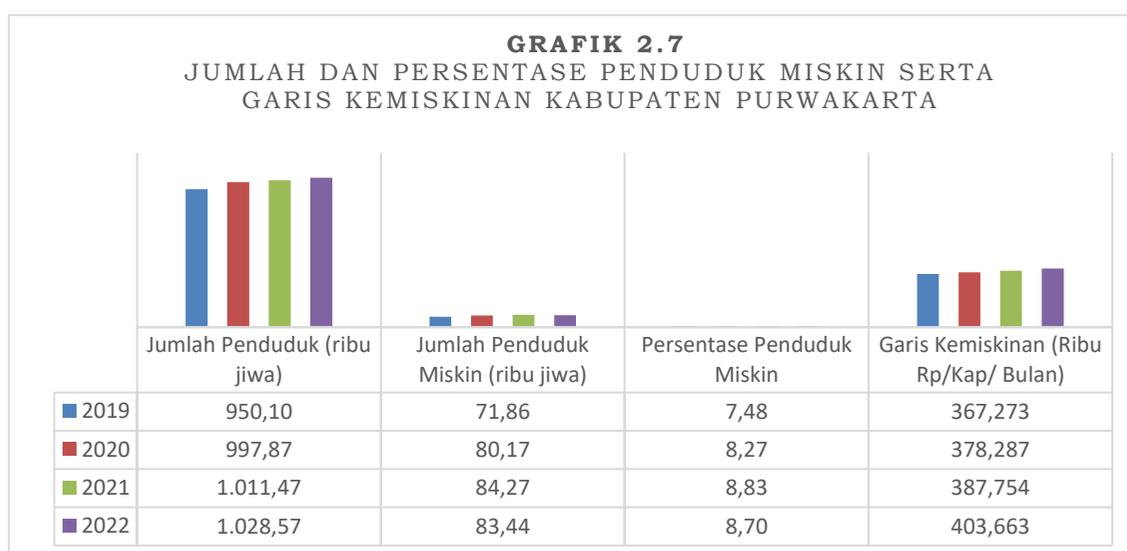
Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Tabel 2.20

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2022

| NO. | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 1. | Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | 950,10 | 997,87 | 1.011,47 | 1.028,57 |
| 2. | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 71,86 | 80,17 | 84,27 | 83,44 |
| 3. | Persentase Penduduk Miskin | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 |
| 4. | Garis Kemiskinan (Ribu Rp/Kap/ Bulan) | 367,273 | 378,287 | 387,754 | 403,663 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.21

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskinan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten di Wilayah Perbatasan Tahun 2019-2022

| Uraian | Kabupaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| Jumlah Penduduk (ribu jiwa) | Kab. Purwakarta | 950,10 | 997,87 | 1.011,47 | 1.028,57 |
| | Kab. Karawang | 2 353,92 | 2 439,09 | 2 468,58 | 2 505,25 |
| | Kab. Subang | 1 595,83 | 1 595,32 | 1 608,59 | 1 624,39 |
| | Kab. Bandung Barat | 1 699,90 | 1 788,34 | 1 814,23 | 1 846,97 |
| | Kab. Cianjur | 2 263,07 | 2 477,56 | 2 506,68 | 2 542,79 |
| | Kab. Bogor | 5 965,41 | 5 427,07 | 5 489,54 | 5 566,84 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Kab. Purwakarta | 71,860 | 80,170 | 84,270 | 83,440 |
| | Kab. Karawang | 171,721 | 195,410 | 210,780 | 199,910 |
| | Kab. Subang | 127,460 | 149,810 | 158,970 | 155,340 |
| | Kab. Bandung Barat | 163,437 | 179,460 | 190,770 | 183,670 |
| | Kab. Cianjur | 209,751 | 234,470 | 260,020 | 246,810 |
| | Kab. Bogor | 395,000 | 465,670 | 491,240 | 474,740 |
| Persentase Penduduk Miskin (persen) | Kab. Purwakarta | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 |
| | Kab. Karawang | 7,39 | 8,26 | 8,95 | 8,44 |
| | Kab. Subang | 8,12 | 9,31 | 10,03 | 9,75 |
| | Kab. Bandung Barat | 9,38 | 10,49 | 11,30 | 10,82 |
| | Kab. Cianjur | 9,15 | 10,36 | 11,18 | 10,55 |
| | Kab. Bogor | 6,66 | 7,69 | 8,13 | 7,73 |
| Garis Kemiskinan (Ribu Rp/Kap/ Bulan) | Kab. Purwakarta | 367,273 | 378,287 | 387,754 | 403,663 |
| | Kab. Karawang | 440,347 | 466,152 | 496,201 | 521,158 |
| | Kab. Subang | 339,607 | 351,885 | 360,691 | 372,308 |
| | Kab. Bandung Barat | 341,307 | 362,212 | 374,470 | 393,956 |
| | Kab. Cianjur | 350,760 | 371,699 | 387,631 | 406,829 |
| | Kab. Bogor | 373,799 | 402,877 | 418,483 | 443,787 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah 70,82, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 ada peningkatan menjadi 70,98 dan 71,56 poin.

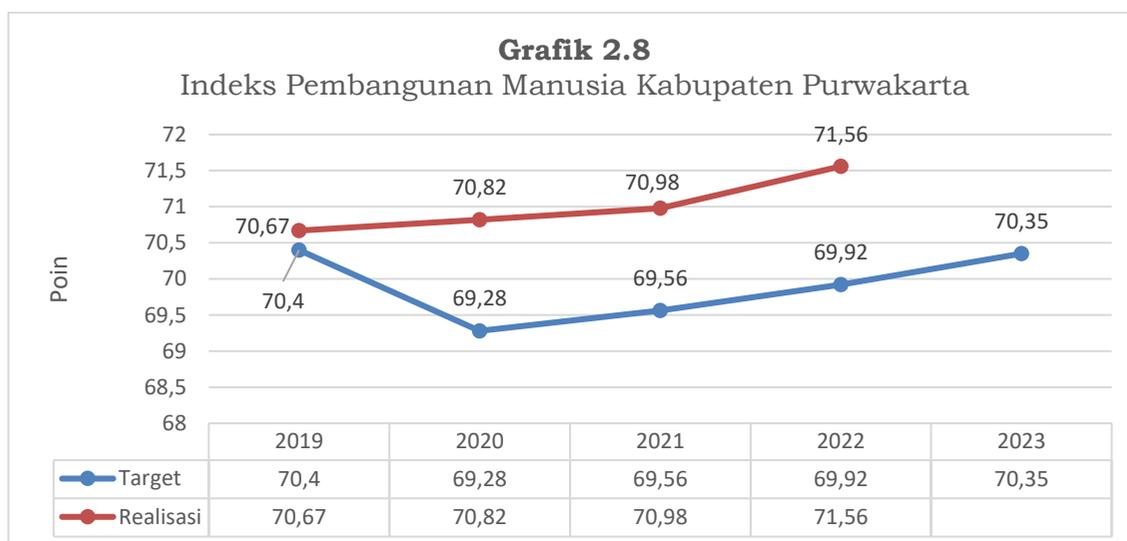
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Tahun 2019-2023, seperti terlihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.22

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 70,40 | 70,67 | 69,28 | 70,82 | 69,56 | 70,98 | 69,92 | 71,56 | 70,35 |
| Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,08 | 7,92 | 7,91 | 8,09 | 7,97 | 8,10 | 8,04 | 8,11 | 8,12 |
| Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,24 | 12,10 | 12,36 | 12,11 | 12,46 | 12,12 | 12,58 | 12,13 | 12,73 |
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,65 | 70,8 | 70,58 | 70,99 | 70,63 | 71,18 | 70,68 | 71,47 | 70,75 |
| Pengeluaran Perkapita Disesuaikan | Juta Rp | 11,173 | 11,819 | 12,200 | 11,614 | 12,700 | 11,669 | 13,000 | 12,193 | 13,150 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

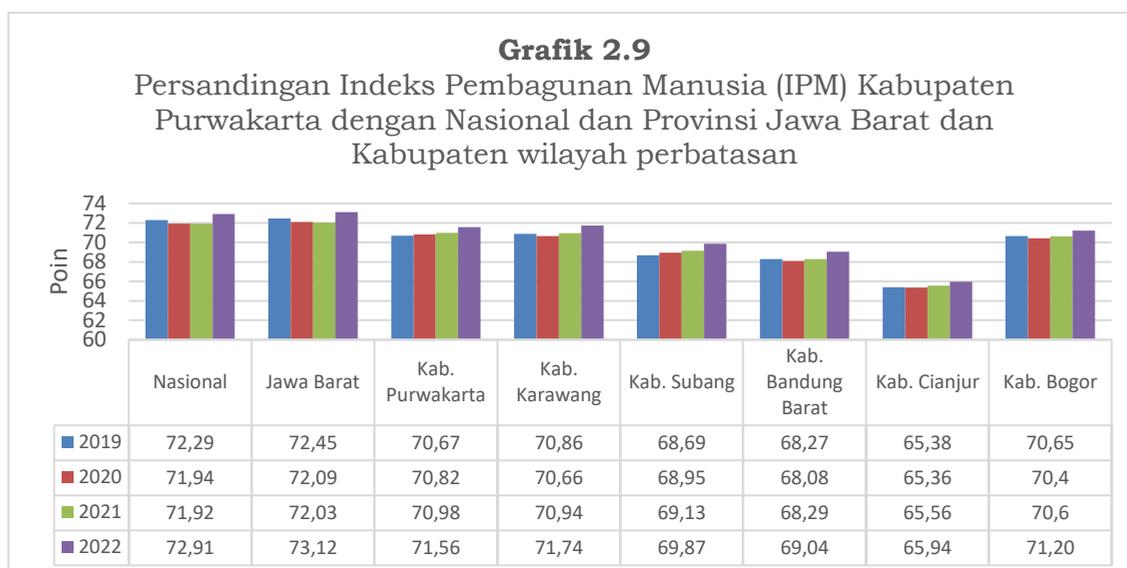
Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.23

Persandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

| No. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nasional | 72,29 | 71,94 | 71,92 | 72,91 |
| 2 | Jawa Barat | 72,45 | 72,09 | 72,03 | 73,12 |
| 3 | Kab. Purwakarta | 70,67 | 70,82 | 70,98 | 71,56 |
| 4 | Kab. Karawang | 70,86 | 70,66 | 70,94 | 71,74 |
| 5 | Kab. Subang | 68,69 | 68,95 | 69,13 | 69,87 |
| 6 | Kab. Bandung Barat | 68,27 | 68,08 | 68,29 | 69,04 |
| 7 | Kab. Cianjur | 65,38 | 65,36 | 65,56 | 65,94 |
| 8 | Kab. Bogor | 70,65 | 70,40 | 70,60 | 71,20 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini diakibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menurunkan sisi perekonomian nasional dan daerah sehingga berdampak pada penurunan dari sector dunia usaha termasuk tenaga kerja yang banyak di PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Akibat hal tersebut maka pada tahun 2020 TPT Kabupaten Purwakarta meningkat mencapai angka 11,07 dan TPAK turun ke angka 60,91.

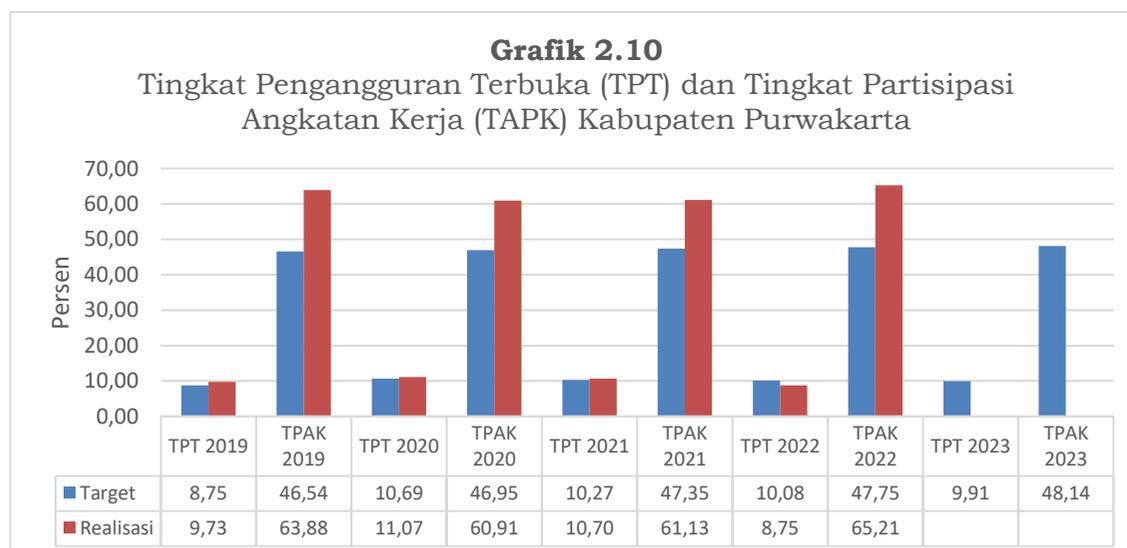
Berikut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah :

Tabel 2.24

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 8,75 | 9,73 | 10,69 | 11,07 | 10,27 | 10,70 | 10,08 | 8,75 | 9,91 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 46,54 | 63,88 | 46,95 | 60,91 | 47,35 | 61,13 | 47,75 | 65,21 | 48,14 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Bila dibandingkan dengan Kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Barat, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.25

Persandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten diwilayah perbatasan Tahun 2019-2022

| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Nasional | 5,23 | 7,07 | 6,49 | 5,86 |
| Provinsi Jawa Barat | 8,04 | 10,46 | 9,82 | 8,31 |
| Kab. Purwakarta | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 |
| Kab. Karawang | 9,68 | 11,52 | 11,83 | 9,87 |
| Kab. Subang | 8,68 | 9,48 | 9,77 | 7,77 |
| Kab. Bandung Barat | 8,24 | 12,25 | 11,65 | 9,63 |
| Kab. Cianjur | 9,81 | 11,05 | 9,32 | 8,41 |
| Kab. Bogor | 9,11 | 14,29 | 12,22 | 10,64 |

| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Nasional | 67,53 | 67,77 | 67,80 | 68,63 |
| Provinsi Jawa Barat | 64,99 | 64,53 | 64,95 | 66,15 |
| Kab. Purwakarta | 63,88 | 60,91 | 61,13 | 65,21 |
| Kab. Karawang | 63,57 | 64,90 | 64,19 | 65,51 |
| Kab. Subang | 67,67 | 66,70 | 67,78 | 68,87 |
| Kab. Bandung Barat | 61,97 | 59,91 | 60,75 | 64,37 |
| Kab. Cianjur | 66,00 | 69,26 | 67,98 | 69,98 |
| Kab. Bogor | 65,41 | 62,65 | 62,55 | 63,75 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / Statistik Indonesia Tahun 2023

g. Ketimpangan

Pencapaian pembangunan daerah terkait pengukuran ketimpangan, digunakan indikator Gini Rasio. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

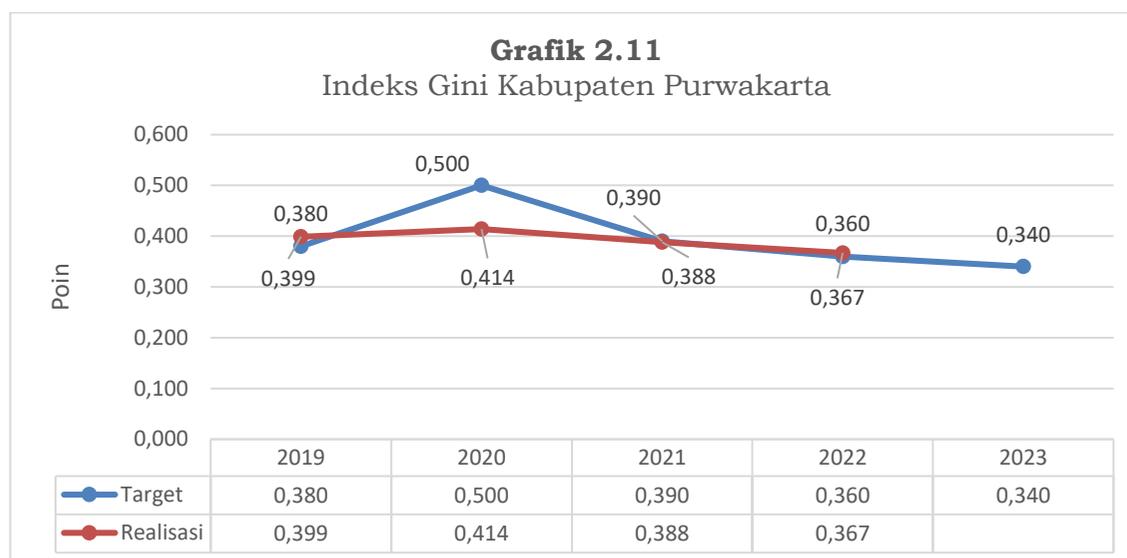
Tingkat ketimpangan atau Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.26

Capaian Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 – 2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|--------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Indeks Gini / Gini Rasio | Poin | 0,38 | 0,399 | 0,50 | 0,414 | 0,39 | 0,388 | 0,36 | 0,367 | 0,34 |

Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023



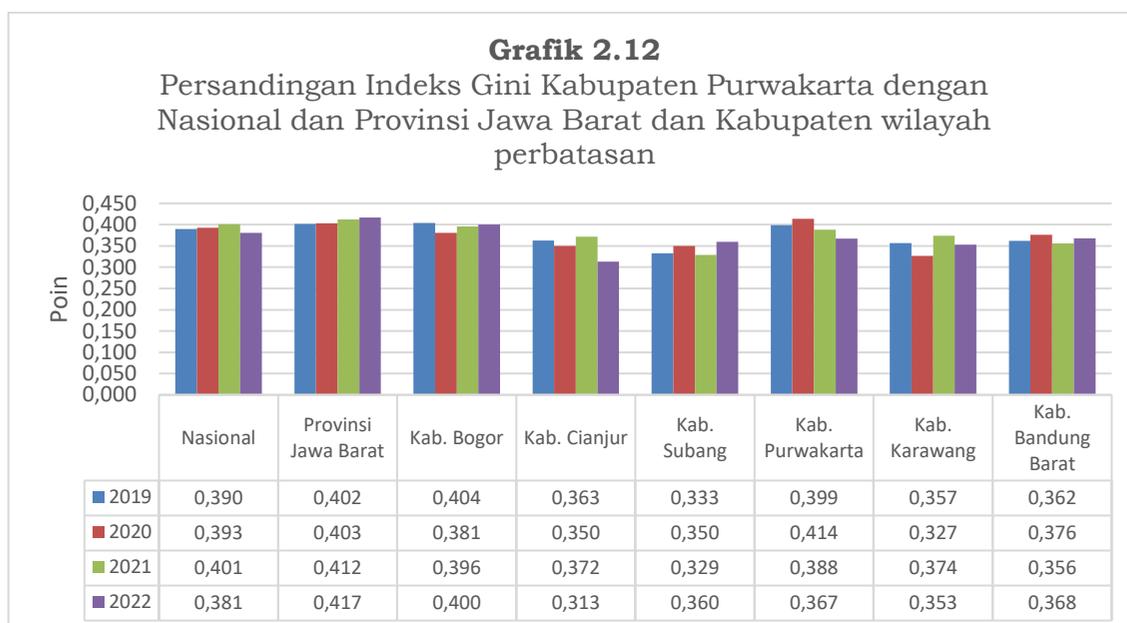
Sumber : BPS Kabupaten Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023
Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023

Tabel 2.27

Persandingan Indeks Gini / Gini Rasio Kabupaten Purwakarta dengan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di wilayah perbatasan Tahun 2019-2022

| No. | Indek Gini / Gini Rasio (poin) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nasional | 0,390 | 0,393 | 0,401 | 0,381 |
| 2 | Provinsi Jawa Barat | 0,402 | 0,403 | 0,412 | 0,417 |
| 3 | Kab. Bogor | 0,404 | 0,381 | 0,396 | 0,400 |
| 4 | Kab. Cianjur | 0,363 | 0,350 | 0,372 | 0,313 |
| 5 | Kab. Subang | 0,333 | 0,350 | 0,329 | 0,360 |
| 6 | Kab. Purwakarta | 0,399 | 0,414 | 0,388 | 0,367 |
| 7 | Kab. Karawang | 0,357 | 0,327 | 0,374 | 0,353 |
| 8 | Kab. Bandung Barat | 0,362 | 0,376 | 0,356 | 0,368 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023 / BPS Kab. Dalam Angka Tahun 2023

g. Pendapatan Perkapita

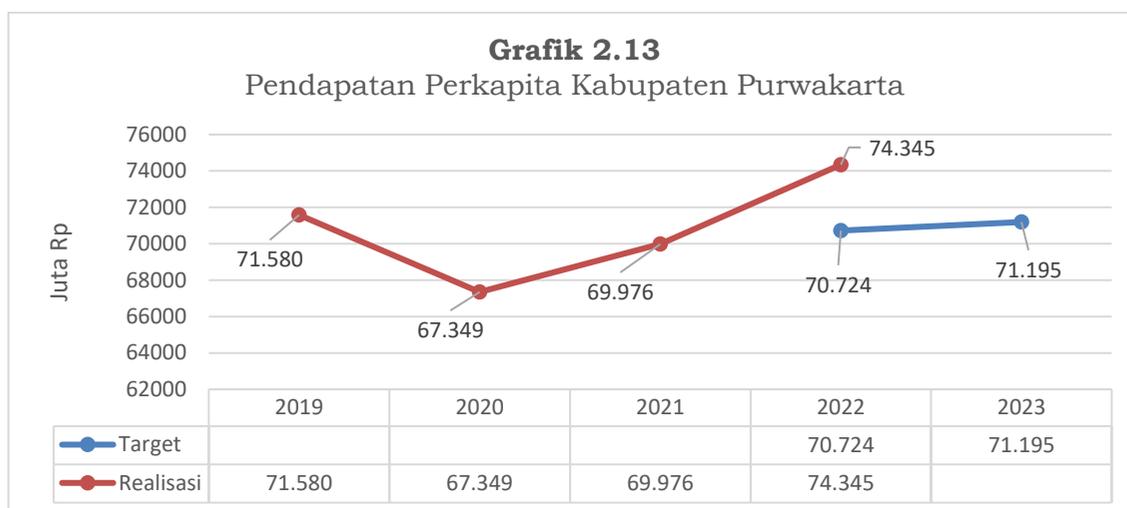
Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Pendapatan perkapita di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Berikut tingkat capaian pendapatan perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 2.28
Pendapatan Perkapita Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

| Indikator | Satuan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target |
|-----------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
| Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB | Ribu Rp. | - | 71.580 | - | 67.349 | - | 69.976 | 70.724 | 74.345 | 71.195 |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah, diperlukan sasaran pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya meningkatnya penanggulangan kemiskinan, meningkatnya aksesibilitas kesempatan kerja dan meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja.

Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung, seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Selain itu dalam pembangunan kesejahteraan sosial juga

harus diperhatikan terkait pembangunan manusianya agar peningkatan kesejahteraan sosial selaras dengan peningkatan pembangunan manusia.

Kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan melalui program pembangunan oleh perangkat daerah teknis. Adapun capaian indikator kinerja program dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 70,67 | 70,82 | 70,98 | 71,56 | 70,35 |
| 2 | Angka Kemiskinan | Persen | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 | 7,48 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 | 9,91 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,16 |
| 5 | Indeks Gini | Poin | 0,399 | 0,414 | 0,388 | 0,367 | 0,340 |
| 6 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB | Juta Rp. | 71.580 | 67.349 | 69.976 | 74.345 | 71.195 |
| 6a | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan | Rp | 11.819.000 | 11.614.000 | 11.669.000 | 12.193.000 | 13.150.500 |
| 7 | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persen | 1,35 | 1,54 | 1,82 | 1,69 | 0,47 |
| 8 | Inflasi | Persen | 2,00 | 1,16 | 1,81 | 4,86 | 2,89 |
| 9 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,92 | 8,09 | 8,10 | 8,11 | 8,12 |
| 10 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,10 | 12,11 | 12,12 | 12,13 | 12,73 |
| 11 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 70,8 | 70,99 | 71,18 | 71,47 | 70,75 |
| 12 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 63,88 | 60,91 | 61,13 | 65,21 | 48,14 |
| 13 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 87,19 | 87,19 | 86,78 | 86,93 | 90,18 |
| 14 | Indeks Perberdayaan Gender (IDG) | Poin | 72,04 | 72,04 | 74,39 | 77,89 | 77,46 |
| 15 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | Persen | 85,63 | 87,88 | 83,25 | 84,00 | 89,63 |

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 71 | 64,41 | 61,07 | 64,28 | 72,81 |
| 17 | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 85,4 | 34,82 | 35,06 | 37,56 | 86 |
| 18 | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 16 | 16 | 80,00 | 32 | 40 |
| 19 | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 34 | 34 | 77,00 | 70,3 | 75,52 |
| 20 | Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan | Persen | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |
| 21 | Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD | Persen | 35 | 7,71 | 6,36 | 6,36 | 55 |
| 22 | Jumlah Wisatawan | Orang | 1.942.213 | 97.421 | 783.171 | 783.171 | 2.515.000 |
| 23 | Laju UMKM Yang Dibina | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Laju Koperasi Aktif | Persen | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 25 | Laju Pertumbuhan IKM | Persen | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 26 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | Persen | 4,69 | 6,91 | 6,84 | 5,12 | 5 |
| 27 | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Trilyun | 62,7 | 69,76 | 74,49 | 80,24 | 75 |
| 28 | Skor Pola pangan Harapan | Poin | 88,55 | 85,1 | 78,3 | 91,40 | 93,15 |
| 29 | Laju Produksi Pertanian | Persen | 1,22 | 2,97 | 4,9 | 4,9 | 1,1 |
| 30 | Laju Produksi Peternakan | Persen | 3 | 0,24 | 3,13 | 3,13 | 2 |
| 31 | Laju Produksi Perikanan | Persen | 14 | 16,48 | 2,27 | 2,27 | 14 |

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023, Bappelitbangda 2023

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya sebagaimana tertuang di dalam Tujuan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diperlukan sasaran pembangunan yang salah satunya yaitu meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga. Sedangkan dalam pengembangan dan pembangunan seni budaya dititikberatkan pada pemeliharaan jati diri terhadap nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan dan memelihara nilai seni budaya daerah dan meningkatkan prestasi olahraga daerah dilaksanakan melalui program pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah teknis. Adapun capaian indikator kinerja program dalam rangka mengembangkan seni budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.30

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Dalam Rangka Mengembangkan Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan | Persen | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 68,5 | 95 | 91 | 74,45 | 73 |
| 3 | Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Persen | 25 | 25 | 35 | 35 | 55 |

Sumber : Bappelitbangda 2023

2.2.4 Fokus Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk menurunnya capaian target pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang serius dan menyeluruh dari semua aspek. Dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta telah dilakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, diantaranya yaitu melakukan pergeseran anggaran dan *refocusing* program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan pada tiga aspek utama yang terdampak, yaitu aspek kesehatan, aspek sosial masyarakat dan aspek ekonomi. Pada aspek kesehatan pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya penanganan kesehatan diantaranya untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), desinfektan, *hand sanitizer*, pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan, penyediaan ruang untuk pasien covid-19, vaksinasi tahap I-II dan III (*booster*) dari segala sektor usia, sosialisasi dan penertiban lokasi yang rawan kerumunan masyarakat dll. Sedangkan pada aspek sosial masyarakat pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya untuk pengamanan jaring sosial masyarakat bagi masyarakat miskin yang terkena dampak, melalui pemberian bantuan sosial baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Langsung Non Tunai, bantuan sembilan bahan pokok makanan (sembako), bantuan sosial ini dikolaborasikan dengan bantuan sosial yang bersumber dari Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari aspek ekonomi pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya untuk pemulihan perekonomian masyarakat khususnya bagi yang terdampak pandemi Covid-19, diantaranya yakni dengan memberikan fasilitasi permohonan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, penataan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat, penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di tempat umum, penyediaan lapangan kerja melalui proyek pembangunan yang sifatnya padat karya, pelatihan dan pembinaan wirausaha baru, dll.

Dari hasil penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 sudah menunjukkan trend yang positif dimana jumlah penderita covid-19 sudah berkurang dikarenakan target pelaksanaan vaksinasi telah memenuhi harapan, selain itu pemulihan ekonomi masyarakat sudah mulai berangsur membaik dan merangkak naik. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam melewati masa-masa sulit akibat dampak pandemi di tahun pertama, terutama bagi masyarakat miskin, penanganan pandemi ini juga menjadikan masyarakat menjadi sadar akan hidup bersih dan sehat, disiplin dalam menjaga kesehatan dan semangat dalam bekerja dan berusaha sehingga perekonomian masyarakat secara berangsur ada peningkatan kembali.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk tahun 2022 dan 2023 masih tetap menjadi prioritas guna menekan penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan pemulihan ekonomi yang diharapkan terus membaik, diantaranya melalui normalisasi kunjungan wisatawan pada beberapa destinasi pariwisata unggulan.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan yakni Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.31

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pendidikan | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | 1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|--------|-------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang – undangan | | | | | | |
| | 6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi | Persen | 55,43 | 53,10 | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | 1 Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi | Persen | 67,16 | 99,03 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 2 Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi | Persen | 63,89 | 97,29 | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Pendidikan Non Formal | Persentase Lembaga Dikmas yang terakreditasi | Persen | 88,23 | 70,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | 1 Persentase Guru yang berkualifikasi S1 (%) | Persen | 95,32 | 95,73 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 2 Persentase Guru yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan | Persen | 0,45 | 0,77 | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | 1 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (%) | Persen | 59,19 | 67,09 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 2 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%) | Persen | 99,53 | 99,53 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 3 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B (%) | Persen | 99,72 | 99,72 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 4 Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dalam keadaan baik | Persen | 18,45 | 49,78 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | 5 Persentase Kondisi Ruang Kelas SMP dalam keadaan baik | Persen | 31,91 | 67,12 | - | - | Dinas Pendidikan |
| Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase realisasi program Manajemen pelayanan pendidikan (%) | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Dinas Pendidikan |
| | 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran | Persen | - | - | 100,00 | 92,13 | Dinas Pendidikan |
| Program Pengelolaan Pendidikan | | | | | | | Dinas Pendidikan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|---------|-----------|------|--------|--------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 APK Pendidikan Anak Usia Dini | Persen | - | - | 68,00 | 72,83 | Dinas Pendidikan |
| | 2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | - | - | 99,57 | 99,58 | Dinas Pendidikan |
| | 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat | Persen | - | - | 99,54 | 99,53 | Dinas Pendidikan |
| | 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat | Persen | - | - | 99,73 | 99,73 | Dinas Pendidikan |
| | 5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat | Persen | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan |
| | 6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat | Persen | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan |
| | 7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan |
| | 8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan |
| | 9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pendidikan |
| | 10 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik | Persen | - | - | 86,23 | 86,23 | Dinas Pendidikan |
| | 11 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik | Persen | - | - | 88,64 | 88,64 | Dinas Pendidikan |
| | 12 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | Persen | - | - | 57,57 | 43,65 | Dinas Pendidikan |
| | 13 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | Persen | - | - | 92,62 | 95,32 | Dinas Pendidikan |
| | 14 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | Persen | - | - | 93,41 | 97,22 | Dinas Pendidikan |
| Program Pengembangan Kurikulum | | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | 1 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Dokumen | - | - | 1,00 | 1,00 | Dinas Pendidikan |
| | 2 Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Dokumen | - | - | 1,00 | 1,00 | Dinas Pendidikan |
| Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Dokumen Hasil Pengawasan | Dokumen | - | - | 0,00 | 1,00 | Dinas Pendidikan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|-------|------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pengembangan Bahasa dan Sastra | Prosentase keikutsertaan Sekolah dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra Daerah | Persen | - | - | 95,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Kesehatan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kesehatan yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.32

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|-------|------|------|------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kesehatan | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 34,00 | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 75,00 | - | - | Dinas Kesehatan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 75,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 75,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | Persen | 100,00 | 97,67 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pencapaian Target SPM Sesuai Wilayah Kerja | Persen | 41,67 | 75,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Persen | 76,67 | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | Persen | 62,02 | 63,76 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 2 Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | Persen | 65,80 | 65,99 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Cakupan Pelayanan Anak Balita | Persen | 71,35 | 62,50 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 2 Cakupan Pelayanan Bayi | Persen | 99,90 | 107,06 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Cakupan Sarana Sanitasi dasar (Air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL) | Persen | 78,10 | 79,90 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 2 Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat | Persen | 58,25 | 50,61 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | Persen | 68,84 | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Persentase Bayi Dengan Imunisasi Dasar Lengkap | Persen | 95,70 | 90,00 | - | - | Dinas Kesehatan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|------|------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penyakit Menular (TB paru, HIV) | Persen | 68,84 | 64,74 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Persen | 61,10 | 26,26 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | Persen | 100,00 | 67,85 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 2 Persentase Kepesertaan Penduduk Miskin Yang Memiliki Jaminan Kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Dengan Kondisi Baik | Persen | 61,16 | 61,54 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | Persen | 100,53 | 99,41 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 2 Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani | Persen | 103,20 | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 3 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | Persen | 101,04 | 101,22 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Promosi Kesehatan | Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Individu, Keluarga dan Masyarakat Dalam Menumbuhkan Perilaku Hidup Sehat dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat | Persen | 76,50 | - | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi Minimal Madya | Persen | 90,00 | 90,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Persentase Kunjungan Pemeriksaan Labkesda | Persen | 80,00 | 89,41 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | 2 Persentase Parameter Pemeriksaan Labkesda | Persen | 84,47 | 83,50 | - | - | Dinas Kesehatan |
| Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP Yang Masih Berlaku | Persen | 83,54 | 100,00 | - | - | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Dinas Kesehatan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 60,00 | 80,00 | Dinas Kesehatan |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | 1 Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan | % | - | - | 75,00 | 75,00 | Dinas Kesehatan |
| | 2 Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | % | - | - | 91,74 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | % | - | - | 50,00 | 98,41 | Dinas Kesehatan |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | % | - | - | 99,00 | 100,00 | Dinas Kesehatan |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri | % | - | - | 68,00 | 68,09 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | |
| Kesehatan | | | | | | | RSUD Bayu Asih |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | RSUD Bayu Asih |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan dukungan administrasi perkantoran | Persen | 100,00 | 96,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | RSUD Bayu Asih |
| | 1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis | Persen | 69,94 | 71,50 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 2 Tingkat Mutu Keperawatan | Persen | 68,53 | 71,50 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 3 Cakupan pelayanan penunjang | Persen | 65,88 | 71,50 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | RSUD Bayu Asih |
| | 1 Persentase Pencapaian Target SPM Pelayanan Medis | Persen | 60,00 | 88,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 2 Tingkat Mutu Keperawatan | Persen | 60,00 | 75,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 3 Cakupan pelayanan penunjang | Persen | 60,00 | 75,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| Program Penguatan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | RSUD Bayu Asih |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|--------|-------|--------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi | Persen | 80,00 | 85,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana rumah sakit | Persen | 70,00 | 75,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 4 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 5 Persentase ketersediaan data kinerja OPD | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | 6 Persentase pemenuhan kebutuhan operasional | Persen | 90,00 | 90,00 | - | - | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | RSUD Bayu Asih |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | RSUD Bayu Asih |
| | 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran | Persen | - | - | 20,00 | 100,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 3 Penilaian Akreditasi Rumah Sakit | Opini | - | - | Madya | Madya | RSUD Bayu Asih |
| | 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | - | - | 75,00 | 81,94 | RSUD Bayu Asih |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | RSUD Bayu Asih |
| | 1 Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis | Persen | - | - | 75,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 2 Tingkat Mutu Keperawatan | Persen | - | - | 75,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 3 Cakupan Pelyanan Penunjang | Persen | - | - | 75,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 4 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit | Persen | - | - | 85,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 5 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Persen | - | - | 80,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 6 Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan | Persen | - | - | 75,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |
| | 7 Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | - | 75,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|--|--------|-----------|------|-------|-------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 8 Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional | Persen | - | - | 78,00 | 75,00 | RSUD Bayu Asih |

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 34,00 | - | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program pembangunan jalan dan jembatan | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 1 Panjang Ruas Jalan Baru | Km | 1,00 | 0,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Jumlah Jembatan Baru | Titik | 1,00 | 1,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun | Persen | - | 13,69 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan | Persen | - | 3,76 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan | Persen | - | 2,86 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi | Persen | 10,00 | 0,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program pembangunan turap/talud/bronjong | Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi | Persen | - | 6,25 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan) | Persen | 87,80 | 87,88 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan | Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan | Persen | 72,85 | 18,20 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program tanggap darurat jalan dan jembatan | Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan | Persen | 100,00 | 95,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan | Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | Persen | - | 25,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi | Persen | 44,40 | 5,55 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi | Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi | Persen | 34,22 | 32,56 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan | Km | 19,74 | - | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan | Unit | - | - | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Penelitian dan Perancangan Jalan dan Jembatan | Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan | Persen | 97,11 | 20,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi | Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan | Persen | 20,00 | 20,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong | Persen | - | 4,18 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pembangunan Jaringan Irigasi | Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun | Persen | - | 3,10 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi | Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan | Persen | - | 25,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik | Persen | - | 32,56 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pengujian Bahan dan Alat Laboratorium Teknik | Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik | Persen | - | 23,00 | - | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran | Persen | - | - | 80,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 1 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi | Persen | - | - | 6,25 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi | Persen | - | - | 35,06 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan | Persen | - | - | 22,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun | Persen | - | - | 0,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan | Persen | - | - | 0,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi | Persen | - | - | 25,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong | Persen | - | - | 25,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| Program Penyelenggaraan Jalan | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|---|--------|-----------|------|-------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Panjang Ruas Jalan Baru | Km | - | - | 0,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 2 Jumlah Jembatan Baru | Titik | - | - | 0,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun | Persen | - | - | 15,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan | Persen | - | - | 10,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan | Persen | - | - | 1,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan) | Persen | - | - | 85,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan | Persen | - | - | 18,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan | Persen | - | - | 90,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | Persen | - | - | 25,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 10 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi | Persen | - | - | 5,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 11 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan | Km | - | - | 0,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 12 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan | Unit | - | - | 0,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 13 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan | Persen | - | - | 20,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 14 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik | Persen | - | - | 25,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | 15 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik | Persen | - | - | 25,00 | - | Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan |
| | | | | | | | |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|------------------------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku | Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun (Unit) | Unit | - | 0,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (%) | Persen | - | 18,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Daerah | Jumlah Perangkat Lunak | 1,00 | 0,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Laporan Status Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan (Laporan) | Laporan | 1,00 | 12,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 3 Persentase Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Tata Ruang (%) | Persen | 100,00 | 70,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 4 Persentase Perusahaan Pemegang izin Pemanfaatan Ruang yang dibina/ ditinjau | Persen | 80,00 | 70,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Jumlah Permohonan Rencana Tapak Yang Dikaji | Dokumen | 60,00 | 46,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|--------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun | Unit | 1,00 | 4,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun (Km) | Km | 1,59 | 2,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan | Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Meter | 987,50 | 175,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | A | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 100,0 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun | Unit | - | - | 20,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun | Km | - | - | 0,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 3 Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun | Unit | - | - | 20,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Cakupan Sarana Pengolahan Sampah Yang Memadai | Persen | - | - | 0,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki | Unit | - | - | 19,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Meter | - | - | 150,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengembangan Permukiman | Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun | Unit | - | - | 15,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penataan Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan | Unit | - | - | 220,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun | Unit | - | - | 7,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peserta Pembinaan | % | - | - | 57,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah | % | - | - | 100,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | | | | | | | |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | - | BB | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran | Persen | - | - | - | 84,15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 1 Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi | Persen | - | - | - | 5,95 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 2 Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Secara Partisipatif yang berfungsi | Persen | - | - | - | 35,75 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 3 Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan | Persen | - | - | - | 19,04 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 4 Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun | Persen | - | - | - | 2,95 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 5 Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan | Persen | - | - | - | 23,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 1 Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi | Persen | - | - | - | 24,12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 2 Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong | Persen | - | - | - | 24,12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penataan Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan | Unit | - | - | - | 1.905,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun | Unit | - | - | - | 14,42 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penyelenggaraan Jalan | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 1 Panjang Ruas Jalan Baru | Km | - | - | - | 1,14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 2 Jumlah Jembatan Baru | Titik | - | - | - | 0,88 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 3 Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun | Persen | - | - | - | 13,47 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 4 Persentase Jalan yang ditingkatkan | Persen | - | - | - | 7,73 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 5 Persentase Jembatan yang ditingkatkan | Persen | - | - | - | 1,26 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|------|-------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6 Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan) | Persen | - | - | - | 75,32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 7 Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan | Persen | - | - | - | 16,03 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 8 Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan | Persen | - | - | - | 83,67 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 9 Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | Persen | - | - | - | 22,02 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 10 Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang berfungsi | Persen | - | - | - | 5,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 11 Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan | Km | - | - | - | 1,14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 12 Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan | Unit | - | - | - | 0,88 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 13 Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan | Persen | - | - | - | 20,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 14 Persentase Pengawasan dan Pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilaksanakan dengan baik | Persen | - | - | - | 33,08 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | 15 Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik | Persen | - | - | - | 25,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Peserta Pembinaan | % | - | - | - | 64,32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah | % | - | - | - | 10,45 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.34

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|---------------|-----------|----------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengembangan Perumahan | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki | Unit | 1.840,00 | 1.400,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Jumlah Pendirian Kawasan Rusunawa Yang Difasilitasi | Jumlah Menara | 2,00 | 2,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Lingkungan Sehat Perumahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki (Unit) | Unit | 1,00 | 2,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/Permukiman | Kelompok Masyarakat Yang Dibentuk dan Dibina | BKM | 48,00 | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Luas Areal TPU Yang Dikelola Pemda | Ha | 4,20 | 8,40 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Keselamatan Gedung dan Bangunan | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan | Persen | 20,73 | 30,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Frekuensi Inspeksi Keselamatan Gedung dan Bangunan (Hari) | Hari | 5,00 | 3,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Dibangun/Diperbaiki | Km | 15,79 | 4,36 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) | Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik | Unit | 3.801,00 | 3.200,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|----------|-------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pemeliharaan Ornamen Kota | Persentase Ornamen Kota Yang Dipelihara | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah RTH Yang Dibangun/ Dipelihara (Lokasi) | Lokasi | 68,00 | 33,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pembangunan dan Penataan Ruang Publik | Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun. | Unit | 15,00 | 15,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pengelolaan Ornamen Kota dan Reklame | Persentase Ornamen Kota dan Reklame Yang Dikelola dan Dipelihara | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Pembangunan dan Pengelolaan Lampu Hias | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Jumlah Lampu Hias Dalam Kondisi Baik | Unit | 1.500,00 | 811,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Jumlah Lampu Hias dan Penerangan Jalan Umum Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis | Unit | - | 1.810,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | | | | | | | |
| Program Kawasan Permukiman | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan | Ha | - | - | 42,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan | Ha | - | - | 15,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan | Unit | - | - | 2,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | | | | | | | |
| Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | - | A | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | - | 100,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program Pengembangan Perumahan | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki | Unit | - | - | - | 710,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program Kawasan Permukiman | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan | Ha | - | - | - | 2,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Sesuai Dengan Surat Keputusan | Ha | - | - | - | 2,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana | Unit | - | - | - | 14,00 | Dinas Perumahan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|---------|-----------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Unitilitas Penunjang Perumahan | | | | | | Kawasan Permukiman |
| Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Dokumen | - | - | - | 0,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE dan Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 71,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Gedung/Bangunan Yang Memiliki Proteksi Kebakaran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Sosialisasi dan Pelatihan / Simulasi Yang Akan Dilaksanakan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Kebakaran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana DPKPB | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana | | | | | | Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Perawatan dan Pemeliharaan Asset Sarana dan Prasarana | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 4 Persentase Ketersediaan Data Kejadian Kebakaran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Data / Informasi tentang Informasi dan Resiko Bencana Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah / Legal | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Warga Negara Yang Terlatih di Kawasan Rawan Bencana | Persen | - | 9,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 4 Persentase Tersedianya Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persen | - | 10,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 5 Persentase Peralatan Perlindungan Terhadap Bencana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|-------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6 Persentase Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Kedaruratan dan Logistik | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Jumlah SDM Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan di Evakuasi Terhadap Kejadian Bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Kecepatan Response Time Kurang Dari 24 Jam Untuk Status Darurat Bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase dokumen penilaian kerusakan akibat bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase bangunan yang di rehabilitasi pasca bencana | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | A | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 95,00 | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Penanggulangan Bencana | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Persen | - | - | 97,94 | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persen | - | - | 84,54 | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | 3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persen | - | - | 95,70 | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persen | - | - | 96,95 | - | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
| | | | | | | | |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 65,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 80,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Pemeliharaan Trantibmas dan Penegakan Peraturan Daerah | Frekuensi Penertiban Trantibmas; Frekuensi Pengendalian Trantibmas dan Frekuensi Penertiban Trantibmas | Kali | 10 Kali; 45 Kali dan 65 Kali | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Trantibmas | Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas dan Jenis Sarana Prasarana Penanganan Kantribmas | Jenis | 4 Jenis dan 2 Jenis | - | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1 Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum | Persen | - | 100,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani | Persen | - | 100,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|-------|--------|--------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Penertiban Trantibmas | Kegiatan | - | 34,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah | Kegiatan | - | 8,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada | Persen | - | 48,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibmas | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Diklat/Bimtek Satpol PP Yang Diselenggarakan | Persen | - | 85,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Persentase Anggota Satpol PP Yang Dibina | Persen | - | 85,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Perlindungan Masyarakat | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina | Persen | - | 20,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat | Kegiatan | - | 10,00 | - | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | BB | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 90,00 | 90,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 1 Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 2 Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 3 Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas | Kegiatan | - | - | 34,00 | 40,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 4 Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah | Kegiatan | - | - | 8,00 | 8,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 5 Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada | % | - | - | 60,00 | 60,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 6 Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek | Jumlah | - | - | 98,00 | 98,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|------|-------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7 Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS) | % | - | - | 60,00 | 80,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 8 Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS) | Kali | - | - | 48,00 | 48,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 9 Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina | % | - | - | 20,00 | 20,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | 10 Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat | Kegiatan | - | - | 10,00 | 10,00 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | | |
| Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | - | BB | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | - | 82,25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Program Penanggulangan Bencana | | | | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1 Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Persen | - | - | - | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 2 Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persen | - | - | - | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 3 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persen | - | - | - | 100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | | |
| Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | - | BB | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | - | 92,14 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Persen | - | - | - | 95,53 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Sosial

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Sosial yakni Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sosial | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 5 Persentase Perencanaan dan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|---------|-----------|--------|--------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Yang Diberdayakan | Persen | 85,00 | 82,03 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persen | 93,68 | 40,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pembinaan Anak Terlantar | Jumlah Anak terlantar yang dibina | Orang | 14,00 | 40,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina | Lembaga | 24,00 | 31,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | B | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 88,60 | 90,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pemberdayaan Sosial | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina | Lembaga | - | - | 26,00 | 29,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Jumlah migran yang terfasilitasi | persen | - | - | 0,00 | 10,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persen | - | - | 94,23 | 99,87 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 1 Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina | Persen | - | - | 206,00 | 25,06 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2 Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah | Persen | - | - | 87,00 | 90,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|----------|-----------|------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayaankan | | | | | | Perlindungan Anak |
| Program Penanganan Bencana | Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana | Desa/Kel | - | - | 99,77 | 90,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan | Persen | - | - | 88,00 | 85,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja, yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Tenaga Kerja yakni Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tenaga Kerja | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|-------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 1 Persentase Pelatihan Berbasis Kompetensi | Persen | 60,65 | 68,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 2 Persentase Pelatihan Berbasis Masyarakat | Persen | 50,00 | 8,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan | Persen | 50,00 | 26,07 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | 50,00 | 66,67 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Pelatihan Kewirausahaan | Persen | 60,00 | 24,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | BB | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 32,87 | 86,25 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 1 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja | Orang | - | - | 70,16 | 95,00 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---------------------------------|---|--------|-----------|------|--------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil | Orang | - | - | 0,00 | 54,87 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 1 Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan | Persen | - | - | 100,00 | 14,06 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | 2 Persentase Pelatihan Kewirausahaan | Persen | - | - | 0,00 | 14,06 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Hubungan Industrial | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | - | - | 100,00 | 55,45 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|-------------------------------|--------|-----------|-------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Penguatan Kelembagaan | Tingkat Penguatan Kelembagaan | Persen | 63,88 | 35,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pengarusutamaan Gender dan Anak | Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | Perlindungan Anak |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Persen | 86,82 | 70,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Persentase Peran serta Gender dalam Pembangunan | Persen | 78,00 | 81,00 | - | - | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | |
| Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan | Persen | - | - | 74,67 | 85,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Perlindungan Perempuan | Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persen | - | - | 80,84 | 90,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Persen | - | - | 80,00 | 90,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Tersedianya Data Gender Anak | Persen | - | - | 0,00 | 75,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Pemenuhan Hak Anak | Persen | - | - | 90,00 | 60,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak | Persen | - | - | 11,74 | 60,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Pangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pangan yakni Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pangan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Jumlah Lumbung Pangan Yang Terbangun | Unit | 1,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Terpenuhinya Kebutuhan Beras | Ton | 130.970,06 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Umbi-Umbian | Ton | 23.568,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 4 Terpenuhinya Kebutuhan Sayuran dan Buah | Ton | 182.632,80 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah | Persen | - | 123,07 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan | Persen | - | 135,60 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Persentase pengisian gudang cadangan pangan | Persen | - | 80,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | BB | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan | Persen | - | - | 75,00 | 80,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Ketersediaan Beras Terhadap Kebutuhan Beras Daerah | Persen | - | - | 167,92 | 163,66 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Ketersediaan Bahan Makanan | Persen | - | - | 181,69 | 170,38 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan kerawanan pangan | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Pertanahan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pertanahan, yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pertanahan yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pertanahan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|---------|-----------|--------|--------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pertanahan | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Persentase Konflik Pertanahan Milik Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan | Persen | 100,00 | 0,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penataan Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 1 Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik | Lokasi | 3,00 | 0,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | 2 Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Fasilitasi Administrasi Umum Pertanahan | Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik | Lokasi | 3,00 | - | - | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | | | | | | | |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi | Persen | - | - | 89,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi) | Lokasi | - | - | 100,00 | - | Dinas Tata Ruang dan Permukiman |
| | | | | | | | |
| Pertanahan | | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Pengelolaan Izin Lokasi | Jumlah Izin Lokasi Yang Direkomendasikan | Dokumen | - | - | - | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi | Persen | - | - | - | 77,80 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan | Jumlah Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Publik (Lokasi) | Lokasi | - | - | - | 16,68 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|------|-------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | | | | |
| Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Tahun | Lokasi | - | - | - | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penetapan Tanah Ulayat | Jumlah Penetapan Tanah Ulayat | Lokasi | - | - | - | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Pengelolaan Tanah Kosong | Jumlah Tanah Kosong yang di Kelola Oleh Pemerintah Daerah | Lokasi | - | - | - | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | Persentase Izin Lokasi Membuka Tanah Yang Direkomendasikan | Persen | - | - | - | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Program Penatagunaan Tanah | Persentase Konflik Perpenatagunaan Yang Terfasilitasi | Persen | - | - | - | 0,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|------|-------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lingkungan Hidup | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|------------|-----------|-------|------|------|------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 73,91 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 99,04 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 96,69 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 95,47 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 80,68 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 69,60 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Jumlah Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah | Unit | 63,00 | 69,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 Jumlah Target Pembinaan | perusahaan | 30,00 | 30,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2 Jumlah Dokumen Amdal | dokumen | 16,00 | 1,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase Sumber Daya Alam (Mata Air) Yang Terjaga dan Terlindungi | Persen | 25,00 | 25,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 Jumlah Perusahaan Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPERDA) | perusahaan | 24,00 | 24,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2 Jumlah Titik Lokasi Pengelolaan DAS Citarum | Lokasi | 2,00 | 0,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------------------------|-----------|-------|--------|--------|------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3 Jumlah Titik Pantau Kualitas Air | Titik | 20,00 | 74,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 4 Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara | Titik | 23,00 | 4,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Penyebaran dan Penegakkan Hukum Lingkungan | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta | Kali | 6,00 | 6,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2 Penerimaan Pengaduan | Kasus | 4,00 | 0,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 3 Aplikasi SIPP | Buah | 1,00 | 0,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 4 Adipura | Titik pantau (Kecamatan) | 3,00 | 0,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 5 Jumlah Sosialisasi Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata | lokasi (sekolah) | 3,00 | 50,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah | Jumlah Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi | jenis | 4,00 | 5,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengelolaan Pelayanan Sedot Tinja | Adipura | Titik pantau | 3,00 | 0,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim | Persen | - | 25,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengendalian Lingkungan Hidup | Jumlah Peserta Kegiatan PROPERDA | Perusahaan | - | 24,00 | - | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | BB | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup | % | - | - | 99,55 | 72,10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim | % | - | - | 22,07 | 66,05 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun | Dokumen | - | - | 1,00 | 0,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Target Pembinaan | % | - | - | 63,04 | 70,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|-------|--------|------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta | Lokasi | - | - | 6,00 | 6,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani | % | - | - | 30,29 | 56,07 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan yang ditangani | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| Program Pengelolaan Persampahan | Persentase Layanan Persampahan | % | - | - | 89,17 | 100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan : | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Tingkat Kesadaran Masyarakat | Persen | 50,00 | 95,60 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|-------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan | Persen | 85,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 3 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan | Persen | 75,00 | 85,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan | Persen | 50,00 | 85,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna | Persen | 50,00 | 85,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 3 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk | Persen | 50,00 | 85,00 | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 80,00 | 80,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Pendaftaran Penduduk | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan: | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik | % | - | - | 90,00 | 100,05 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan KIA | % | - | - | 90,00 | 46,98 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Tingkat Kesadaran Masyarakat | % | - | - | 90,00 | 95,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|-------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pencatatan Sipil | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil : | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan Akta Kematian | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | - Tingkat kepemilikan Akta Perceraian | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 1 Tingkat Akurasi Data Kependudukan | % | - | - | 90,00 | 95,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2 Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 3 Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan | % | - | - | 90,00 | 90,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 4 Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan | % | - | - | 90,00 | 100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 5 Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna | % | - | - | 90,00 | 90,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 6 Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk | % | - | - | 90,00 | 80,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 95,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 90,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 93,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Dibina | Buah | 192,00 | - | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|----------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pemberdayaan Ekonomi Desa | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1 Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM | Desa | 28,00 | 35,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM | Desa | 132,00 | 140,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 3 Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM | Desa | 23,00 | 8,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 4 Persentase Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas) | Persen | 20,00 | 40,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 5 Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan Yang Dilaksanakan di Tiap Desa | Kegiatan | 20,00 | 45,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 6 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina (LPM) | Persen | 20,00 | 40,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 7 Jumlah Posyandu Yang Dibina | Unit | 1.031,00 | 1.031,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa | Persen | 7,00 | - | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1 Jumlah Bumdes Yang Dibina | Bumdes | 175,00 | 172,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Jumlah Potensi/Inovasi Desa Yang Dikembangkan | Jenis | 230,00 | 120,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1 Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa | Orang | 183,00 | 90,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Bagi Kades, Perangkat Desa dan Banmusdes | Orang | 300,00 | 366,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | Persentase Kawasan Pedesaan Yang Dibina | Persen | 42,00 | 57,00 | - | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | | |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|-------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | BB | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 78,66 | 90,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Penataan Desa | Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa | Persen | - | - | 87,18 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Peningkatan Kerjasama Desa | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1 Persentase Kerjasama Desa yang terealisasi | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Persentase Pembangunan Kawasan Pedesaan yang dibentuk | Persen | - | - | 61,89 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1. Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa | Persen | - | - | 64,54 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2 Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa | Persen | - | - | 80,76 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 1. Persentase Pemberdayaan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Persen | - | - | 72,16 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | 2. Persentase Pengembangan Teknologi dan Inovasi Produk Unggulan Desa | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Administrasi Perkantoran | | | | | | Keluarga Berencana |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Keluarga Berencana | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Ratio Akseptor KB | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Persentase Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) | Persen | 81,04 | 81,37 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Persentase KB Mandiri (Cakupan PUS Menjadi Peserta KB Aktif) | Persen | 45,01 | 45,02 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 4 Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | Orang | 7.095,00 | 42.600,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 5 Persentase Jumlah Peserta KB Yang Dilayani | Persen | 31,00 | 32,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 6 Peserta KB Aktif Yang Drop Out Selama Satu Tahun | Persen | 9,99 | 9,98 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 7 Persentase PUS Muda Usia Rendah Cakupan PUS Dibawah Usia 20 th | Persen | 1,99 | 1,98 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 | Persen | 40,00 | 45,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) | Poin | 33,00 | 30,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita | Tahun | 40,00 | 45,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | Persen | 33,00 | 30,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program pelayanan kontrasepsi | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Persentase Peserta KB Aktif Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 35,00 | 35,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Kontrasepsi (Alekton) | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Persentase Jumlah PPKBD dan Sub. PPKBD (1500) | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Desa/Kelurahan | Rasio | 1 : 1 | 1 : 1 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Ratio Pembantu Pembina Kel Berencana (PPKBD) | Rasio | 1 : 1 | 1 : 1 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 4 Persentase Data Kependudukan Kelurga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 5 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS | Jumlah Remaja Yang Dibina | Orang | 150,00 | - | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | Kader | 576,00 | - | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Cakupan Kampung KB | Persen | 45,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|----------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Keluarga Berencana |
| | 2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB | Persen | 37,5 | 43,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Persentase Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS | Persen | 60,00 | 70,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Orang | 562,80 | 591,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Orang | 568,05 | 591,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 3 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Orang | 562,80 | 591,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 4 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB | PUS | 562,80 | 591,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 5 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | Kelompok | 562,80 | 591,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 6 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | Keluarga | 562,80 | 591,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pengendalian Penduduk | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | Persen | 65,00 | 100,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | Persen | 70,00 | 75,00 | - | - | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|-------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Keluarga Berencana |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran | persen | - | - | 87,40 | 70,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pengendalian Penduduk | | | | | | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 1 Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | persen | - | - | 86,90 | 100,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | persen | - | - | 86,90 | 100,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | persen | - | - | 82,66 | 100,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga | persen | - | - | 97,10 | 100,00 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

9. Perhubungan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan yakni Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perhubungan | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 94,05 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 94,81 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Jumlah Trayek Angkutan Umum | Trayek | 50,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 2 Jumlah Armada Angkutan Umum | Unit | 1.378,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum | Persen | 4,00 | 50,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 2 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten | Jumlah | 451,00 | 120,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 3 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Persen | 2,00 | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|------------|-----------|--------|-------|-------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Yang Direhabilitasi dan Terpelihara | | | | | | |
| | 4 Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan penyebrangan | Persen | - | 30,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR | Persen | 105,00 | 165,92 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 2 Jumlah Dokumen Lalu Lintas | Jumlah | 1,00 | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah | Unit | 243,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 2 Panjang Marka Jalan | Meter | 428,45 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 3 Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas | Hari/Tahun | 28,00 | - | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Persentase Layanan Angkutan Darat | Persen | - | 74,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | 2 Jumlah Dokumen Lalu lintas | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas | Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan | Jumlah | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek | Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran | Jumlah Sarana Prasarana Parkir | Jumlah | - | 100,00 | - | - | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | BB | Dinas Perhubungan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 85,89 | 81,57 | Dinas Perhubungan |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Presentase Prasarana Perlengkapan lalulintas dan Angkutan jalan | Persen | - | - | 95,32 | 87,79 | Dinas Perhubungan |
| Program Pengelolaan Pelayanan | Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan penyebrangan | Persen | - | - | 79,89 | 84,57 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

10. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Komunikasi dan Informatika | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 52,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 87,60 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 85,50 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 89,70 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 99,20 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 0,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|----------|-----------|-------|------|------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan | Persen | 95,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah | Persen | 90,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Persentase Layanan Informasi Publik | Persen | 90,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 4 Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah | Persen | 95,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengembangan Aplikasi Telematika | Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika | Kegiatan | 8,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi | Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi | Kegiatan | 8,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan | Persen | - | 88,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah | Persen | - | 93,10 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan | Persen | - | 97,20 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani | Persen | - | 81,10 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | Persen | - | 93,20 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengembangan Teknologi Informatika | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika | Persen | - | 90,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City | Persen | - | 70,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik | Persen | - | 70,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi | Persen | - | 90,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengembangan Aplikasi Informatika | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan | Persen | - | 99,70 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi | Persen | - | 0,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum | Persen | - | 99,70 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | BB | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 90,00 | 93,53 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan | Persen | - | - | 88,30 | 99,72 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah | Persen | - | - | 99,00 | 97,81 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan | Persen | - | - | 92,40 | 98,80 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 4 Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani | Persen | - | - | 98,90 | 82,30 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | Persen | - | - | 98,40 | 98,50 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika | Persen | - | - | 98,30 | 97,58 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City | Persen | - | - | 94,90 | 95,50 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik | Persen | - | - | 91,00 | 95,60 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 4 Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi | Persen | - | - | 97,60 | 98,40 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 5 Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan | Persen | - | - | 0,00 | 98,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|--|--------|-----------|------|-------|-------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6 Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi | Persen | - | - | 0,00 | 99,70 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 7 Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum | Persen | - | - | 85,50 | 35,36 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yakni Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | Jumlah UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi | Unit | 8.454,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional | Unit | 20,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses | Unit | 15,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kredit Perbankan dan Non Perbankan | | | | | | Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar | Unit | 15,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD | Unit | 105,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi Yang Ada Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat | Persen | 5,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi | Persentase Koperasi Yang Bermitra Dengan Lembaga Perbankan | Persen | 25,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Daya Saing Koperasi | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh Koperasi | Even | - | 0,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Bantuan | Unit | - | 8,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Koperasi Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya | Unit | - | 60,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Jumlah Koperasi Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan | Unit | - | 50,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penguatan Kelembagaan Koperasi | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Laju Peningkatan Koperasi Sehat | Persen | - | 5,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Laju Peningkatan Koperasi Aktif | Persen | - | 10,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Laju Peningkatan Koperasi Bersertifikat | Persen | - | 15,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Laju Peningkatan Koperasi Melakukan Audit Melalui Akuntan Publik | Persen | - | 5,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Laju Peningkatan Koperasi Melaksanakan RAT | Persen | - | 7,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Daya Saing UMKM | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM | Even | - | 0,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan | Unit | - | 100,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya | Unit | - | 24,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan | Unit | - | 0,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Kewirausahaan | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Persentase UMKM Yang Terbina | Persen | - | 10,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk | Unit | - | 30,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan | Unit | - | 30,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 90,57 | 70,87 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Jumlah Koperasi Yang Diawasi | Unit | - | - | 0,00 | 150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi | Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya | Unit | - | - | 80,00 | 150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian | Unit | - | - | 150,00 | 150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|------|--------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Jumlah Koperasi Yang Dapat Bersaing Dengan Pelaku Usaha Lainnya | Unit | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi | UMKM | - | - | 60,00 | 60,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional | UMKM | - | - | 30,00 | 40,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan | UMKM | - | - | 100,00 | 150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Persentase UMKM Yang Terbina | UMKM | - | - | 60,00 | 60,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk | UMKM | - | - | 30,00 | 40,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan UMKM | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan | UMKM | - | - | 30,00 | 50,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar | UMKM | - | - | 25,00 | 10,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD | UMKM | - | - | 20,00 | 20,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UKKM | UMKM | - | - | 2,00 | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan | UMKM | - | - | 0,00 | 15,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 6 Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya | UMKM | - | - | 30,00 | 20,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 7 Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan | UMKM | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|-------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian |

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

12. Penanaman Modal

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal yakni Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Penanaman Modal | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 93,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 90,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 85,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 85,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 90,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 1 Jumlah Buku Promosi Potensi Unggulan Daerah | Set | 1,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Jumlah Buku Peluang Potensi Investasi | Set | 1,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 3 Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri | Event | 3,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala | Persen | 90,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat | Jumlah | 1,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Persen | 10,16 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 80,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 3 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan | Persen | 95,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 4 Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 5 Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Jumlah Buku Promosi Investasi | Buku | - | 1,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi | Event | - | 1,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Perbaikan Iklim Investasi | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dimonitoring Secara Berkala | | | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 3 Persentase Pengaduan Perizinan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 4 Peningkatan Nilai IKM | Persen | - | 85,59 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu | Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan | Persen | - | 80,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi | Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | A | A | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 93,00 | 95,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Jumlah Minat Penanaman Modal | Investor | - | - | 305,00 | 176,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan | Event | - | - | 5,00 | 7,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 1 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan | % | - | - | 100,00 | 95,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|-------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | - | - | 87,78 | 92,38 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala | % | - | - | 89,00 | 100,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal | Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan | % | - | - | 99,00 | 100,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga yakni Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 93,25 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 93,25 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 93,25 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 93,25 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 93,25 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 93,25 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 10,56 | 29,83 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 19,61 | 20,00 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | 4,73 | 11,00 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pembinaan Kepemudaan | Cakupan Pembinaan Kepemudaan | Persen | 20,00 | 20,00 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pembangunan dan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan | Persen | - | 18,88 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program pembangunan dan / Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan | Persen Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan | Persen | 20,00 | 19,59 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kemitraan | Cakupan Wirausaha Muda | Persen | 20,00 | 40,00 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pembangunan dan/Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga | Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga | Persen | 64,29 | 54,00 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | B | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 87,01 | 82,43 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | - | - | 39,00 | 84,86 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Cakupan Pembinaan Kepemudaan | Persen | - | - | 19,50 | 19,97 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 Cakupan Wirausaha Muda | Persen | - | - | 48,75 | 59,90 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Cakupan Pembinaan Olahraga; | Persen | - | - | 19,46 | 22,26 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Cakupan Pembinaan Atlet Muda; | Persen | - | - | 10,92 | 12,30 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3 Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga | Persen | - | - | 63,82 | 60,83 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan | Persen | - | - | 0,00 | 6,83 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

14. Statistik

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Statistik yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.50

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Statistik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|---------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Statistik | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Persandian dan Statistik | Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun | Dokumen | 5,00 | - | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 100,00 | 97,70 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|---------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan | Dokumen | 100,00 | 96,00 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah | Persen | - | - | 96,80 | 99,56 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan | Persen | - | - | 75,00 | 82,50 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

15. Persandian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Persandian yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persandian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Persandian | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Pengembangan Persandian Daerah | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) | Persen | 100,00 | 99,86 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) | Persen | 100,00 | 99,86 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP) | Persen | 100,00 | 99,50 | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 1 Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) | Persen | - | - | 96,70 | 99,70 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2 Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) | Persen | - | - | 0,00 | 99,70 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 3 Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP) | Persen | - | - | 96,70 | 99,80 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

16. Kebudayaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.52

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kebudayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|----------|-----------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kebudayaan | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina | Kelompok | 3,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pelestarian Budaya | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Persen | 88,89 | 88,53 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | Persen | 50,00 | 49,80 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Persentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina | Persen | 50,00 | 49,70 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti | Persen | 50,00 | 49,70 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 Persentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan | Persen | 36,00 | 35,78 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kebudayaan | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina | Persen | - | - | 49,76 | 54,58 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti | Persen | - | - | 49,76 | 49,62 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan | Persen | - | - | 35,83 | 35,73 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina | kelompok | - | - | 3,00 | 2,94 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pembinaan Sejarah | Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan | persen | - | - | 33,21 | 49,92 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Persen | - | - | 99,60 | 99,86 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu | Persen | - | - | 49,80 | 59,93 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengelolaan Permuseuman | Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan | Persen | - | - | 19,85 | 19,87 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

17. Perpustakaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perpustakaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|------------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perpustakaan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | Orang | 244.820,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun | Orang | 15.239,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling | Titik | 156,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Jumlah Perpustakaan Binaan | Unit | 417,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Jumlah Buku Perpustakaan | Buah | 4.134,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pengembangan dan Pelestarian Perpustakaan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan | Persen | 5,00 | 19,45 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Persentase Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta | Persen | 100,00 | 0,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum dan Sekolah | Persen | 26,00 | 8,30 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca di Ruang Publik | Persen | 20,00 | 41,17 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan | Persen | 0,06 | 0,11 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Peningkatan Layanan Perpustakaan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Laju Pengunjung Perpustakaan | Persen | 4,90 | 8,32 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Laju Anggota Perpustakaan | Persen | 22,90 | 2,63 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan | Persen | 5,00 | 24,58 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca | Persen | 5,00 | 16,89 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | 49,00 | 64,43 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|--------|-------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | 0,00 | 0,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 7 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca | Persen | 19,80 | 57,61 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 8 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan | Persen | 4,00 | 30,59 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | A | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 100,00 | 93,53 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan | Persen | - | - | 7,90 | 14,13 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah | Persen | - | - | - | 29,30 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik | Persen | - | - | 0,00 | 4,78 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan | Persen | - | - | 0,15 | 0,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Laju Pengunjung Perpustakaan | Persen | - | - | 8,80 | 7,30 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 6 Laju Anggota Perpustakaan | Persen | - | - | 33,25 | 8,73 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 7 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan | Persen | - | - | 7,90 | 5,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 8 Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca | Persen | - | - | 3,98 | 2,90 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 9 Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | - | - | 12,40 | 40,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 10 Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | - | - | 49,80 | 0,10 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 11 Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca | Persen | - | - | 10,14 | 17,68 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 12 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan | Persen | - | - | 5,00 | 0,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|--------|-------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta | Persen | - | - | 100,00 | 99,90 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

18. Kearsipan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kearsipan yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kearsipan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kearsipan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kearsipan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|------------------|-----------|--------|------|------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | 42,00 | 40,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | 63,00 | 63,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 75,00 | 73,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | 80,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | 80,00 | 100,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah | Perangkat Daerah | 43,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Persentase Akuisisi Arsip Daerah | Persen | 96,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Jumlah Depo Arsip Yang Mendapatkan Fumigasi dan Anti Rayap | Unit | 4,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Jumlah Kegiatan Pembinaan Penataan Kearsipan Daerah | Kegiatan | 2,00 | - | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kearsipan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD | Persen | 100,00 | 0,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis | Persen | 100,00 | 20,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis | Persen | 1,75 | 2,60 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan | Persen | 22,00 | 0,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan | Persen | 22,90 | 6,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib | Persen | 26,10 | 15,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|--------|----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Persentase Arsip Aktif, In Aktif dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar: | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | - Arsip Aktif | Persen | 20,00 | 20,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | - Arsip In Aktif | Persen | 20,00 | 37,80 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | - Arsip Vital | Persen | 20,00 | 6,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Persentase Penyusutan Arsip | Persen | 20,00 | 6,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan | Persen | 70,00 | 0,00 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis | Persen | 19,99 | 19,99 | - | - | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Pengelolaan Arsip | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Persentase Pembinaan Kearsipan OPD | Persen | - | - | 50,00 | 100,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Tingkat Penyelamatan Arsip Statis | Persen | - | - | 33,04 | 100,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Tingkat Pelestarian Arsip Statis | Persen | - | - | 1,75 | 1,75 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan | Persen | - | - | 2,67 | 9,35 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 1 Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib | Persen | - | - | 28,57 | 39,10 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 2 Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan | Persen | - | - | 27,00 | 27,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 3 Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar: | | | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | - Arsip Aktif | Persen | - | - | 20,00 | 20,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | - Arsip Inaktif | Persen | - | - | 5,28 | 20,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | - Arsip Vital | Persen | - | - | 20,00 | 7,23 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 4 Persentase Penyusutan Arsip | Persen | - | - | 9,50 | 20,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 5 Indek Kepuasan Masyarakat (IkM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan | Persen | - | - | 73,00 | 75,00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | 6 Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis | Persen | - | - | 19,99 | 19,99 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Perternakan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yakni Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|---------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kelautan dan Perikanan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|----------------|----------------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Prasarana Kantor | | | | | | |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan | Ekor | 1.000,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan | Ekor | 75.000,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu | Kegiatan | 1,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan | Kelompok | 118,00 | 121,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Produksi Benih Ikan UPR | Ekor | 582.550.000,00 | 741.649.000,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Produksi Ikan Konsumsi | Ton | 93.286,70 | 108.661,04 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Produksi Ikan Hias | Ekor | 95.880,00 | 330.000,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|-----------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5 Produksi Benih UPTD BBI | Ekor | 6.323.494,00 | 6.650.000,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 6 Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan | Orang | 11.668,00 | 9.190,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 7 Luas Lahan Budidaya yang Disertifikasi | Hektar | 8,70 | 4,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan (Ton) | Ton | 1.183,59 | 1.272,50 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan | Ekor | 350.000,00 | 870.000,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap | Kelompok | 52,00 | 48,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Kawasan Perairan Umum Yang Dikelola | Jenis | 3,00 | 3,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang Dikelola | Kecamatan | 17,00 | 17,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah KJA | Petak | 45.073,00 | 42.562,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Produksi Ikan KJA | Ton | 91.529,63 | 106.833,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (Unit) | Unit | 100,00 | 93,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Produksi Olahan Produk | Ton | 1.037,15 | 763,72 | - | - | Dinas Perikanan dan |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|----------------|------------------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Perikanan (ton) | | | | | | Peternakan |
| | 3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (Kelompok) | kelompok | 19,00 | 14,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Jumlah Unit Pemasaran Hasil Perikanan (Unit) | Unit | 1.170,00 | 763,72 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | BB | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 100,00 | 84,79 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Produksi Ikan Hasil Tangkapan | Ton | - | - | 336,80 | 1.470,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking) | Ekor | - | - | 954.700,00 | 100.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina | Kelompok | - | - | 13,00 | 50,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Poduksi Ikan Konsumsi | Ton | - | - | 78.590,58 | 108.715,52 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Produksi Benih Ikan UPR | Ekor | - | - | 554.013.000,00 | 1.111.677.788,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Produksi Benih Ikan BBI | Ekor | - | - | 6.630.833,00 | 7.056.667,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Produksi Ikan Hias | Ekor | - | - | 239.090,00 | 520.100,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|------------|-----------|------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina | Kelompok | - | - | 30,00 | 190,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya | Kecamatan | - | - | 5,00 | 17,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Angka Konsumsi Ikan | kg/kap/t h | - | - | 35,81 | 36,20 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Produksi Olahan Produk Perikanan | Ton | - | - | 250,00 | 320,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan | Kelompok | - | - | 11,00 | 14,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Unit | - | - | 111,00 | 131,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |

Sumber: Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

2. Pariwisata

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pariwisata yakni Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pariwisata di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pariwisata | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Event Promosi Yang Diikuti / Diselenggarakan | Event | 8,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah ODTW Yang Ditata | ODTW | 4,00 | - | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Kepariwisataan | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Persentase Daerah Tujuan Wisata (DTW) Dikembangkan | Persen | - | 10,81 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ tTersertifikasi | Persen | - | 2,16 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ Tersertifikasi | Persen | - | 2,16 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Promosi Wisata Daerah | Persentase Event Promosi Yang Diikuti/Diselenggarakan | Persen | - | 29,67 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina | Persen | - | 39,63 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program pembangunan dan / Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata | Cakupan Pembangunan dan/atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata | Persen | - | 19,80 | - | - | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | | |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 1 Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan | Persen | - | - | 13,24 | 15,49 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 2 Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi | Persen | - | - | 4,41 | 4,42 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 3 Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkatkan/ Tersertifikasi | Persen | - | - | 4,41 | 4,42 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan | Persen | - | - | 39,52 | 39,53 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata | Persen | - | - | 39,74 | 39,83 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina | Persen | - | - | 39,42 | 39,69 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Pertanian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Perternakan. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Pertanian yakni Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--------------------------------------|--------|-----------|--------|------|------|---------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pertanian | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan | Orang | 645,00 | 650,00 | - | - | Dinas Perikanan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|-----------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pemasaran Hasil Peternakan | | | | | | Peternakan |
| | 2 jumlah Ternak Yang Diperjual Belikan di Pasar Hewan | Ekor | 67.908,00 | 60.917,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Keikutsertaan Dalam Pameran/Expo Produk Hasil Peternakan | Kegiatan | 3,00 | 0,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Produksi Peternakan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Budidaya Ternak Ruminansia Besar (Lokasi) | Lokasi | 5,00 | 6,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Budidaya Ternak Ruminansia Kecil | lokasi | 5,00 | 14,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Budidaya Ternak Unggas | Lokasi | 25,00 | 9,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Produksi Hasil Ternak | Persen | 7,24 | 0,97 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 5 Jumlah Akseptor IB (Ekor) | Ekor | 4.891,00 | 2.224,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 6 Jumlah Teknologi Yang Diterapkan | Jenis | 3,00 | 1,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 7 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam (Ekor) | Ekor | 1.363,00 | 1.207,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 8 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (Lokasi) | Lokasi | 2,00 | 4,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Akseptor IB | Ekor | 4.891,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Paket Teknologi Yang Diterapkan | Paket | 3,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak | | | | | | | Dinas Perikanan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|-----------|------------|-----------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Peternakan |
| | 1 Persentase Populasi Ternak Yang Divaksin | Persen | 80,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Presentase Populasi Ternak Yang Diobati | Persen | 20,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Sarana Kesehatan Hewan | Kegiatan | 1,00 | - | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Kasus Penyakit Hewan Menular | PHMS | - | 0,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Terjaminnya Keamanan PAH/HPAH | kecamatan | - | 17,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Ternak dan Hewan Kesayangan Yang Ditangani | ekor | - | 2.073,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Jumlah Ternak Ruminansia Yang Diperiksa Kesihatanya Sebelum Dipotong | ekor | - | 6.505,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Peternakan | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan | kelompok | - | 112,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Kelompok Peternakan Yang Mengikuti Lomba (Kelompok) | kelompok | - | 0,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Peternak Yang Mengikuti Magang/Studi Banding/Kursus/Pelatihan (Orang) | Orang | - | 50,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Hewani | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Ternak Unggas Yang Disebarkan (Ekor) | Ekor | 640,00 | 1.200,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Benih Ikan Yang Ditebarkan (Ekor) | Ekor | 120.000,00 | 65.000,00 | - | - | Dinas Perikanan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Peternakan |
| | 3 Penyediaan Daging, Telur dan Susu Perbaikan Gizi Masyarakat : | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | Daging (Ton) | Ton | - | 5,48 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | Telur (Ton) | Ton | 5,52 | 16,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | Susu (Liter) | Liter | 1.104,00 | 1.325,00 | - | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | | |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Produksi Hasil Ternak | Persen | - | - | 0,50 | 1,60 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Akseptor IB | Ekor | - | - | 2.867,00 | 2.733,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam | Ekor | - | - | 1.569,00 | 1.941,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Budidaya Ternak Ruminansia Unggul | Lokasi | - | - | 15,00 | 4,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 5 Budidaya Ternak Unggas Unggul | Lokasi | - | - | 14,00 | 2,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 6 Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) | Lokasi | - | - | 1,00 | 2,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 7 Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina | Orang | - | - | 30,00 | 30,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 8 Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina: | Produsen | - | - | 1,00 | 2,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis | Unit | - | - | 1,00 | 1,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan | | | | | | | Dinas Perikanan dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|-------------|-----------|------|-----------|------------|-----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | Peternakan |
| | 1 Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik | Persen | - | - | 70,25 | 71,20 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) | Kasus | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan | Kecamatan | - | - | 17,00 | 17,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 4 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) | Ekor | - | - | 10.030,00 | 102.068,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 5 Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) | Kecamatan | - | - | 17,00 | 17,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 6 Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) : | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | - Daging | Ton | - | - | 2,00 | 2,50 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | - Telur | Ton | - | - | 13,00 | 5,75 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | - Susu | Liter | - | - | 22,62 | 0,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| Program Penyuluhan Pertanian | | | | | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 1 Jumlah Kelompok Usaha Peternakan | Kelompok | - | - | 101,00 | 123,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 2 Jumlah Peternak Yang Terlatih | Orang | - | - | 100,00 | 65,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3 Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi | Penghargaan | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | | |
| Pertanian | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pangan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|----------|------------|--------|------|------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | dan Pertanian |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Persen | 100,00 | 70,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Kelompok Tani Yang Mendapat Bantuan | Persen | 30,92 | 20,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah Promosi Produk Pertanian /Perkebunan Yang Dilaksanakan | Kegiatan | 2,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Produksi Padi | Ton | 251.627,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Produksi Palawija | Ton | 30.484,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Produksi Teh | Ton | 4.955,00 | - | - | - | Dinas Pangan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|----------|------------|------|------|------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | dan Pertanian |
| | 4 Produksi Cengkeh | Ton | 483,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 5 Produksi Sayuran | Ton | 182.632,80 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 6 Produksi Buah-Buahan | Ton | 145.149,20 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti Oleh Penyuluh | Kegiatan | 30,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Kelompok | 450,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Pengembangan Agribisnis | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Penanaman Manggis | Pohon | 4.500,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Penanaman /Rehabilitasi The | Ha | 4,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Penanaman Cengkeh | Ha | 15,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 4 Penanaman Ubi Kayu | Ha | 1.087,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 5 Penanaman Pala | Ha | 350,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 6 Penerapan Pertanian Organik | Ha | 60,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Produktivitas Padi Sawah | Ku/Ha | 64,88 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Produktivitas Padi Ladang | Ton | 32,57 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Produktivitas Jagung | Ku/Ha | 56,20 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 4 Produktivitas Ubi Kayu | Ku/Ha | 193,00 | - | - | - | Dinas Pangan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | dan Pertanian |
| | 5 Produktivitas Cengkeh | Kg/Ha | 456,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 6 Produktivitas Teh | Kg/Ha | 1.507,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 7 Produktivitas Pala | Kg/Ha | 546,00 | - | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Laju Produksi Padi | Persen | - | 1,30 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Laju Produksi Kacangkacangan | Persen | - | 1,90 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Laju Produksi Umbi-umbian | Persen | - | 0,95 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 4 Persentase Kehilangan Hasil | Persen | - | 15,30 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian | Persen | - | 25,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Pengembangan Perbenihan Pertanian | Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | Persen | - | 93,33 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Pengendalian Serangan OPT | Persen | - | 2,20 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | Persen | - | 0,80 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan dan Holtikultura | Laju Produksi Perkebunan dan Holtikultura | Persen | - | 0,09 | - | - | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|------|------------|------------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian | Persen | - | - | 25,00 | 25,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Persen | - | - | 75,00 | 95,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 3 Produksi Padi | Ton | - | - | 270.538,00 | 260.425,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 4 Produksi Jagung | Ton | - | - | 3.017,00 | 1.238,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 5 Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu | Hektar | - | - | 50,00 | 50,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 6 Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya | kegiatan | - | - | 0,00 | 2,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 7 Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | Hektar | - | - | 1.018,00 | 315,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 8 Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan | Unit | - | - | 19,00 | 24,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 9 Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis | Hektar | - | - | 10,00 | 15,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 10 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura | Peserta | - | - | 15,00 | 30,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 11 Peningkatan Luas Tanaman Durian | Hektar | - | - | 20,00 | 9,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 12 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan | Hektar | - | - | 10,00 | 5,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 13 Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | Persen | - | - | 80,00 | 75,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Pengendalian Serangan OPT | Persen | - | - | 3,00 | 3,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | Persen | - | - | 3,00 | 3,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|------|--------|--------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Perizinan Usaha Pertanian | Laju Produksi Perkebunan dan Hortikultura | Persen | - | - | 0,11 | 0,23 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| Program Penyuluhan Pertanian | | | | | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 1 Persentase Ketersediaan Program Penyuluhan | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 2 Persentase Pelaku Pertanian Yang Terlatih | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Perdagangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perdagangan yakni Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perdagangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perdagangan | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|------------|-----------|--------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 75,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 75,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 75,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Konsumen Yang Dibina | Orang | 780,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Persentase Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen (BPSK) | Persen | 69,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Tera dan Tera Ulang Alat UTP | UTTP/Tahun | 780,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------------|-----------|-----------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 Jumlah Pengukuran BDKT | BDKT/Tahun | 40,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan Barang / Jasa | Pelaku Usaha | 300,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 6 Jumlah Komoditi Yang Diawasi Dalam Pengawasan Barang / Jasa | Komoditi | 60,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 7 Jumlah Komoditi Yang Diuji (Lab) Pertahun | Komoditi | 25,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Jumlah Peraturan (Regulasi) Tentang Pengelolaan, Penataan dan Pemetaan Lokasi Pasar Modern | Regulasi | 1,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor. | Even | - | 0,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Pelayanan Ekspor | Dokumen SKA | - | 12.000,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Terbangunnya Pasar Tradisional Yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern | Pasar | 9,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Tertatanya Penyempurnaan Pusat Perbelanjaan Pasar Jum'at | Pasar | 1,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang Representative | Unit | 6,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Tertatanya Sarana / Prasarana (Kios / Los / Jalan) Yang Representative di Pasar Tradisional | Unit | 6,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|----------|-------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Perlindungan Konsumen | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pembinaan | Orang | - | 200,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Fasilitas Pengaduan Konsumen | Kasus | - | 150,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Pelayanan Kemetrolgian | Unit | - | 1.500,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Jumlah Pengawasan Alat UTTP dan BDKT | Unit | - | 100,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat | Kegiatan | - | 12,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Direvitalisasi | Pasar | - | 1,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Persentase Capaian Target Retribusi Pasar | Persen | - | 77,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional | Orang | - | 219,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Kawasan | - | 2,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | |
| Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Terfasilitasnya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Dokumen | - | - | 20,00 | 700,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di | Unit | - | - | 0,00 | 3,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------------|-----------|------|-------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kabupaten Purwakarta | | | | | | dan Perindustrian |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor | Pelaku Usaha | - | - | 50,00 | 150,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Ekspor | Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta | Pelaku Usaha | - | - | 0,00 | 80,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen | Pelaku Usaha | - | - | 80,00 | 80,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta | Even | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Perindustrian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Perindustrian yakni Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.59

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perindustrian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perindustrian | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Industri Kecil Yang Memiliki SNI | Unit | 100,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Desain Kemasan Produksi | Unit | 120,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Industri Kecil Pangan Memiliki P-IRT | Unit | 180,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah GKM Industri Kecil Yang Terbentuk | Unit | 3,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Lokasi Sarana / Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil | Unit | 2,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Bahan Baku Yang Standard Hasil Litbang | Jenis | 10,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Percontohan Mesin Pengolahan Bahan Baku Keramik (TTG) | Unit | 2,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Percontohan Tungku Pembakaran Keramik Dengan Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan | Unit | 3,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penataan Struktur Industri | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Lahan Kawasan IKM | Ha | 1,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|-----------|-----------|-------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri yang Up To Date | Jenis | 10,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Bangunan Sarana dan Prasarana UPTD Litbang Keramik | Paket | 1,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar / Spesifik (Berkarakter) | Desain | 100,00 | - | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah P2WKSS Terbina | Desa | - | 1,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran Kerajinan Daerah | Kegiatan | - | 2,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah GKM Industri Yang Terbina | Unit | - | 1,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Jumlah lokasi Sarana/Prasarana Promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil | Unit | - | 1,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 5 Jumlah Desain Kemasan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) | Desain | - | 5,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 6 Jumlah Desain Produk Keramik Yang Standar/Spesifik | Desain | - | 20,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 7 Jumlah Data Potensi dan Informasi Industri | Buku | - | 0,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Keramik Yang Terbina | Pengrajin | - | 30,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|------------|-----------|----------|--------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 Jumlah Pengunjung ke Sentra Industri Keramik dan Gerabah | Orang | - | 1,645,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Hulu/Lembaga Keuangan | IKM | - | 1,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Pemanfaatan Potensi Sumberdaya IKM | IKM | - | 40,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Bahan Baku Yang Standar Produk IKM | Unit | - | 1,00 | - | - | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan | Orang | - | - | 240,00 | 100,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 2 Jumlah Desiminsasi | Orang | - | - | 0,00 | 160,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3 Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan | Buah | - | - | 9,00 | 25,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 4 Jumlah Perda | Buah | - | - | 0,00 | 0,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | 1 Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah | Unit Usaha | - | - | 20,00 | 30,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM | Unit Usaha | - | - | 60,00 | 80,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Pengembangan Diverifikasi Produk IKM | Buah | - | - | 4,00 | 7,00 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Transmigrasi

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pilihan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Transmigrasi yakni Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Transmigrasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|--------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Transmigrasi | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Transmigrasi Regional | Persentase Transmigran Yang Diberangkatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase transmigran yang diberangkatkan | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|------------------------------------|--------|-----------|------|------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Persentase transmigran yang dibina | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pendukung Sekretariat Daerah yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|-------|------|------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sekretariat Daerah | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | 85,00 | 80,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | 85,00 | 90,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 85,00 | 90,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 95,00 | 0,00 | - | - | Sekretariat Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|---------|-----------|--------|------|------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | - Perda | Persen | 88,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| | - Perbup | Persen | 74,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| | - Kepbup | Persen | 85,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Fasilitas Bantuan Hukum | Persen | 5,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum | Persen | 4,25 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | - Perda | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | - Perbup | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | - Kepbup | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Fasilitas Bantuan Hukum | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Sosialisasi Produk Hukum | Persen | - | 0,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jumlah Rangkaian Pelayanan Kedinasan KDH / WKDH | Bulan | 12,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Paket Pelelangan Pertahun | Paket | 250,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Dokumen Juknis Pengelolaan APBD | Dokumen | 1,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Tambahan Aparat Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa | Orang | 25,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah | Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Koordinasi Implementasi Pembangunan Ekonomi Daerah | Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah | Persen | - | 81,34 | - | - | Sekretariat Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|--------|------|------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah | Capaian Penataan OPD Sesuai Dengan Peraturan PerundangUndangan | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah | Jumlah Kajian/Analisis Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah | Kegiatan | 5,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | Pembinaan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah | Kegiatan | 1,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | Persentase OPD Yang Terevaluasi Kinerjanya | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | Jumlah Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi WilayahWilayah Perbatasan | Kegiatan | 2,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Fasilitasi Kemasyarakatan dan Keagamaan | Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi | Persen | 95,00 | 98,15 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Penataan Administrasi Pembangunan Daerah | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan | Persen | 90,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB) | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi | Persen | 25,00 | 50,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Fasilitasi Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | Jumlah Kegiatan Yang Menunjang Kelancaran Proses Pengadaan Barang/Jasa | Kegiatan | 10,00 | - | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa | Persen | 75,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | Persen | 61,54 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Biroktasi | Poin | 45,00 | 60,01 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Penatausahaan Keuangan | | | | | | | Sekretariat Daerah |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Peresentase Penyusunan Perencanaan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Data Keuangan Yang Diverifikasi | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Poin | 3,50 | 3,36 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| | 4 Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Sekretariat Daerah |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 100,00 | 93,71 | Sekretariat Daerah |
| Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Poin | - | - | 3,30 | 3,50 | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 4 Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 5 Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan: | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | - Perda | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | - Perbup | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | - Kepbup | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|------|--------|--------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6 Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 7 Persentase Sosialisasi Produk Hukum | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 8 Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | - | - | 55,00 | 62,00 | Sekretariat Daerah |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | 1 Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 2 Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB) | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 3 Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi | Persen | - | - | 50,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 4 Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 5 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | 6 Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Sekretariat Daerah |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pendukung Sekretariat DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pendukung Sekretariat DPRD yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.62

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|----------|-----------|--------|------|------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sekretariat DPRD | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program peningkatan disiplin aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Rapat Pembahasan Raperda Menjadi Perda | Kegiatan | 10,00 | - | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 60,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 90,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 60,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 90,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 90,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program Fasilitasi Rapat DPRD | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | 1 Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 3 Persentase penyusunan risalah rapat | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | 1 Persentase penyusunan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan | Persen | - | 90,00 | - | - | Sekretariat DPRD |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|-------|--------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | sesuai peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | 2 Persentase data keuangan yang diverifikasi | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 3 Persentase laporan keuangan yang tepat waktu | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program Peningkatan Hubungan Masyarakat dan Protokol | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | 1 Persentase fasilitas hubungan antar lembaga | Persen | - | 86,62 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 2 Persentase publikasi kegiatan DPRD | Persen | - | 90,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| | 3 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD | Persen | - | 100,00 | - | - | Sekretariat DPRD |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | D | B | Sekretariat DPRD |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 61,78 | 64,74 | Sekretariat DPRD |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | 1 Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan | Persen | - | - | 75,00 | 100,00 | Sekretariat DPRD |
| | 2 Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD | Persen | - | - | 75,00 | 100,00 | Sekretariat DPRD |
| | 3 Persentase penyusunan risalah rapat | Persen | - | - | 75,00 | 100,00 | Sekretariat DPRD |

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Perencanaan yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Perencanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.63

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perencanaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Perencanaan | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|---------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Pengembangan Daerah |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | 80,00 | 82,50 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | 82,00 | 82,50 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 85,00 | 82,50 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 82,50 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | 100,00 | 82,50 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | 100,00 | 82,50 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Evaluasi Pembangunan Daerah | Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan | Persen | 87,00 | 101,96 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Pengembangan Data/Informasi | Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Tersedia | Dokumen | 6,00 | - | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi | Persen | 80,00 | 104,31 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah | Persen | 80,00 | 112,61 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Sosial dan Budaya | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya | Persen | 80,00 | 103,87 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|-------|--------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 80,00 | 98,02 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | AA | AA | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 89,06 | 81,58 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 2 Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan | % | - | - | 90,85 | 95,60 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 3 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 1 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | - | - | 90,75 | 89,42 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 2 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | % | - | - | 85,79 | 84,47 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|---|--------|-----------|------|-------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3 Persentase Kesesuaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | - | - | 87,47 | 87,80 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2. Keuangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Keuangan yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.64

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keuangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|------|---------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Keuangan | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 55,56 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 91,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 97,15 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Pengelolaan Aset Daerah | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Persentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tersedia | Persen | 50,00 | 66,66 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Persentase Inventarisasi Asset Daerah | Persen | 60,24 | 61,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 3 Persentase Pengelola Aset OPD Yang Dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Pengelolaan Anggaran Daerah | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 3 Persentase Penyerapan Anggaran | Persen | - | 92,50 | - | - | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | A | A | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 3 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 4 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 5 Persentase Penyerapan Anggaran | Persen | - | - | 90,36 | 86,67 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 1 Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | 2 Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | | |
| Keuangan | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 75,00 | - | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|--------|------|------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Administrasi Perkantoran | | | | | | |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 15,00 | - | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | 1 Persentase Peningkatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB | Persen | - | 36,25 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 2 Persentase Peningkatan Pendapatan Potensi Pajak Non PBB dan BPHTB | Persen | - | 36,26 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 3 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB | Persen | - | 36,27 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Non PBB dan BPHTB | Persen | - | 36,28 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | 1 Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak PBB | Persen | - | 1,19 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 2 Persentase Peningkatan Data PBB P2 yang Terekam | Persen | - | 0,52 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 3 Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak PBB P2 | Persen | - | 2,50 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 4 Persentase Peningkatan Pendapatan dari sektor Pajak BPHTB | Persen | - | 2,50 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 5 Persentase Penyelesaian Pengaduan Permasalahan PBB P2 dan BPHTB | Persen | - | 90,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Intensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | 1 Persentase Pencapaian Target PBB P2 | Persen | - | 115,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 2 Persentase Pencapaian Target PBB P2 | Persen | - | 15,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 3 Persentase Terhapusnya Piutang Pajak Daerah kadaluwarsa | Persen | - | 35,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|-------|--------|--------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masalah Keberatan Pajak Daerah/Pendapatan Lainnya | Persen | - | 95,00 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | 5 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Persen | - | 3,50 | - | - | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | A | A | Badan Pendapatan Daerah |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | 1 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); | % | - | - | 63,40 | 48,08 | Badan Pendapatan Daerah |
| | 2 Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | - | - | 5,02 | 2,05 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

3. Kepegawaian

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Kepegawaian yakni Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepegawaian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kepegawaian | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Aparatur Pemerintah | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai | Persen | 2,86 | 0,64 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan | Persen | 50,00 | 50,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja | Persen | - | 100,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Penyelenggaraan Manajemen Manajemen Kepegawaian Negara | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai | Persen | - | 2,58 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan | Persen | 66,59 | 99,64 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi | Persen | 3,62 | 9,64 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 4 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu | Persen | 20,34 | 82,73 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 Persentase Data ASN Yang Mutakhir | Persen | 100,00 | 94,07 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 6 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian | Persen | - | 0,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|--------|-----------|------|--------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Persentase ASN Yang Melaporkan LHKPN dan LHKASN | Persen | 100,00 | 0,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase ASN Berprestasi/Teladan/Berinovasi dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan | Persen | 1,26 | 1,36 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu | Persen | 4,30 | 5,10 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 0,00 | 62,25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program Kepegawaian Daerah | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Persentase Penurunan Indisipliner pegawai | Persen | - | - | 0,43 | 5,88 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase Sistem Aplikasi Kinerja | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 4 Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan | Persen | - | - | 1,50 | 4,85 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu | Persen | - | - | 6,01 | 4,65 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 6 Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai | Persen | - | - | 5,58 | 0,27 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|---|--------|-----------|------|-------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Sumber Daya Manusia |
| | 7 Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas | Persen | - | - | 95,96 | 97,07 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 8 Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi | Persen | - | - | 72,00 | 91,93 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 9 Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu | Persen | - | - | 82,73 | 84,54 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 10 Persentase Data ASN Yang Mutakhir | Persen | - | - | 92,97 | 98,48 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 11 Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian | Persen | - | - | 0,00 | 100,00 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | | |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan yakni Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.66

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pendidikan dan Pelatihan di
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|--------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program peningkatan Potensi dan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar | Persen | - | 0,00 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/Lokakarya dan Tugas Belajar | Persen | - | 1,88 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Persen | - | 4,25 | - | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | | |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 1 Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar | Persen | - | - | 100,00 | 97,46 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 2 Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar | Persen | - | - | 0,20 | 0,99 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 3 Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Persen | - | - | 4,98 | 12,15 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | | |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-) : tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

5. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|-------|-------|-------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Penelitian, Penguasaan, Dan Pemanfaatan IPTEK | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan | Persen | - | 27,45 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah | Persen | - | 27,45 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Pengembangan Data dan Pelaporan Informasi Pembangunan | Tingkat ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah | Persen | - | 85,87 | - | - | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | 1 Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan | % | - | - | 90,68 | 74,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|--|--------|-----------|------|-------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah | % | - | - | 84,25 | 80,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

6. Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang yang salah satunya adalah pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi penunjang Pengelolaan Perbatasan Daerah yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengelolaan Perbatasan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--------------------------------|---|--------|-----------|------|------|--------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pengelolaan Perbatasan | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| Program Pengelolaan Perbatasan | Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan | Persen | - | - | 100 | 100,00 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | | |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.6 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan

1. Inspektorat

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pengawasan Inspektorat yakni Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.69

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pengawasan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|--------|------|------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Inspektorat Daerah | | | | | | | Inspektorat |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Inspektorat |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Inspektorat |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Inspektorat |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan | Kegiatan | 43,00 | - | - | - | Inspektorat |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah Diklat Yang Telah Dilaksanakan Oleh Aparatur Pengawas | Kegiatan | 4,00 | - | - | - | Inspektorat |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Inspektorat |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | 80,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|-------|-------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Administrasi Perkantoran | | | | | | |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |
| Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | | | | | | | Inspektorat |
| | 1 Opini Penilaian SAKIP Kabupaten | Opini | B | BB | - | - | Inspektorat |
| | 2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten | Opini | WTP | WTP | - | - | Inspektorat |
| | 3 Persentase Penurunan Temuan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Terhadap OPD | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Inspektorat |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Inspektorat |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | A | Inspektorat |
| | 2 Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | Persen | - | - | 94,71 | 65,09 | Inspektorat |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | | | | | | | Inspektorat |
| | 1 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan | OPD | - | - | 24,00 | 47,00 | Inspektorat |
| | 2 Opini Penilaian LKPD Kabupaten | Opini | - | - | WTP | WTP | Inspektorat |
| | 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten | Persen | - | - | 79,00 | 50,07 | Inspektorat |
| | 4 Capaian SAKIP Kabupaten | Opini | - | - | B | BB | Inspektorat |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | | | | | | | Inspektorat |
| | 1 Peningkatan Level Kapabilitas APIP | Level | - | - | 2,00 | 2,00 | Inspektorat |
| | 2. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | OPD | - | - | 1,00 | 0,00 | Inspektorat |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|-------------------------|---|--------|-----------|------|-------|--------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3 Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Persen | - | - | 37,50 | 100,00 | Inspektorat |
| | | | | | | | |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenan

2.3.7 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Kewilayahan

1. Kecamatan

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi kewilayahan Kecamatan yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.70

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|------|------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | 1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| | 4 Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Jatiluhur |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|--------|-------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 66,54 | - | - | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | C | CC | Kecamatan Jatiluhur |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 97,30 | 86,46 | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 100,00 | 80,00 | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 41,81 | 0,00 | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 80,00 | Kecamatan Jatiluhur |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 30,05 | 51,00 | Kecamatan Jatiluhur |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Sukasari |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Sukasari |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Sukasari |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Sukasari |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 95,00 | - | - | Kecamatan Sukasari |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukasari |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 80,00 | - | - | Kecamatan Sukasari |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 95,00 | - | - | Kecamatan Sukasari |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 82,00 | - | - | Kecamatan Sukasari |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 54,39 | - | - | Kecamatan Sukasari |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | D | C | Kecamatan Sukasari |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 65,00 | 80,00 | Kecamatan Sukasari |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Sukasari |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 10,00 | 100,00 | Kecamatan Sukasari |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 80,00 | Kecamatan Sukasari |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 80,00 | Kecamatan Sukasari |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 97,59 | 80,00 | Kecamatan Sukasari |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Maniis |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Maniis |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Maniis |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Maniis |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Maniis |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Maniis |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Maniis |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|--------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4 Presntase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Maniis |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Maniis |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 68,81 | - | - | Kecamatan Maniis |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | B | Kecamatan Maniis |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 97,00 | 90,57 | Kecamatan Maniis |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Maniis |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Maniis |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Maniis |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 33,33 | 100,00 | Kecamatan Maniis |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 39,74 | 100,00 | Kecamatan Maniis |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Tegalwaru |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 35,06 | - | - | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | B | Kecamatan Tegalwaru |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 29,00 | 100,00 | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 35,00 | 75,00 | Kecamatan Tegalwaru |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Kecamatan Tegalwaru |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Plered |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Plered |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Plered |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Plered |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Plered |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Plered |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|------|--------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Plered |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Plered |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Plered |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Plered |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 54,41 | - | - | Kecamatan Plered |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | CC | Kecamatan Plered |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 0,00 | 89,55 | Kecamatan Plered |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | 0,00 | Baik | Kecamatan Plered |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 76,00 | Kecamatan Plered |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 86,00 | Kecamatan Plered |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Kecamatan Plered |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Kecamatan Plered |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Sukatani |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Sukatani |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Sukatani |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Sukatani |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Sukatani |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|-------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukatani |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukatani |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukatani |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukatani |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukatani |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Sukatani |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | B | Kecamatan Sukatani |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 90,75 | 80,00 | Kecamatan Sukatani |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Sukatani |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Sukatani |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Sukatani |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | % | - | - | 14,30 | 80,00 | Kecamatan Sukatani |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 24,00 | 51,00 | Kecamatan Sukatani |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Darangdan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Darangdan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Darangdan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Darangdan |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Darangdan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Darangdan |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Darangdan |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Darangdan |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Darangdan |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Darangdan |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Darangdan |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | - | 82,85 | - | - | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Darangdan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | B | Kecamatan Darangdan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 92,00 | 100,00 | Kecamatan Darangdan |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Darangdan |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Darangdan |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Darangdan |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 90,32 | 100,00 | Kecamatan Darangdan |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 95,72 | 100,00 | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Bojong |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Bojong |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Bojong |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Bojong |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | 1 Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 90,00 | - | - | Kecamatan Bojong |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana prasarana kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Bojong |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Bojong |
| | 4 Persentase pelayanan administrasi perkantoran | Persen | 100,00 | 87,26 | - | - | Kecamatan Bojong |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 97,27 | - | - | Kecamatan Bojong |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 84,44 | - | - | Kecamatan Bojong |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | B | Kecamatan Bojong |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 93,10 | 80,00 | Kecamatan Bojong |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Bojong |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 50,00 | Kecamatan Bojong |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 50,00 | Kecamatan Bojong |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 72,71 | 0,00 | Kecamatan Bojong |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Bojong |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Wanayasa |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 75,58 | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 70,04 | - | - | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | B | Kecamatan Wanayasa |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 91,69 | 80,00 | Kecamatan Wanayasa |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Wanayasa |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 80,00 | 80,00 | Kecamatan Wanayasa |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Wanayasa |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 80,00 | 80,00 | Kecamatan Wanayasa |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 56,96 | 61,00 | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Kiarapedes |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|-------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 82,00 | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 81,11 | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 95,21 | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 86,75 | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 99,85 | - | - | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | C | Kecamatan Kiarapedes |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 18,97 | 73,35 | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | 0,00 | Baik | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 97,35 | 97,00 | Kecamatan Kiarapedes |
| Program Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 92,31 | 74,00 | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | | | |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|--------|--------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 64,00 | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 97,00 | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 96,00 | - | - | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | B | Kecamatan Pasawahan |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 93,53 | 81,99 | Kecamatan Pasawahan |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | 0,00 | Baik | Kecamatan Pasawahan |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Pasawahan |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Pasawahan |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Pasawahan |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 100,00 | 100,00 | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 82,00 | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 81,11 | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 94,88 | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 84,81 | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 88,62 | - | - | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | BB | B | Kecamatan Pondoksalam |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 80,16 | 84,58 | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 95,81 | 0,00 | Kecamatan Pondoksalam |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 81,38 | 98,71 | Kecamatan Pondoksalam |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 93,40 | 99,01 | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 91,00 | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 35,00 | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 42,00 | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 58,00 | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 22,00 | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 91,64 | - | - | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | BB | Kecamatan Purwakarta |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 80,00 | 68,51 | Kecamatan Purwakarta |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Purwakarta |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 83,09 | 57,68 | Kecamatan Purwakarta |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 50,06 | 35,80 | Kecamatan Purwakarta |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 36,15 | 51,80 | Kecamatan Purwakarta |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 84,64 | 0,00 | Kecamatan Purwakarta |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 72,05 | - | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 91,70 | - | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 43,84 | - | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 83,33 | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 96,90 | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 86,92 | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 79,17 | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 83,33 | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 60,64 | 49,47 | - | - | Kecamatan Babakan Cikao |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | BB | Kecamatan Babakan Cikao |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 89,96 | 88,75 | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Babakan Cikao |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|--------|-----------|--------|-------|--------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 57,58 | 100,00 | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 100,00 | Kecamatan Babakan Cikao |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 14,76 | 0,00 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Campaka |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Campaka |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Campaka |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Campaka |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 80,00 | - | - | Kecamatan Campaka |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Campaka |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 70,33 | - | - | Kecamatan Campaka |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 90,00 | - | - | Kecamatan Campaka |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 71,43 | - | - | Kecamatan Campaka |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 80,00 | - | - | Kecamatan Campaka |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | B | Kecamatan Campaka |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 80,00 | 72,07 | Kecamatan Campaka |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Campaka |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 80,00 | Kecamatan Campaka |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 80,00 | 80,00 | Kecamatan Campaka |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 80,00 | 80,00 | Kecamatan Campaka |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 51,00 | 51,00 | Kecamatan Campaka |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Cibatu |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Cibatu |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Cibatu |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Cibatu |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Cibatu |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Cibatu |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 73,55 | - | - | Kecamatan Cibatu |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 95,00 | - | - | Kecamatan Cibatu |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 75,00 | - | - | Kecamatan Cibatu |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 95,00 | - | - | Kecamatan Cibatu |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 85,00 | - | - | Kecamatan Cibatu |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 89,00 | - | - | Kecamatan Cibatu |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Cibatu |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | CC | CC | Kecamatan Cibatu |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|----------|-----------|--------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 94,48 | 77,42 | Kecamatan Cibatu |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Cibatu |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 75,00 | Kecamatan Cibatu |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 75,00 | Kecamatan Cibatu |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Cibatu |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | | | |
| Kecamatan | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Bungursari |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Bungursari |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kecamatan Bungursari |
| Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Wilayah | Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan | Kali | 51,00 | - | - | - | Kecamatan Bungursari |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 68,00 | - | - | Kecamatan Bungursari |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor | Persen | 100,00 | 85,00 | - | - | Kecamatan Bungursari |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 94,00 | - | - | Kecamatan Bungursari |
| | 4 Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | 98,00 | - | - | Kecamatan Bungursari |
| | 5 Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Per Undang-Undangan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kecamatan Bungursari |
| Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan | Persen | 100,00 | 95,94 | - | - | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kecamatan Bungursari |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|---|----------|-----------|------|--------|--------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | BB | Kecamatan Bungursari |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 93,00 | 85,48 | Kecamatan Bungursari |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kategori | - | - | Baik | Baik | Kecamatan Bungursari |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan | % | - | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Bungursari |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 100,00 | 90,00 | Kecamatan Bungursari |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan | % | - | - | 96,00 | 100,00 | Kecamatan Bungursari |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan | % | - | - | 68,00 | 100,00 | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | | | |

Sumber: 17 Kecamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.8 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan fungsi pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik yakni Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif.

Adapun capaian indikator kinerja pada urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2022

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|---|--------|-----------|--------|------|------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | Persen | 100,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | Persen | 100,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | Persen | 100,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | Persen | - | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | Persen | - | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | - | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persen | - | 0,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|---|--|-------------------|-----------|--------|-------|------|------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Persen | - | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | Persen | - | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah | Jumlah Forum /Tim | 4,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Jumlah LSM | LSM | 27,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Jumlah Kegiatan | Kegiatan | 5,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina | Jumlah forum | 3,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program pendidikan politik masyarakat | Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes | Persen | 76,00 | - | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Kesatuan Bangsa | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama | Persen | 100,00 | 100,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Kewaspadaan Dini Daerah | Persentase jumlah penurunan konflik sosial di purwakarta | Persen | 100,00 | 93,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Politik Dalam Negeri | Persentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik | Persen | 100,00 | 0,00 | - | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | B | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | 90,66 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|--------|-------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: | Persen | - | - | 91,66 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik | Persen | - | - | 84,98 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes | Persen | - | - | 74,80 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina; | Persen | - | - | 100,00 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah | Persen | - | - | 100,00 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; | Persen | - | - | 90,91 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama | Persen | - | - | 90,91 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta | Persen | - | - | 41,99 | - | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Opini | - | - | - | BB | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | % | - | - | - | 93,02 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Bidang Urusan / Program | Indikator | Satuan | Realisasi | | | | Perangkat Daerah |
|--|--|--------|-----------|------|------|-------|-----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar: | Persen | - | - | - | 68,93 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik | Persen | - | - | - | 97,39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes | Persen | - | - | - | 97,39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina; | Persen | - | - | - | 92,71 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah | Persen | - | - | - | 92,71 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 1 Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; | Persen | - | - | - | 64,45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | 2 Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama | Persen | - | - | - | 64,45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta | Persen | - | - | - | 86,13 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | |

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Ket. (-): tidak ada data realisasi indikator pada tahun berkenaan, karena indikator tersebut tidak dipakai ditahun berkenaan

2.3.9 Pencapaian Penerapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM di Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sudah dilakukan secara optimal namun masih terdapat beberapa indikator capaian SPM yang harus di dorong dan didukung baik dari aspek anggaran maupun SDM pelaksananya. Adapun Hasil Capaian SPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Tabel 2.72

Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----------|---------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KABUPATEN PURWAKARTA | | 100 % | 62,97% |
| 1. | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 100 % | 82,09% |
| 2. | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 % | 44,29% |
| 3. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100 % | 62,54% |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.73

Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----------|---------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KABUPATEN PURWAKARTA | | 100 % | 86,89% |
| 1. | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 99,43% |
| 2. | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 96,67% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|---|--|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 100,00% |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 89,88% |
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 67,27% |
| 6. | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 79,89% |
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 57,42% |
| 8. | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 80,76% |
| 9. | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 97,64% |
| 10. | Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 100,00% |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan | 100 % | 98,50% |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100 % | 75,16% |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.74

Hasil Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----------|--|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KABUPATEN PURWAKARTA | | 100 % | 86,71% |
| 1. | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari | 100 % | 82,91% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|----|---|--|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik | Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 100 % | 90,50% |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.75

Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----------|---|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KABUPATEN PURWAKARTA | | 100 % | 100,00% |
| 1. | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | 100,00% |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 % | 100,00% |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.76

Hasil Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----------|---|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KABUPATEN PURWAKARTA | | 100 % | 100,00% |
| 1. | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota | 100 % | 100,00% |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100 % | 100,00% |
| 3. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 % | 100,00% |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 100,00% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|----|--|--|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 % | 100,00% |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Tabel 2.77

Hasil Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TARGET | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----------|---|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | KABUPATEN PURWAKARTA | | 100 % | 99,82% |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | 100,00% |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | 99,09% |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 % | 100,00% |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti | 100 % | 100,00% |
| 5. | Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota | 100 % | 100,00% |

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal baik level internasional, nasional maupun regional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak eksternal. Kondisi perekonomian Kabupaten Purwakarta diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global.

Posisi daya saing global Indonesia yang terus menurun menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang untuk bangkit dan mampu berperan strategis dipercaturan ekonomi internasional. Selain itu,

Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan besar di era informasi dan globalisasi saat ini.

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, propinsi, nasional atau internasional. Kondisi daya saing yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Kabupaten Purwakarta yang memiliki struktur wilayah yang menarik, wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan disebelah selatan, tenggara dan barat, mendatar di tengah dan utara. Di Purwakarta juga terdapat Danau Jatiluhur sebagai pembangkit listrik besar pemasok Jawa Bali.
- b) Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas ke Jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional – internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta.
- c) Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.
- d) Kabupaten Purwakarta juga merupakan kabupaten yang mempunyai banyak lahan pertanian dan perkebunan, yang juga sebagai pemasok barang kebutuhan utama di Pasar Induk Bandung dan Jakarta. Kondisi tanah yang subur dan air yang melimpah dapat di tanami banyak jenis pohon. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat masyarakat pada hamparan wilayah tertentu, misalnya persawahan, perkebunan dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan skala ekonomi.

- e) Kedekatan dengan pusat-pusat permintaan (*demand*) seperti Jakarta dan Bandung adalah keunggulan geografis Purwakarta. Sektor finansial yang berkembang pesat di Purwakarta dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi, namun masalah penjaminan bagi usaha kecil juga penting menjadi perhatian.
- f) Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi dengan sektor pembangunan daerah lainnya.

Dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdapat 4 aspek yakni aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/enabling environment, aspek SDM/Human Capital, aspek pasar/market. Daerah dengan daya saing yang tinggi akan membuat daerah tersebut maju dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, Informasi Indeks Data Saing Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 memperoleh Score/Nilai Indeks sebesar **2.7081**, dengan rincian aspek :

- 1). Faktor Penguat/ Enabling Environment, 3.6210;
- 2). Sumber Daya Manusia/ Human Capital, 3.0208;
- 3). Faktor Pasar/ Market, 2.5625;
- 4). Ekosistem Inovasi, 1.6281.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.78

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,16 |
| 2 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB | Juta Rp. | 71.580 | 67.349 | 69.976 | 74.345 | 71.195 |
| 3 | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan | Rp | 11.819.000 | 11.614.000 | 11.669.000 | 12.193.000 | 13.150.500 |
| 4 | Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD | Persen | 35 | 7,71 | 6,36 | 6,36 | 55 |
| 5 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | Persen | 4,69 | 6,91 | 6,84 | 5,12 | 5 |
| 6 | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Trilyun | 62,7 | 69,76 | 74,49 | 80,24 | 75 |

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | Persen | 85,63 | 87,88 | 83,25 | 84,00 | 89,63 |
| 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 71 | 64,41 | 61,07 | 64,28 | 72,81 |
| 3 | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 85,4 | 34,82 | 35,06 | 37,56 | 86 |
| 4 | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 16 | 16 | 80,00 | 32 | 40 |
| 5 | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 34 | 34 | 77,00 | 70,3 | 75,52 |
| 6 | Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan | Persen | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |

Sumber : Bappelitbangda 2023

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus iklim berinvestasi dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.80

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Iklim Berinvestasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Trilyun | 62,7 | 69,76 | 74,49 | 80,24 | 75 |
| 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Poin | 68,5 | 95 | 91 | 74,45 | 73 |
| 3 | Status Indeks Desa Membangun | Status | Berkembang | Berkembang | Maju | Maju | Berkembang |

Sumber : Bappelitbangda 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan fokus sumber daya manusia dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, dimana hasil capaian kinerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.81

Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama terkait Fokus Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | 70,67 | 70,82 | 70,98 | 71,56 | 70,35 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 | 9,91 |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 45 | 60,06 | 60,06 | 64,41 | 60 |
| 5 | Nilai SAKIP Kab. Purwakarta | Predikat | B | B | B | B | A |
| 6 | Nilai LPPD Kab. Purwakarta | Poin | 35 | 35 | 35 | 3,50 | 35 |
| 7 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Predikat | B | B | B | B | B |

| No. | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan | Persen | 100 | 99,7 | 98 | 98,00 | 100 |
| 9 | Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | PD | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Indeks Profesionalitas ASN | Sebutan/ Poin | Sangat Rendah (50) | Sangat Rendah (54,5) | Sangat Rendah (54,23) | Sangat Rendah | Rendah (61-70) |
| 11 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 63,88 | 60,91 | 61,13 | 65,21 | 48,14 |
| 12 | Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Persen | 25 | 25 | 35 | 35 | 55 |

Sumber : BPS Kab. Purwakarta Dalam Angka Tahun 2023, Bappelitbangda 2023

2.5 CAPAIAN KINERJA RPJMD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2018-2023

Pada dokumen Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Visi “Mewujudkan Purwakarta Istimewa” dan dilaksanakan dengan 5 misi, 7 tujuan, 18 sasaran strategis, 19 strategi dan 49 indikator. Capaian kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 tersebut telah menunjukkan hasil yang positif walau masih ada beberapa indikator kinerja yang masih belum optimal dalam pencapaiannya dikarenakan tersendat akibat dampak dari pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020-2021, bahkan sampai sekarang pun dampak pandemi covid-19 tersebut masih belum kembali normal namun Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya agar kinerja pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian realisasi kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.82

Capaian dan Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

| Tujuan | Sasaran | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|--|---|--|---|---|-----------|--------|-------|-------|-------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA | | | | | | | | | | |
| Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya | | Indeks Pembangunan Manusia (poin) | 70,67 | 70,82 | 70,98 | 71,56 | 70,35 | | |
| | | 1.1.1 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa | 1 | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 7,92 | 8,09 | 8,10 | 8,11 | 8,12 |
| | | | | 2 | Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,10 | 12,11 | 12,12 | 12,13 | 12,73 |
| | | | | 3 | Persentase Seni dan Budaya Yang Dibina dan Dilestarikan (%) | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 |
| | | | | 4 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin) | 68,5 | 95 | 91 | 74,45 | 73 |
| | 5 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 1,35 | 1,54 | 1,82 | 1,69 | 0,47 | | | |
| | 1.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga | 1 | Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional (%) | 25 | 25 | 35 | 35 | 55 | |
| | 1.1.3 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1 | Angka Harapan Hidup (tahun) | 70,8 | 70,99 | 71,18 | 71,47 | 70,75 | |
| 1.2 | Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | 1 | Angka Kemiskinan (%) | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 | 7,48 | |
| | | | 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 | 9,91 | |
| | | 1.2.1 | Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan | 1 | Angka Kemiskinan (%) | 7,48 | 8,27 | 8,83 | 8,70 | 7,48 |
| | | 1.2.2 | Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja | 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) | 63,88 | 60,91 | 61,13 | 65,21 | 48,14 |
| | | | | 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 9,73 | 11,07 | 10,70 | 8,75 | 9,91 |
| | | 1.2.3 | | 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin) | 87,19 | 87,19 | 86,78 | 86,93 | 90,18 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|--|--|---|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja | 2 Indeks Perberdayaan Gender (IDG) (poin) | 72,04 | 72,04 | 74,39 | 77,89 | 77,46 | |
| Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional | | | | | | | | |
| 2.1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif | | Indeks Reformasi Birokrasi (poin) | 45 | 60,06 | 60,06 | 64,41 | 60 |
| | 2.1.1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi (poin) | 45 | 60,06 | 60,06 | 64,41 | 60 |
| | | 2 | Nilai SAKIP Kab. Purwakarta (predikat) | B | B | B | B | A |
| | | 3 | Nilai LPPD Kab. Purwakarta (poin) | 35 | 35 | 35 | 3,50 | 35 |
| | 2.1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (predikat) | B | B | B | B | B |
| | | 2 | Persentase aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan (%) | 100 | 99,7 | 98 | 98,00 | 100 |
| 2.2 | Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas | | 1 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 2.2.1 Meningkatkan Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | 1 | Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (PD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 2.2.2 Meningkatkan Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | 1 | Indeks Profesionalitas ASN (poin) | Sangat Rendah (50) | Sangat Rendah (54,5) | Sangat Rendah (54,23) | Sangat Rendah | Rendah (61-70) |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|--|--|---|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan | | | | | | | | |
| 3.1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup | | 1 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%) | 85,63 | 87,88 | 83,25 | 84,00 | 89,63 |
| | | 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 71 | 64,41 | 61,07 | 64,28 | 72,81 |
| | 3.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah | 1 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%) | 85,63 | 87,88 | 83,25 | 84,00 | 89,63 |
| | | 2 | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) | 85,4 | 34,82 | 35,06 | 37,56 | 86 |
| | | 3 | Cakupan Layanan Persampahan (%) | 52 | 52 | 0,00 | | 64 |
| | | 4 | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik (%) | 16 | 16 | 80,00 | 32 | 40 |
| | | 5 | Cakupan Layanan Air Bersih (%) | 34 | 34 | 77,00 | 70,3 | 75,52 |
| | 3.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) | 71 | 64,41 | 61,07 | 64,28 | 72,81 |
| 2 | | Persentase Rencana Rinci Tata Ruang Yang Ditetapkan (%) | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | |
| 3.2 Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan | | 1 | Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD (%) | 35 | 7,71 | 6,36 | 6,36 | 55 |
| | 3.2.1 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | 1 | Jumlah Wisatawan (Orang) | 1.942.213 | 97.421 | 783.171 | 783.171 |
| Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa | | | | | | | | |
| 4.1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat | | 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,37 | -2,13 | 3,42 | 5,24 | 4,16 |
| | | 2 | Indeks Gini (Poin) | 0,399 | 0,414 | 0,388 | 0,367 | 0,34 |
| | | 3 | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp) | 11.819.000 | 11.614.000 | 11.669.000 | 12.193.000 | 13.150.500 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|---|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4 Inflasi (%) | 2,00 | 1,16 | 1,81 | 4,86 | 2,89 |
| | 4.1.1 Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi | 1 Laju UMKM Yang Dibina (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2 Laju Koperasi Aktif (%) | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| | 4.1.2 Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan | 1 Laju Pertumbuhan IKM (%) | 55 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| | | 2 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) | 4,69 | 6,91 | 6,84 | 5,12 | 5 |
| | 4.1.3 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif | 1 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) | 62,7 | 69,76 | 74,49 | 80,24 | 75 |
| | 4.1.4 Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan | 1 Skor Pola pangan Harapan (poin) | 88,55 | 85,1 | 78,3 | 91,40 | 93,15 |
| | | 2 Laju Produksi Pertanian (%) | 1,22 | 2,97 | 4,9 | 4,9 | 1,1 |
| | | 3 Laju Produksi Peternakan (%) | 3 | 0,24 | 3,13 | 3,13 | 2 |
| | | 4 Laju Produksi Perikanan (%) | 14 | 16,48 | 2,27 | 2,27 | 14 |
| | 4.1.5 Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 Status Indeks Desa Membangun (status) | Berkembang | Berkembang | Maju | Maju | Berkembang |

Sumber : Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, Hasil Evaluasi RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

2.6. PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP*) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

- a) Mengakhiri kelaparan dan *extreme poverty*;
- b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
- d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi public yang efektif dan akuntabel; dan
- e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain).

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDG's adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru dengan sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepebisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni **pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance**. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Upaya pencapaian SDG's di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh.

Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDG's antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

2.7. ANALISIS DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG KLHS

Keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara bijaksana, yaitu memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perlu diperhatikan pula hubungan antar wilayah, untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu wilayah tertentu, sehingga dapat dipenuhi dengan penyediaan dari wilayah lainnya (prinsip ekspor-impor). Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang berkelanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Identifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Indonesia yang diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam *Millenium Ecosystem Assessment –United Nation*. Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem (Hein *et al.* 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu, seperti tercantum dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 mengenai Pedoman

Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ketersediaan baik kuantitas dan kualitas jasa ekosistem akan berpengaruh dan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai panduan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perlu beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah (a) ruang dan sifatnya, (b) tipe pemanfaatan ruang, (c) ukuran produk lingkungan hidup utama (udara dan air), (d) penggunaan/penutupan lahan mendukung publik (hutan), (e) penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

2.7.1 Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”*. Salah satu hasil kajian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut. Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada data terkait jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem penyedia air bersih yaitu 57,48%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut tersebut berkaitan dengan luasan satuan ekoregion yang mendominasi Kabupaten Purwakarta yaitu Dataran Fluvio Vulkanik.

Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga

landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lolasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi.

Tabel 2.83

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Purwakarta

| Jenis Jasa Ekosistem | Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|---------|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
| | Sangat Rendah | | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Penyedia Pangan | 0,81 | 0,002 | 387,48 | 1,082 | 3.536,74 | 9,877 | 4.239,97 | 11,841 | 4.412,92 | 12,324 |
| Penyedia Air Bersih | - | - | 6544,68 | 7,407 | 65.881,57 | 74,564 | 15.928,53 | 18,027 | 0,86 | 0,0009 |
| Pendukung Biodiversitas | - | - | 46,59 | 1,599 | 173,20 | 5,946 | 1.131,70 | 38,856 | 1.561,00 | 53,596 |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

2.7.2 Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu: *“Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya”* Salah satu hasil kajian daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini juga menghasilkan distribusi luasan dari jasa ekosistem tersebut yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84

Distribusi Kelas dan Luasan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

| Jenis Jasa Ekosistem | Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|----------|-------|----------|------|----------|-------|---------------|-------|
| | Sangat Rendah | | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Pengaturan Iklim | 298.08 | 0,29 | 14409.11 | 15,23 | 4125.34 | 6,10 | 54371.78 | 57,92 | 32029.40 | 19,97 |
| Pengaturan tataaliran air dan banjir | 8994.72 | 7,89 | 7869.19 | 6,32 | 11493.36 | 8,95 | 49791.42 | 62,11 | 19887.93 | 19,79 |

| Jenis Jasa Ekosistem | Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------------|-------|
| | Sangat Rendah | | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | Sangat Tinggi | |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % |
| Pencegahan Dan perlindungan dari bencana | 17154.30 | 14,92 | 501.23 | 0,67 | 21997.31 | 22,01 | 64767.02 | 60,07 | 7233.09 | 7,09 |
| Pemeliharaan kualitas udara | 9097.11 | 7,98 | 15994.32 | 14,87 | 26114. | 21,88 | 42332.06 | 35,27 | 20009.1 | 17,84 |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil analisis data distribusi luasan jasa ekosistem yang tersaji pada Tabel jasa ekosistem yang berada dalam kelas tertinggi dengan luasan terluas adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yaitu 19,79%. Tingginya persentase luasan jasa ekosistem tersebut berkaitan dengan luasan kawasan non terbangun yang meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau yang masih cukup besar. Keberadaan hutan, sawah, dan ruang terbuka hijau akan mampu menginfiltrasi air ke dalam tanah sehingga larian air (*run off*) akan semakin kecil sehingga siklus hidrologi dalam kondisi yang stabil.

2.7.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan juga dapat diukur dan didekati dengan menggunakan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan asumsi semakin tinggi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, semakin terjaga kemampuan lingkungan sehingga daya dukungnya juga semakin meningkat. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal:

1. Membantu perumusan kebijakan;
2. Membantu dalam mendesain program lingkungan; dan
3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan

salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Dalam perhitungannya, masing-masing parameter diberikan bobot yang berbeda. Pemberian bobot berbeda dari ketiga indeks kualitas berdasarkan dampak serius dari kelangkaan yang meliputi Indeks Kualitas Air dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan dengan bobot 40%.

Berdasarkan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, pengukuran masing-masing parameter IKLHD Kabupaten Purwakarta ialah sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Purwakarta dilakukan di 10 (sepuluh) titik pemantauan pada dua periode yaitu bulan Juli dan Oktober Tahun 2017. Hasil pengukuran kualitas udara tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.85

Kualitas Udara Ambien Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

| Lokasi | Lama Pengukuran | Tanggal Pengukuran | SO ² (µg/Nm ³) | NO ₂ (µg/Nm ³) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta | 24 Jam | 18/07/2017 | 2 | 8 |
| Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta | 24 Jam | 18/07/2017 | < 1,4 | 12 |
| Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta | 24 Jam | 14/08/2017 | 15 | 16 |
| Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta | 24 Jam | 14/08/2017 | 2 | 37 |
| Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta | 24 Jam | 23/08/2017 | 6 | 14 |
| Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta | 24 Jam | 23/08/2017 | 15 | 39 |
| Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta | 24 Jam | 3/10/2017 | < 1,4 | 17 |

| Lokasi | Lama Pengukuran | Tanggal Pengukuran | SO ² (µg/Nm ³) | NO ₂ (µg/Nm ³) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta | 24 Jam | 3/10/2017 | < 1,4 | 43 |
| Kantor Pemda Kabupaten Purwakarta | 24 Jam | 26/10/2017 | 26 | 16 |
| Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta | 24 Jam | 26/10/2017 | 24 | 48 |

Keterangan: Berdasarkan Hasil Sampling Passive Sampler

Tanda (-) menunjukkan parameter tersebut tidak dianalisa Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada periode waktu pengukuran bulan Agustus tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di kawasan Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Sedangkan pada periode bulan Oktober tahun 2017, kadar SO₂ tertinggi berada di lokasi Kantor Pemkab Purwakarta dan kadar NO₂ tertinggi berada di Kantor DPMPTSP Kab. Purwakarta. Atas dasar hasil perhitungan tersebut, maka dihitung Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purwakarta. Parameter uji kualitas udara ambien jalan raya yang diukur mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Parameter yang diukur dengan menggunakan passive sampler yang tersebar di wilayah kota dan wilayah yang berpotensi sumber pencemar lebih tinggi dengan rentang waktu pengukuran dimulai dari bulan Juli – Oktober 2017 terdiri dari parameter Nitrogen Dioksida (NO₂), Sulfur Dioksida (SO₂), dilakukan dengan waktu pengukuran 24 Jam.

Berdasarkan hasil pengamatan semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PP RI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Terlihat semua parameter SO₂, NO₂ yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan PPRI No. 41 Tahun 1999 Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Semua parameter yang dipantau masih berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan debu dari lalu lintas pada daerah titik sampling. Keberadaan konsentrasi dari parameter yang terukur di lokasi ini lebih disebabkan oleh aktifitas jalan raya yang pada saat ini bila melihat data faktual terjadi peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor serta penambahan ruas jalan alternatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, dan aktifitas mobilisasi kendaraan angkut industri dimana pesatnya

perkembangan industri baru ditambah dengan berubahnya pola penggunaan energy bagi kalangan industri dari penggunaan bahan bakar minyak berubah menjadi bahan bakar batubara, kadar dari parameter tersebut merupakan disversi dari kegiatan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga parameter yang terjadi di jalan akan menyebarkan dalam radius yang cukup luas, hal ini juga diiringi oleh keadaan iklim setempat.

Tindakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan untuk dapat meminimalkan dampak tersebut antara lain melakukan pengawasan dan pembinaan secara simultan terhadap pelaku industri khususnya mengenai pengelolaan pencemaran udara serta melakukan kegiatan operasi KIR untuk kendaraan bermotor khusus niaga. Sedangkan untuk wilayah perkotaan pemerintah daerah telah menambah dan merevitalisasi ruang terbuka hijau dengan menambah jenis tanaman yang dapat menyerap sumber polutan yang ada.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air dihitung berdasarkan analisis air sungai untuk parameter TSS, DO, dan COD. Pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Purwakarta terhadap aliran sungai selama tahun 2017 dengan jumlah sampel sebanyak 5 Sungai sebagai berikut:

1) Sungai Cikao

Diantara parameter yang diukur hanya parameter khususnya Zat Terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cikao umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP. 82 tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l .

2) Sungai Citarum

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Citarum dilakukan pada lokasi sebelum dan sesudah PT. Indo Bharat Rayon. Diantara

parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya algae dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Citarum umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas I PP Nomor 82 Tahun 2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l

3) Sungai Ciherang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Ciherang dilakukan pada lokasi sekitar wilayah Kecamatan Bungursari. Diantara parameter yang diukur hanya parameter zat terlarut, COD dan sulfat (SO_4) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Sedangkan parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alga dan organisme lain, merupakan nutrisi penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Parameter COD menunjukkan jumlah

oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cihorang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter COD berada diatas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l COD sebesar 10 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

4) Sungai Cilamaya

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cilamaya yang melintas di Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi sesudah PT. San Fu. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut, COD, BOD dan sulfat (SO₄) yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. Parameter fosfat dalam bentuk organik menyebabkan suburnya alge dan organisme lain, merupakan nutrien penting untuk tumbuhan dan binatang. Dapat ditemukan di alam dalam air, tanah dan sedimen, umumnya tidak terdapat di udara dalam kondisi gas (dapat dalam bentuk partikel debu). Peningkatan konsentrasi fosfat akan meningkatkan pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya dan menutupi cahaya matahari sehingga air tidak dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme lain, dengan cepat akan turun ke dasar laut sebagai endapan organik. Nilai BOD yang tinggi mencerminkan tingginya kegiatan mikroorganisme di dalam air akibat pencemaran baik limbah penduduk, industri maupun sumber pencemaran lainnya yang masuk ke badan air, Sedangkan parameter COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nilai COD dapat digunakan sebagai ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses

mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Dari hasil pemantauan tahun 2017, parameter tersebut diatas di sungai Cilamaya umumnya masih memenuhi kriteria mutu air namun untuk parameter BOD dan COD berada diatas ambang baku mutu berdasarkan PP. 82 tahun 2001 dengan ruang kelas 1 dengan nilai baku mutu kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l, COD sebesar 10 mg/l, bod sebesar 2 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l.

5) Sungai Cikembang

Pengukuran air sungai khususnya di sungai Cikembang yang melintas I Kabupaten Purwakarta dilakukan pada lokasi kampung Cikembang. Diantara parameter yang diukur hanya parameter Zat Terlarut dan Klorida yang tinggi diantara parameter lainnya. Materi yang terlarut mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produsen. parameter tersebut diatas di sungai Cikembang umumnya masih memenuhi kriteria mutu air kelas II PP. 82/2001 dengan nilai baku mutu untuk zat padat terlarut sebesar 1000 mg/l dan sulfat sebesar 400 mg/l. Di Kabupaten Purwakarta terdapat sekitar 2 Waduk, 18 embung. Waduk Juanda atau Jatiluhur, waduk Cirata merupakan waduk utama di Kabupaten Purwakarta. Secara administratif waduk Juanda berada di Kecamatan Jatiluhur, Sukatani dan Sukasari dan merupakan waduk terbesar. Utamanya kedua waduk tersebut dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan cakupan distribusi Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan sumber laporan analisis kualitas air sungai periode Januari-Desember 2017 Perum Jasa Tirta II, menyatakan hasil pantau kualitas air pada bulan Januari-Desember 2017 dengan melihat data seri waduk Ir. H. Djuanda ada parameter yang melebihi baku mutu lingkungan dan bila dianalisa dengan menggunakan metode pengujian yang ada keadaan atau status Ir. H. Djuanda ada indikasi parameter parameter yang diatas nilai baku mutu yang ditetapkan dan diupayakan ada tindakan yang lebih komprehensif lintas sektor. Sedangkan kondisi danau, waduk, situ, embung lainnya yang berada

di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Alasan dilakukan pengukuran terhadap sungai dan danau, situ tersebut dikarenakan sebagai fungsi badan air penerima dari segala kegiatan yang potensial misalnya sebagai penerima outfall dari segala kegiatan antara lain industri, permukiman dan lain-lain. Gambaran tersebut menunjukkan tingkat kesadaran pelaku usaha ekonomi yang masih kecil dimana untuk setiap buangan limbah cairnya masih ada yang tidak mengolahnya ataupun tindakan pengolahannya masih belum optimal, sedangkan untuk tekanan yang menimbulkan keadaan sungai tersebut tercemar adalah dari banyaknya permukiman disekitar bantaran sungai tersebut bila dilihat dari cakupan sarana air bersih untuk fasilitas tempat buang air besar dari lingkup kecamatan masih didominasi dilakukan secara sendiri - sendiri langsung membuang buangan rumah tangga kedalam badan air penerima.

c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, adapun Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86

Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

| Luas Wilayah | Luasutupan Hutan (km ²) | Persentase Luas Tutupan Hutan | Indeksutupan Hutan |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 971,72 km ² . | 681,86 km ² | 70,17% | 85 |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks tutupan lahan Kabupaten Purwakarta, selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap masing-masing indeks

sehingga didapatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2017

| Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Air | Indeks Tutupan Lahan | IKLHD |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 70,56 | 52,15 | 85 | 69,23 |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah 69,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kategori **CUKUP**. Nilai IKLH mencerminkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan tekanan lingkungan hidup oleh penduduk. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta yang dilakukan pemerintah cukup baik sehingga nilai IKLH Kabupaten Purwakarta juga Cukup. Selain itu, nilai IKLH ini juga dapat mencerminkan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi.

2.8 KERJASAMA DAERAH

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan dalam PP. Nomor 28/2018.

Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga guna membantu pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Adapun laporan kegiatan kerjasama daerah di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.88

Laporan Kegiatan Kerjasama Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2020

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|------------|--|--|------------------|
| 1 | 1. KEPALA BAPENDA PROV JAWA BARAT 2. BUPATI PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG SINERGITAS PROGRAM INTENSIFIKASI, PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KAB PURWAKARTA | - |
| 2 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 KOSTRAD | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PSBB PARSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGAN COVID 19 DI KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 3 | 1. KEPALA SATUAN POLISI PP KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN RESIMEN ARMED 2 KOSTRAD | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PSBB PARSIAL DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGAN COVID 19 DI KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 4 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG | ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 | - |
| 5 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL YANG TERKENA TRACE PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DI KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 6 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PT. MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG SUSUN (INTER CHANGE) PADA KILO METER 77+800 JALAN TOL CIKOPO PALIMANAN, JALAN PENGHUBUNG, PERSIMPANGAN (INTERSECTION) DAN PENINGKATAN JALAN KOLEKTOR RUAS CIKOPO – CILANDAK. | - |

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|------------|---|---|------------------|
| 7 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI | PERJANJIAN ANTARA IPDN DENGAN PEMERINTAH KAB PURWAKARTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN BAGI ASN PEMDA KAB PURWAKARTA PERJANJIAN ANTARA IPDN DENGAN PEMERINTAH KAB PURWAKARTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN BAGI ASN PEMDA KAB PURWAKARTA | - |
| 8 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. SEKRETARIS DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT | PERJANJIAN HIBAH DAERAH TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PENGADAAN 1 (SATU) UNIT BUS SEKOLAH/UMUM/PELAJAR/KAMPUS | - |
| 9 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | - |
| 10 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KEPALA PT. BJB SYARIAH CABANG BRAGA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI | - |
| 11 | 1. DIRJEND PAJAK 2. DIRJEND PERIMBANGAN KEUANGAN 3. PEMDA KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 12 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 13 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KETUA YAYASAN CARE PEDULI | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PROGRAM WORKER DIGNITY HEALTH AND LEADERSHIP (WDHL) DI KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 14 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BAMUSDES,RW/RT DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 15 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KASDAM III SILIWANGI | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DARURAT DAN PENINGKATAN JALAN (KARYA BAKTI TNI - AD) | - |
| 16 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | - |
| 17 | 1. KEPALA DPUBMP KAB PURWAKARTA 2. PT. MEGATAMA PUTRA SEJAHTERA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBANGUNAN JALAN SIMPANG SUSUN (INTER CHANGE) PADA KILO METER 77+800 JALAN TOL CIKOPO PALIMANAN, JALAN PENGHUBUNG, PERSIMPANGAN (INTERSECTION) DAN PENINGKATAN JALAN KOLEKTOR RUAS CIKOPO – CILANDAK. | - |

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Purwakarta

Tahun 2021

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|-------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BMKG PUSAT | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN METEOROLOGI,KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 1 TAHUN |
| 2 | 1 SEKRETARIS DAERAH CQ. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 2 KEPALA STASIUN GEOFISIKA BANDUNG | PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMDA KAB PURWAKARTA UNTUK PENEMPATAN SENSOR PEMANTAUAN GEMPA BUMI (SEISMOGRAFH BROAD BAND) | 5 TAHUN |
| 3 | 1 PEMDA KAB PURWAKARTA 2 KETUA STT WASTUKENCANA PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENDIDIKAN,PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 3 TAHUN |
| 4 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PT. POS INDONESIA KANREG 5 BANDUNG | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG JASA PELAYANAN POS | 2 TAHUN |
| 5 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KODIM 0619 PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI BERSAMA KODIM 0619 PURWAKARTA UNTUK KEGIATAN RELOKASI JALAN CIKAO BANDUNG – KUTAMANAH KP. CIPUTAT DESA KUTAMANAH KEC SUKASARI | 2 BULAN |
| 6 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PEMDA KAB SUBANG | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK | 3 TAHUN |
| 7 | 1. PEMPROV JAWA BARAT 2. PEMDA KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF | 3 TAHUN |
| 8 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KODIM 0619 PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI DALAM LINGKUP KEGIATAN KEBINAMARGAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PURWAKARTA | 6 BULAN |
| 9 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. FORUM TJS LP KAB PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN MEKANISME TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJS LP) DALAM RANGKA Mendukung PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWAKARTA | 5 TAHUN |
| 10 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA 3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU PENGESAHAN PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA | 3 TAHUN |

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|------------|---|---|------------------|
| 11 | 1. KADISDUKCAPIL KAB PURWAKARTA 2. PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA 3. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU PENGESAHAN PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA | 3 TAHUN |
| 12 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KESEHATAN CAB KARAWANG | NOTA KESEPAKATAN OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL | 2 TAHUN |
| 13 | 1. SEKRETARIS DAERAH KAB PURWAKARTA 2. KEPALA BPJS KESEHATAN CABANG KARAWANG | RENCANA KERJA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 | 2 TAHUN |
| 14 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KETENAGAKERJAAN CAB PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | 3 TAHUN |
| 15 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. BPJS KETENAGAKERJAAN CAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | - |

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Purwakarta

Tahun 2022

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|------------|--|---|------------------|
| 1 | 1. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT 2. PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG SINERGI PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 2 TAHUN |
| 2 | 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2. KEPALA PT. BJB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG LAYANAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PENERIMAAN SETORAN RETRIBUSI DAERAH | 1 TAHUN |
| 3 | 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT 2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA BARAT | 3 TAHUN |
| 4 | 1. KEPALA DPMD KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JAMINAN SOSIAL | 1 TAHUN |

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|-------------------|--|---|-------------------------|
| | 2. KEPALA CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PURWAKARTA | KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BAMUSDES, RW/RT DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | |
| 5 | 1. SEKRETARIS DAERAH KAB PURWAKARTA 2. KEPALA CABANG BPJS KESEHATAN KARAWANG | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 | 2 TAHUN |
| 6 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI KODIM 0619/PURWAKARTA LINGKUP KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA | 1 TAHUN |
| 7 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PEMDA KAB BANDUNG BARAT | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK | 2 TAHUN |
| 8 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. PEMDA KAB MAMUJU TENGAH | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM (TU) DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKASI SALULISU KAWASAN TOBADAK DESA BATU PARIGI KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 | 5 TAHUN |
| 9 | 1. KEPALA DISNAKERTRAN KAB PURWAKARTA 2. KEPALA DISNAKERTRAN KAB MAMUJU TENGAH | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM (TU) DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKASI SALULISU KAWASAN TOBADAK DESA BATU PARIGI KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 | 5 TAHUN |
| 10 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KOMANDAN RESIMEN ARMED 1 KOSTRAD | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI RESIMEN ARMED 1/SY/1 KOSTRAD LINGKUP KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN | 1 TAHUN |
| 11 | 1. KOMANDAN RESIMEN ARMED 1 KOSTRAD 2. PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN SWAKELOLA KARYA BAKTI TNI RESIMEN ARMED 1 STHIRA YUDHA 1 KOSTRAD LINGKUP KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN | 1 TAHUN |
| 12 | 3. PEMDA KAB PURWAKARTA 4. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | 2 TAHUN |

| NOMOR URUT | PARA PIHAK | URAIAN JUDUL NASKAH | WAKTU PERJANJIAN |
|-------------------|--|---|-------------------------|
| 13 | 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DISNAKAN KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | 2 TAHUN |
| 14 | 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DISKOMINFO KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | 2 TAHUN |
| 15 | 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DISPANGTAN KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | 2 TAHUN |
| 16 | 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA DPMD KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | 2 TAHUN |
| 17 | 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA 2. KEPALA PELAKSANA BPBD KAB PURWAKARTA | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | 2 TAHUN |
| 18 | 1. PEMDA KAB PURWAKARTA 2. KETUA YAYASAN CARE PEDULI | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PROGRAM STRIVING FOR WOMEN'S RIGHTS (SWIR) DI KABUPATEN PURWAKARTA | 1 TAHUN |
| 19 | 1. KETUA YAYASAN CARE PEDULI 2. KEPALA DINAS SOSIAL DAN P3A 3. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PEMBERDAYAAN, PENGUATAN, DAN PEMENUHAN HAK – HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (EKOSOB) PEREMPUAN DI LINGKUP KELUARGA, MASYARAKAT, DAN TEMPAT KERJA DI KABUPATEN PURWAKARTA | 1 TAHUN |
| 20 | 1. PEMKAB PURWAKARTA 2. REKTOR UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 5 TAHUN |
| 21 | 1. PEMKAB PURWAKARTA 2. REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG | KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | 5 TAHUN |

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setda Kab. Purwakarta

2.9 KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak pada sektor usaha air minum dan jasa keuangan, yaitu terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gapura Tirta Rahayu, PT. Bank Jabar Banten, PT. LKM Mekar Asih, dan PD. BPR Raharja Wanayasa. Sebagian dari APBD Kabupaten Purwakarta dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah atau BUMD tersebut. Adapun kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.89

Kinerja BUMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

Tahun 2019

| No | Nama Kabupaten/Kota | Nama BUMD | Aset (Rp) | Ekuitas (Rp) | Pendapatan (Rp) | Biaya/Beban (Rp) | Laba/(Rugi) setelah Pajak (Rp) | Kontribusi Pemda terhadap BUMD (Rp) | Kontribusi BUMD terhadap PAD Pemda (Rp) | Status | Bentuk | Jenis | Laporan Keuangan | Ket. |
|----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------------|------|
| 1 | Kab. Purwakarta | PT. Bank Jabar Banten | 116.996.377.000.000 | 12.620.880.000.000 | 12.292.992.000.000 | 10.366.617.000.000 | 1.541.852.000.000 | 12.804.792.750 | 4.578.993.887 | beroperasi | Perseroda | Perbankan | Audited | |
| 2 | | PT. LKM Mekar Asih | 3.468.324.178 | 2.046.801.227 | 660.888.379 | 599.171.717 | 57.800.592 | 1.524.454.097 | 17.370.226 | beroperasi | Perseroda | Perbankan | Audited | |
| 3 | | PD. BPR Raharja Wanayasa | 36.267.085.000 | 17.270.455.000 | 7.744.064.000 | 6.106.243.000 | 1.328.940.000 | 14.275.000.000 | 514.152.120 | beroperasi | Perusda | Perbankan | Audited | |
| 4 | | Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu | 53.557.811.911 | 36.874.620.346 | 30.134.221.044 | 30.017.045.239 | 52.274.805 | 22.331.405.349 | - | beroperasi | Perusda | PDAM | Audited | |

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

Tahun 2020

| No | Nama Kabupaten/Kota | Nama BUMD | Aset (Rp) | Ekuitas (Rp) | Pendapatan (Rp) | Biaya/Beban (Rp) | Laba/(Rugi) setelah Pajak (Rp) | Kontribusi Pemda terhadap BUMD (Rp) | Kontribusi BUMD terhadap PAD Pemda (Rp) | Status | Bentuk | Jenis | Laporan Keuangan | Ket. |
|----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------------|------|
| 1 | Kab. Purwakarta | PT. Bank Jabar Banten | 133.559.935.000.000 | 12.581.533.000.000 | 13.369.736.000.000 | 11.239.184.000.000 | 1.682.122.000.000 | 12.804.792.750 | 4.815.626.457 | beroperasi | Perseroda | Perbankan | Audited | |
| 2 | | PT. LKM Mekar Asih | 3.446.200.765 | 2.052.885.570 | 631.190.726 | 621.414.806 | 6.084.343 | 1.527.028.242 | - | beroperasi | Perseroda | Perbankan | Audited | |
| 3 | | PD. BPR Raharja Wanayasa | 44.440.049.000 | 22.184.429.000 | 8.045.187.000 | 6.220.132.000 | 1.477.137.000 | 18.775.000.000 | 730.917.172 | beroperasi | Perusda | Perbankan | Audited | |
| 4 | | Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu | 55.127.837.398 | 31.293.670.718 | 29.404.170.481 | 29.121.440.977 | 172.134.504 | 22.331.405.349 | 16.064.738 | beroperasi | Perusda | PDAM | Audited | |

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

Tahun 2021

| No | Nama Kabupaten/Kota | Nama BUMD | Aset (Rp) | Ekuitas (Rp) | Pendapatan (Rp) | Biaya/Beban (Rp) | Laba/(Rugi) setelah Pajak (Rp) | Kontribusi Pemda terhadap BUMD (Rp) | Kontribusi BUMD terhadap PAD Pemda (Rp) | Status | Bentuk | Jenis | Laporan Keuangan | Ket. |
|----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------|
| 1 | Kab. Purwakarta | PT. Bank Jabar Banten | 158.356.097.000.000 | 13.084.033.000.000 | 9.618.774.000.000 | 7.020.159.000.000 | 2.018.654.000.000 | 12.804.792.750 | 4.903.723.432 | beroperasi | Perseroda/Perusda/Lainnya | Perbankan | Audited/Unaudited | |
| 2 | | PT. LKM Mekar Asih | 3.833.107.026 | 2.012.080.155 | 836.704.217 | 822.218.161 | 10.302.534 | 1.500.000.000 | 27.028.242 | beroperasi | Perseroda/Perusda/Lainnya | PDAM/Perbankan/Lainnya | Audited/Unaudited | |
| 3 | | PD. BPR Raharja Wanayasa | 50.172.658.901 | 22.854.454.242 | 8.495.861.752 | 6.281.231.865 | 1.849.393.025 | 18.775.000.000 | 818.834.811 | beroperasi | Perseroda/Perusda/Lainnya | PDAM/Perbankan/Lainnya | Audited/Unaudited | |
| 4 | | Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu | 54.227.118.844 | 31.417.560.862 | 28.194.433.281 | 28.245.509.823 | (51.076.542) | 22.331.405.349 | - | beroperasi | Perseroda/Perusda/Lainnya | PDAM | Unaudited | |

Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis keuangan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selanjutnya sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat digunakan analisis keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka anggaran pembangunan daerah akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.

Dalam penerapan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta secara umum tercermin atas tiga aspek, yaitu:

- A. Aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- B. Aspek Pengelolaan Belanja Daerah; dan
- C. Aspek Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
3. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mengoptimalisasi kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
10. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
11. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan perkembangan penyebaran Covid-19;
12. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;

13. Mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu Tahun 2019 – 2021, secara umum dari aspek pengelolaan Pendapatan Daerah memperlihatkan trend yang positif dimana setiap tahun ada kenaikan rata-rata sebesar 5,31%, yaitu dari Rp. 2.169.865.594.847 di tahun 2019 menjadi Rp. 2.402.816.479.087 pada tahun 2021.

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 11,16%, yaitu dari Rp. 420.353.733.502 di tahun 2019 menjadi Rp. 515.746.568.984 pada tahun 2021.

Kemudian dari sektor Pendapatan Transfer terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 10,05%, yaitu dari Rp. 1.466.082.804.899 di tahun 2019 menjadi Rp. 1.763.835.158.455 pada tahun 2021.

Sedangkan pada sektor Pendapatan Lain-lain yang Sah terlihat rata-rata realisasinya menurun yakni sebesar -27,91%, yaitu dari Rp. 283.429.056.446 di tahun 2019 menjadi Rp. 123.234.751.648 pada tahun 2021.

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel 3.1

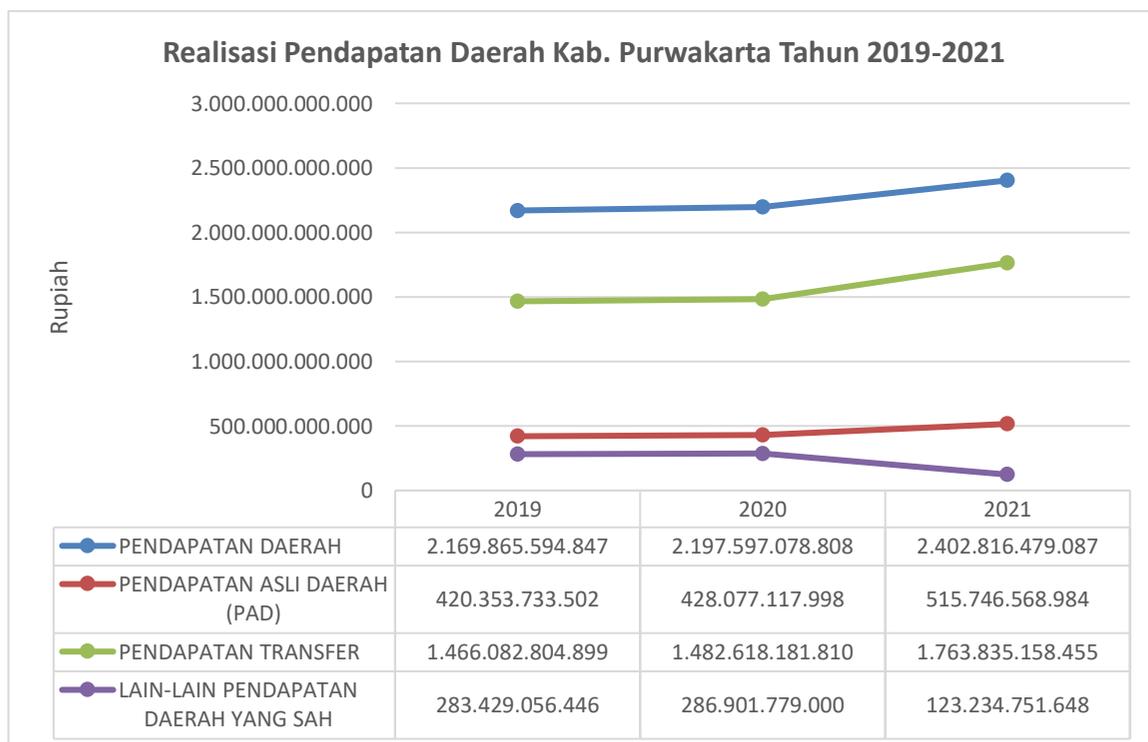
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.169.865.594.847 | 2.197.597.078.808 | 2.402.816.479.087 | 5,31 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 420.353.733.502 | 428.077.117.998 | 515.746.568.984 | 11,16 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 244.826.953.244 | 250.048.366.305 | 286.064.771.702 | 8,27 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 21.438.760.660 | 27.806.891.170 | 22.984.397.619 | 6,18 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.349.792.210 | 5.901.060.417 | 5.964.612.631 | 5,69 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 148.738.227.388 | 144.320.800.106 | 200.732.787.032 | 18,06 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.466.082.804.899 | 1.482.618.181.810 | 1.763.835.158.455 | 10,05 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.254.756.529.989 | 1.257.384.044.758 | 1.471.176.858.725 | 8,61 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 211.326.274.910 | 225.234.137.052 | 292.658.299.730 | 18,26 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 283.429.056.446 | 286.901.779.000 | 123.234.751.648 | -27,91 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 116.030.301.446 | 119.433.257.000 | 123.234.751.648 | 3,06 |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 167.398.755.000 | 167.468.522.000 | 0 | -49,98 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

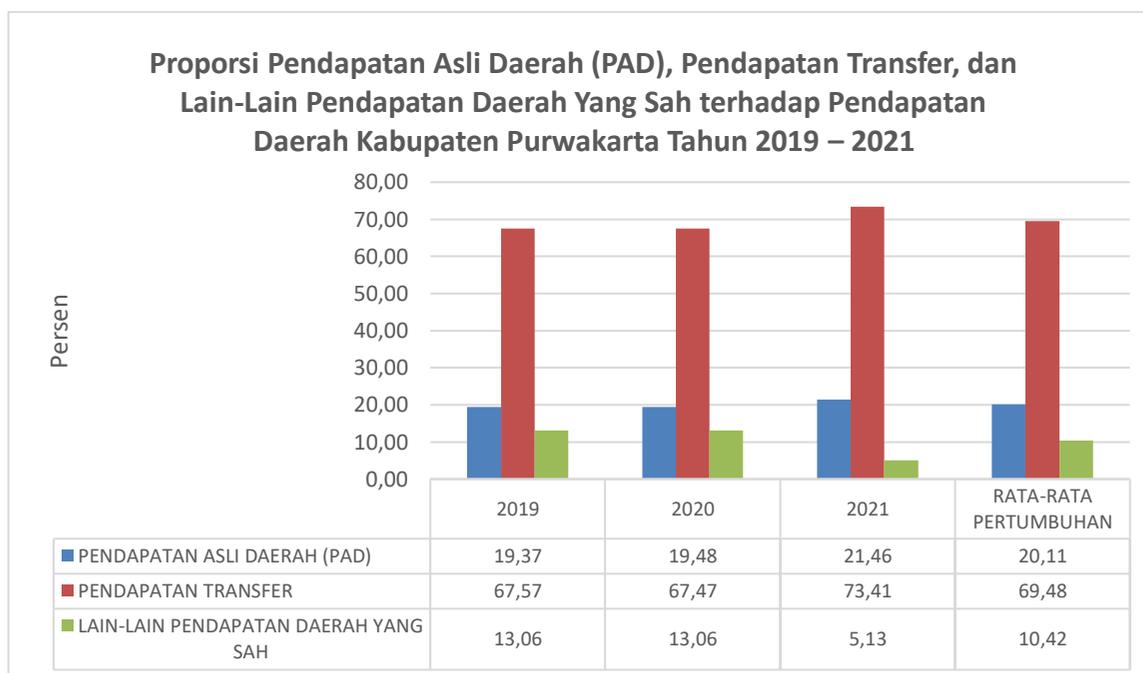


Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD 2022

Sedangkan bila dilihat dari proporsi persentase setiap sektor Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.2

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi Pendapatan Transfer sangat mendominasi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 yakni rata-rata sebesar 69,48%, kemudian sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 20,11% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 10,42%.

3.1.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan belanja daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran,

berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai, yaitu menjamin dijalankannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah daerah seperti : pro poor, pro job dan pro growth.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19;
4. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18

- (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
7. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
 8. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
 9. Pemenuhan dana fungsi kesehatan sebesar 10% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;
 10. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahan dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
 11. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
 12. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
 13. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu Tahun 2019 – 2021, secara umum dari aspek pengelolaan Belanja Daerah memperlihatkan trend dimana setiap tahun ada kenaikan kebutuhan pagu anggaran untuk belanja daerah dengan rata-rata sebesar 2,71%. Dari sektor Belanja Operasi terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 3,33%. Kemudian dari sektor Belanja Modal terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 0,86%. Pada sektor Belanja Tidak Terduga terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 8.638,47%. Sedangkan pada sektor Belanja Transfer terlihat rata-rata kenaikannya sebesar 2,03%.

Realisasi kinerja pada sektor Belanja Tidak Terduga terlihat sangat signifikan kenaikannya, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemenuhan kebutuhan anggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 diantaranya untuk penanganan kesehatan, pengamanan jaring sosial masyarakat dan pemulihan ekonomi. Pemenuhan anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 ini telah menguras cukup banyak pagu anggaran belanja pada semua sektor, dimana dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut, dilakukan pergeseran anggaran dan refocusing target capaian kinerja pembangunan,

dengan tujuan agar penanganan pandemi ini dapat lebih fokus dan menyeluruh dengan didukung oleh anggaran belanja daerah yang optimal.

Adapun Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel 3.2

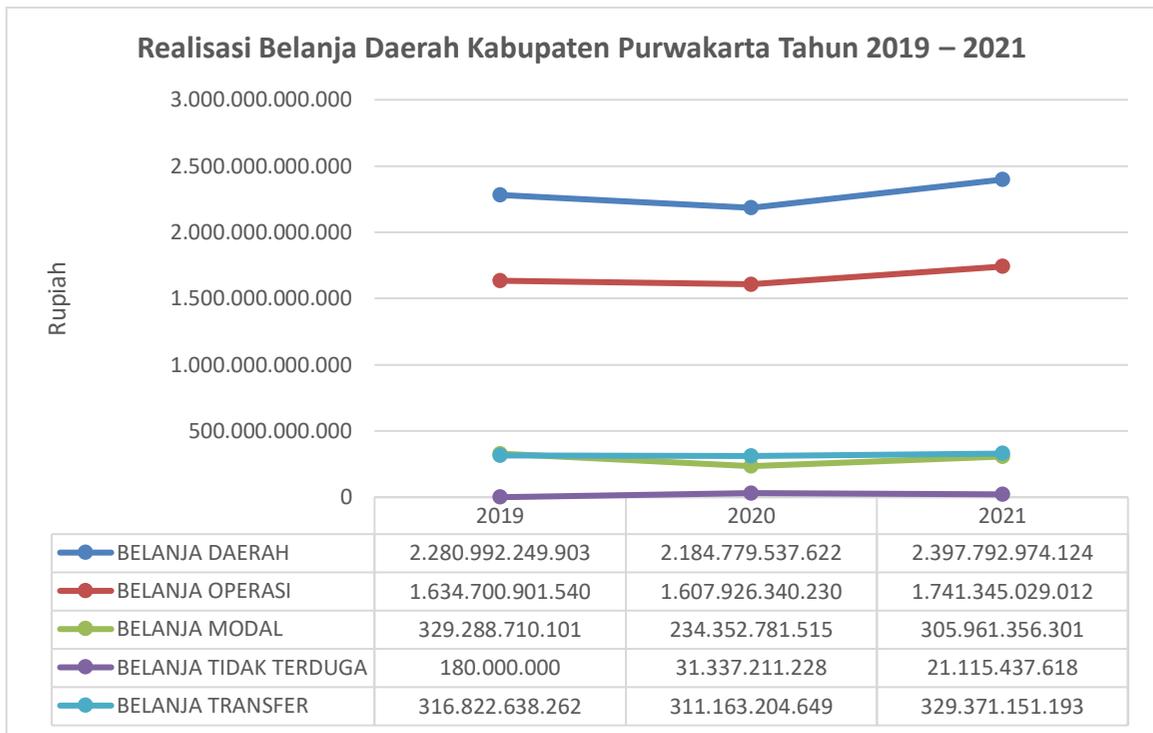
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.280.992.249.903 | 2.184.779.537.622 | 2.397.792.974.124 | 2,77 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.634.700.901.540 | 1.607.926.340.230 | 1.741.345.029.012 | 3,33 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.009.252.000.724 | 961.918.101.977 | 918.150.922.272 | -4,62 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 575.993.092.744 | 572.476.121.676 | 746.409.752.174 | 14,89 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 47.457.805.150 | 45.435.142.660 | 74.666.814.566 | 30,04 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.998.002.922 | 28.096.973.917 | 2.117.540.000 | 606,89 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 329.288.710.101 | 234.352.781.515 | 305.961.356.301 | 0,86 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 9.714.095.515 | 9.601.145.726 | 229.500.000 | -49,39 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 112.992.097.488 | 94.587.063.837 | 164.933.700.271 | 29,04 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 87.680.019.087 | 82.510.483.630 | 95.517.889.109 | 4,93 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 93.917.571.047 | 35.450.120.200 | 38.157.250.021 | -27,31 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 24.984.926.964 | 12.203.968.122 | 7.123.016.900 | -46,39 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 180.000.000 | 31.337.211.228 | 21.115.437.618 | 8.638,47 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 180.000.000 | 31.337.211.228 | 21.115.437.618 | 8.638,47 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 316.822.638.262 | 311.163.204.649 | 329.371.151.193 | 2,03 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 48.663.409.140 | 29.927.822.558 | 27.860.059.993 | -22,70 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 268.159.229.122 | 281.235.382.091 | 301.511.091.200 | 6,04 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.3

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD 2022

Sedangkan bila dilihat dari proporsi persentase setiap sektor Belanja terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.4

Proporsi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan data grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Operasi sangat mendominasi terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 yakni rata-rata sebesar 72,63%, kemudian sektor Belanja Transfer rata-rata sebesar 13,96%, Belanja Modal rata-rata sebesar 12,64% dan Belanja Tak Terduga rata-rata sebesar 0,77%.

Dari Belanja Operasi tersebut yang paling mendominasi yaitu kebutuhan untuk Belanja Pegawai yang mencapai rata-rata sebesar 42,19%. Besarnya anggaran tersebut untuk kebutuhan pembayaran Gaji dan Tunjangan.

3.1.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja keuangan masa lalu pada pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021, khususnya pada pengelolaan Pembiayaan Daerah memperlihatkan trend dimana setiap tahun ada penurunan pembiayaan dengan rata-rata sebesar -19,79%. Dari sektor Penerimaan Pembiayaan terlihat rata-rata penurunannya sebesar -26,93%. Kemudian dari sektor Pengeluaran Pembiayaan terlihat rata-rata penurunannya sebesar -57,05%.

Penurunan Pembiayaan Daerah dikarenakan pada sektor Penerimaan Pembiayaan terutama pada pos rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) terdapat penyerapan anggaran yang optimal ditahun sebelumnya.

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel 3.3

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

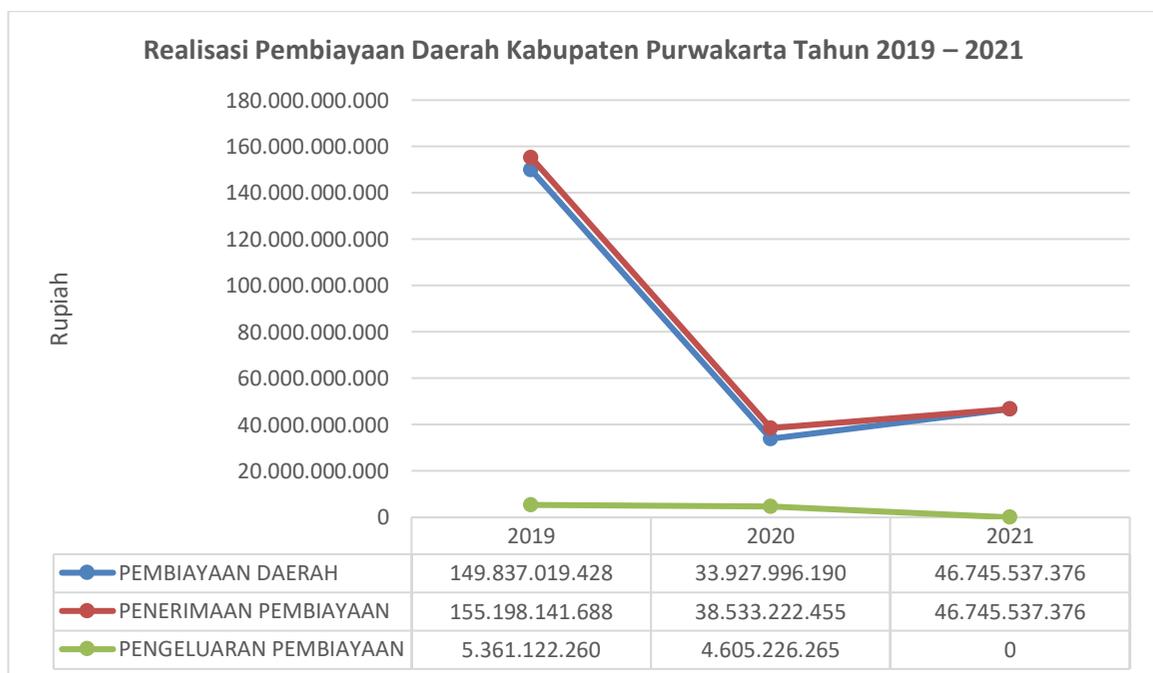
| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 149.837.019.428 | 33.927.996.190 | 46.745.537.376 | -19,79 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 155.198.141.688 | 38.533.222.455 | 46.745.537.376 | -26,93 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 155.198.141.688 | 38.533.222.455 | 46.745.537.376 | -26,93 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.361.122.260 | 4.605.226.265 | 0 | -57,05 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.050.000.000 | 4.500.000.000 | 0 | -55,45 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 311.122.260 | 105.226.265 | 0 | -83,09 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.5

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu Tahun 2019 – 2021, secara umum dari aspek pengelolaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat bahwa APBD Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu Tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dari Rp. 2.325.063.736.535 ditahun 2019 menjadi Rp. 2.449.562.016.463 pada tahun 2021, atau rata-rata pertumbuhan kenaikannya sebesar 2,86%.

Berikut kami sajikan komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhannya pada komponen APBD Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Grafik 3.6

Komposisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhannya terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Tabel 3.4

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.169.865.594.847 | 2.197.597.078.808 | 2.402.816.479.087 | 5,31 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 420.353.733.502 | 428.077.117.998 | 515.746.568.984 | 11,16 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 244.826.953.244 | 250.048.366.305 | 286.064.771.702 | 8,27 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 21.438.760.660 | 27.806.891.170 | 22.984.397.619 | 6,18 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.349.792.210 | 5.901.060.417 | 5.964.612.631 | 5,69 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 148.738.227.388 | 144.320.800.106 | 200.732.787.032 | 18,06 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.466.082.804.899 | 1.482.618.181.810 | 1.763.835.158.455 | 10,05 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.254.756.529.989 | 1.257.384.044.758 | 1.471.176.858.725 | 8,61 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 211.326.274.910 | 225.234.137.052 | 292.658.299.730 | 18,26 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 283.429.056.446 | 286.901.779.000 | 123.234.751.648 | -27,91 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 116.030.301.446 | 119.433.257.000 | 123.234.751.648 | 3,06 |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 167.398.755.000 | 167.468.522.000 | 0 | -49,98 |
| | | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.280.992.249.903 | 2.184.779.537.622 | 2.397.792.974.124 | 2,77 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.634.700.901.540 | 1.607.926.340.230 | 1.741.345.029.012 | 3,33 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.009.252.000.724 | 961.918.101.977 | 918.150.922.272 | -4,62 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 575.993.092.744 | 572.476.121.676 | 746.409.752.174 | 14,89 |

| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 47.457.805.150 | 45.435.142.660 | 74.666.814.566 | 30,04 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.998.002.922 | 28.096.973.917 | 2.117.540.000 | 606,89 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 329.288.710.101 | 234.352.781.515 | 305.961.356.301 | 0,86 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 9.714.095.515 | 9.601.145.726 | 229.500.000 | -49,39 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 112.992.097.488 | 94.587.063.837 | 164.933.700.271 | 29,04 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 87.680.019.087 | 82.510.483.630 | 95.517.889.109 | 4,93 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 93.917.571.047 | 35.450.120.200 | 38.157.250.021 | -27,31 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 24.984.926.964 | 12.203.968.122 | 7.123.016.900 | -46,39 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 180.000.000 | 31.337.211.228 | 21.115.437.618 | 8.638,47 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 180.000.000 | 31.337.211.228 | 21.115.437.618 | 8.638,47 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 316.822.638.262 | 311.163.204.649 | 329.371.151.193 | 2,03 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 48.663.409.140 | 29.927.822.558 | 27.860.059.993 | -22,70 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 268.159.229.122 | 281.235.382.091 | 301.511.091.200 | 6,04 |
| | | | | | |
| | Total Surplus/(Defisit) | -111.126.655.056 | 12.817.541.186 | 5.023.504.963 | -86,17 |
| | | | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 149.837.019.428 | 33.927.996.190 | 46.745.537.376 | -19,79 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 155.198.141.688 | 38.533.222.455 | 46.745.537.376 | -26,93 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 155.198.141.688 | 38.533.222.455 | 46.745.537.376 | -26,93 |

| KODE REKENING | URAIAN | REALISASI 2019 | REALISASI 2020 | REALISASI 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.361.122.260 | 4.605.226.265 | 0 | -57,05 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.050.000.000 | 4.500.000.000 | 0 | -55,45 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 311.122.260 | 105.226.265 | 0 | -83,09 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) | 38.710.364.372 | 46.745.537.376 | 51.769.042.339 | 15,75 |
| | TOTAL APBD | 2.325.063.736.535 | 2.236.130.301.263 | 2.449.562.016.463 | 2,86 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Laporan Neraca Daerah memberikan informasi penting kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah Daerah, DPRD, pemberi pinjaman, investor dan masyarakat luas lainnya) tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Neraca Daerah ini terdiri atas:

1. **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung

maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Dari Neraca Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2021 dapat diperoleh gambaran bahwa rata-rata pertumbuhan aset yang menjadi hak dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah 3,67%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah 6,72% menandakan bahwa roda pemerintahan dijalankan dengan tidak sepenuhnya mengandalkan pinjaman.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas dana meliputi (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan.

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dari tahun 2019–2021 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 3,56% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan bersih yang menjadi modal kerja dalam pelaksanaan program kegiatan.

Adapun Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 17.587.753.927 | 33.155.076.596 | 14.067.613.038 | 15,47 |
| Kas di pemegang kas | | | | |
| Kas di bendahara pengeluaran | 54.751.819 | 105.242 | | -99,90 |
| Kas di bendahara penerimaan | | | 166.249.475 | |
| Kas di BLUD | 4.227.185.263 | 4.250.922.606 | 34.987.065.309 | 361,80 |
| Kas Dana JKN | 12.463.323.288 | 7.145.850.034 | 2.202.624.905 | -55,92 |
| Kas di BOS | 4.407.114.847 | 2.196.235.941 | 345.489.612 | -67,22 |
| Kas Lainnya | | | 59.526.857 | |
| Piutang Pajak | 86.064.185.001 | 100.648.023.433 | 111.172.840.314 | 13,70 |
| Penyisihan Piutang Pajak | -47.739.812.563 | -55.451.646.227 | -63.278.662.349 | 15,13 |
| Piutang Pajak netto | 38.324.372.438 | 45.196.377.206 | 47.894.177.965 | 11,95 |
| Piutang Retribusi | 3.509.330.165 | 3.540.825.165 | 11.410.020.800 | 111,57 |
| Penyisihan Piutang Retribusi | -1.993.864.705 | -2.475.258.795 | -6.794.752.870 | 99,33 |
| Piutang Retribusi netto | 1.515.465.460 | 1.065.566.370 | 4.615.267.930 | 151,72 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 25.965.807.343 | 18.483.548.911 | 14.075.011.941 | -26,33 |
| Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | -129.829.036 | | | -100,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat netto | 25.835.978.307 | 18.483.548.911 | 14.075.011.941 | -26,15 |

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Belanja Dibayar di Muka (Uang muka) | 131.862.750 | 237.196.083 | 498.821.667 | 95,09 |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | | | |
| Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi | 163.000.000 | 11.600.000 | | -96,44 |
| Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi | -16.300.000 | -58.000 | | -99,82 |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto | 146.700.000 | 11.542.000 | | -96,07 |
| Piutang Lainnya | 46.030.545.629 | 49.726.072.152 | 86.113.244.627 | 40,60 |
| Penyisihan Piutang Lainnya | -4.376.038.893 | -6.528.637.712 | -8.051.755.785 | 36,26 |
| Piutang Lainnya Netto | 41.654.506.736 | 43.197.434.440 | 78.061.488.842 | 42,21 |
| Persediaan | 39.920.823.155 | 44.678.256.630 | 51.799.278.597 | 13,93 |
| Jumlah Aset Lancar | 186.269.837.990 | 199.618.112.059 | 248.772.616.138 | 15,90 |
| | | | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | |
| Investasi Permanen | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 52.779.393.033 | 57.406.719.284 | 57.554.289.060 | 4,51 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-BJB | 12.804.792.750 | 12.804.792.750 | 12.804.792.750 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-BPR Raharja | 15.005.917.172 | 19.593.834.811 | 19.792.166.164 | 15,79 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-PDAM | 23.444.229.014 | 23.481.063.481 | 23.452.971.382 | 0,02 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-LKM Mekar Asih | 1.524.454.097 | 1.527.028.242 | 1.504.358.764 | -0,66 |
| Jumlah Investasi Permanen | 52.779.393.033 | 57.406.719.284 | 57.554.289.060 | 4,51 |
| Investasi Non Permanen | | | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | 52.779.393.033 | 57.406.719.284 | 57.554.289.060 | 4,51 |

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 284.863.397.012 | 294.430.832.738 | 294.763.215.238 | 1,74 |
| Peralatan dan Mesin | 800.462.427.113 | 911.046.928.665 | 1.082.932.791.460 | 16,34 |
| Gedung dan Bangunan | 1.159.936.793.406 | 1.218.250.849.340 | 1.329.615.168.282 | 7,08 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.404.732.800.195 | 1.437.694.541.385 | 1.473.321.515.115 | 2,41 |
| Aset Tetap Lainnya | 176.297.666.152 | 196.687.784.201 | 203.635.603.801 | 7,55 |
| Kontruksi dalam Pengerjaan | 20.883.435.584 | 36.526.260.270 | 14.463.980.084 | 7,25 |
| Akumulasi Penyusutan | -1.388.173.719.948 | -1.597.502.150.400 | -1.796.109.112.121 | 13,76 |
| Jumlah Aset Tetap | 2.459.002.799.514 | 2.497.135.046.199 | 2.602.623.161.859 | 2,89 |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 50.899.000 | 50.899.000 | 50.899.000 | 0,00 |
| Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran Netto | 50.899.000 | 50.899.000 | 50.899.000 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Rugi | 4.148.736.385 | 4.311.736.385 | 4.192.198.285 | 0,58 |
| Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi | | | | |
| Tuntutan Ganti Rugi Netto | 4.148.736.385 | 4.311.736.385 | 4.192.198.285 | 0,58 |
| Dana Talangan dari BI (Eks BKPD-BBKO) | | | | |
| Dana Talangan dari Kas Daerah (Eks BKPD-BBKO) | | | | |
| Kemitraan dengan pihak ketiga | 4.507.174.733 | 4.507.174.733 | 4.507.174.733 | 0,00 |

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tanah Sadang Terminal Square | 3.625.500.000 | 3.625.500.000 | 3.625.500.000 | 0,00 |
| Bangunan Sadang Terminal Square | | | | |
| Hewan Ternak yang Dikerjasamakan dengan masyarakat | | | | |
| Aset Tanah yang dikerjasamakan dengan PT. SHP | 881.674.733 | 881.674.733 | 881.674.733 | 0,00 |
| Aset Tak Berwujud | | | | |
| Amortisasi Aset Tidak berwujud | | | | |
| Aset Tak Berwujud Netto | | | | |
| Aset Lain-lain | 11.714.928.817 | 2.721.516.317 | 2.916.366.317 | -34,80 |
| BKPD (BBO) | | | | |
| BKPD Kecamatan Purwakarta | | | | |
| BKPD Kecamatan Plered | | | | |
| BKPD Kecamatan Campaka | | | | |
| Dana Bergulir BPR Raharja (Invest. Non Permanen) | 115.660.664 | 115.660.664 | 115.660.664 | 0,00 |
| Aset lainnya yang dihibahkan kepada masyarakat | | | | |
| Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga | 9.646.602.000 | | 194.850.000 | |
| Hewan ternak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga | 378.265.999 | 378.265.999 | 378.265.999 | 0,00 |
| Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat | 1.574.400.154 | 2.227.589.654 | 2.227.589.654 | 20,74 |
| Jumlah Aset Lainnya | 20.421.738.935 | 11.591.326.435 | 11.666.638.335 | -21,30 |
| JUMLAH ASET | 2.718.473.769.472 | 2.765.751.203.977 | 2.920.616.705.392 | 3,67 |
| | | | | |
| | | | | |

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Hutang Pajak | | | | |
| Utang pada Pihak Ketiga | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 29.764.772 | 2.653.043 | 59.526.857 | 1.026,32 |
| Utang Bunga | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan diterima dimuka | 5.772.398.200 | 5.712.176.865 | 3.745.980.565 | -17,73 |
| Utang Belanja | 83.880.854.240 | 89.930.306.855 | 99.000.975.355 | 8,65 |
| Utang jangka pendek lainnya | 1.663.319.704 | 2.931.607.116 | 1.225.330.650 | 9,02 |
| Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang | | | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 91.346.336.916 | 98.576.743.879 | 104.031.813.427 | 6,72 |
| | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | |
| Hutang Kepada Lembaga Keuangan | | | | |
| Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | | | | |
| Utang Jangka panjang lainnya | | | | |
| Hutang Kepada Pemerintah Pusat | | | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 91.346.336.916 | 98.576.743.879 | 104.031.813.427 | 6,72 |
| | | | | |
| | | | | |

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EKUITAS DANA | | | | |
| EKUITAS DANA LANCAR | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | | | | |
| Pendapatan yang Ditangguhkan | | | | |
| Cadangan Piutang | | | | |
| Cadangan Persediaan | | | | |
| Cadangan untuk Biaya dibayar dimuka | | | | |
| Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | | | | |
| Jumlah Ekuitas Dana Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| EKUITAS DANA INVESTASI | | | | |
| Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | | | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | | | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | | | | |
| Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | | | | |
| Jumlah Ekuitas Dana Investasi | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH EKUITAS/ EKUITAS DANA | | | | |
| JUMLAH EKUITAS | 2.627.127.432.556 | 2.667.174.460.098 | 2.816.584.891.965 | 3,56 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 2.718.473.769.472 | 2.765.751.203.977 | 2.920.616.705.392 | 3,67 |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, 2022

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah.

Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Purwakarta periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Purwakarta diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat dan antar daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
3. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan pelayanan publik terkait pendapatan daerah berupa pelayanan konsultasi, pengaduan, penelusuran dan pemberian apresiasi atau penghargaan kepada wajib pajak teladan;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mengoptimalkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
10. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;
11. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan perkembangan penyebaran Covid-19;
12. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah;
13. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;

2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan kesehatan masyarakat, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya;
3. Dukungan pelaksanaan pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19;
4. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah;
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;

6. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
7. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
8. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
9. Pemenuhan dana fungsi kesehatan sebesar 10% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;
10. Pemenuhan dana fungsi infrastruktur sebesar 40% secara bertahap dalam rangka peningkatan pemenuhan infrastruktur daerah;
11. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
12. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak; dan
13. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi;

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan pengelolaan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- a) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

- b) Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
- c) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis Penggunaan Anggaran dapat dilihat dari pengelolaan belanja daerah dimana rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu tahun 2019-2021 sebesar 2,77%.

Pada komponen Belanja Operasi khususnya untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) di Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu tahun 2019-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhannya menurun sebesar -4,62%.

Sedangkan bila dilihat dari proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) terhadap Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran selama kurun waktu tahun 2019-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,12%.

Adapun analisis pertumbuhan dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Purwakarta tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 3.6

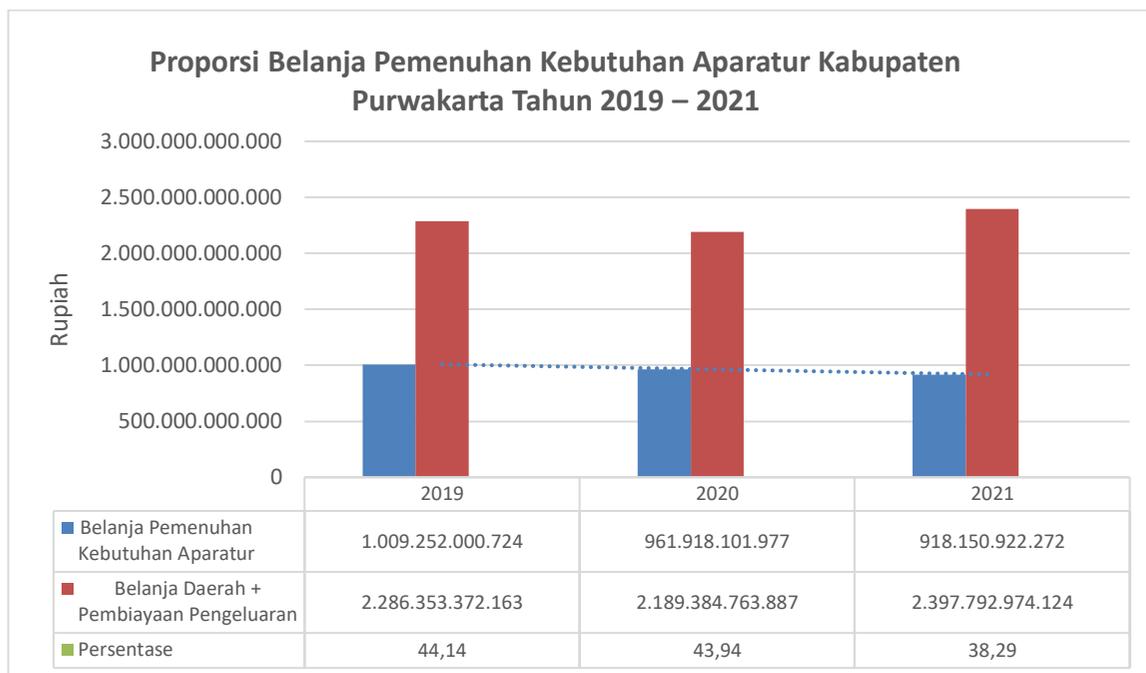
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

| No. | Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|-----|------------|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/4 x 100) |
| 1 | Tahun 2019 | 1.009.252.000.724 | 2.286.353.372.163 | 44,14 |
| 2 | Tahun 2020 | 961.918.101.977 | 2.189.384.763.887 | 43,94 |
| 3 | Tahun 2021 | 918.150.922.272 | 2.397.792.974.124 | 38,29 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Grafik 3.7

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021



Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai / Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran trendnya menurun, dimana nilai proporsi rata-rata sebesar 42,12%. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

Penghitungan defisit riil anggaran di Kabupaten Purwakarta dihitung melalui Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan Total Kebutuhan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan perhitungan ini akan terlihat berapa besaran defisit sesuai dengan kemampuan Pendapatan Daerah.

Adapun perhitungan analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.169.865.594.847 | 2.197.597.078.808 | 2.402.816.479.087 |
| | Dikurangi Realisasi | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 2.280.992.249.903 | 2.184.779.537.622 | 2.397.792.974.124 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5.361.122.260 | 4.605.226.265 | 0 |
| | Defisit Riil | -116.487.777.316 | 8.212.314.921 | 5.023.504.963 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Dalam upaya mengatasi defisit ini salah satunya adalah melalui pemanfaatan anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya. Dimana dalam menghitung komponen penutup defisit riil ini adalah dengan membagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya dengan Total Defisit Riil setiap tahunnya.

Adapun Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

| No. | Uraian | Realisasi (Rp.) | | |
|-----|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| A. | Defisit Riil | -116.487.777.316 | 8.212.314.921 | 5.023.504.963 |
| | ditambah | | | |
| B. | Penerimaan Pembiayaan : | 155.198.141.688 | 38.533.222.455 | 46.745.537.376 |

| No. | Uraian | Realisasi (Rp.) | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 155.198.141.688 | 38.533.222.455 | 46.745.537.376 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 |
| C. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 38.710.364.372 | 46.745.537.376 | 51.769.042.339 |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

Tabel 3.9

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2021

| No. | Uraian | Realisasi Tahun | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Jumlah SILPA | 38.710.364.372 | 46.745.537.376 | 51.769.042.339 | 15,75 |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | - | - | - | |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | - | - | - | |
| 4 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | - | - | - | |
| 5 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | - | - | - | |
| 6 | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Sebelum terselesaikan | - | - | - | |
| 7 | Kegiatan Lanjutan | - | - | - | |

Sumber : LRA Tahun 2019-2021, BKAD tahun 2022

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu tiga tahun mendatang.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam menyusun analisis kerangka pendanaan pembangunan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diterbitkan turunan peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, analisis proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Purwakarta untuk 3 (tiga) tahun mendatang harus mempertimbangkan pemenuhan mandatory spending sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pemenuhan kebutuhan prioritas pembangunan nasional maupun daerah sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan, dengan memperhitungkan tren pertumbuhan capaian realisasi kinerja keuangan pada tahun sebelumnya

agar proyeksi anggaran yang disusun dapat sesuai dengan kemampuan target anggaran keuangan yang akan dicapai.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja

Dengan memperhatikan kondisi sekarang dimana kebijakan pengelolaan keuangan daerah masih diarahkan pada penanganan sisa dampak pandemi Covid-19 dan penanganan dampak inflasi daerah, tentunya akan mempengaruhi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang sama-sama memerlukan dukungan anggaran untuk mewujudkan program prioritas yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, pengelolaan kebijakan keuangan daerah harus dapat mengukur kemampuan kapasitas riil dalam membiayai atau mendanai program prioritas pembangunan daerah agar dapat berjalan sesuai target yang telah dilakukan penyesuaian.

Sejalan dengan hal itu, pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU HKPD”) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah terutama peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH).

Realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019-2021 dimana pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah sebesar 5,31%.

Kemudian untuk realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019 - 2021 dimana pertumbuhan rata-rata kebutuhan belanja daerah sebesar 2,77%.

Sedangkan realisasi pembiayaan daerah dari pos penerimaan pembiayaan apabila memperhatikan realisasi anggaran tahun 2019-2021 dimana pertumbuhan rata-rata pembiayaan daerah sebesar -19,79%.

Dari uraian diatas, maka proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dapat disimpulkan bahwa

proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Purwakarta dalam kurun waktu 2024 – 2026 rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,64%

Adapun Proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| KODE REKENING | URAIAN | PROYEKSI 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2.451.297.029.258 | 2.487.389.549.811 | 2.536.888.117.380 | 1,72 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 749.285.264.555 | 760.752.492.323 | 782.467.778.588 | 2,18 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 493.164.444.405 | 497.264.183.455 | 503.049.354.401 | 0,99 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 40.131.794.939 | 41.488.739.139 | 42.976.405.759 | 3,43 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.635.881.071 | 7.998.828.832 | 8.386.353.432 | 4,69 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 208.353.144.140 | 214.000.740.897 | 228.055.664.996 | 4,60 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.702.011.764.703 | 1.726.637.057.488 | 1.754.420.338.792 | 1,52 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.506.316.436.671 | 1.525.561.517.921 | 1.546.828.734.834 | 1,33 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 195.695.328.032 | 201.075.539.567 | 207.591.603.958 | 2,96 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3.02 | Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 | 1,64 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.955.085.354.777 | 1.970.743.893.225 | 2.003.231.802.963 | 1,22 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 995.261.945.631 | 994.691.735.221 | 995.691.735.221 | 0,02 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 908.632.645.891 | 921.651.823.691 | 949.860.491.560 | 2,24 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | PROYEKSI 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 45.698.163.255 | 46.888.972.328 | 46.888.972.328 | 1,27 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.492.600.000 | 7.511.361.985 | 10.790.603.854 | 35,27 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 162.486.404.445 | 182.005.946.954 | 196.389.605.672 | 9,31 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.237.828.888 | 1.361.982.438 | 1.591.637.826 | 12,99 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.964.513.876 | 75.951.602.386 | 78.332.961.485 | 4,19 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40.631.694.266 | 47.331.694.266 | 52.218.933.269 | 12,24 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 35.953.645.869 | 43.661.946.318 | 49.145.809.867 | 15,11 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.698.721.546 | 13.698.721.546 | 15.100.263.225 | 8,77 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 23.348.210.605 | 23.511.954.478 | 23.708.989.850 | 0,77 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 23.348.210.605 | 23.511.954.478 | 23.708.989.850 | 0,77 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 348.669.312.558 | 348.779.081.017 | 349.209.044.758 | 0,08 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 44.927.822.558 | 44.962.193.106 | 44.692.156.847 | -0,26 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 303.741.490.000 | 303.816.887.911 | 304.516.887.911 | 0,13 |
| | | | | | |
| | Total Surplus/(Defisit) | -38.292.253.127 | -37.651.325.863 | -35.651.325.863 | -3,51 |
| | KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 | 1,64 |
| | | | | | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 38.292.253.127 | 37.651.325.863 | 35.651.325.863 | -3,51 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 43.292.253.127 | 42.651.325.863 | 40.651.325.863 | -3,10 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 43.292.253.127 | 42.651.325.863 | 40.651.325.863 | -3,10 |

| KODE REKENING | URAIAN | PROYEKSI 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0,00 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiIpa) | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL APBD | 2.494.589.282.385 | 2.530.040.875.674 | 2.577.539.443.243 | 1,64 |

Sumber : Analisa TAPD tahun 2022

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk mengetahui besaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Dalam menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah terdapat penentuan Proyeksi SILPA, Proyeksi SiLPA berdasarkan analisis pertumbuhan realisasi besaran SiLPA pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2019 - 2021. Pada periode tahun 2024 - 2026 diproyeksikan menurun sebesar -3,10%. Penurunan SilPA tersebut diharapkan penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan Belanja Daerah yang terdiri dari : a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer, sehingga perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah sama dengan Belanja Daerah.

Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja Tahun 2024 - 2026 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berikut adalah proyeksi SiLPA, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 -2026 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

| Uraian | Proyeksi | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2026 (Rp) |
| Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 43.292.253.127 | 42.651.325.863 | 40.651.325.863 |

Sumber: Analisa Tim, 2023

Tabel 3.12

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

| No. | Uraian | Proyeksi | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pendapatan Daerah | 2.451.297.029.258 | 2.487.389.549.811 | 2.536.888.117.380 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 43.292.253.127 | 42.651.325.863 | 40.651.325.863 |
| | Total penerimaan | 2.494.589.282.385 | 2.530.040.875.674 | 2.577.539.443.243 |
| | Dikurangi: | | | |
| 4 | Belanja Tidak Langsung | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| | | | | |
| | KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 |

Sumber: Analisa Tim, 2023

Tabel 3.13

Belanja Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta

| Kode Rekening | Uraian | Proyeksi | | |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.955.085.354.777 | 1.970.743.893.225 | 2.003.231.802.963 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 995.261.945.631 | 994.691.735.221 | 995.691.735.221 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 908.632.645.891 | 921.651.823.691 | 949.860.491.560 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 45.698.163.255 | 46.888.972.328 | 46.888.972.328 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.492.600.000 | 7.511.361.985 | 10.790.603.854 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 162.486.404.445 | 182.005.946.954 | 196.389.605.672 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.237.828.888 | 1.361.982.438 | 1.591.637.826 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.964.513.876 | 75.951.602.386 | 78.332.961.485 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40.631.694.266 | 47.331.694.266 | 52.218.933.269 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 35.953.645.869 | 43.661.946.318 | 49.145.809.867 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.698.721.546 | 13.698.721.546 | 15.100.263.225 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 23.348.210.605 | 23.511.954.478 | 23.708.989.850 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 23.348.210.605 | 23.511.954.478 | 23.708.989.850 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 348.669.312.558 | 348.779.081.017 | 349.209.044.758 |

| Kode Rekening | Uraian | Proyeksi | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 44.927.822.558 | 44.962.193.106 | 44.692.156.847 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 303.741.490.000 | 303.816.887.911 | 304.516.887.911 |
| KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 |

Sumber: Analisa Tim, 2023

Selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program prioritas*).

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purwakarta selama 3 (tiga) tahun dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Adapun penjelasan masing-masing prioritas, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| No. | Uraian | Proyeksi | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2025 (Rp) | Tahun 2026 (Rp) |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 |
| 1 | Prioritas I (untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar) | 1.753.410.835.082 | 1.773.519.089.141 | 1.801.349.728.465 |
| 2 | Prioritas II (untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah) | 720.068.413.238 | 735.097.148.287 | 754.254.183.910 |
| 3 | Prioritas III (untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya) | 16.110.034.065 | 16.424.638.246 | 16.935.530.868 |

Sumber: Analisa Tim, 2023

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Secara umum dengan adanya pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk dampak dari kenaikan inflasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah;

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat

peningkatan dari tahun 2019 – 2022 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2022 mencapai 71,56 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan tahun 2022 masih menyandang predikat Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

2. Kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB masih perlu ditingkatkan secara optimal

Sejak pandemi Covid-19 melanda diberbagai daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, telah menguji kesiapan dan kualitas mutu pelayanan kesehatan di daerah, akses pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang belum optimal dan memadai telah menjadi kendala yang harus diatasi, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan SDM tenaga kesehatan yang merata, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan memadai termasuk ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan serta penyuluhan dan pemberdayaan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat harus terus ditingkatkan secara optimal.

3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan;

Dalam merespon setiap kejadian bencana yang tidak dapat di prediksi sebelumnya tentu perlu dilakukan langkah antisipatif guna memperoleh informasi/ peringatan awal (early warning) terhadap potensi bencana yang akan terjadi, baik bencana alam maupun bencana karena kelalaian manusia, termasuk bencana akibat kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Dalam penanganan bencana daerah tidak hanya terpusat pada penanganan pasca bencana saja namun harus dilakukan secara sistemis dan sistematis mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kejadian dan penanganan pasca kejadian bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi terhadap sistem ketahanan bencana dan

pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan guna mengukur kesiapan daerah dalam penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui terobosan inovasi;

Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta perkembangannya naik-turun, dimana angka 7,48% ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021, kemudian turun di tahun 2022 ke angka 8,70%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 dan 2022 beranjak naik ke angka 3,42 dan 5,24 persen. Meskipun ada peningkatan tiap tahunnya namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang, maju dan mandiri.

Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang.

Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih harus terus digalakkan, disisi lain program pemulihan ekonomi sangat perlu untuk terus diprioritaskan guna menurunkan angka kemiskinan pada level terendah.

Kebijakan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya penurunan angka kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern;

Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori Baik, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dll. termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang masih belum merata;

Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai sarana konektivitas antar wilayah (jalan dan jembatan) sudah sepatutnya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap wilayah, capaian ketersediaan infrastruktur (Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap) di Kab. Purwakarta tahun 2021 terdapat penurunan dibanding tahun 2020, yakni hanya 83,25 persen atau turun - 4,63 persen. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga berdampak pada pembangunan fisik terutama pembangunan akses jalan, akibatnya penyediaan sarana infrastruktur konektivitas masih belum merata di setiap wilayah.

7. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan penanganan masalah kesehatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan serta penurunan kesejahteraan sosial.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 – 2021 telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta termasuk pendudukan anggaran dan refocusing target kinerja pembangunan untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan jaring sosial. Meskipun secara berangsur upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 ini telah membuahkan hasil dari sebagian aspek yang terdampak, namun dikarenakan dampak dari pandemi ini masih membayangi masyarakat, walaupun Pemerintah Pusat telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetapi pencegahan dan pengendalian Covid-19 menuju Endemi masih tetap dilakukan dan masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta termasuk penanganan penanggulangan kemiskinan yang setiap tahun kecenderungannya terus meningkat.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

1. Bidang Pendidikan

1. Masih kurang meratanya pelayanan pendidikan;
2. Sarana dan Prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan;
3. Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan;
4. Masih kurangnya guru PNS sehingga banyak sekolah yang mengandalkan tenaga guru dari guru bantu maupun guru tidak tetap;
5. Akibat pandemi Covid-19, proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menjadi terganggu sehingga harus dilakukan pola pembelajaran dengan cara jarak jauh atau daring, namun dari segi fasilitas pendukung yang digunakan masih kurang, selain itu metode pembelajarannya masih belum efektif dilaksanakan.

2. Bidang Kesehatan

1. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi lansia dan penyandang cacat;
2. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir;
3. Masih adanya balita gizi buruk dan kasus *stunting*;
4. Masih adanya penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, leptospirosis, ISPA, diare, dan sebagainya);
5. Penyakit degeneratif, penyakit tidak menular pada usia diatas 15 tahun masih belum optimal penanganannya;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
7. Fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal mutu pelayanannya;
8. Jumlah peserta penjaminan kesehatan menurun;
9. Meningkatnya jumlah pasien akibat covid-19, yang menyebabkan daya tampung fasilitas kesehatan dan rumah sakit meningkat bahkan tidak terlayani dengan baik karena keterbatasan ruang perawatan dan tenaga medis kesehatan;

10. Masih kurangnya tenaga medis kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensi serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata sesuai kebutuhan, serta kualitas sehingga pelayanan kesehatan belum optimal;
11. Masih adanya penduduk miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Tertundanya pekerjaan fisik akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19;
2. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
3. Cakupan air bersih/air minum masih ada yang belum memenuhi SPM;
4. Belum optimalnya pengelolaan drainase pada beberapa titik kawasan permukiman maupun jalan, sehingga menyebabkan potensi genangan air yang cukup tinggi;
5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional, dimana prasarana TPA/TPS masih kurang sehingga daya tampung sampah belum optimal;
6. Masih banyak kerusakan jalan dan jembatan yang kondisinya kurang baik akibat beban yang melebihi tonase, kontur tanah yang labil, maupun akibat bencana alam;
7. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum adanya peraturan pengelolaan PSU di lingkungan permukiman;
2. Terbatasnya penyediaan lahan dan pemenuhan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
3. Masih terdapat kawasan yang perlu penanganan lebih lanjut untuk mencegah menjadi kawasan kumuh;

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya pelayanan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanggulangan resiko bencana;
2. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku, terutama Perda terkait Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K3);

6. Bidang Sosial

1. Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertiban dalam upaya koersif anak jalanan dan orang terlantar;
2. Data PMKS daerah belum bisa terintegrasi dengan data pusat;
3. Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap permasalahan sosial (kondisi anak terlantar, penyandang disabilitas);
4. Dampak penanganan pandemi Covid-19 dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih terdapat data penerima bantuan yang kurang tepat sasaran dan masih yang belum dapat menerima bantuan dikarenakan terbatasnya kuota jumlah penerima bantuan;
5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dan lansia;
6. Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal;
7. Terjadinya Pandemi Covid-19 berdampak pada potensi meningkatnya jumlah keluarga miskin;

7. Bidang Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan kerja karena keterbatasan sarana prasarana dan instruktur, serta kurikulum yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
4. Belum tersedianya data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja, Persentase tenaga kerja yang siap kerja, AKAD (antar kerja antar daerah) yang dikarenakan tidak adanya penganggaran guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Belum sepenuhnya semua pekerja memahami hukum ketenagakerjaan;
6. Relatif masih minimnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing di dunia kerja, terlebih dengan akan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) beserta konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pekerja dan calon;
7. Isu terkait pasar kerja didorong menjadi inklusi, perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan;
8. Terjadinya Pandemi Covid-19 berdampak pada potensi meningkatnya jumlah pengangguran;

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG dikarenakan kurangnya komitmen masing-masing perangkat daerah;
2. Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah anak, remaja dan lansia;
3. Masih banyak ditemukan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak;
4. Masih kurangnya sharing dana desa untuk keberlanjutan P2WKSS;

5. Belum optimalnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

9. Bidang Pangan

1. Serangan OPT yang masih tinggi;
2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi;
3. Pengawasan ketersediaan dan harga pangan belum optimal;
4. Pengadaan beras dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah belum optimal.

10. Bidang Pertanahan

1. Lambatnya proses administrasi pertanahan;
2. Kurangnya kesadaran hukum terkait pemanfaatan tanah kas desa oleh masyarakat, sehingga banyak menimbulkan konflik;
3. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah desa;
4. Minimnya bukti otentik tentang kepemilikan maupun tukar menukar tanah;

11. Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3;
2. Masih belum optimalnya penanganan sampah;
3. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL;
4. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan;

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk proses pembangunan;

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan/memperbarui data kependudukan;

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes sebagai katalis perekonomian desa;
3. Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
5. Hasil temuan inovasi alat teknologi tepat guna rawan plagiarisme/duplikasi;
6. Salah satu indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu aspek ekologi di beberapa desa belum terpenuhi;
7. Belum adanya dukungan terhadap program Rumah Desa Sehat (RDS) yang dicanangkan oleh Kementerian Desa dan PDT di tingkat Kabupaten

14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber KB.
2. Masih Rendahnya Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja.
3. Rendahnya Ratio Petugas Lapangan KB dibanding dengan jumlah Wilayah Pemerintahan (Desa/Kelurahan)
4. Pertumbuhan penduduk yang cepat akibat banyaknya migrasi penduduk dan tingginya angka kelahiran;
5. Masih banyaknya usia kawin pertama di usia dini;

15. Bidang Perhubungan

1. Masih rendahnya ketersediaan angkutan darat.
2. Masih rendahnya Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan).
3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai.
4. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar.
5. Penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan penambahan kendaraan.
6. Belum adanya Terminal Angkutan Penumpang.
7. Kurangnya tertib hukum pengendara kendaraan.
8. Kurangnya sarana dan Prasaran yang dimiliki .
9. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian khusus di bidang Perhubungan

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersedianya rencana induk (master plan) dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola IT di perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan layanan data informasi publik;
4. Masih kurangnya infrastruktur sarana komunikasi dan informasi;
5. Belum semua layanan publik berbasis SPBE yang terintegrasi;

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi, sehingga masih banyak koperasi yang tidak aktif;
2. Rendahnya daya saing UKM;
3. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri;
4. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang;

5. Terbatasnya kompetensi SDM koperasi dan UMKM, sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar;

18. Bidang Penanaman Modal

1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Purwakarta yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Purwakarta;
3. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung promosi investasi;
4. Adanya ijin-ijin tertentu yang memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait, sehingga memperlambat proses perijinan;
5. Banyak ijin yang belum diambil oleh pemohon;

19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Masih rendahnya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Purwakarta, hal ini terlihat dari cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan masih rendah;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga;
3. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan;
4. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan
5. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Purwakarta;
6. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina dan tenaga keolahragaan;
7. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Purwakarta yang memenuhi standar nasional dan internasional;
8. Mempertahankan prestasi Purwakarta pada berbagai olahraga multi event;

9. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di Purwakarta;
10. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Purwakarta yang memenuhi standar nasional dan internasional;

20. Bidang Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time;
2. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistic sektoral;
3. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan;

21. Bidang Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;
2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness);
4. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas;

22. Bidang Kebudayaan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain);
2. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya.
3. Belum tersedia gedung kesenian daerah.

4. Lemahnya database bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.
5. Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah. Perkembangan pariwisata tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sarana rekreasi, pengembangan kebudayaan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia Sebagai Tenaga Ahli. Berkembangnya sanggar seni, baik seni musik, tari di purwakarta cukup baik. akan tetapi blm diimbangi dengan tenaga ahli dari setiap sanggar.
7. Sarana Pendukung/ Alat Kesenian. Kurangnya perhatian terhadap sanggar kesenian dalam fasilitas sarana dan prasarana alat kesenian., dalam upaya pengembangan dan pelestarian kesenian yang ada di daerah.
8. Belum Optimalnya Pendataan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan ciri peninggalan sejarah di daerah tersebut. Sekaligus menjadi daya tarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlihat dari banyaknya peninggalan suatu daerah yang belum diteliti.
9. Pendataan Sanggar. Berkembangnya kesenian di Purwakarta menjadikan banyak berdirinya sanggar seni yang belum di ketahui tempat dan pendiri sanggar tersebut.

23. Bidang Perpustakaan

1. Masih kurangnya pustakawan yang terampil dan bersertifikasi;
2. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan;
4. Terbatasnya koleksi perpustakaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan e-book sebagai media literasi digital;
6. Belum optimalnya dukungan dari para stakeholder terhadap perkembangan perpustakaan;

24. Bidang Kearsipan

1. Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan;
2. Masih rendahnya unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip);
3. Masih minimnya sarana dan prasarana Kearsipan;
4. Masih belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, dan pengelolaan serta pelayanan kearsipan;
5. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif;

25. Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik;
2. Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh bantuan sarana produksi;
3. Sumberdaya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang teknis peternakan dan Perikanan masih relatif terbatas;
4. Pertumbuhan produksi perikanan dan peternakan relatif lambat, sehingga penyediaan daging, telur susu dan ikan masih terbatas;
5. Potensi sumberdaya Peternakan dan perikanan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi peternakan dan perikanan dalam upaya penyediaan pangan hewani;
6. Kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah, relatif masih terbatas;
7. Masih terbatasnya penyediaan produksi daging, telur dan susu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Purwakarta. Dalam hal ini penyediaan sapi potong dan ayam buras, Kabupaten Purwakarta sebagian besar masih bergantung kepada pasokan dari luar Kabupaten;
8. Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan dalam rangka menunjang berkembangnya sentra-

sentra bibit/benih komoditas unggulan peternakan dan perikanan;

26. Bidang Pariwisata

1. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Purwakarta;
2. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan kunjungan wisatawan;
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan;
4. Belum Optimalnya Daya Saing Destinasi Pariwisata, dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur;
5. Masih Kurangnya Penataan dan Pengamanan Objek Wisata. Kondisi potensi objek pariwisata Purwakarta umumnya belum siap jual, namun seiring dengan pengembangan kawasan pariwisata maka perlu penataan yang lebih baik;
6. Penambahan destinasi wisata belum diimbangi dengan infrastruktur dan pengelolaan yang baik;
7. Adanya pandemi covid-19, menyebabkan kunjungan wisatawan dan industri wisata menurun;

27. Bidang Pertanian

1. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas;
2. Terbatasnya lahan pertanian dan belum maksimalnya pemanfaatan lahan;
3. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berstatus PNS yang terus berkurang karena mencapai Batas Usia Pensiun;
4. Terbatasnya permodalan dan masih rendahnya regenerasi petani;
5. Meningkatnya resiko kerugian usaha tani akibat dampak perubahan iklim;
6. Pemasaran hasil pertanian belum maksimal;
7. Perubahan iklim global dan meningkatnya populasi organisme tanaman yang dapat mempengaruhi produksi pertanian.

28. Bidang Perdagangan

1. Masih rendahnya serapan resi Gudang;
2. Masih rendahnya pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat;
3. Masih ditemukannya kasus peredaran barang rusak/kadarluarsa, dan produk makanan dengan bahan berbahaya;

29. Bidang Perindustrian

1. Industri kecil belum optimal dalam memanfaatkan e-commerce;
2. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi;
3. Masih rendahnya pelaksanaan pembinaan terhadap sentra industry;
4. Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing dibandingkan produk serupa dari daerah lain;
5. Dalam penerbitan perijinan usaha industri belum bersinergi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten;

30. Bidang Transmigrasi

1. Terbatasnya kuota pemberangkatan transmigran yang disediakan oleh pemerintah provinsi maupun pusat yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya;
2. Dokumen perjanjian kerjasama antar daerah terkadang terlambat ditanda tangani oleh kepala daerah kabupaten penerima;
3. Kementerian PDT belum menyiapkan lahan dan pemukiman pada lokasi penerima;

31. Unsur Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP, SP, penerapan standar pelayanan minimal

dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik;

2. Belum optimalnya perbaikan manajemen layanan publik berbasis *reinventing government*;
3. Masih belum optimalnya kebutuhan organisasi yang sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Masih belum optimalnya penilaian penyelenggaraan LPPD dan RB Kabupaten.

32. Unsur Sekretariat DPRD

1. Belum optimalnya pemahaman ketugasan dari anggota dewan;
2. Belum optimalnya pemenuhan ketepatan jadwal pembahasan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

33. Unsur Perencanaan

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
2. belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
4. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
5. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
7. Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

34. Unsur Keuangan

1. Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;
2. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
3. Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terutama saat terjadi pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan daerah;

35. Unsur Kepegawaian

1. Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;
2. Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

36. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

37. Unsur Penelitian dan Pengembangan

1. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Purwakarta.

38. Unsur Pengelolaan Perbatasan

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan di Kabupaten Purwakarta.

39. Unsur Pengawasan (Inspektorat)

1. Masih sedikit unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kab. Purwakarta;

2. Masih belum optimalnya laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti;
3. Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/ pemantauan SPIP belum optimal;

40. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

1. Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa/kelurahan;

41. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat akan kehidupan demokrasi dan pendidikan politik, serta pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang masih perlu di tingkatkan;

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Aspek Daya Saing Daerah di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal baik level internasional, nasional maupun regional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan dengan gejolak eksternal. Kondisi perekonomian Kabupaten Purwakarta diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang menyangkut pada aspek daya saing daerah yakni masih belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi dan sumber daya manusia yang profesional dan terampil serta ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan masih terbatas dan belum merata. Selain itu inovasi kebijakan daerah dan pelayanan publik termasuk promosi dan pengembangan kepariwisataan juga masih kurang optimal dan tepat sasaran, sehingga hal ini mempengaruhi dalam peningkatan nilai daya saing daerah dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) terdapat 4 aspek yakni aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/enabling environment, aspek SDM/Human Capital, aspek pasar/market. Daerah dengan daya saing yang tinggi akan membuat daerah tersebut maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, Informasi Indeks Data Saing Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 memperoleh Score/Nilai Indeks sebesar **2.7081**, dengan rincian aspek : 1). Faktor Penguat/ Enabling Environment,

3.6210; 2). Sumber Daya Manusia/ Human Capital, 3.0208; 3). Faktor Pasar/ Market, 2.5625; 4). Ekosistem Inovasi, 1.6281.

4.2 ISU STRATEGIS

Penetapan Isu Strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional dan lokal. Isu Strategis tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta masih dirasakan cukup banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan di Bali, 15-16 November 2022 yang lalu, sebagaimana diketahui, terdapat lima isu strategis global yang dihadapi oleh otoritas pengambil kebijakan di dunia saat ini. **Pertama**, bagaimana mengatasi isu kesehatan akibat pandemi covid dan ketahanan pangan yang disebabkan gangguan pasokan. **Kedua**, bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif. **Ketiga**, bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan ekonomi. **Keempat**, bagaimana CBDC dapat dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, lebih lanjut meramu mitigasi dampak negatif dari asset kripto terhadap stabilitas sistem keuangan melalui kerangka pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dan **Kelima**, bagaimana sinergi antara upaya transisi, termasuk dukungan keuangan berkelanjutan menuju net zero carbon emissions.

Kelima isu tersebut dilatarbelakangi kerentanan perekonomian global dengan tingkat inflasi yang tinggi dengan pemulihan yang lebih lemah. Perang yang tengah berlangsung di Ukraina, disertai dengan tindakan kebijakan dalam merespon perang dan kebangkitan COVID-19 di beberapa negara, telah memperpanjang gangguan rantai pasokan. Kondisi tersebut, seiring dengan meluasnya kebijakan inward looking, khususnya komoditas pangan di sejumlah negara, telah mendorong kenaikan harga komoditas internasional secara signifikan sehingga meningkatkan tekanan inflasi global. Sebagai tanggapan, beberapa negara telah memulai pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama juga diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Secara berkepanjangan, hal ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menahan aliran modal asing dan memperburuk tekanan mata uang di negara berkembang. Selanjutnya, dalam gala seminar yang berlangsung, dielaborasi respon terhadap kelima isu global dimaksud.

Respon pertama terkait food security dan health dibahas pembentukan sistem kolaborasi dan kerjasama global (Global Collaboration and Cooperation) untuk mengatasi tantangan kerawanan pangan (food insecurity) yang terus meningkat. Kolaborasi dan kerjasama global tersebut akan memiliki fokus pada upaya mendukung ketahanan pangan dengan memastikan keterjangkauan (affordability) dan kemudahan perolehan (accessibility) pangan, serta meningkatkan ketersediaan data untuk pupuk. Di samping itu, disepakati pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund) untuk membantu memastikan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi untuk tindakan pencegahan (prevention), kesiapsiagaan (preparedness), dan penanggulangan (response) terhadap pandemi di masa depan. Dana tersebut dikelola oleh World Bank dengan komitmen awal sebesar US\$1,1 miliar.

Respon kedua mengulas bauran kebijakan makroekonomi, membahas upaya untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Pertama, fundamental makroekonomi yang kuat yang dapat dicapai melalui

kebijakan fiskal, moneter, serta stabilitas keuangan yang terencana, terukur, dan terkomunikasi dengan baik. Kedua, kebijakan moneter yang pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve. Hal ini dicapai tidak hanya melalui suku bunga, melainkan juga instrumen lainnya antara lain stabilisasi nilai tukar, pengelolaan aliran modal, serta koordinasi dengan Pemerintah. Ketiga, memperkuat sisi suplai melalui kebijakan sektor riil dan reformasi struktural.

Respon ketiga bertajuk kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk stabilitas dan pemulihan. Pertama, kebijakan moneter perlu kembali menitikberatkan pada stabilitas harga secara pre-emptive dan forward-looking untuk mengendalikan ekspektasi inflasi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama, dilengkapi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen arus modal, terutama di negara berkembang dengan pasar keuangan yang belum dalam. Kedua, pentingnya pendekatan yang semakin granular dan mikro untuk menjaga kestabilan keuangan, terutama sektor korporasi dan rumah tangga. Di samping kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial juga perlu diterapkan dalam rangka memitigasi risiko-risiko terhadap stabilitas keuangan. Ketiga, mengingat persoalan stabilitas harga saat ini bersumber pada sisi penawaran, maka koordinasi antara bank sentral dan pemerintah semakin diperlukan. Koordinasi tersebut tidak terbatas pada sinergi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, namun juga terkait reformasi struktural. G20 berhasil menggabungkan Integrated Policy Framework (IPF) dari IMF dengan Macro Financial Stability Framework (MFSF) dari BIS untuk mengakselerasi terwujudnya stabilitas harga global.

Respon keempat menghadirkan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan asset kripto, disambut baik berbagai inisiatif rancangan CBDC, khususnya dalam penggunaan untuk interoperabilitas dan pembayaran lintas-batas (cross-border payments). Di samping itu, rancangan CBDC juga perlu menjamin stabilitas moneter dan keuangan internasional. Diskusi juga membahas pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan yang kokoh dari asset kripto, termasuk yang disebut stablecoin, dengan menerapkan prinsip 'same activity, same risk, same regulation'. Tujuan yang ingin dicapai adalah memitigasi risiko dari penggunaan asset kripto dan memastikan level playing field, dengan tanpa menghambat inovasi dan

inklusi. Membangun kesadaran public akan risiko penggunaan asset kripto merupakan hal penting.

Respon kelima terkait ekonomi dan keuangan hijau membahas berbagai rekomendasi dalam rangka mengembangkan kerangka untuk pembiayaan transisi menuju net zero emission, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan menuju tujuan tersebut, dan meningkatkan inovasi pada instrument dan pasar keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya pertukaran pengalaman dalam rangka mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi menuju net zero emission.

Presidensi G20 Indonesia memberikan referensi untuk melakukan exit strategy dari kebijakan luar biasa di masa pandemi untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar (scaring effect) untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang tinggi. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak semua anggota untuk berkomitmen mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk dengan terus berkoordinasi dalam langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Presidensi G20 Indonesia berhasil meyakinkan anggota untuk memperkuat komitmen mendukung transisi yang berjalan mulus (orderly), adil (just), dan terjangkau (affordable) menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sumber :

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419222.aspx

4.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyatakan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar 4.1

Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



2. Penanganan Pandemi Covid-19 belum selesai

Sejak mulai masuknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Indonesia, dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Purwakarta, pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kesehatan, perekonomian dan sosial masyarakat. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat dan para pelaku usaha agar pandemi covid-19 tidak menyebar luas dan segera hilang.

Penanganan terhadap dampak pandemi covid-19 telah dilakukan pemerintah dengan memfokuskan pada penanganan kesehatan,

pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Selama tahun 2020 – 2021 penanganan dampak pandemi covid-19 telah cukup banyak menguras anggaran daerah dan mempengaruhi terhadap capaian target pembangunan daerah secara nasional.

Walaupun di tahun 2022 perkembangan Covid-19 sudah mulai reda dan perekonomian masyarakat dan daerah secara nasional sudah mulai berangsur naik dari tahun sebelumnya dibanding pada saat pandemi covid-19 melanda, namun demikian pemerintah masih terus waspada terhadap perkembangan virus tersebut yang sewaktu-waktu dapat bermutasi dan menyerang kembali. Oleh karena itu, penanganan dampak pandemi covid-19 ini masih menjadi isu strategis dan prioritas kesehatan di berbagai daerah.

3. Keamanan Data Pribadi

Data pribadi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu dijaga dengan baik. Terlebih di era digital seperti saat ini, data pribadi bisa diakses dengan mudah dengan adanya internet dan sosial media, namun siapa sangka data pribadi bisa disalahgunakan dan bisa saja menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Pencurian data pribadi adalah hal yang paling sering terjadi, baik secara besar-besaran maupun dalam skala kecil sekalipun. Biasanya, hasil dari pencurian data pribadi ini akan dijual di dark web. Apapun motif pencurian data pribadi ini, tentunya akan memberikan dampak buruk untuk pemiliknya.

Masyarakat Indonesia belum memahami pentingnya melindungi data pribadi, ada berbagai alasan mengapa kita perlu menjaga data pribadi. **Pertama**, perlindungan data pribadi dibutuhkan untuk menghindari ancaman pelecehan seksual, perundungan online, hingga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). **Kedua**, perlindungan data pribadi perlu dilakukan untuk mencegah oknum atau pihak tidak bertanggungjawab dan menghindari potensi pencemaran nama baik. Kemudian alasan terakhir adalah untuk memberikan hak kendali atas data pribadi kita.

4. Pemilu dan Pilkada Serentak

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sebelum ini, pemilu terakhir digelar pada 2019. Artinya, pemilu selanjutnya harus diselenggarakan pada 2024. Sementara, ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

4.2.3 Isu Strategis Regional

1. Telaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019. Pembangunan tahun 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V (2023-2025). Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahap V disusun dengan mempertimbangkan isu strategis dan merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

1) Isu Strategis

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan kualitas penduduk serta persebarannya;
- b) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan;
- c) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
- d) Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
- e) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
- g) Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
- h) Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

2) Visi dan Misi

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU
DI INDONESIA”.

Pernyataan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat diatas, memiliki makna:

1. **Iman dan Takwa** sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. **Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia** dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

1. Misi Satu: **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing** adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Misi Dua: **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah**; adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi

pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Misi Tiga: **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;** adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Misi Empat: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Misi Lima: **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

2. Telaahan Rancangan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026

Dokumen RPD Daerah Tahun 2024-2026 tidak memuat visi dan misi Kepala Daerah, dengan demikian penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan **visi** RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa barat Termaju di Indonesia”**, melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tujuan pertama RPD adalah **Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia** diarahkan untuk menjawab isu strategis kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Tujuan tersebut memiliki 5 (lima) sasaran, meliputi: 1). Meningkatnya akses dan mutu pendidikan; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3). Meningkatnya standar hidup layak masyarakat; 4). Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, dan 5). Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan kedua RPD adalah **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan** merupakan respon atas isu strategis daerah pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan kedua dilaksanakan dengan 8 (delapan) sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2). Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; 3). Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif; 4). Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha; 5). Terkendalinya tingkat kemiskinan; 6). Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja; 7). Meningkatnya ketahanan pangan daerah; dan 8). Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

Tujuan ketiga RPD adalah **Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan** memiliki keterhubungan dengan isu strategis daerah pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur

berkualitas dan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan ketiga memiliki 2 (dua) sasaran strategis, yaitu 1). Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan RPD yang terakhir adalah **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah**, memiliki keterkaitan dengan isu strategis reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Tujuan ini diturunkan kedalam 5 (lima) sasaran strategis, yaitu: 1). Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien; 2). Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera; 3). Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel; 4). Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan 5). Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan yang Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Serta Dan Kelautan Dan Perikanan.
3. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu.
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
5. Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

3. Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 menjadi salah satu dokumen yang harus dipedomani dalam penyusunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Mepedomani RTRW bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana tata ruang.

Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya ruang berfungsi lindung seluas 45 persen dari Wilayah Daerah Provinsi dengan target pencapaian pada tahun 2042;
2. Tersedianya ruang untuk Ketahanan Pangan;
3. Terwujudnya Ruang Investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
4. Terwujudnya ruang untuk Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dalam sistem Wilayah yang terintegrasi; dan
5. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam Penataan Ruang.

Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Strategi untuk kebijakan pengembangan Wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP dengan ketetapan Kawasan yang dikendalikan perkembangannya, Kawasan yang didorong perkembangannya, Kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan Kawasan yang ditingkatkan perkembangannya, meliputi:
 - a) menetapkan WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran dengan fungsi dan arah pengembangan tertentu sesuai potensi dan kendala agar terjadi sinergitas pembangunan;

- b) meningkatkan fungsi WP sebagai klaster pengembangan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa; dan
 - c) meningkatkan fungsi PKW dan PKL untuk mendukung klaster perekonomian di WP, melalui peningkatan penyediaan prasarana dengan kuantitas dan kualitas sesuai standar pelayanan minimal untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam WP.
2. Strategi untuk kebijakan pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi, meliputi:
- a) meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
 - b) mewujudkan Kawasan Perkotaan baru yang terpadu di wilayah PKN Cirebon dengan mengintegrasikan PKW, PKL dan Kawasan Permukiman baru di Kawasan tersebut;
 - c) meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
 - d) meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - e) menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; dan
 - f) pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
3. Strategi untuk kebijakan penataan dan pengembangan infrastruktur Wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi, meliputi:

- a) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan di sepanjang koridor Kawasan Perkotaan Bodebek-Kawasan Perkotaan Bandung Raya- Kawasan Perkotaan Cirebon Raya, dan koridor penghubung PKN-PKW, antar PKW, serta peningkatan konektivitas menuju PKL;
- b) mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;
- c) mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
- d) mengembangkan dan membangun pelabuhan laut di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat, serta bandar udara untuk pengembangan Wilayah di Jawa Barat;
- e) mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
- f) mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
- g) meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
- h) mewujudkan sistem sarana prasarana Wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan baru di Wilayah timur Daerah Provinsi yang meliputi Daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang;
- i) mengembangkan sistem tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perkotaan dan ekonomi;

- j) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP; dan
 - k) meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW.
4. Strategi untuk kebijakan perlindungan dan peningkatan kualitas Kawasan berfungsi lindung, meliputi:
- a) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b) membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - c) meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
 - d) mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
 - e) mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f) meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
 - g) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
 - h) mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
 - i) meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - j) meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;

- k) mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - l) mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5. Strategi untuk kebijakan pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan nasional, meliputi:
- a) mengukuhkan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai KP2B yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b) mengamankan keberadaan KP2B di Kawasan pesisir pantai utara Daerah Provinsi agar tetap berfungsi sebagai salah satu lumbung padi nasional;
 - c) melakukan sinergi antara pengembangan jaringan irigasi dengan pengembangan lahan sawah;
 - d) merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah;
 - e) memelihara jaringan irigasi teknis dan setengah teknis melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
 - f) meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan budi daya pertanian sebagai kegiatan ekonomi Wilayah; dan
 - g) pengembangan lahan sawah yang dilindungi untuk periode 20 tahun ke depan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan sawah dilakukan melalui mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif dengan peningkatan pembangunan DI baru serta sarana prasarana lainnya yang mendukung penyediaan pangan di Daerah Provinsi.

6. Strategi untuk kebijakan pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan Pulau Kecil dengan pendekatan keterpaduan Ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, meliputi:
 - a) merehabilitasi Kawasan pelestarian ekologi pesisir, laut dan Pulau Kecil serta Kawasan perlindungan bencana pesisir;
 - b) mengembangkan kegiatan ekonomi Wilayah melalui peningkatan produktivitas perikanan dan sumber daya laut lainnya;
 - c) pemanfaatan hutan bakau secara lestari dan terpadu;
 - d) mengendalikan pencemaran di Kawasan Pesisir, laut dan Pulau Kecil; dan
 - e) mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada tanah timbul melalui pengaturan Pola Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Strategi untuk kebijakan optimalisasi potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - a) meningkatkan ekonomi Wilayah yang belum berkembang dengan peningkatan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
 - b) menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir komoditas unggulan Wilayah;
 - c) mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan menengah agar terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur regional melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang tetap menjaga Kawasan berfungsi lindung dan pertanian pangan berkelanjutan di Kawasan Perkotaan serta mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
 - d) mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan di koridor Bodebek- Cikampek-Bandung serta pada koridor rencana pengembangan KPI di Jawa Barat bagian Utara.

8. Strategi untuk kebijakan pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan RTR pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan agar fungsi Kawasan terjaga; dan
 - b) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - c) strategi pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Telaahan RPJMD/RPD Daerah Lain

Penyusunan RPD juga memperhatikan dokumen RPJMD/RPD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1

Telaahan RPJMD/RPD Daerah Lain

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD/RPD | Kebijakan RPJMD/RPD | Keterangan |
|-----|--------------|-------------------|---|---|
| 1 | Kab. Cianjur | 2021-2026 | <p>VISI :</p> <p>“CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0; 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0; 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi; 4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup; 5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0; | Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2021-2026 |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD/RPD | Kebijakan RPJMD/RPD | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------|---|--|
| 2 | Kab. Subang | 2024-2026 | <p>TUJUAN DAN SASARAN :</p> <p>T.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan 3 (tiga) sasaran :</p> <p>S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan;</p> <p>S.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan;</p> <p>S.3 Meningkatnya Pemanfaatan Kebudayaan Lokal.</p> <p>T.2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan 2 (dua) sasaran :</p> <p>S.4 Meningkatnya Kesempatan Kerja;</p> <p>S.5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>T.3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dengan 4 (empat) sasaran :</p> <p>S.6 Meningkatkan Perekonomian Daerah;</p> <p>S.7 Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;</p> <p>S.8 Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur;</p> <p>S.9 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.</p> <p>T.4 Mewujudkan pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, dengan 2 (dua) sasaran :</p> <p>S.10 Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;</p> <p>S.11 Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui Penataan Ruang.</p> | Rancangan Peraturan Bupati Subang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang 2024-2026 |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD/RPD | Kebijakan RPJMD/RPD | Keterangan |
|-----|---------------|-------------------|---|---|
| | | | T.5 Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, dengan 2 (dua) sasaran : S.12 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah; S.13 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. | |
| 3. | Kab. Karawang | 2021-2026 | <p>VISI :</p> <p>“MEWUJUDKAN KARAWANG MANDIRI,BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 2. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal; 3. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan; 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas; | Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang 2021-2026 |
| 4. | Kab. Bogor | 2024-2026 | <p>TUJUAN DAN SASARAN :</p> <p>T.1 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>S.1 Meningkatkan pelayanan pendidikan</p> <p>S.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan</p> <p>S.3 Meningkatkan ketahanan pangan</p> <p>S.4 Meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat</p> <p>S.5 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>S.6 Meningkatkan pelayanan infrastruktur publik</p> <p>S.7 Meningkatkan aksesibilitas ekonomi masyarakat</p> | Rancangan Peraturan Bupati Bogor Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026 |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD/RPD | Kebijakan RPJMD/RPD | Keterangan |
|-----|--------------------|-------------------|--|---|
| | | | <p>S.8 Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat</p> <p>T.2 Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik</p> <p>S.1 Meningkatkan profesionalitas ASN</p> <p>S.2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>S.3 Meningkatkan pelayanan kewenangan daerah</p> <p>T.3 Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing</p> <p>S.1 Meningkatkan inovasi daerah yang implementatif</p> <p>S.2 Meningkatkan investasi</p> <p>S.3 Meningkatkan pendapatan daerah</p> <p>T.4 Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi</p> <p>S.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>S.2 Menurunkan tingkat risiko bencana</p> | |
| 5. | Kab. Bandung Barat | 2018-2023 | <p>VISI :</p> <p>“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, RASIONAL, MAJU, AGAMIS DAN SEHAT BERBASIS PADA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH”</p> <p>MISI :</p> <p>1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Kualitas Birokrasi Dalam Melayani Masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Dalam</p> | Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD/RPD | Kebijakan RPJMD/RPD | Keterangan |
|-----|-------------|-------------------|--|------------|
| | | | <p>Bidang Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat;</p> <p>3. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, Untuk Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan;</p> <p>4. Memantapkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Berkelanjutan;</p> <p>5. Meningkatkan Kesalehan dan Modal Sosial Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal;</p> <p>6. Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa;</p> | |

Sumber : RPJMD/RPD Kabupaten terkait

4.2.4 Isu Strategis Lokal

1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD karena tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Purwakarta. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 adalah **“Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah”**.

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun **5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025**, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, **RPJMD tahap ke-4** ditujukan untuk mencapai keunggulan masyarakat Purwakarta dalam segala bidang dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kabupaten Purwakarta memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dan pembangunan Kabupaten Purwakarta relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain.

Perhatian bidang pendidikan pada periode 2018-2023 adalah target akselerasi penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya memasuki saat-saat menentukan pada periode ini. Upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar lima belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala regional dan nasional. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum nasional dan internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah diperoleh. Fokus pembangunan kurun 2018-2023 pada aspek kesehatan diutamakan pada peran serta dan partisipasi masyarakat dan penguatan institusi dalam peningkatan kesehatan, yaitu peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam

kesehatan lingkungan, dan peningkatan pendidikan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Pembangunan bidang keagamaan pada tahapan ini diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antarumat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagi segi kehidupan. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan keagamaan tersebut, antara lain dengan meningkatkan fungsi dan peran forum keagamaan sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama. Selain itu dilakukan upaya untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Pembangunan aspek ketenagakerjaan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk perluasan sarana, prasarana dan kurikulum berbasis peluang kerja dan potensi lokal pada pelatihan peningkatan ketrampilan serta membangun jiwa wirausaha dibarengi kemampuan manajemen pengelolaan usaha calon tenaga kerja. Dalam upaya menciptakan produktivitas, kualitas, peningkatan kesejahteraan pekerja dan harmonisasi dalam lingkungan kerja, ditumbuhkembangkan pelaksanaan hubungan industrial berdasarkan norma yang berlaku.

Dari segi pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada pemberdayaan keluarga, sedangkan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk secara migrasi adalah melalui peningkatan kualitas data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan yang terintegarsi. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta pada periode tahapan ini unggul dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, pada aspek pengembangan kesadaran dan peran masyarakat perlu terus dioptimumkan, tidak hanya terbatas kepada kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang sedang di hadapi pemerintah daerah. Pada tahapan ini perlu pula dikembangkan kesadaran dan peran

masyarakat untuk turut serta memikirkan dan melakukan hal-hal lain dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, pada periode ini perhatian lebih diupayakan melalui penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Purwakarta.

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan daerah, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui meningkatnya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan dengan memberikan nilai tambah terhadap potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan substitusi pemanfaatan sumber daya alam.

Pada tahap ini, pengembangan agribisnis harus sudah menguasai jaringan bisnis yang luas, terutama pada wilayah regional Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan: (1).Perusahaan induk (*Holding Company*) dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional, (2).Kolaborasi bisnis, dan (3).Jejaring bisnis. Pada tahap ini agribisnis Kabupaten Purwakarta sudah berkembang menembus batas-batas wilayah, sehingga sebagai konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global di bidang agribisnis akan semakin kuat.

Berdasarkan potensi yang ada, daerah-daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta secara umum merupakan penghasil produk agro. Pada RPJMD tahap ke-4, komoditi-komoditi agro unggulan spesifik lokal yang dihasilkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Purwakarta harus terus dikembangkan, dikemas dan ditata aspek

pemasaran dan distribusinya. Diharapkan Kabupaten Purwakarta memiliki produk unggulan lokal yang berstandar nasional dan internasional. Pada aspek industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi serta perluasan jaringan perdagangan daerah.

Sementara itu, pada aspek pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata. Pada tahapan ini, pengembangan KUKM diarahkan pada pengembangan jaringan kelembagaan KUKM untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUKM. Pada tahap ini KUKM diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan regional, nasional dan internasional.

Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini akan ditandai dengan lebih mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Pembangunan wilayah di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta semakin merata karena telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhannya sehingga kegiatan perekonomian akan semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya. Pada tahapan ini, kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan rencana tata ruang sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga bahkan dapat meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.

Hal ini ditandai dengan tercapainya alokasi ruang kawasan lindung dan terjaminnya lahan untuk sawah serta tersedianya alokasi ruang di kawasan perkotaan untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas

perkotaan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pemantapan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Sedangkan aspek hukum pada tahapan ini diarahkan guna pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan.

Pada tahap ini pembangunan bidang pemerintahan diarahkan pada pemantapan capaian pada tahap ketiga. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (*check and balances*) antarlembaga di daerah dan masyarakat madani (*civil society*) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;

- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas:

- a. Strategi pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*) meliputi:
 - 1) Menyediakan ruang kawasan peruntukan industri yang memadai di sekitar bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*interchange*);
 - 2) Mendorong investasi pembangunan kawasan industri di kawasan peruntukan industri;
 - 3) Mendorong penyediaan/pemanfaatan fasilitas dan utilitas pendukung bersama untuk kegiatan-kegiatan industri di luar kawasan industri; dan
 - 4) Merelokasi secara bertahap kegiatan industri ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri.

- b. Strategi pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten meliputi:
- 1) Menata dan mengembangkan kegiatan budidaya perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di wilayah kabupaten dan bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura unggulan di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 3) Mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di bagian barat daya wilayah kabupaten; dan
 - 5) Mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemasaran dan perangkutan produk pertanian.
- c. Strategi pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri meliputi:
- 1) Mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di bagian tenggara wilayah kabupaten;
 - 2) Mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di kawasan industri kecil unggulan;
 - 3) Mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di sekitar waduk yang ada di wilayah kabupaten purwakarta;
 - 4) Mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan;
 - 5) Mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke kawasan wisata; dan
 - 6) Membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri kecil unggulan di kawasan wisata dan kawasan perkotaan.
- d. Strategi pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhirarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis meliputi:
- 1) Mengembangkan PKW, PKL, pklp, PPK, PPL terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri, pertanian, dan pariwisata;

- 2) Mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3) Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap kawasan perkotaan; dan
 - 5) Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu.
- e. Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global meliputi:
- 1) Memantapkan perlindungan kawasan hutan lindung;
 - 2) Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau dan sumur resapan di kawasan perkotaan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan domestik dengan prinsip teknologi bersih dan tuntas di tempat secara mandiri dan berkelanjutan;
 - 5) Meningkatkan ketertiban penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai dan danau/waduk/situ; dan
 - 6) Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
- f. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- 1) Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;

- 3) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
- 4) Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara

pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain:

a. Dimensi Sosial

Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi sosial disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Sosial

| Tujuan | Target | Rekomendasi | | Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD |
|--|--|--|---|---|
| | | Program | Sasaran | |
| Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. | 2.1 Menghilangkan segala bentuk Kekurangan gizi, dan memenuhi kebutuhan gizi | Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/ baduta. | Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian. |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Malnutrisi | Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe. | |
| | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Prevalensi anemia pada ibu hamil. Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) Bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kualitas konsumsi | |

| Tujuan | Target | Rekomendasi | | Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD |
|--|---|---|--|--|
| | | Program | Sasaran | |
| | | | Pangan yang diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | |
| | Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan | Rata-rata pendapatan Produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat. | |
| | Menjamin system produksi pangan yang berkelanjutan | Program Pemetaan Kawasan LP2B | Penetapan kawasan pertanianpangan berkelanjutan. | |
| | Mengelola keragaman genetic benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Holtikultura, dan Perikanan | Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. | |
| | | Program Pengembangan Data Proporsi Hewan Ternak | Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menuruttingkat risiko kepunahan: berisiko tidak berisiko, dan risiko yangtidak diketahui. | |
| Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.1 Mengurangi Rasio angka kematian ibu | Program Bimbingan Ibu Hamil | Angka Kematian Ibu (AKI). | |
| | | ProgramBimdal Kesehatan | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | |
| | | | Persentase Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | |
| | 3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita | ProgramBimdal Kesehatan Bagi Ibu Menyusui | AngkaKematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. AngkaKematian Neonatal (AKN) | |

| Tujuan | Target | Rekomendasi | | Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD |
|---|---|--|--|--|
| | | Program | Sasaran | |
| | | | per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | |
| | | Program Imunisasi Kepada Bayi | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | |
| | 3.3 Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV | Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV. | |
| Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | | | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB | | Kejadian TB per 1000 orang. | | |
| | | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria | | Kejadian Malaria per 1000 orang. Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria. | | |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis | Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk. | |
| Persentase Kecamatan yang Melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | | | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tropis | | Jumlah orang yang memerlukan Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | | |
| | Jumlah Kecamatan dengan eliminasi Kusta. | | | |

| Tujuan | Target | Rekomendasi | | Pengintegrasian Ke Dalam Dokumen RPJMD |
|---|---|--|---|--|
| | | Program | Sasaran | |
| | | | Jumlah Kecamatan denganeliminasi filariasis(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | |
| Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua | 4.7 Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Pengarusutaman pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaandunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian | |

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta, 2018

b. Dimensi Ekonomi

Rekomendasi pada subbab ini disusun dengan harapan dilakukan pengintegrasian ke dalam RPJMD demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta. Program-program yang direkomendasikan ialah program yang yang dalam targetnya telah terskenariokan untuk ditambahkan. Setelah dilakukan identifikasi, maka diketahui beberapa target yang perlu ditambahkan dalam bentuk program dengan uraian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Ekonomi

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|--|--|---|---|---|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern unuk Semua | 7.2.Meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. | Program Diversifikasi Energi Dengan Mengoptimalkan Potensi Energi Terbarukan Seperti LimbahKotoran Hewan dan Panas Bumi. | Konsumsi energi terbarukan meningkat | Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian. |
| | | Program Pelatihan Untuk Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia Terkait Pemanfaatan Energi Terbarukan Yang Lebih Optimal | | |
| | 7.a. 7.3. Melakukan perbaikan efisiensi energi sebanyak dua kali lipat. | Program Pengoptimalan Konservasi Energi DalamBerbagai Sektor | Intensitasenergi primer | |
| | 7.b. Memperkuat Kerjasama dan mempromosikan investasi terkait infrastruktur dan teknologi dalam hal energi bersih. | Program Perluasan Jaringan dan Upaya Pemanfaatan Sister City Promosi Secara Aktif Dalam Hal Investasi Infrastrukturdan TeknologiEnergi Bersih | Peningkatan kerjasama dan pendanaan utuk infrastrktur dan teknologi dalam energi bersih | |
| Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan | 8.b.Mengoperasionalkan strategiglobal untuk ketenagakerjaan pemuda. | Program Perluasan Infrastruktur | Dana investasi untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan energi | |
| | | Peningkatan Kerjasama Bidang Energi | | |
| Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi ang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan | 8.b.Mengoperasionalkan strategiglobal untuk ketenagakerjaan pemuda. | Program Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda | Tersedianya anggaran untuk program terkait ketenagakerjaan dan meningkatnya keterampilan pemuda | |
| | | Program Pengoptimalan Sumber Dana UntukPelatihan | | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|---|---|--|--|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto. | Keterampilan | | Peningkatan nilai tambah sektor industri |
| | | Program Peningkatan Infrastruktur Industri | | |
| | | Program Peningkatan Kualitas SDM Dalam Sektor Industri | | |
| Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi | 9.b. Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas | Program Pengembangan Riset Industri | Meningkatnya diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas | |
| | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif | | |
| | 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses TIK dan internet untuk semua. | Program Perluasan Jaringan Akses Internet | Peningkatan penduduk yang memanfaatkan internet | |
| | | Program Pelatihan Penggunaan Internet | | |
| Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara | 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, ke negara-negara yang paling membutuhkan sesuai dengan rencana dan program nasional mereka. | Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik Didalam Maupun Luar Negeri | Total aliran sumber daya yang masuk untuk pembangunan | |
| Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan | 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan Internasional untuk Meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | Program Peningkatan Inovasi Daerah | Total pendapatan pemerintah | |
| | 17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber. | Program Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Terkait Baik didalam Maupun Luar Negeri | Bantuan biaya pembangunan | |
| | 17.8. Mengoperasionalkan Secara penuh bank | Program Perluasan Jaringan Akses Internet | Proporsi individu yang menggunakan internet | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|--------|---|--|---|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| | Teknologi dansains, Mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan Penggunaan teknologi Yang memampukan, Khususnya teknologi Informasi dan komunikasi. | | | |
| | 17.14.Meningkatkan Keterpaduan kebijakan Untuk pembangunan berkelanjutan | Program Fasilitasi Untuk Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan | Keterpaduan Kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan | |
| | 17.17. Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. | Program Fasilitasi Untuk Menunjang Kemitraan Publik Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil | Proyek atau kegiatan yang dilaksanakan dengan skema kerjasama | |

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

c. Dimensi Lingkungan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi lingkungan didasarkan pada hasil analisis. Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi lingkungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Lingkungan

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD | |
|---|--|---|---|---|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | | |
| Tujuan 6: Menjamin Keterseediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk Semua | Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan menghentikan praktik buang air besa di tempat terbuka | Pembangunan dan peningkatan jumlah fasilitas cuci tangan dengan sabun pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum masyarakat | Meningkatnya Proporsi fasilitas umum yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian. | |
| | | Program sanitasi berbasis masyarakat melalui penyediaanMCK dan pemipaan IPAL | Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | | |
| | | Pembangunan Infrastruktur air limbah sistem terpusat | Meningkatnya jumlah Infrastruktur air limbah sistem terpusat skla kota, kawasan, dan komunal. | | |
| | | Pemeliharaan Infrastruktur air limbah sistem terpusat | | | |
| | | Peningkatan saluran rumah (SR) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | Meningkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | | |
| | | 6.3.Meningkatkan kualitas air dan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang. | Pembangunan instalasi | | Tersedianya instalasi |
| | | | pengelolaan lumpur tinja (IPLT) | | Pengelolaan lumpur tinja (IPLT) |
| | | | Pemeliharaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) | | |
| | | | Penetapan tata ruang lahan sempadansungai dan waduk | | Meningkatnya kualitas air sungai dan waduk |
| | | | Penentuan baku Mutu kelas air sungai dan waduk | | |
| | Penentuan daya tamping beban pencemaran air | | | | |
| | Pengembangan program | | | | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|---|--|---|---|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| | | pembinaan dan percontohan perikanan ramah lingkungan | | |
| | | Peningkatan sanitasi penduduk | | |
| | | Pengelolaan limbah peternakan, pertanian, pertambangan, dan industri | | |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan waduk | | |
| Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dan warisan alam. | Penetapan warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya | Meningkatnya Jumlah warisan Budaya dan warisan alam yang dilestarikan | |
| | 11.6. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | Pembangunan System pemilahan Sampah secara terpadu | Meningkatnya persentase sampah yang tertangani | |
| | | Penerapan sistem pemilahan sampah secara terpadu | | |
| | | Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah | | |
| | | Peningkatan nilai tambah ekonomi hasil pengolahan sampah | | |
| | | Penambahan luasan RTH | Meningkatnya Indeks kualitas udara | |
| | | Penambahan dan peningkatan kualitas transportasi umum massal | | |
| | | Pengujian secara | | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|---|---|--|---|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| | | Berkala emisi kendaraan | | |
| | | Pengujian emisi/polusi aktivitas industri | | |
| | | Evaluasi Kualitas Udara perkotaan | | |
| | 11.7 Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau | Penetapan kawasan Yang tidak boleh dibangun | Meningkatnya Persentase RTH Terhadap luas wilayah | |
| | | Pembangunan lahan hijau baru melalui pembebasan lahan | | |
| | | Pembangunan koridor ruang hijau kota | | |
| Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 12.2. Mencapai Pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber Daya alam secara efisien. | Pembuatan dan Updating neraca Sumberdaya alam dan lingkungan | Tercapainya keseimbangan antara kebutuhan, Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan | |
| | 12.3. Mengurangi limbah pangan per kapita dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen. | Penurunan susut Hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan | | |
| | | Penanganan pasca Panen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri | | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|--------|--|---|--|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| | | Peningkatan kapasitas sumberdaya masia dan kelembagaan pascapanen | | |
| | 12.4.Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah. | Pembuatan e-manifest dokumen limbah B3, data Base pengawasan dan penataan industri, dan database perizinan dan registrasi B3 online | Meningkatnya a Jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh usaha dan/ atau kegiatan | |
| | | Pengawasan kinerja Perusahaan yang ramah lingkungan | Meningkatnya Peserta proper yang mencapai minimal ranking biru | |
| | 12.5.Mengurangi produksi limbah Melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | Sosialisasi Pendirian bank sampah | Meningkatnya Jumlah bank sampah tiap RW | |
| | | Pembinaan dan Pelatihan SDM Pengelola bank sampah | | |
| | | Pemberian insentif Dan penghargaan pada bank sampah yang aktif | | |
| | | Pembangunan TPS 3R | Meningkatnya Jumlah sampah yang dikelola secara 3R | |
| | 12.6. Mendorong perusahaan, terutama | Pembuatan Database dan melakukan updating | Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|--------|---|---|--|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| | perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan | memiliki izin lingkungan | |
| | | Peningkatan pelayanan Pembuatan izin lingkungan secara online maupun offline | | |
| | | Penerapan sanksi Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan telah beroperasi tanpa memiliki izin lingkungan | | |
| | | Pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh usah dan/atau kegiatan sesuai dengan pelaporan dokumen pengelolaan lingkungan yang mereka miliki | Meningkatnya usaha dan /atau kegiatan yang melaporkan upaya pengelolaan lingkungan | |
| | 12.8. Menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. | Pengembangan Kurikulum dan Metode belajar berbasis lingkungan hidup | Terciptanya sekolah adiwiyata yang berwawasan lingkungan | |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan sarana pendidikan Untuk pendidikan Lingkungan | | |
| | | Penghargaan sekolah adiwiyata terbaik | | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|---|---|--|--|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| | | Peningkatan system Pelayanan publik Sesuai dengan standar pelayanan | Meningkatnya Fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat | |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan | | |
| | 12.a. Memperkuat Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi menuju arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. | Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam Pola produksi pertanian, peternakan, pertambangan, dan industri | | |
| | Mengembangkan dan menerapkan Perangkat untuk memantau dampak Pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah | Meningkatnya strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan | |
| | | Pengembangan destinasi wisata | | |
| | | Peningkatan promosi pariwisata | | |
| | | Peningkatan Kemitraan dengan Pelaku usaha pariwisata | | |
| Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan | 15.3. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai bebas dari lahan terdegradasi. | Pembuatan database lahan kritis | Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi | |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|--|--|---|---|--|
| | | PROGRAM | SASARAN | |
| Penggururan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | | Pengadaan bibit pohon | | |
| | | Penanaman pohon pada lahan kritis yang berpartisipasi dengan masyarakat | | |
| | 15.6. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut. | Pembentukan dan penetapan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembangian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembangian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumberdaya genetika | |
| | 15.8. Memperkenalkan langkah-langkah Untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasive pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau Memberantas jenis asing invasif prioritas. | Pembuatan dan pengembangan basis data atau system informasi Dalam rangka menyebarkan informasi tentang jenis asing invasif Yang meliputi penyebaran, pengendalian maupun pencegahannya terutama pada kawasan konservasi | Terkendalinya jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air | |
| | | Penetapan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keanekaragaman hayati hewani dan nabati | | |

Sumber: Tim KLHS Kab Purwakarta 2018

d. Dimensi Kelembagaan

Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dimensi kelembagaan merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target

tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi Bupati Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi kelembagaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Rekomendasi Program dan Sasaran Dimensi Kelembagaan

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | |
|--|--|---|---|
| | | PROGRAM | SASARAN |
| Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. | 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal | Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. |
| | | | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. |
| | | | Kematian disebabkan konflik berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian. |
| | | | Kematian disebabkan konflik per100.000 penduduk |
| | | | Penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual |
| | | | Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan |
| | | | Penduduk yang merasa aman berjalansendirian di area tempat tinggalnya. |
| | 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | |
|--------|--|---|---|
| | | PROGRAM | SASARAN |
| | penyiksaan terhadap anak. | | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. |
| | | Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | Korban perdagangan manusia Perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. |
| | 16.3. Menggalakkan Negara berdasarkan hukum ditingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang samaterhadap keadilan bagi semua. | Program Jaminan Sosial | Korban kekerasan yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang dalam mekanisme resolusi konflik. |
| | | Program Kemitraan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan | Proporsi korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi Kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum. |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | |
|--------|---|--|---|
| | | PROGRAM | SASARAN |
| | | | Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana. |
| | | | Proporsi tahanan yang melebihi masapenahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. |
| | 16.9. Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan pencatatan kelahiran | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, E28 menurut umur. |
| | | | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. |
| | Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. | Program Kerjasama Informasi Kriminal | Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir. |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Komunkasi Serta Media Masa | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) |
| | | | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. |
| | | | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana |

| TUJUAN | TARGET | REKOMENDASI | |
|--------|--|---|---|
| | | PROGRAM | SASARAN |
| | | | diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. |
| | | | Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. |
| | | | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
| | 16.a. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan. | Program pembentukan lembaga hak asasi manusia dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga | Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris E6Principles</i> . |

Sumber: KLHS RPJMD Kab Purwakarta Tahun 2018-2023

Beberapa rekomendasi bagi program yang dapat diterapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Rekomendasinya adalah:

- 1) Optimalisasi sistem pendidikan 12 tahun dengan kebijakan yang tepat akurat melalui proses kajian yang komprehensif.
- 2) Melaksanakan implementasi sistem hidrologi kawasan berdasarkan hasil kajian.
- 3) Implementasi teknologi pengolahan air sesuai karakteristik air baku dan daya dukung (debit air) sungai.

b. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

c. Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Rekomendasinya:

- 1) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 2) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 3) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- 4) Menetapkan kebijakan tentang pengawasan orang dan barang dari luar daerah.
- 5) Menetapkan kebijakan tentang mekanisme Pembebasan lahan dan Penetapan harga pasar lahan untuk menghindari spekulasi penguasaan tanah.

d. Program peningkatan perekonomian rakyat

Rekomendasinya:

- 1) Menetapkan kebijakan program Kehati.
- 2) Kawasan pengembangan berada pada wilayah dengan risiko bencana yang kecil.
- 3) Pemanfaatan lahan sesuai RTRW.
- 4) Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik lahan.

4. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, telah berkembang melalui berbagai interpretasi skema tujuan yang ingin dicapai. Setelah *Millenium Development Goals* menjadi tujuan pembangunan yang dikembangkan sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2015, sekarang ini diterapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan tujuan yang lebih komprehensif dan beragam.

Berdasarkan Analisis Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat seperti yang tersaji dalam buku *Menyongsong SDGs Kesiapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat* yang diterbitkan bersama antara SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, dapat digambarkan pencapaian indikator TPB Kabupaten Purwakarta. Hal ini tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Purwakarta

| TARGET | INDIKATOR | SKOR | NILAI | KETERANGAN |
|--------|--|------|-------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Penduduk Miskin dengan Garis \$ 1,90 per hari | 4 | A | Mencapai hampir mencapai target SDGs |
| 1.2 | Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional) | 4 | A | |
| 2.2 | Balita Dengan Berat Badan Kurus dan Sangat Kurus | 4 | A | |
| 3.1 | Angka Kematian di bawah 5 Tahun | 4 | A | |
| 3.2 | Angka Kematian Neonatal | 4 | A | |
| 4.1 | Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar | 4 | A | |
| 4.3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi | 4 | A | |
| 4.6 | Angka Melek Huruf Usia 15-24 | 4 | A | |
| 6.2 | Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak | 4 | A | |
| 7.1 | Rumah Tangga dengan Akses Listrik | 4 | A | |
| 8.1 | PDRB per Kapita (Harga Konstan 2000) | 4 | A | |
| 8.5 | Tingkat Pengangguran dengan Kriteria Jam Kerja < 35 | 4 | A | |
| 16.3 | Anak Dibawah 5 Tahun Yang Sudah Memiliki Akte Kelahiran | 4 | A | |
| 3.4 | Angka Harapan Hidup Saat Lahir | 3 | B | |
| 4.5 | Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 dengan Pendidikan Tersier | 3 | B | |
| 4.5 | Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA | 3 | B | |
| 4.6 | Gap T10B40 Partisipasi Murni SMA | 3 | B | |
| 8.6 | Penduduk Usia Muda Yang Tidak Bekerja, Tidak Sekolah dan Tidak Pelatihan | 3 | B | |
| 8.7 | Penduduk Usia 5-14 tahun Yang Termasuk Kedalam Kateggori Pekerja Anak | 3 | B | |

| TARGET | INDIKATOR | SKOR | NILAI | KETERANGAN |
|------------------|--|-------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1 | Kondisi Jalan dengan Kualitas Baik dan Sedang | 3 | B | |
| 9.2 | Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir | 3 | B | |
| 15.1 | Proporsi Luas Area Hutan Terhadap Luas Daratan | 3 | B | |
| 2.1 | Balita Dengan Tinggi Badan Pendek dan Sangat Pendek | 2 | C | Masih Seperempat jalan lagi menuju target SDGs |
| 2.3 | Produktivitas Tanaman Pangan | 2 | C | |
| 4.1 | Rata-rata Lama Sekolah | 2 | C | |
| 11.1 | Rumah Tangga Yang Memenuhi Spesifikasi Rumah Sederhana Sehat | 2 | C | |
| 3.5 | Penduduk dengan Kebiasaan merokok diatas usia 15 tahun | 1 | D | Baru Setengah Jalan Menuju Target SDGs |
| 4.1 | Penduduk Usia 25-64 tahun dengan Pendidikan Menengah Atas | 1 | D | |
| 4.5 | Gender Gap Penduduk Usia 25-64 Tahun dengan Pendidikan Tersier | 1 | D | |
| 4.7 | Gap T10B40 Penduduk Usia 25-64 Tahun SMA | 1 | D | |
| 5.2 | Tingkat partisipasi angkatan Kerja Wanita | 1 | D | |
| 6.1 | Rumah Tangga dengan Air Minum Layak | 1 | D | |
| 10.1 | Rasio Gini | 1 | D | |
| 10.2 | Rasio Palma | 1 | D | |
| 10.3 | Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% Terbawah | 1 | D | |
| 15.2 | Area Konservasi yang Dilindungi | 1 | D | |
| 3.6 | Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas | 0 | E | Masih Cukup Jauh Mencapai target SDGs |
| 5.1 | Tingkat Kesuburan wanita | 0 | E | |
| 5.3 | Proporsi perempuan dalam parlemen | 0 | E | |
| 11.2 | Rumah Tangga Kota Dengan Jaringan Air Ledeng | 0 | E | |
| 12.1 | Rumah Tangga Dengan Perilaku Memilah Sampah | 0 | E | |
| 13.1 | Emisi CO2 BBM + Listrik Rumah Tangga | 0 | E | |
| 15.3 | Persentase Lahan Kritis (Kriteria+Sangat Kritis) terhadap Luas Wilayah | 0 | E | |
| 16.1 | Kejadian Pembunuhan | 0 | E | |
| 16.2 | Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana / Crime Rate | 0 | E | |
| Rata-Rata | | 2,16 | | |

Sumber: Menyongsong SDGs Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, SDGs Center Universitas Padjajaran dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

Kabupaten Purwakarta secara umum mendapatkan skor 2.16 dan dengan demikian mendapatkan nilai C dalam pencapaian SDGs tahun 2030. Meskipun artinya masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Purwakarta, angka ini sama dengan angka skor rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang bernilai 2.16 (C).

Tantangan paling besar diantaranya adalah indikator jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas (tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera) dan rumah tangga kota dengan jaringan air ledeng (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Jumlah kematian akibat kecelakaan diproyeksikan akan

mencapai 117 atau 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan targetnya sebanyak 41 untuk setiap 100.000 penduduk dan dengan demikian mendapatkan nilai E. Sedangkan untuk rumah tangga dengan jaringan air ledeng Kabupaten Purwakarta diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target dan karena mendapatkan nilai E.

Meskipun demikian, banyak indikator akan mengalami kemajuan, diantaranya indikator balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus (tujuan 2 tanpa kelaparan) dan rumah tangga dengan sanitasi layak (tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak). Keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs pada tahun 2030 dimana keduanya bernilai tinggi dan memperoleh nilai A. Indikator lainnya yang juga akan mengalami kemajuan pesat adalah tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen dan, PDRB perkapita (tujuan ke 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi). Tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja kurang dari 35 persen diproyeksikan menurun ke angka 2,2 persen melampaui target SDGs yang berada pada angka 3,9 persen yang artinya untuk indikator tersebut kabupaten Purwakarta memperoleh nilai A. PDRB perkapita (harga konstan 2016) juga mendapatkan nilai A yang diproyeksikan akan mencapai angka \$9891 per tahun jauh melampaui target SDGs sebesar \$3956 per tahun.

Indikator pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purwakarta secara umum memiliki progress yang baik bernilai rata-rata A. Artinya, secara keseluruhan indikator pendidikan dan kesehatan Kabupaten Purwakarta memiliki arah yang baik untuk mencapai target SDGs. Indikator pendidikan yang bernilai baik atau A adalah angka partisipasi murni tingkat SD, angka partisipasi kasar perguruan tinggi, dan angka melek huruf usia muda 15- 24 tahun. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah masih perlu untuk mendapat perhatian khusus karena diproyeksikan hanya akan mampu mencapai setengah dari target SDGs. Indikator kesehatan yang bernilai A adalah angka kematian balita dan angka kematian neonatal, keduanya diproyeksikan akan mencapai target SDGs tahun 2030.

4.2.5 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Purwakarta dalam 3 (tiga) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah;

Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat peningkatan dari tahun 2019 – 2022 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2022 mencapai 71,56 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan tahun 2022 masih menyandang predikat Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB;

Sejak pandemi Covid-19 melanda diberbagai daerah termasuk Kabupaten Purwakarta, telah menguji kesiapan dan kualitas mutu pelayanan kesehatan di daerah, akses pelayanan dan sarana prasarana kesehatan yang belum optimal dan memadai telah menjadi kendala yang harus diatasi, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penyediaan SDM tenaga kesehatan yang merata, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan memadai termasuk ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan serta penyuluhan dan pemberdayaan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat harus terus ditingkatkan secara optimal.

3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;

Dalam merespon setiap kejadian bencana yang tidak dapat di prediksi sebelumnya tentu perlu dilakukan langkah antisipatif guna memperoleh informasi/ peringatan awal (early warning) terhadap potensi bencana yang akan terjadi, baik bencana alam maupun bencana karena kelalaian manusia, termasuk bencana akibat kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Dalam penanganan bencana daerah tidak hanya terpusat pada penanganan pasca bencana saja namun harus dilakukan secara sistemis dan sistematis mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kejadian dan penanganan pasca kejadian bencana. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi terhadap sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan guna mengukur kesiapan daerah dalam penanganan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi;

Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta perkembangannya naik-turun, dimana angka 7,48% ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021, kemudian turun di tahun 2022 ke angka 8,70%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 dan 2022 beranjak naik ke angka 3,42 dan 5,24 persen. Meskipun ada peningkatan tiap tahunnya namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang, maju dan mandiri.

Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian

dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang.

Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih harus terus digalakkan, disisi lain program pemulihan ekonomi sangat perlu untuk terus diprioritaskan guna menurunkan angka kemiskinan pada level terendah.

Kebijakan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya penurunan angka kemiskinan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern;

Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori Baik, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Dari aspek akuntabilitas dan maturitas pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan juga masih perlu terus ditingkatkan terutama dari aspek tata kelola pemerintahan (good governance), tata kelola keuangan, pengelolaan manajemen SDM, dll. termasuk peningkatan dan pemanfaatan inovasi daerah baik secara teknologi informasi maupun regulasi, sehingga dapat menyikapi setiap perubahan dinamika dan regulasi yang terus berkembang setiap waktu.

6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata;

Ketersediaan infrastruktur dasar sebagai sarana konektivitas antar wilayah (jalan dan jembatan) sudah sepatutnya menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap

wilayah, capaian ketersediaan infrastruktur (Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap) di Kab. Purwakarta tahun 2021 terdapat penurunan dibanding tahun 2020, yakni hanya 83,25 persen atau turun - 4,63 persen. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran dan refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga berdampak pada pembangunan fisik terutama pembangunan akses jalan, akibatnya penyediaan sarana infrastruktur konektivitas masih belum merata di setiap wilayah.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
- Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
- Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, serta keterkaitan antara isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR |
|--|--|----------------------|--------|---------|---|--------|--------------|-------|----------------|-------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | | | | | | | | |
| I. | Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah | | | | | | | | | | | |
| I.1 | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | 74,11 |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,13 | 65,21 | 82,22 | 89,58 | 96,43 | 96,43 |
| I.1.1 | Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | 74,11 |
| | | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,10 | 8,11 | 9,23 | 9,75 | 10,24 | 10,24 |
| | | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,12 | 12,13 | 13,85 | 14,63 | 15,38 | 15,38 |
| | | | | | Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| I.1.2 | Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,13 | 65,21 | 82,22 | 89,58 | 96,43 | 96,43 |
| | | | | | Persentase Pemuda Berprestasi | Persen | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| II. | Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,47 | 72,01 | 72,32 | 72,64 | 72,64 |
| II.1.1 | Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,47 | 72,01 | 72,32 | 72,64 | 72,64 |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR |
|----------------|--|----------------------|---|---------|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,82 | 1,69 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 |
| II.2 | | | Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | 70,69 |
| | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,66 |
| II.2.1 | | | Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | 70,69 |
| II.2.2 | | | Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,66 |
| | | | | | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Predikat | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |
| III. | Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal | | | | | | | | | | | |
| III.1 | | | Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | | | | | | | | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | 6,39 |
| | | | | | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | 90,54 |
| III.1.1 | | | Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | 6,39 |
| | | | | | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | 90,05 |
| | | | | | Pertumbuhan UMKM | Persen | 1,00 | 0,00 | 11,86 | 13,16 | 14,69 | 14,69 |
| III.1.2 | | | Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian | | | | | | | | | |
| | | | | | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | 90,54 |
| | | | | | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) | Rp. | 48,83 | 51,24 | 56,08 | 58,49 | 60,91 | 60,91 |
| | | | | | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) | Rp. | 74,50 | 82,83 | 93,32 | 99,89 | 106,66 | 106,66 |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR |
|---------|----------------------|--|--------|---|---|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III.1.3 | | | | Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | | | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,82 | 10,41 | 10,41 |
| III.1.4 | | | | Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai Tukar Petani | Poin | 97,84 | 99,13 | 101,71 | 103,00 | 104,29 | 104,29 |
| | | | | | Skor Pola Pangan Harapan | Poin | 78,30 | 91,40 | 95,70 | 97,80 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | Persen | 6,57 | 6,57 | 6,39 | 6,34 | 6,29 | 6,29 |
| III.2 | | | | Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | 0,255 |
| | | | | | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 11,67 | 12,19 | 12,64 | 12,91 | 13,18 | 13,18 |
| III.2.1 | | | | Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | 6,44 |
| | | | | | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | 0,255 |
| | | | | | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 11,67 | 12,19 | 12,64 | 12,91 | 13,18 | 13,18 |
| III.2.2 | | | | Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 86,70 | 86,93 | 87,38 | 87,60 | 87,83 | 87,83 |
| | | | | | Indeks Perberdayaan Gender (IDG) | Poin | 74,39 | 77,89 | 79,92 | 80,93 | 81,94 | 81,94 |
| IV. | | Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah | | | | | | | | | | |
| IV.1 | | | | Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | | | | | | | | |
| | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR |
|---------------|---|----------------------|--------|---|--|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| IV.1.1 | | | | Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | | | | | | | | |
| | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | | | | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 79,76 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 |
| IV.1.2 | | | | Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien | | | | | | | | |
| | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 88,35 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 |
| | | | | | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 37,56 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| V. | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| V.1 | Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 61,41 | 64,41 | 67,41 | 70,41 | 73,41 | 73,41 |
| | | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 73,64 | 73,64 |
| | | | | | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,58 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | 50,74 |
| | | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| V.1.1 | Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 73,64 | 73,64 |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 61,41 | 64,41 | 67,41 | 70,41 | 73,41 | 73,41 |
| | | | | | Indeks SPBE | Poin | 2,37 | - | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| V.1.2 | Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Profesionalitas ASN | Predikat | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Rendah |
| | | | | | Sistem Merit Kabupaten | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR |
|---------------|----------------------|----------------------|--|-----------|--|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | | Indeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,195 | 0,212 | 0,228 | 0,237 | 0,245 | 0,245 |
| | | | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Poin | 77,52 | 79,16 | 82,45 | 84,09 | 85,74 | 85,74 |
| | | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 2,64 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,38 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | 50,74 |
| V.2 | | | Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | 81,45 |
| | | | | | Indeks Desa Membangun | Predikat | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju |
| V.2.1 | | | Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Desa Membangun | Predikat | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju |
| V.2.2 | | | Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | 81,45 |
| JUMLAH | 1 | 5 | 8 | 17 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.2

Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | ISU STRATEGIS |
|--|----------------------|--|---|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | |
| I. | | Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah | | | |
| I.1 | | | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | | 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan daerah |
| I.1.1 | | | Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| I.1.2 | | | Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat | | |
| II. | | Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup | | | |
| II.1 | | | Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | 2. Peningkatan kualitas mutu pelayanan, akses pelayanan, dan sarana/ prasarana bidang Kesehatan dan KB |
| II.1.1 | | | Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana | | |
| II.2 | | | Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | 3. Reformasi sistem ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup |
| II.2.1 | | | Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | |
| II.2.2 | | | Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana | | |
| III. | | Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal | | | |
| III.1 | | | Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | | 4. Penguatan sosial ekonomi masyarakat melalui terobosan inovasi |
| III.1.1 | | | Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | |
| III.1.2 | | | Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian | | |
| III.1.3 | | | Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | |
| III.1.4 | | | Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | |
| III.2 | | | Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | |
| III.2.1 | | | Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | ISU STRATEGIS |
|------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| III.2.2 | | | | Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| IV. | | Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah | | | |
| IV.1 | | | Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | | 6. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara merata |
| IV.1.1 | | | Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | | |
| IV.1.2 | | | Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien | | |
| V. | | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | |
| V.1 | | | Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | 5. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern |
| V.1.1 | | | Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE | | |
| V.1.2 | | | Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | |
| V.2 | | | Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tenram dan Damai | | |
| V.2.1 | | | Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | |
| V.2.2 | | | Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | | |
| | | | | | |

Sumber : Analisa Tim, 2023

5.3 KESELARASAN RPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Sebagai salah satu amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 harus memperhatikan penyelarasan dengan dokumen RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Adapun penyelarasan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

Keselarasan Indikator Makro RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| No. | Indikator Makro Pembangunan | Satuan | Target RPJMN Tahun 2020-2024 | | | | | Target RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 | | | Target RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 | | |
|-----|-------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | Poin | n/a | n/a | n/a | 73,31-73,49 | 75,54 | 73,56 | 73,78 | 74,00 | 72,99 | 73,55 | 74,11 |
| 2 | Angka Kemiskinan | Persen | n/a | n/a | n/a | N/A | 6,0 - 7,0 | 7,39 | 7,24 | 7,10 | 7,25 | 6,83 | 6,44 |
| 3 | Angka Pengangguran | Persen | n/a | n/a | n/a | 6,00-5,30 | 3,6 - 4,3 | 8,21 | 8,16 | 8,11 | 7,00 | 6,30 | 5,68 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,30 | 5,4 - 5,7 | 5,7 - 6,0 | 5,3-6,0 | 6,2 - 6,5 | 5,42 | 5,68 | 5,54 | 5,80 | 6,10 | 6,39 |
| 5 | Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) | Poin | n/a | n/a | n/a | 0,378-0,375 | 0,360 - 0,374 | 0,408 | 0,406 | 0,404 | 0,306 | 0,280 | 0,255 |
| 6 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB | Juta Rp. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 82,77 | 86,73 | 90,54 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.4

Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

| SASARAN POKOK RPJPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 3. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| | 5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana |
| 4. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 5. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| | 11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6. Meningkatnya Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

| SASARAN POKOK RPJPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|--|
| 1 | 2 |
| 8. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.5

Keselarasn Sasaran RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

| SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|--|---|
| 1 | 2 |
| 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian; | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 3. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan; | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk; | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| 6. Terpenuhinya Layanan Dasar, Bidang Kesehatan dan Pendidikan; | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |

| SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; | 11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 8. Terwujudnya pengentasan kemiskinan; | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| 9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing; | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| 10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan; | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial; | 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan |
| | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter Bangsa; | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif; | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| 18. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah |
| 19. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; | 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 20. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |

| SASARAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|--|---|
| 1 | 2 |
| 21. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 22. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; | 5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana |
| 23. Pembangunan Rendah Karbon; | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 24. Konsolidasi Demokrasi; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 25. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; | - |
| 26. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 27. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 28. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional; | 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 5.6

Keselarasn Sasaran RPD Kabupaten Purwakarta dengan dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

| SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat | 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| 3. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| | 6. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 4. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga | 11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk | 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat |
| 6. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| 7. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 8. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif | 8. Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| 9. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha | 7. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian |
| 10. Terkendalinya tingkat kemiskinan | 10. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan |
| 11. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja | 1. Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah | 9. Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 13. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| | 5. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana |

| SASARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 - 2026 | SASARAN RPD KAB. PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan | 12. Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah 13. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien |
| 15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| 16. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE 16. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 17. Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat |
| 17. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 18. Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 19. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas | 14. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE |
| 20. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan | 15. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

Sumber : Analisa Tim, 2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 STRATEGI

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategi menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,

sekaligus menerjemahkan visi dan misi kedalam rencana kerja yang akan diaplikasikan.

2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Urutan strategi dari tahun ke tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien.

Adapun uraian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dapai dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Purwakarta

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | |
| I. | | Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah | | | | |
| I.1 | | | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | | | |
| I.1.1 | | | | Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan | | 1. Peningkatan Kualitas SDM |
| I.1.1.1 | | | | | Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas | Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan |
| I.1.1.2 | | | | | Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan | Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan |
| I.1.1.3 | | | | | Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat | Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat |
| I.1.2 | | | | Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat | | 1. Peningkatan Kualitas SDM |
| I.1.2.1 | | | | | Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
|-----------------|------------|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran | |
| | | | | | | Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai | |
| II. | | Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
| II.1 | | | Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | |
| II.1.1 | | | | Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana | | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | |
| II.1.1.1 | | | | | Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan | Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan | |
| | | | | | | Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC | |
| | | | | | | Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya | |
| | | | | | | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan | |
| | | | | | | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat | |
| II.1.1.2 | | | | | Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera | Menerapkan rencana pengendalian penduduk | |
| | | | | | | Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB | |
| | | | | | | Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah | |
| | | | | | | Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera | |
| II.2 | | | Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | | | |
| II.2.1 | | | | Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | |
| II.2.1.1 | | | | | Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup | Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup | |
| | | | | | | Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan | |
| | | | | | | Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau | |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----------|------------|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3 |
| | | | | | | Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan |
| II.2.1.2 | | | | | Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan |
| II.2.2 | | | | Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana | | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana |
| II.2.2.1 | | | | | Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana | Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan |
| | | | | | | Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan |
| | | | | | | Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat) |
| III. | | Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal | | | | |
| III.1 | | | Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | | | |
| III.1.1 | | | | Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah |
| III.1.1.1 | | | | | Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi | Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian |
| III.1.1.2 | | | | | Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital | Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional |
| | | | | | | Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha |
| | | | | | | Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM |
| | | | | | | Menyediakan Sistem Data Base UMKM |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----------|------------|------------|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III.1.2 | | | | Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian | | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah |
| III.1.2.1 | | | | | Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi yang Kondusif | Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha |
| III.1.2.2 | | | | | Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri | Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen |
| III.1.3 | | | | Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah |
| III.1.3.1 | | | | | Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata | Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan |
| III.1.3.2 | | | | | Strategi 15 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi | Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----------|------------|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III.1.4 | | | | Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah |
| III.1.4.1 | | | | | Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah |
| | | | | | | Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian |
| | | | | | | Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak |
| III.1.4.2 | | | | | Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas |
| III.2 | | | Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | |
| III.2.1 | | | | Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan | | 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat |
| III.2.1.1 | | | | | Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin | Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| | | | | | | Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat |
| | | | | | | Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas |
| | | | | | | Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat |
| III.2.2 | | | | Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat |
| III.2.2.1 | | | | | Strategi 19 : Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak | Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan |
| | | | | | | Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | |
|----------|------------|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| IV. | | Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah | | | | | |
| IV.1 | | | Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | | | | |
| IV.1.1 | | | | Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | | 6. Peningkatan Infrastruktur Daerah | |
| IV.1.1.1 | | | | | Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap | Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat | |
| IV.1.1.2 | | | | | Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata | Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata | |
| IV.1.1.3 | | | | | Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman | |
| IV.1.2 | | | | Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien | | 6. Peningkatan Infrastruktur Daerah | |
| IV.1.2.1 | | | | | Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya Meningkatkan penyediaan rumah layak huni Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh | |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----------------|------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| V. | | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | | |
| V.1 | | | Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | |
| V.1.1 | | | | Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE | | 7. Reformasi Birokrasi |
| V.1.1.1 | | | | | Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD |
| V.1.1.2 | | | | | Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik | Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan |
| V.1.2 | | | | Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | 7. Reformasi Birokrasi |
| V.1.2.1 | | | | | Strategi 26 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance) | Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---------|------------|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif</p> <p>Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah</p> <p>Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna</p> <p>Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan</p> |
| V.1.2.2 | | | | | Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas | <p>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa</p> <p>Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP</p> <p>Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas</p> |
| V.2 | | | Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | | | |
| V.2.1 | | | | Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | 8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |
| V.2.1.1 | | | | | Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa | <p>Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa</p> <p>Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa</p> <p>Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan</p> |

| KODE | VISI RPJPD | MISI RPJPD | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---------|------------|------------|----------|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| V.2.2 | | | | Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | | 8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |
| V.2.2.1 | | | | Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila |
| | 1 | 5 | 8 | 17 | 29 | 8 / 100 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (tiga) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Rumusan arah kebijakan pada RPD telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

Tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026

| TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026 | |
|---|---|
| | TAHUN 2026 |
| | MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING |
| | TAHUN 2025 |
| | PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL |
| TAHUN 2024 | |
| MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH | |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) arah kebijakan pokok yang masing – masing dijabarkan menjadi 100 arah kebijakan sesuai dengan strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 6.1 diatas. Kemudian arah kebijakan pokok tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya.

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM

1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/ kesetaraan dan PAUD
2. Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
4. Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional
5. Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya
6. Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
7. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno
8. Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat
9. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja
10. Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan
11. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
12. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran
13. Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai

2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB

1. Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan
2. Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC

3. Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat
6. Menerapkan rencana pengendalian penduduk
7. Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB
8. Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah
9. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

1. Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup
2. Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan
3. Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3
5. Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan
6. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan
7. Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan
8. Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan
9. Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat)

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian
3. Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional
4. Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha
5. Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM
6. Menyediakan Sistem Data Base UMKM
7. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses
8. Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha
9. Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis
10. Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu
11. Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
12. Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah
13. Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen
14. Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan
15. Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar
16. Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata
17. Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan
18. Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata
19. Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI
20. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah

21. Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian
22. Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan
23. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian
24. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak
25. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata
26. Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas
4. Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat
5. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak

6. Peningkatan Infrastruktur Daerah

1. Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata
2. Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat
3. Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan
5. Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman

6. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat
7. Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya
8. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
9. Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan
10. Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh

7. Reformasi Birokrasi

1. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah
2. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi
3. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital
6. Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel
7. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan
8. Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait
10. Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri
11. Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital
12. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan

13. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
14. Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif
15. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah
16. Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna
17. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional
18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
19. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
20. Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP
21. Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas

8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
2. Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa
3. Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan
4. Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
5. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 – 2026

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Peningkatan Kualitas SDM | | |
| 1 | Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD | Dinas Pendidikan |
| 2 | Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal | Dinas Pendidikan |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan | Dinas Pendidikan |
| 4 | Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 5 | Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 6 | Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 7 | Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 8 | Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 9 | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 10 | Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 11 | Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 12 | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 13 | Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | | |
| 1 | Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih |
| 2 | Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC | Dinas Kesehatan |
| 3 | Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya | Dinas Kesehatan |
| 4 | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan | Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 6 | Menerapkan rencana pengendalian penduduk | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 7 | Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 8 | Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4 | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 6 | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 7 | Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; |
| 8 | Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; |
| 9 | Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta, Komunitas dan masyarakat) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; |
| 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | |
| 1 | Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3 | Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 4 | Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 5 | Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 6 | Menyediakan Sistem Data Base UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 7 | Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8 | Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 9 | Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 11 | Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 12 | Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 13 | Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 14 | Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 15 | Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 16 | Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat sadar wisata | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 17 | Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 18 | Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 19 | Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 20 | Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah | Dinas Pangan dan Pertanian; |
| 21 | Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian | Dinas Pangan dan Pertanian; |
| 22 | Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan; |
| 23 | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian | Dinas Pangan dan Pertanian; |
| 24 | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak | Dinas Perikanan dan Peternakan; |
| 25 | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata | Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan; |
| 26 | Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas | Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan; |
| | | |
| | 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | |
| 1 | Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2 | Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 3 | Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 4 | Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5 | Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6. Peningkatan Infrastruktur Daerah | | |
| 1 | Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2 | Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 3 | Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 4 | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan | Dinas Perhubungan |
| 5 | Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman | Dinas Perhubungan |
| 6 | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 7 | Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 8 | Meningkatkan penyediaan rumah layak huni | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 9 | Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 10 | Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 7. Reformasi Birokrasi | | |
| 1 | Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah | Semua Perangkat Daerah; |
| 2 | Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi | Sekretariat Daerah |
| 3 | Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah; |
| 4 | Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD | Sekretariat DPRD; |
| 5 | Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kecamatan; |
| 6 | Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel | Dinas Komunikasi dan Informatika; |
| 7 | Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; |
| 8 | Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Sekretariat Daerah; |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait | Sekretariat Daerah; |
| 10 | Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri | Sekretariat Daerah; |
| 11 | Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; |
| 12 | Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; |
| 13 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran | Badan Keuangan dan Aset Daerah; |
| 14 | Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif | Badan Keuangan dan Aset Daerah; |
| 15 | Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah | Badan Pendapatan Daerah; |
| 16 | Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; |
| 17 | Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; |
| 18 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | Kecamatan; |
| 19 | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa | Inspektorat; Kecamatan; |
| 20 | Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP | Inspektorat; |
| 21 | Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas | Inspektorat; Kecamatan; |
| | | |
| | 8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | |
| 1 | Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan; |
| 2 | Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan; |
| 3 | Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan; |
| 4 | Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan ; |
| 5 | Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan; |
| 6 | Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; |
| | 8 / 100 | 47 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

6.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam rangka menjabarkan sasaran pembangunan, maka ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan pembangunan, selanjutnya guna melaksanakan arah kebijakan tersebut maka perlu dirumuskan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran sesuai strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.4

Keselarasan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Peningkatan Kualitas SDM | 1. Peningkatan Kualitas SDM | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan |
| 1 | Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD | Dinas Pendidikan | |
| 2 | Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal | Dinas Pendidikan | |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan | Dinas Pendidikan | |
| 4 | Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 5 | Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 6 | Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 7 | Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 8 | Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| 9 | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 11 | Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 12 | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| 13 | Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |
| | | | |
| | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB |
| 1 | Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih | |
| 2 | Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya | Dinas Kesehatan | |
| 4 | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan | Dinas Kesehatan; RSUD Bayu Asih | |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat | Dinas Kesehatan | |
| 6 | Menerapkan rencana pengendalian penduduk | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 7 | Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 9 | Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | |
| | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 3 | Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 4 | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 5 | Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 6 | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 7 | Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; | |
| 8 | Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; | |
| | | | |
| | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM |
| 1 | Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 2 | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 3 | Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 4 | Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 5 | Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 6 | Menyediakan Sistem Data Base UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 7 | Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan |
| 8 | Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 9 | Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 11 | Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 12 | Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 13 | Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | |
| 14 | Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | 6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| 15 | Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 16 | Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 17 | Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 18 | Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 19 | Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 20 | Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah | Dinas Pangan dan Pertanian; | 7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 21 | Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian | Dinas Pangan dan Pertanian; | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan | Dinas Perikanan dan Peternakan; | |
| 23 | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian | Dinas Pangan dan Pertanian; | |
| 24 | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak | Dinas Perikanan dan Peternakan; | |
| 25 | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata | Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan; | |
| 26 | Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas | Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan dan Peternakan; | |
| | | | |
| | 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2 | Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 3 | Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 4 | Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 5 | Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | |
| | 6. Peningkatan Infrastruktur Daerah | 6. Peningkatan Infrastruktur Daerah | 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |
| 1 | Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 2 | Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| 3 | Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 4 | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan | Dinas Perhubungan | |
| 5 | Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman | Dinas Perhubungan | |
| 6 | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 7 | Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 8 | Meningkatkan penyediaan rumah layak huni | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| 9 | Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | |
| | 7. Reformasi Birokrasi | 7. Reformasi Birokrasi | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| 1 | Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah | Semua Perangkat Daerah; | |
| 2 | Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi | Sekretariat Daerah | |
| 3 | Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah; | |
| 4 | Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD | Sekretariat DPRD; | |
| 5 | Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kecamatan; | |
| 6 | Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel | Dinas Komunikasi dan Informatika; | |
| 7 | Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; | |
| 8 | Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Sekretariat Daerah; | |
| 9 | Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait | Sekretariat Daerah; | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|------------|---|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri | Sekretariat Daerah; | |
| 11 | Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; | |
| 12 | Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; | |
| 13 | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran | Badan Keuangan dan Aset Daerah; | |
| 14 | Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif | Badan Keuangan dan Aset Daerah; | |
| 15 | Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah | Badan Pendapatan Daerah; | |
| 16 | Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; | |
| 17 | Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; | |
| 18 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | Kecamatan; | |
| 19 | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa | Inspektorat; Kecamatan; | |
| 20 | Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP | Inspektorat; | |
| 21 | Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas | Inspektorat; Kecamatan; | |

| NO. | ARAH KEBIJAKAN | PERANGKAT DAERAH | PRIORITAS PEMBANGUNAN |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | 8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 1 | Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan; | |
| 2 | Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan; | |
| 3 | Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kecamatan; | |
| 4 | Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan ; | 12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |
| 5 | Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan; | |
| 6 | Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; | |
| | 8 / 100 | 47 | 12 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 6.5

Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024
dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KABUPATEN PURWAKARTA |
|--|---|
| 1 | 2 |
| 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM |
| | 5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan |
| | 6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat |
| | 7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |
| | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan |
| | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB |
| 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan |
| 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB |
| 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan |
| 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |
| 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana |
| | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik |
| | 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | 12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 6.6

Keterkaitan / Keselarasan Prioritas Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat dengan RPD Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

| PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT | PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA |
|--|---|
| 1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. | 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB |
| 2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan yang Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Serta Dan Kelautan Dan Perikanan. | 4. Pengembangan Koperasi dan UMKM 5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan 6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat 7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 3. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu. | 8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 4. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan. | 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana 9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah |
| 5. Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah. | 10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |

Sumber : Analisa Tim, 2023

6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjabarkan dan memastikan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan, untuk mencapai tujuan dan sasaran selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja pelaksanaan program pembangunan sebagian besar telah menggunakan indikator yang terdapat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Adapun program pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.7

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | |
|--|--|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| TOTAL PAGU ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 | | | 7.587.169.601.302 | | |
| Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah | | | | | | | | | | | | 215.183.101.295 | 218.215.674.912 | 226.748.111.316 | | | 660.146.887.523 | | |
| I.1 | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | 215.183.101.295 | 218.215.674.912 | 226.748.111.316 | | | 660.146.887.523 | | |
| | | | | | | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | | | | 74,11 | | | | |
| | | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | | | | 5,68 | | | | |
| | | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,13 | 65,21 | 82,22 | 89,58 | 96,43 | | | | 96,43 | | | | |
| I.1.1 | Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | 205.798.645.983 | 209.786.219.600 | 217.543.828.833 | | | 633.128.694.416 | | |
| | | | | | | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | | | | 74,11 | | | | |
| | | | | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,10 | 8,11 | 9,23 | 9,75 | 10,24 | | | | 10,24 | | | | |
| | | | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,12 | 12,13 | 13,85 | 14,63 | 15,38 | | | | 15,38 | | | | |
| | | | | | | Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | |
| 1.01.02 | Program : Pengelolaan Pendidikan | | | | | | | | | | | | 199.986.134.737 | 203.876.219.600 | 211.613.828.833 | | | 615.476.183.170 | Dinas Pendidikan | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 72,83 | 0,00 | 74,29 | 75,74 | 77,20 | | | | 77,20 | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 99,30 | 0,00 | 99,50 | 99,70 | 99,90 | | | | 99,90 | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 94,13 | 0,00 | 94,33 | 94,53 | 94,73 | | | | 94,73 | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,52 | 0,00 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | | | | 0,56 | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 98,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan | | |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,52 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | | | | 0,48 | | Dinas Pendidikan | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Persen | 1,72 | 0,00 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | | | | 1,82 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Persen | 72,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 72,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka partisipasi kasar | Persen | 23,40 | 23,40 | 24,30 | 24,80 | 25,30 | | | | 25,30 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka pendidikan yang ditamatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Partisipasi Murni | Persen | 21,90 | 21,90 | 22,80 | 23,20 | 23,70 | | | | 23,70 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 99,60 | 99,60 | 99,61 | 99,62 | 99,63 | | | | 99,63 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 83,80 | 83,80 | 84,00 | 84,10 | 84,20 | | | | 84,20 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | Persen | 99,30 | 99,30 | 99,50 | 99,60 | 99,70 | | | | 99,70 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | Persen | 94,13 | 94,10 | 94,30 | 94,40 | 94,50 | | | | 94,50 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | | | | 0,30 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 5,90 | 5,90 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | | | | 5,50 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 21,13 | 22,61 | 24,19 | 24,67 | 25,15 | | | | 25,15 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | Persen | 39,20 | 41,95 | 44,88 | 47,63 | 50,38 | | | | 50,38 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Persen | 41,53 | 0,00 | 41,55 | 41,56 | 41,57 | | | | 41,57 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) | % | 58,41 | 59,51 | 59,10 | 59,17 | 59,24 | | | | 59,24 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 97,66 | 99,58 | 98,86 | 98,98 | 99,10 | | | | 99,10 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) | % | 5,18 | 9,58 | 7,93 | 8,21 | 8,48 | | | | 8,48 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 48,95 | 54,69 | 52,54 | 52,90 | 53,26 | | | | 53,26 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional | nilai | 37,08 | 42,99 | 40,77 | 41,14 | 41,51 | | | | 41,51 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 59,00 | 61,92 | 60,83 | 61,01 | 61,19 | | | | 61,19 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 52,94 | 53,57 | 53,33 | 53,37 | 53,41 | | | | 53,41 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 44,83 | 42,90 | 43,50 | 43,62 | 43,87 | | | | 43,87 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 | % | 63,52 | 2,59 | 21,63 | 25,44 | 33,05 | | | | 33,05 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Indeks Iklim Keamanan SD | nilai | 75,34 | 85,48 | 81,68 | 82,31 | 82,95 | | | | 82,95 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Indeks Iklim Kebinekaan SD | nilai | 62,83 | 89,14 | 79,27 | 80,92 | 82,56 | | | | 82,56 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Indeks Inklusivitas SD | nilai | 70,98 | 78,46 | 75,66 | 76,12 | 76,59 | | | | 76,59 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Indeks Iklim Keamanan SMP | nilai | 77,48 | 78,96 | 78,41 | 78,50 | 78,59 | | | | 78,59 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | nilai | 62,41 | 74,48 | 69,95 | 70,71 | 71,46 | | | | 71,46 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Indeks Inklusivitas SMP | nilai | 65,28 | 73,32 | 70,31 | 70,81 | 71,31 | | | | 71,31 | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.03 | | | | | | Program : Pengembangan Kurikulum | | | | | | | 380.300.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.180.300.000 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|--------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----|------------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1.01.04 | | | | | Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Persen | | 38,67 | 38,67 | 38,77 | 38,87 | 38,97 | | | | 38,97 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Persen | | 41,60 | 41,70 | 41,80 | 41,90 | 42,00 | | | | 42,00 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | | 95,88 | 96,00 | 96,06 | 96,12 | 96,18 | | | | 96,18 | | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.05 | | | | | Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan | | | | | | | | | 199.999.900 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 599.999.900 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.06 | | | | | Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra | | | | | | | | | 200.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | | 650.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan | Persen | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Pendidikan |
| 2.22.02 | | | | | Program : Pengembangan Kebudayaan | | | | | | | | | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | | 7.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina | Persen | | 36,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan | Persen | | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti | Persen | | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.03 | | | | | Program : Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | | | | | | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | | 825.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 12,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Persentase Kelompok/Komunitas Seni/Kesenian yang dibina | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.04 | | | | | Program : Pembinaan Sejarah | | | | | | | | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | | 1.350.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.05 | | | | | Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | | | | | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | | 1.800.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | Persen | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Buah | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.06 | | | | | Program : Pengelolaan Permuseuman | | | | | | | | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | | 1.650.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat | Persen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.23.02 | | | | | Program : Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | 407.211.346 | 460.000.000 | 480.000.000 | | 1.347.211.346 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat | Persen | 63,90 | 63,90 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-----|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah | Persen | 84,60 | 2,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | 1,07 | 0,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | | | | 1,07 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Laju pengunjung perpustakaan | Persen | 39,25 | 409,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Orang | 12.381,00 | 63.035,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | | | | 0,80 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | | | 0,16 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Laju Anggota Perpustakaan | Persen | 0,15 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | | | | 51,52 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | 0,32 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | | | | 0,08 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.23.03 | | | | | | Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 150.000.000 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | Persen | 40,00 | 42,86 | 50,00 | 53,00 | 61,00 | | | | 61,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| I.1.2 | | | | | | Sasaran 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat | | | | | | 9.384.455.312 | 8.429.455.312 | 9.204.282.483 | | 27.018.193.107 | | |
| | | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | | | | 5,68 | | |
| | | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,13 | 65,21 | 82,22 | 89,58 | 96,43 | | | | 96,43 | | |
| | | | | | | Persentase Pemuda Berprestasi | Persen | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | | | | 0,07 | | |
| 2.07.03 | | | | | | Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | | 3.210.000.000 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 0,00 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | | | | 69,06 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | 0,40 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan | Persen | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | | | | 3,40 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | | | | 0,57 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | | | 0,11 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|---|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|---------------------|------|----------------------|---------------|--|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Persen | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | 0,07 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.04 | | | | | Program : Penempatan Tenaga Kerja | | | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 | | | | | 2.235.000.000 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Persen | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | | | | 5,81 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.05 | | | | | Program : Hubungan Industrial | | | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | | | | 900.000.000 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Persen | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | | | 0,64 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 0,00 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | | | | 38,88 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.19.02 | | | | | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 | | | | | 2.325.000.000 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | 0,0043 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | | | | 0,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 0,95 | 0,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | 0,01 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 0,26 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | | | | 0,41 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-----|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 0,33 | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,84 | | | | 0,84 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase Pembinaan Kepemudaan | Persen | 0,26 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | | | | 0,41 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.19.03 | | | | | | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | | | 4.024.455.312 | 3.024.455.312 | 3.075.000.000 | | 10.123.910.624 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Tingkat prestasi olahraga | Persen | 50,00 | 66,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 25,00 | 49,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | | | | 65,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Persen | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Tingkat atlet berprestasi | Persen | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 52,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga | Persen | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.19.04 | | | | | | Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | | | 620.000.000 | 620.000.000 | 1.039.282.483 | | 2.279.282.483 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----|------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 3.32.02 | | | | | Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 225.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan | Persen | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | | | | | Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | 225.000.000 | 225.000.000 | 275.000.000 | | 725.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase transmigran swakarsa | Persen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih | Persen | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase transmigran yang diberangkatkan | Persen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.04 | | | | | Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | | 375.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman | Persen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 5.04.02 | | | | | Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | 1.425.000.000 | 1.470.000.000 | 1.725.000.000 | | 4.620.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | | | | 1,15 | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | | 37,25 | 47,34 | 51,01 | 56,51 | 63,85 | | | | 63,85 | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis | Persen | | 2,61 | 5,49 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | | | | 2,86 | | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|---------|---------|---|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| II. Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | 137.127.808.186 | 140.625.922.321 | 143.980.807.508 | | 421.734.538.015 | | | | |
| II.1 | | | Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | 131.027.833.200 | 133.337.922.321 | 136.045.807.508 | | 400.411.563.029 | |
| | | | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,47 | 72,01 | 72,32 | 72,64 | | | | 72,64 | | | | | |
| II.1.1 | | | Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | 131.027.833.200 | 133.337.922.321 | 136.045.807.508 | | 400.411.563.029 | |
| | | | | | | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,47 | 72,01 | 72,32 | 72,64 | | | | 72,64 | | | | | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,82 | 1,69 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | | | | 1,48 | | | | | |
| 1.02.02 | | | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | 86.109.252.055 | 87.281.228.126 | 88.825.631.813 | | 262.216.111.994 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 36,37 | 36,36 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | | | | 65,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 97,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 98,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 71,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 39,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 81,46 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 65,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 59,94 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 93,58 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 79,31 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 98,43 | 92,20 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |
| | | | | | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Dinas Kesehatan | | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 97,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 71,47 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 39,94 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 81,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 66,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 60,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 94,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 79,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98,43 | 92,20 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Rasio posyandu per satuan balita | Poin | 16,68 | 16,82 | 17,34 | 17,60 | 17,86 | | | | 17,86 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 97,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 98,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 0,00 | 77,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 85,31 | 81,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Persen | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | Persen | 50,00 | 37,49 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 92,48 | 82,20 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 246,95 | 282,78 | 245,65 | 208,52 | 171,39 | | | | 171,39 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 6,07 | 2,90 | 2,58 | 2,26 | 1,94 | | | | 1,94 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Persen | 92,48 | 82,20 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Persen | 93,73 | 86,53 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Penderita diare yang ditangani | Persen | 76,26 | 56,58 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | Rasio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan puskesmas | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan pelayanan nifas | Persen | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 75,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan pelayanan anak balita | Persen | 61,91 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|------|------|-----------------------|-----|------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02 | | | | | | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | 13.500.000.000 | 14.150.000.000 | 14.750.000.000 | | | | | | 42.400.000.000 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Tingkat Pengendalian Infeksi di RS | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Capaian Indikator Medik | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Prosedur Penanganan Sampel Uji | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Pengendalian Mutu | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Bed Occupancy Rate (BOR) | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Ketepatan Waktu Pelayanan | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Temuan Yang di Tindaklanjuti | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Tingkat Keandalan Sumber Daya | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.03 | | | | | | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | 13.201.009.160 | 13.201.009.160 | 13.201.009.160 | | | | | | 39.603.027.480 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | Persen | 50,00 | 85,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan | Persen | 68,00 | 75,46 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 68,20 | 73,50 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 68,20 | 73,50 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Rasio dokter per satuan penduduk | Poin | 0,06 | 0,07 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Poin | 0,08 | 0,10 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03 | | | | | | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | 625.000.000 | 725.000.000 | 800.000.000 | | | | | | 2.150.000.000 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.04 | | | | | | Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | | 620.000.000 | 685.000.000 | 740.000.000 | | | | | | 2.045.000.000 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Persen | 70,75 | 79,67 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|--|--------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1.02.05 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | | | | | | 680.000.000 | 685.000.000 | 695.000.000 | | 2.060.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | | Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina | Persen | 83,40 | 77,20 | 89,00 | 96,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan | |
| 1.02.05 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | | | | | | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 1.500.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | NU1 | NU1 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | RSUD Bayu Asih | |
| 2.14.02 | | | | | Program : Pengendalian Penduduk | | | | | | | | | 349.385.450 | 429.969.750 | 474.969.750 | | 1.254.324.950 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | TFR (Angka Kelahiran Total) | Persen | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | | | 2,50 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 37.890,00 | 37.890,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | | | 36,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | Persen | 29,89 | 29,89 | 30,00 | 30,00 | 31,11 | | | | 31,11 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2.14.03 | | | | | Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | | | | | | | | 9.017.281.650 | 9.254.810.400 | 9.633.291.900 | | 27.905.383.950 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 12.263,00 | 81,27 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 33,52 | 34,05 | 35,22 | 36,30 | 38,40 | | | | 38,40 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | | | | 94,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Ratio Akseptor KB | Persen | 26.717,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | | | | 25.521,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | | | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi | Persen | 81,27 | 82,27 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | | | | 83,28 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | perempuan menikah usia 15 - 49 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) | Poin | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | | | | 25,71 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 533,83 | 533,83 | 534,83 | 534,83 | 534,83 | | | | 534,83 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 35,54 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | | | | 46,24 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 17,72 | 17,73 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | | | | 17,78 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 681.167,00 | 681.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | | | | 691.167,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 151.153,00 | 151.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | | | | 161.153,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 623.471,00 | 623.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | | | | 624.471,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 23,53 | 23,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 51,71 | 51,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | 98,00 | 115,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | | | 126,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 22,80 | 22,80 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | | | | 23,90 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Persen | 21,57 | 21,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 149.900,00 | 274.920,00 | 272.476,00 | 325.980,00 | 391.178,00 | | | | 391.178,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan | Persen | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | | | 135,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|---------|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.04 | | | | | | Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | | | | | | 6.425.904.885 | 6.425.904.885 | 6.425.904.885 | | 19.277.714.655 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persen | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | | | | 15,65 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | | | | 3.314,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | Persen | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | | | | 674,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | | | | 15,65 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | | | | 53,71 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Persen | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | | 19,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| II.2 | | | | | | Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | | | | | | 6.099.974.986 | 7.288.000.000 | 7.935.000.000 | | 21.322.974.986 | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | | | | 70,69 | | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | | | | 0,66 | | |
| II.2.1 | | | | | | Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | 3.455.000.000 | 4.573.000.000 | 5.123.000.000 | | 13.151.000.000 | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | | | | 70,69 | | |
| 2.11.02 | | | | | | Program : Perencanaan Lingkungan Hidup | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.11.03 | | | | | | Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | 1.275.000.000 | 1.333.000.000 | 1.533.000.000 | | 4.141.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim | Persen | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | Skor/ Kategori | 63,33 / Sedang | 50 / Sedang | 60 / Sedang | 65 / Sedang | 70 / Baik | | | | 70 / Baik | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara | Skor/ Kategori | 73,47 / Baik | 68,74 / Sedang | 70 / Baik | 75 / Baik | 80 / Baik | | | | 80 / Baik | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Skor/ Kategori | 35,46 | 36,45 | 37,18 | 37,55 | 37,93 | | | | 37,93 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 | | | | | | Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun | Dokumen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.05 | | | | | | Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 150.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Kg | 18.922.101.000,00 | 16.591.264.000,00 | 15.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | | | | 11.000.000.000,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.06 | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | | | | 250.000.000 | 325.000.000 | 375.000.000 | | 950.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan | Persen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.11.07 | | | | | Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | | 350.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Penetapan hak MHA | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 | | | | | Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | | | | | | | 100.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | | 350.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 | | | | | Program : Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | 955.000.000 | 1.890.000.000 | 2.090.000.000 | | 4.935.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 60,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | Persen | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | | | | 32,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 73,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Skor | 71,00 | 71,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | | | 72,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | Persen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.08 | | | | | Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | | | | | 300.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 | | 950.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 | | | | | Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | | | | | 125.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 425.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Kali | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| II.2.2 | | | | | | Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana | | | | | | | 2.644.974.986 | 2.715.000.000 | 2.812.000.000 | | 8.171.974.986 | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | | | | 0,66 | | |
| | | | | | | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Predikat | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | | | | Sedang | | |
| 1.05.03 | | | | | | Program : Penanggulangan Bencana | | | | | | | 1.076.000.000 | 1.090.000.000 | 1.117.000.000 | | 3.283.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 | | | | | | Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | 1.355.000.000 | 1.405.000.000 | 1.455.000.000 | | 4.215.000.000 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 95,76 | 90,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | | | | 18,14 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | - | 89,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Persen | 95,76 | 90,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | | | | Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|----------------------|--------|---------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Layanan | 543,00 | 808,00 | 800,00 | 750,00 | 700,00 | | | | 700,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.06.06 | | | | | Program : Penanganan Bencana | | | | | | | | 213.974.986 | 220.000.000 | 240.000.000 | | 673.974.986 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| III. | Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal | | | | | | | | | | | | 21.643.250.806 | 21.969.884.508 | 22.748.841.597 | 66.361.976.911 | | |
| III.1 | Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | | | | | | | | | | | | 19.189.950.806 | 19.392.884.508 | 20.068.841.597 | 58.651.676.911 | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | | | | | 6,39 | | |
| | | | | | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | | | | | 1,16 | | |
| | | | | | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | | | | | 90,54 | | |
| III.1.1 | Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | 1.150.000.000 | 1.215.000.000 | 1.365.000.000 | 3.730.000.000 | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | | | | | 6,39 | | |
| | | | | | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | | | | | 90,05 | | |
| | | | | | Pertumbuhan UMKM | Persen | 1,00 | 0,00 | 11,86 | 13,16 | 14,69 | | | | | 14,69 | | |
| 2.17.02 | | | | | Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | | | | | | | | 50.000.000 | 52.500.000 | 60.000.000 | | 162.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 90,00 | 91,67 | | | | | 91,67 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|--|--------|--------------|-------|----------------|-------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.17.03 | | | | | Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | | | | | | | | 185.000.000 | 195.000.000 | 222.500.000 | | 602.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | | | | 90,05 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.04 | | | | | Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | | | | | | | 290.000.000 | 307.500.000 | 345.000.000 | | 942.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,25 | | | | 90,25 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian | Persen | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | | | | 18,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.05 | | | | | Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | | | | | | | | 100.000.000 | 102.500.000 | 105.000.000 | | 307.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian | Persen | 69,90 | 71,66 | 72,82 | 73,71 | 74,60 | | | | 74,60 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.07 | | | | | Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | | | | | 375.000.000 | 382.500.000 | 432.500.000 | | 1.190.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 47,85 | 0,00 | 85,23 | 92,24 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha | Persen | 55,06 | 0,00 | 56,46 | 56,93 | 57,39 | | | | 57,39 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha | Persen | 53,00 | 0,00 | 75,23 | 86,45 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|---|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat Wirausaha Baru (WUB) | Persen | 1,00 | 0,00 | 2,53 | 2,78 | 3,85 | | | | 3,85 | | Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan | Persen | 52,20 | 0,00 | 57,90 | 60,42 | 63,22 | | | | 63,22 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.08 | | | | | Program : Pengembangan UMKM | | | | | | | | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | | 525.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 10,00 | 0,00 | 20,56 | 24,30 | 28,04 | | | | 28,04 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya | Persen | 6,82 | 0,00 | 9,63 | 10,56 | 11,50 | | | | 11,50 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| III.1.2 | | | | | Sasaran 7 : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian | | | | | | | | 3.018.320.100 | 3.193.320.100 | 3.420.062.508 | | 9.631.702.708 | |
| | | | | | | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | | | | 1,16 | | |
| | | | | | | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | | | | 90,54 | | |
| | | | | | | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) | Rp. | 48,83 | 51,24 | 56,08 | 58,49 | 60,91 | | | | 60,91 | | |
| | | | | | | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) | Rp. | 74,50 | 82,83 | 93,32 | 99,89 | 106,66 | | | | 106,66 | | |
| 2.18.02 | | | | | Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | | | | 99.989.800 | 99.989.800 | 99.989.800 | | 299.969.400 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | Persen | 6,78 | 11,19 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | | | | 6,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp. | 4,73 | 5,88 | 6,73 | 7,20 | 7,70 | | | | 7,70 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|------|----------------------|---|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 550,00 | 604,00 | 730,00 | 803,00 | 884,00 | | | | 884,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Persen | 27,74 | 28,00 | 28,50 | 29,00 | 29,5 | | | | 29,5 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | | | | | Program : Promosi Penanaman Modal | | | | | | | 199.950.000 | 199.950.000 | 199.950.000 | | 599.850.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan | Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun) | Rp. | 6,00 | 6,50 | 7,40 | 7,90 | 8,40 | | | | 8,40 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.04 | | | | | Program : Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | | 299.986.500 | 299.986.500 | 299.986.500 | | 899.959.500 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | | Rasio daya serap tenaga kerja | Persen | 16,95 | 17,30 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | | | | 19,50 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan | Persen | 93,79 | 90,58 | 94,58 | 95,58 | 96,58 | | | | 96,58 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 87,78 | 91,26 | 92,50 | 93,00 | 93,50 | | | | 93,50 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.05 | | | | | Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | 393.394.000 | 393.394.000 | 393.394.000 | | 1.180.182.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | | Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala | Persen | 6,67 | 6,67 | 7,14 | 8,70 | 8,70 | | | | 8,70 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.06 | | | | | Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | | | | | | 399.999.800 | 399.999.800 | 451.742.208 | | 1.251.741.808 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | | | | | Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Penanaman Modal dan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3.30.02 | | | | | | Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | | | | | | | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | | 350.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPF/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 93,00 | 0,00 | 95,32 | 96,53 | 97,86 | | | | 97,86 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.03 | | | | | | Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | 20.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 70.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.04 | | | | | | Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | | | | | | 295.000.000 | 330.000.000 | 345.000.000 | | 970.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 34,84 | 0,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | | | | 39,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.05 | | | | | | Program : Pengembangan Ekspor | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Tingkat Nilai Export bersih | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------------|------|----------------|-------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang | Persen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,94 | 3,22 | | | | 3,22 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.06 | | | | | | Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | | | | | | | 275.000.000 | 350.000.000 | 375.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 62,61 | 0,00 | 64,62 | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.07 | | | | | | Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 135.000.000 | | 285.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.02 | | | | | | Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri | | | | | | | 450.000.000 | 475.000.000 | 600.000.000 | | 1.525.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 47,52 | 0,00 | 83,33 | 90,48 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | | | | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|------|------|---------------|--------|------------------|---|---------------|--|----------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 3.31.03 | | | | | Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | | 225.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Persen | 18,68 | 0,00 | 20,71 | 21,19 | 21,45 | | | | | 21,45 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | |
| | | | | | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | |
| | | | | | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | |
| | | | | | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | |
| 3.31.04 | | | | | Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | | | | | | | | | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | | 375.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | |
| | | | | | | Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan | Kegiatan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | 10,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | |
| III.1.3 | | | | | Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | | | | | | | | | | | | 4.450.000.000 | 4.450.000.000 | 4.450.000.000 | | 13.350.000.000 | |
| | | | | | | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | 0,03 | | | | | | |
| | | | | | | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,82 | 10,41 | | | | | 10,41 | | | | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|-------|----------------|-------|---------------|---------------------|---------------|------|---------------|---|------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.26.02 | | | | | Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | | | | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | | 9.450.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | -35,81 | -44,84 | 6,53 | 3,33 | 4,84 | | | | | 4,84 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Persen | -18,24 | 32,35 | 0,42 | 2,38 | 2,78 | | | | | 2,78 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Tingkat hunian akomodasi | Persen | 17,54 | 16,89 | 19,87 | 24,84 | 31,05 | | | | | 31,05 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Kunjungan wisata | Persen | 53,01 | 69,89 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | | | | | 90,00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | | | | | 2,00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi | Persen | 4,44 | 4,44 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | | | | | 0,31 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat | Persen | 4,44 | 4,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | | | | | 0,43 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan | Persen | 13,33 | 15,56 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | | | | | 0,31 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 3.26.03 | | | | | Program : Pemasaran Pariwisata | | | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.200.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan | Event | 40,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | | | Persentase destinasi wisata yang diminati | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | | | | 0,32 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|--|---------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.26.04 | | | | | Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 1.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan | Persen | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.05 | | | | | Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.200.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | | Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina | Persen | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| III.1.4 | | | | | Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | | | | | 10.571.630.706 | 10.534.564.408 | 10.833.779.089 | | 31.939.974.203 | | |
| | | | | | | Nilai Tukar Petani | Poin | 97,84 | 99,13 | 101,71 | 103,00 | 104,29 | | | | 104,29 | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan | Poin | 78,30 | 91,40 | 95,70 | 97,80 | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | | | | | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | Persen | 6,57 | 6,57 | 6,39 | 6,34 | 6,29 | | | | 6,29 | | |
| 2.09.02 | | | | | Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | | | | | | | | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 | | 990.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan | Persen | 75,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.03 | | | | | Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | 1.065.000.000 | 1.065.000.000 | 1.125.000.000 | | 3.255.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.04 | | | | | Program : Penanganan Kerawanan Pangan | | | | | | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | | 190.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.05 | | | | | Program : Pengawasan Keamanan Pangan | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 240.000.000 | | 640.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.25.03 | | | | | Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | | | | | 596.986.000 | 605.487.000 | 616.877.000 | | 1.819.350.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 1.371,25 | 1.474,09 | 1.635,30 | 1.692,54 | 1.751,77 | | | | 1.751,77 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi perikanan | Persen | 10,50 | 10,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | | 5,25 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Konsumsi ikan | Persen | 20,00 | 32,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | | | | 35,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 11,76 | 16,98 | 18,97 | 19,67 | 20,31 | | | | 20,31 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi perikanan kelompok nelayan | Persen | 0,17 | 9,16 | 3,32 | 3,40 | 3,48 | | | | 3,48 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | Persen | 68,56 | 74,25 | 76,85 | 79,54 | 82,33 | | | | 82,33 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | | | 3,50 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.04 | | | | | | Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | | | 2.925.452.000 | 2.891.669.000 | 2.923.591.000 | | 8.740.712.000 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 108.037,89 | 14.735,00 | 16.351,74 | 17.496,36 | 18.721,11 | | | | 18.721,11 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Poduksi Ikan Konsumsi | Ton | 15.646,00 | 16.205,00 | 17.987,00 | 19.189,00 | 20.473,00 | | | | 20.473,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi Benih Ikan UPR | Ekor | 554.013.000,00 | 1.067.364.864,00 | 1.078.038.512,00 | 1.088.818.897,00 | 1.100.000.000,00 | | | | 1.100.000.000,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi Benih Ikan BBI | Ekor | 6.630.833,00 | 6.740.000,00 | 8.100.000,00 | 9.150.000,00 | 10.200.000,00 | | | | 10.200.000,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi Ikan Hias | Ton | 239.090,00 | 194.918,00 | 608.990,00 | 627.259,00 | 646.076,00 | | | | 646.076,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi Perikanan budidaya | Ton | 39,58 | 0,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | | | | 38,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.05 | | | | | | Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | | | | | | 41.632.000 | 42.226.000 | 43.020.000 | | 126.878.000 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.06 | | | | | | Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | | | 399.851.000 | 405.543.000 | 413.173.000 | | 1.218.567.000 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produksi Olahan Produk Perikanan | Ton | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 | | | | 550,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan | Kelompok | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | | | | 16,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Unit | 112,00 | 121,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | | | | 150,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.27.04 | | | | | | Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | 552.488.000 | 564.289.000 | 576.396.000 | | 1.693.173.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik | Persen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) | Kasus | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan | Lokasi | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | | | | 17,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) | Ekor | 57.983,00 | 39.574,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) | Persen | - | - | 79,00 | 84,00 | 87,50 | | | | 87,50 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 633,00 | 696,00 | 828,00 | 908,00 | 992,00 | | | | 992,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 13,00 | 14,30 | 16,20 | 18,00 | 19,80 | | | | 19,80 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Liter | 32,00 | 35,20 | 38,80 | 41,00 | 42,70 | | | | 42,70 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.05 | | | | | | Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | | | | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 750.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Persentase Pengendalian Serangan OPT | Persen | 3,00 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | Persen | 3,00 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.06 | | | | | | Program : Perizinan Usaha Pertanian | | | | | | | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 120.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin | Persen | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.07 | | | | | | Program : Penyuluhan Pertanian | | | | | | | 600.000.000 | 600.000.000 | 700.000.000 | | 1.900.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | | Cakupan bina kelompok petani | Persen | 70,00 | 70,00 | 73,00 | 74,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.07 | | | | | | Program : Penyuluhan Pertanian | | | | | | | 137.102.000 | 144.058.000 | 159.838.000 | | 440.998.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | Cakupan bina kelompok petani (peternakan) | Persen | 15,00 | 13,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 12,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|---|---------|---|-----------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------|---------------|---------------|-----|--------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.27.02 | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 | | | 2.730.000.000 | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Persen | 6,00 | 6,20 | 6,25 | 6,26 | 6,26 | | | | | 6,26 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Pertumbuhan Produksi Pertanian | Persen | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Persen | 25,00 | 26,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | | | | | 73,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Produksi Padi | Ton | 270,54 | 0,00 | 270.808,00 | 271.079,00 | 271.350,00 | | | | | 271.350,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | Persen | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 3,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | Persen | 60,00 | 65,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | | | | | 77,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Pengembangan Tanaman Manggis | Persen | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.03 | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | 1.880.970.706 | 1.835.854.408 | 1.834.342.089 | | | 5.551.167.203 | | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persen | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | | | | 48,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.02 | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | 519.701.000 | 527.101.000 | 537.014.000 | | | 1.583.816.000 | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | Pertumbuhan Produksi Peternakan | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | | | 1,50 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | Cakupan Akseptor IB | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | | | | | 85,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | Persentase bibit ternak bersertifikat | Persen | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | | | | | 15,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia | Persen | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | | | | | 3,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.03 | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | 62.448.000 | 63.337.000 | 64.528.000 | | | 190.313.000 | | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | Persentase RPH sesuai standar | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| III.2 | | | Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | | 2.453.300.000 | 2.577.000.000 | 2.680.000.000 | | | | | 7.710.300.000 | | | |
| | | | | | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | | | | | 6,44 | | |
| | | | | | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | | | | | 0,255 | | |
| | | | | | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 11,67 | 12,19 | 12,64 | 12,91 | 13,18 | | | | | 13,18 | | |
| III.2.1 | | | Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan | | | | | 1.663.300.000 | 1.759.000.000 | 1.820.000.000 | | | | | 5.242.300.000 | | | |
| | | | | | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | | | | | 6,44 | | |
| | | | | | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | | | | | 0,255 | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 11,67 | 12,19 | 12,64 | 12,91 | 13,18 | | | | 13,18 | | |
| 1.06.02 | | | | | | Program : Pemberdayaan Sosial | | | | | | | 255.000.000 | 271.000.000 | 275.000.000 | | 801.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.03 | | | | | | Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | | | | | | | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04 | | | | | | Program : Rehabilitasi Sosial | | | | | | | 778.300.000 | 833.000.000 | 860.000.000 | | 2.471.300.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 471,00 | 402,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 260,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Persen | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 400,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|--|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 76,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.05 | | | | | Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial | | | | | | | | 600.000.000 | 620.000.000 | 650.000.000 | | 1.870.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase anak terlantar yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| III.2.2 | | | | | Sasaran 11 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | 790.000.000 | 818.000.000 | 860.000.000 | | 2.468.000.000 | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 86,70 | 86,93 | 87,38 | 87,60 | 87,83 | | | | | 87,83 | |
| | | | | | | Indeks Perberdayaan Gender (IDG) | Poin | 74,39 | 77,89 | 79,92 | 80,93 | 81,94 | | | | | 81,94 | |
| 2.08.02 | | | | | Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | 260.000.000 | 273.000.000 | 288.000.000 | | 821.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 | | | | | Program : Perlindungan Perempuan | | | | | | | 205.000.000 | 220.000.000 | 227.000.000 | | 652.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Poin | 5,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | 30,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 17,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.04 | | | | | Program : Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | | | | 120.000.000 | 120.000.000 | 130.000.000 | | 370.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga | Persen | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.05 | | | | | Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | | | | | | | 40.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | | 125.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Data Gender Anak | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 2.08.06 | | | | | Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | | | | | | 140.000.000 | 140.000.000 | 145.000.000 | | 425.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Persentase Pemenuhan Hak Anak | Persen | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Sosial Pemberdayaan | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 | | | | | | Program : Perlindungan Khusus Anak | | | | | | | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 75.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 8,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| IV. | Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah | | | | | | | | | | | | 218.565.377.589 | 222.246.791.143 | 227.341.245.009 | 668.153.413.741 | | |
| IV.1 | Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | | | | | | | | | | | | 218.565.377.589 | 222.246.791.143 | 227.341.245.009 | 668.153.413.741 | | |
| | | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | |
| | | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| IV.1.1 | Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | | | | | | | | | | | | 125.107.053.199 | 126.394.975.699 | 129.150.595.017 | 380.652.623.915 | | |
| | | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | |
| | | | | | | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 79,76 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | | | | 83,00 | | |
| 1.03.10 | Program : Penyelenggaraan Jalan | | | | | | | | | | | | 88.490.000.000 | 89.500.000.000 | 91.550.000.000 | | 269.540.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | - | 84,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 68,76 | - | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | | | 68,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 72,79 | - | 72,00 | 71,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan | Persen | 6,87 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | | | 7,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi | Persen | 2,74 | 4,11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.02 | Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | | | | | | | | | 19.730.000.000 | 19.800.000.000 | 19.870.000.000 | | 59.400.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | - | - | 37,60 | 37,60 | 37,60 | | | | 37,60 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 37,56 | - | 84,71 | 84,71 | 84,71 | | | | 84,71 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.03.03 | | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | | | 13.312.053.199 | 13.501.615.994 | 13.755.595.017 | | 40.569.264.210 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Persen | 60,65 | 61,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | | | | | 63,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 94,55 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | | | | | 97,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | Persen | 79,76 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | | | | 82,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persen | 0,39 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Tingkat jaringan SPAM yang dibangun | Persen | 96,24 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | | | | | 99,00 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2.15.02 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | | | 3.325.000.000 | 3.343.359.705 | 3.725.000.000 | | 10.393.359.705 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Persen | 98,00 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota | Poin | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | | | | | 85,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan) | Unit | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | | | | | 311.378,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Rasio ijin trayek | Persen | 56,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | 50,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan) | Unit | 300,00 | 300,00 | 307,00 | 310,00 | 310,00 | | | | | 310,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | | | | | 1.397,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 884,00 | 884,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | | | | | 881,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Pemasangan Rambu- rambu | Persen | 60,00 | 61,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | | | | | 75,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | | | | | 0,002 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | | | | | 576.262,00 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Orang | 490.776,00 | 490.776,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | | | | | 539.548,00 | Dinas Perhubungan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.15.03 | | | | | Program : Pengelolaan Pelayaran | | | | | | | | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 750.000.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin | Persen | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Perhubungan |
| IV.1.2 | | | | | Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien | | | | | | | | 93.458.324.390 | 95.851.815.444 | 98.190.649.992 | | 287.500.789.826 | |
| | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | |
| | | | | | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | | 88,35 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | | | | 91,00 | | |
| | | | | | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | | 37,56 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | | | | 37,60 | | |
| 1.03.06 | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | | | | 5.570.000.000 | 5.570.000.000 | 5.570.000.000 | | 16.710.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.08 | | | | | Program : Penataan Bangunan Gedung | | | | | | | | 30.100.000.000 | 31.800.000.000 | 33.020.000.000 | | 94.920.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat | Persen | | 54,55 | 8,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara | Persen | | - | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.09 | | | | | Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | | | | | | | | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | | 810.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Persen | | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.11 | | | | | Program : Pengembangan Jasa Konstruksi | | | | | | | | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | | 2.250.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | 0,10 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persen | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.12 | | | | | Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | 3.278.815.235 | 3.303.036.264 | 3.520.172.959 | | 10.102.024.458 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persen | 5,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | Persen | 54,25 | 54,25 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.04 | | | | | Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | | | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.200.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi | Persen | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.05 | | | | | Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | | | | | 5.050.000.000 | 5.050.000.000 | 5.050.000.000 | | 15.150.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.08 | | | | | Program : Pengelolaan Tanah Kosong | | | | | | | | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | | 2.550.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | | | | | Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan | Persen | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.05 | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | | | | | 15.985.175.450 | 16.212.803.333 | 16.517.782.529 | | 48.715.761.312 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 67,69 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | | | | 71,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 81,02 | 81,5 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | | | | 84,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|-------|----------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki | Persen | 98,45 | 80,5 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | | | | 83,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.06 | | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | | | 985.483.039 | 999.516.254 | 1.018.318.164 | | 3.003.317.457 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | 0,05 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.07 | | | | | | Program : Pengembangan Permukiman | | | | | | | 25.920.667.622 | 26.289.776.283 | 26.784.313.511 | | 78.994.757.416 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Persentase areal kawasan kumuh | Persen | 31,55 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Poin | 25,82 | 27,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 | | | | | | Program : Pengembangan Perumahan | | | | | | | 309.146.029 | 313.548.249 | 319.446.408 | | 942.140.686 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 15,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Persen | 7,60 | 2,61 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | | | | 11,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 46,90 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 | | | | | | Program : Kawasan Permukiman | | | | | | | 1.975.893.394 | 2.004.029.990 | 2.041.727.817 | | 6.021.651.201 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Rasio rumah layak huni | Persen | 31,55 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Rasio permukiman layak huni | Persen | 22,87 | 23,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 94,68 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | | | | 98,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persen | 90,91 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | | | | 94,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | | Persentase permukiman yang tertata | Persen | 16,11 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|--|----------------------|--------|---------|--|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.04.05 | | | | | Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | | | | | | | 1.823.143.621 | 1.849.105.071 | 1.883.888.604 | | 5.556.137.296 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 3,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 3,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.06.07 | | | | | Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | | | | 190.000.000 | 190.000.000 | 195.000.000 | | 575.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| V. | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | | | | | | | | | | 1.897.069.744.509 | 1.921.982.602.790 | 1.951.720.437.813 | | 5.770.772.785.112 | |
| V.1 | Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | 1.872.400.149.190 | 1.897.072.332.529 | 1.926.861.287.026 | | 5.696.333.768.745 | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 61,41 | 64,41 | 67,41 | 70,41 | 73,41 | | | | | 73,41 | | |
| | | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 73,64 | | | | | 73,64 | | |
| | | | | | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | | | | 3,50 | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,58 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | | | | | 50,74 | | |
| | | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | WTP | | |
| V.1.1 | Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE | | | | | | | | | | | | 1.464.311.156.189 | 1.479.066.590.562 | 1.498.140.133.978 | | 4.441.517.880.729 | |
| | | | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 73,64 | | | | | 73,64 | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | |
| | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 61,41 | 64,41 | 67,41 | 70,41 | 73,41 | | | | | 73,41 | | |
| | | | | | Indeks SPBE | Poin | 2,37 | - | 2,60 | 2,80 | 3,00 | | | | | 3,00 | | |
| 1.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 478.193.521.597 | 483.929.931.283 | 489.149.931.283 | | 1.451.273.384.163 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | | Dinas Pendidikan |
| 1.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 106.523.567.079 | 108.231.163.570 | 110.573.640.704 | | 325.328.371.353 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | 194.749.458.648 | 196.980.937.644 | 200.300.567.176 | | 592.030.963.468 | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | Rasio Keuangan BLUD | Skor | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|----------|--------------|------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------|------|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional BLUD | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | | | | | Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | Skor | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| 1.03.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 42.437.697.001 | 42.437.697.001 | 42.637.697.001 | | 127.513.091.003 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | - | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 19.853.212.538 | 20.135.921.022 | 20.514.698.022 | | 60.503.831.582 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.05.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 19.233.250.000 | 19.425.407.905 | 19.905.146.303 | | 58.563.804.208 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 5.147.973.206 | 5.222.602.189 | 5.314.348.608 | | 15.684.924.003 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | | | | B | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 13.831.494.622 | 13.997.749.341 | 14.237.490.603 | | 42.066.734.566 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | | | | B | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.06.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 7.599.000.000 | 7.618.171.677 | 7.689.665.661 | | 22.906.837.338 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | | | | B | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.07.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 10.156.905.340 | 10.337.708.465 | 10.529.951.160 | | 31.024.564.965 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|------|----------------|------|------|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.09.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 16.074.497.122 | 16.424.497.122 | 16.624.497.122 | | 49.123.491.366 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.11.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 37.125.305.302 | 36.585.166.273 | 36.809.392.924 | | 110.519.864.499 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.12.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 17.242.960.689 | 17.400.302.479 | 17.441.791.879 | | 52.085.055.047 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.13.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 12.459.426.756 | 12.867.855.618 | 13.581.093.156 | | 38.908.375.530 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.14.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 6.862.690.484 | 6.867.186.933 | 6.875.942.398 | | 20.605.819.815 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.15.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 18.333.385.684 | 18.627.000.000 | 18.663.347.100 | | 55.623.732.784 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Dinas Perhubungan |
| 2.16.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 9.330.482.106 | 9.405.449.632 | 9.462.933.875 | | 28.198.865.613 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.17.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 14.154.207.120 | 14.155.277.954 | 14.153.268.214 | | 42.462.753.288 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2.18.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 11.801.503.096 | 11.989.396.541 | 12.189.396.541 | | 35.980.296.178 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | | | A | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.19.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 18.565.000.000 | 20.043.596.509 | 20.215.000.000 | | 58.823.596.509 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | | BB | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.23.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 10.218.858.281 | 10.282.692.115 | 10.535.935.383 | | 31.037.485.779 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | BB | BB | BB | | | | | | BB | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 3.25.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 11.195.629.263 | 11.421.559.779 | 11.644.323.325 | | 34.261.512.367 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | | BB | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 4.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum | | | | | | | | | 63.243.130.002 | 63.389.097.528 | 63.427.981.770 | | 190.060.209.300 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | A | A | A | | | | | | A | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| 4.02.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 46.876.175.032 | 47.335.987.309 | 47.769.737.665 | | 141.981.900.006 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | D | B | B | B | B | | | | | | B | | Sekretariat DPRD |
| | | | | | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 | | Sekretariat DPRD |
| 5.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 10.617.741.053 | 10.687.724.816 | 10.723.966.937 | | 32.029.432.806 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | AA | AA | AA | AA | AA | | | | | | AA | | Badan Perencanaan Pembangunan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|----------|--------------|------|----------------|------|------|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.02.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 58.106.644.072 | 55.723.000.000 | 55.723.000.000 | | 169.552.644.072 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | | A | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 28.912.578.527 | 29.330.539.558 | 29.407.520.650 | | 87.650.638.735 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | | A | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.03.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 32.358.428.518 | 32.855.654.010 | 33.360.631.091 | | 98.574.713.619 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | | A | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 6.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 25.699.030.316 | 26.039.994.595 | 26.525.727.263 | | 78.264.752.174 | Inspektorat |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | | A | Inspektorat |
| 7.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 3.386.324.995 | 3.429.057.225 | 3.486.055.220 | | 10.301.437.440 | Kecamatan Jatiluhur |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | CC | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 3.130.982.955 | 3.159.416.055 | 3.186.417.055 | | 9.476.816.065 | Kecamatan Sukasari |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | | | | | B | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 2.861.568.444 | 2.887.549.050 | 2.931.200.000 | | 8.680.317.494 | Kecamatan Maniis |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | | | | | B | Kecamatan Maniis |
| 7.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 3.283.584.092 | 3.322.567.225 | 3.371.352.422 | | 9.977.503.739 | Kecamatan Tegalwaru |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 3.391.924.995 | 3.452.415.207 | 3.480.055.220 | | 10.324.395.422 | Kecamatan Plered |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | CC | BB | BB | BB | | | | | BB | Kecamatan Plered |
| 7.01.01 | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 3.881.427.939 | 3.934.804.743 | 4.010.030.920 | | 11.826.263.602 | Kecamatan Sukatani |
| | | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | A | A | A | | | | | A | Kecamatan Sukatani |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|------|----------------|------|------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.523.383.923 | 3.581.561.313 | 3.629.809.164 | | 10.734.754.400 | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.562.383.923 | 3.611.561.313 | 3.677.809.164 | | 10.851.754.400 | Kecamatan Bojong |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.617.383.923 | 3.655.061.313 | 3.701.309.164 | | 10.973.754.400 | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.445.424.995 | 3.494.057.225 | 3.556.555.220 | | 10.496.037.440 | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | CC | B | B | B | | | | | B | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.182.916.067 | 3.195.789.446 | 3.236.664.076 | | 9.615.369.589 | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.327.552.609 | 3.371.291.225 | 3.432.279.792 | | 10.131.123.626 | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | A | A | | | | | A | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 14.829.743.173 | 14.946.793.173 | 15.046.263.434 | | 44.822.799.780 | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.151.551.305 | 3.190.553.138 | 3.229.270.074 | | 9.571.374.517 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.358.024.995 | 3.403.157.225 | 3.464.930.245 | | 10.226.112.465 | Kecamatan Campaka |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.783.342.851 | 3.845.065.429 | 3.971.063.109 | | 11.599.471.389 | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | A | A | | | | | A | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.143.466.067 | 3.185.953.138 | 3.245.651.276 | | 9.575.070.481 | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | | BB | | Kecamatan Bungursari |
| 8.01.01 | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 4.088.634.734 | 4.192.328.341 | 4.317.681.309 | | 12.598.644.384 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | | A | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4.02.02 | | | | | | Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | | | | 24.823.996.300 | 25.385.189.910 | 26.319.398.300 | | 76.528.584.510 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat DPRD |
| | | | | | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat DPRD |
| 2.12.02 | | | | | | Program : Pendaftaran Penduduk | | | | | | | 210.000.000 | 210.000.000 | 215.000.000 | | 635.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Perekaman KTP elektronik | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Kategori | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | | | | Sudah | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 26,98 | 48,22 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|--|---------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.12.03 | | | | | Program : Pencatatan Sipil | | | | | | | | 160.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | | 285.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Kepemilikan akta kelahiran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Rasio bayi berakte kelahiran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Rasio pasangan berakte menikah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 81,61 | 85,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 | | | | | Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | 785.000.000 | 980.000.000 | 1.280.000.000 | | 3.045.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persen | 53,33 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | | | | 57,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 | | | | | Program : Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | | | | | 25.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 95.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Profil data kependudukan | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.16.02 | | | | | Program : Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | | | | | 5.970.000.000 | 5.995.000.000 | 6.300.000.000 | | 18.265.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 | 11,76 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 67,00 | 66,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | - | 90,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | 53,30 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|-----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | Persen | - | - | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16.03 | | | | | | Program : Aplikasi Informatika | | | | | | | 10.370.000.000 | 10.570.000.000 | 10.570.000.000 | | 31.510.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | Persen | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.20.02 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | 675.000.000 | 735.000.000 | 800.000.000 | | 2.210.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 69,50 | 36,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 69,50 | 25,50 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | Persen | - | - | 85,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.21.02 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | | | | 1.040.000.000 | 1.070.000.000 | 1.165.000.000 | | 3.275.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | Persen | - | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 7.01.02 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | | 27.000.000 | Kecamatan Jatiluhur |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.02 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | 12.784.450 | 14.500.000 | 16.500.000 | | 43.784.450 | Kecamatan Sukasari |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Sukasari |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|------|----------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 40.500.000 | 42.500.000 | 44.500.000 | | 127.500.000 | Kecamatan Maniis |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 | | 108.000.000 | Kecamatan Tegalwaru |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 7.500.000 | 7.800.000 | 6.500.000 | | 21.800.000 | Kecamatan Plered |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Plered |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.600.000 | | 23.600.000 | Kecamatan Sukatani |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 20.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | | 69.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 73.000.000 | Kecamatan Bojong |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | | 26.000.000 | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 17.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 0 | 0 | 16.000.000 | | 16.000.000 | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 42.500.000 | 44.050.000 | 44.250.000 | | 130.800.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | | 330.000.000 | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 30.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Babakan Cikao |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.615.000 | | 18.915.000 | Kecamatan Campaka |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Campaka | |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000 | | 120.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Cibatu | |
| 7.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | 20.000.000 | 21.000.000 | 21.250.000 | | 62.250.000 | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | Kecamatan Bungursari | |
| V.1.2 | | | | | Sasaran 15 : Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 408.088.993.001 | 418.005.741.967 | 428.721.153.048 | | 1.254.815.888.016 | |
| | | | | | Indeks Profesionalitas ASN | Predikat | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | | | | | Rendah | | | |
| | | | | | Sistem Merit Kabupaten | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | | Baik | | | |
| | | | | | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | 3,5 | | | |
| | | | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | WTP | | | |
| | | | | | Indeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | | | | | 0,25 | | | |
| | | | | | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Poin | 77,52 | 79,16 | 82,45 | 84,09 | 85,74 | | | | | 85,74 | | | |
| | | | | | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 2,64 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,38 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | | | | | 50,74 | | | |
| 4.01.02 | | | | | Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | 13.870.000.000 | 14.240.000.000 | 14.610.000.000 | | 42.720.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten | Persen | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online | Persen | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif | Persen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | 15,00 | | Sekretariat Daerah | |
| 4.01.03 | | | | | Program : Perekonomian Dan Pembangunan | | | | | | | | | 5.439.152.029 | 6.047.267.719 | 7.134.835.634 | | 18.621.255.382 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun | Dokumen | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | | 8,00 | | Sekretariat Daerah | |
| | | | | | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|---------|--------------|--------|----------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|--------|---|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | ditandatangani pada kuartal pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 44,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | | 55,00 | | Sekretariat Daerah |
| 2.24.02 | | | | | | Program : Pengelolaan Arsip | | | | | | 850.000.000 | 900.000.000 | 850.000.000 | | 2.600.000.000 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | | | | | Persentase Pembinaan Kearsipan OPD | Persen | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib | Persen | 28,57 | 0,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | | | | | 39,10 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan | Persen | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | | | | | 27,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Persentase Penyusutan Arsip | Persen | 9,50 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Arsip Aktif | Persen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Arsip Inaktif | Persen | 5,28 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Arsip Vital | Persen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan | Persen | 73,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | | 75,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan | Persen | 2,67 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | | | | | 4,70 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.24.03 | | | | | | Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | | | | | | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | | 525.000.000 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | | | | | Tingkat Penyelamatan Arsip Statis | Persen | 33,04 | 6,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis | Persen | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | | | | | 19,99 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | | Tingkat Pelestarian Arsip Statis | Persen | 1,75 | 13,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | | | 1,75 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 5.01.02 | | | | | | Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | 1.175.000.000 | 1.200.000.000 | 1.300.000.000 | | 3.675.000.000 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|---------|--------------|--------|----------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------|-------------------|-----|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Capaian Kinerja RKPD | Persen | 88,64 | 88,75 | 89,00 | 89,25 | 89,50 | | | | 89,50 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | | | | | | Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 750.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | | 2.450.000.000 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.02.02 | | | | | | Program : Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | 366.210.000.000 | 374.666.502.002 | 382.803.006.627 | | 1.123.679.508.629 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | Persen | 15,65 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Persen | 81,83 | 0,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | | | | 89,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | WTP | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | 75,24 | 0,00 | 75,54 | 75,84 | 76,14 | | | | 76,14 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Persen | 2,18 | 0,00 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | | | | 2,03 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 2,16 | 2,68 | 1,74 | 1,69 | 1,58 | | | | 1,58 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 30,85 | 0,00 | 32,00 | 34,00 | 35,00 | | | | 35,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 19,05 | 0,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 1,25 | 14,84 | 1,80 | 1,78 | 1,74 | | | | 1,74 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | | | Tepat Waktu | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Kesesuaian Dokumen Penganggaran | Skor | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | 6,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD | Skor | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | Skor | 7,76 | 7,76 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Penyerapan Anggaran | Skor | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Kondisi Keuangan Daerah | Skor | 3,06 | 3,06 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 4,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.03 | | | | | | Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | | 6.450.000.000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak) | Dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | | | | Ya | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat | Persen | 21,79 | 23,66 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persen | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|-----------|----------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-----|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Persentase pengolah BMD yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Persentase penyusutan/ penghapusan BMD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | | Administrasi BMD yang Andal | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.04 | | | | | | Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 3.950.000.000 | 4.000.000.000 | 4.550.000.000 | | 12.500.000.000 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Rasio PAD | Persen | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | | | | 0,93 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | 11,95 | 12,30 | 12,65 | 13,00 | 13,35 | | | | 13,35 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Rasio Pajak daerah | Persen | 48,84 | 49,34 | 49,84 | 50,34 | 50,84 | | | | 50,84 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Rasio retribusi daerah | Persen | 3,92 | 4,23 | 4,53 | 4,84 | 5,14 | | | | 5,14 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Persentase capaian PAD | Persen | 88,05 | 88,50 | 88,95 | 89,40 | 89,85 | | | | 89,85 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah | Persen | 8,80 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | | | | 10,50 | | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.05.02 | | | | | | Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah | | | | | | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.275.000.000 | | 3.575.000.000 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persen | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | Persen | 10,87 | 25,53 | 42,55 | 53,19 | 53,19 | | | | 53,19 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|------|------|---------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.06.02 | | | | | Program : Pengelolaan Perbatasan | | | 600.000.000 | 660.000.000 | 750.000.000 | | | 2.010.000.000 | | | | 2.010.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | | Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| 5.03.02 | | | | | Program : Kepegawaian Daerah | | | 6.050.000.000 | 6.075.000.000 | 6.075.000.000 | | | 18.200.000.000 | | | | 18.200.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 78,59 | 80,16 | 80,88 | 81,74 | 82,67 | | | | 82,67 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 8,40 | 16,66 | 16,99 | 17,33 | 17,67 | | | | 17,67 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 29,76 | 39,68 | 49,80 | 54,86 | 59,92 | | | | 59,92 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | | | | 34,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | | | | 172,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 249,00 | 494,00 | 504,00 | 514,00 | 524,00 | | | | 524,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai | Persen | 0,41 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | | | | 0,21 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Persentase Pemberhentian ASN | Persen | 6,04 | 7,02 | 5,73 | 5,94 | 6,16 | | | | 6,16 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa | Persen | 1,76 | 2,59 | 2,15 | 2,03 | 1,93 | | | | 1,93 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 25.000.000 | 26.000.000 | 27.000.000 | | 78.000.000 | Sumber Daya Manusia Kecamatan Jatiluhur |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 26.914.762 | 34.177.083 | 51.334.221 | | 112.426.066 | Kecamatan Sukasari |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 26.000.000 | 27.000.000 | 28.000.000 | | 81.000.000 | Kecamatan Maniis |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 64.050.000 | 70.250.000 | 82.582.798 | | 216.882.798 | Kecamatan Tegalwaru |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 35.500.000 | 32.000.000 | 66.000.000 | | 133.500.000 | Kecamatan Plered |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 54.600.000 | 55.230.000 | 55.330.000 | | 165.160.000 | Kecamatan Sukatani |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 120.000.000 | 122.000.000 | 122.000.000 | | 364.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.05 | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 300.000.000 | Kecamatan Bojong |
| | | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|------------|------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 35.000.000 | 42.500.000 | 50.000.000 | | 127.500.000 | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | | 34.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 0 | 30.000.000 | 21.000.000 | | 51.000.000 | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 57.372.386 | 58.200.000 | 60.965.428 | | 176.537.814 | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 53.875.000 | 63.717.795 | 106.484.499 | | 224.077.294 | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 34.914.762 | 40.000.000 | 63.031.202 | | 137.945.964 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 69.300.000 | 72.765.000 | 76.403.250 | | 218.468.250 | Kecamatan Campaka |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | | 145.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 7.01.05 | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | 40.000.000 | 40.400.000 | 40.600.000 | | 121.000.000 | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| 6.01.02 | | | | | Program : Penyelenggaraan Pengawasan | | | | | | | | | 3.280.000.000 | 3.378.000.000 | 3.477.000.000 | | 10.135.000.000 | Inspektorat |
| | | | | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 3,00 | | Inspektorat |
| | | | | | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | | 70,09 | 84,79 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | | 80,00 | | Inspektorat |
| | | | | | Jumlah temuan BPK | Laporan | | 16,00 | 15,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | | | | | 8,00 | | Inspektorat |
| | | | | | Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Inspektorat |
| 6.01.03 | | | | | Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | | | | | | | | | 1.145.000.000 | 1.135.000.000 | 1.125.000.000 | | 3.405.000.000 | Inspektorat |
| | | | | | Capaian MCP KPK | Persen | | 74,00 | 100,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | | | | | 83,00 | | Inspektorat |
| | | | | | Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas | Perangkat Daerah | | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | 2,00 | | Inspektorat |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 30.000.000 | 31.000.000 | 34.000.000 | | 95.000.000 | Kecamatan Jatiluhur |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 51,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 41.079.150 | 47.060.000 | 60.050.000 | | 148.189.150 | Kecamatan Sukasari |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | | 90.000.000 | Kecamatan Maniis |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 50.870.000 | 53.220.000 | 55.830.000 | | 159.920.000 | Kecamatan Tegalwaru |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 25.500.000 | 17.842.018 | 25.000.000 | | 68.342.018 | Kecamatan Plered |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|------------|------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 21.314.912 | 22.030.658 | 22.102.189 | | 65.447.759 | Kecamatan Sukatani |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 41.000.000 | 33.000.000 | 50.000.000 | | 124.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 31.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | | 102.000.000 | Kecamatan Bojong |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 51.000.000 | 57.000.000 | 73.500.000 | | 181.500.000 | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 45.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 23.550.000 | 24.763.692 | 35.637.200 | | 83.950.892 | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 45.000.000 | 46.516.000 | 47.960.000 | | 139.476.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | | 40.000.000 | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|---|---------|--|-----------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 28.000.000 | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | | | 69.000.000 | | | Kecamatan Campaka |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 45.000.000 | 45.000.000 | 35.000.000 | | | 125.000.000 | | | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.06 | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | | | 18.800.000 | | | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | | 51,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| V.2 | | | Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | | | | | | | | | | | | 24.669.595.319 | 24.910.270.261 | 24.859.150.787 | 74.439.016.367 |
| | | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | | | | 81,45 | | |
| | | | | | Indeks Desa Membangun | Predikat | | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | | | | Maju | | |
| V.2.1 | | | Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | | | | | | | | | | 17.023.674.397 | 17.130.865.050 | 17.112.354.131 | 51.266.893.578 |
| | | | | | Indeks Desa Membangun | Predikat | | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | | | | Maju | | |
| 2.13.02 | | | | | Program : Penataan Desa | | | | | 1.100.000.000 | 900.000.000 | 700.000.000 | | | 2.700.000.000 | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.03 | | | | | Program : Peningkatan Kerja Sama Desa | | | | | 1.550.000.000 | 1.750.000.000 | 1.850.000.000 | | | 5.150.000.000 | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase kerjasama desa yang difasilitasi | Persen | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,74 | 11,48 | | | | 11,48 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase pembangunan kawasan perdesaan | Persen | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.13.04 | | | | | Program : Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | 4.350.000.000 | 4.250.000.000 | 4.050.000.000 | | 12.650.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase peningkatan status desa mandiri | Persen | 2,86 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | 5,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase desa tertib administrasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | 30,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase pembinaan BUM Desa | Persen | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase penertiban aset desa | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | | | | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase kepala desa yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | | | | | 30,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase aparatur desa yang dibina | Persen | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | | | | | 30,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.05 | | | | | Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | | 6.600.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase LSM aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase PKK aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | | Persentase Posyandu aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|------------|---------------------|------------|------|---------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Masyarakat dan Desa |
| | | | | | | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 29.600.000 | 31.000.000 | 33.500.000 | | 94.100.000 | Kecamatan Jatiluhur | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 21.704.750 | 23.900.000 | 26.000.000 | | 71.604.750 | Kecamatan Sukasari | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 29.438.694 | 37.000.000 | 41.847.331 | | 108.286.025 | Kecamatan Maniis | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 37.970.903 | 39.020.000 | 40.590.000 | | 117.580.903 | Kecamatan Tegalwaru | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | | 69.000.000 | Kecamatan Plered | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 10.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | | 32.500.000 | Kecamatan Sukatani | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 20.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | | 64.000.000 | Kecamatan Darangdan | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 30.000.000 | Kecamatan Bojong | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.03 | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | | 54.000.000 | Kecamatan Wanayasa | |
| | | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|-----------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------------|------|----------------|---------------|-----|----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | 15.000.000 | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 30.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | | | 97.000.000 | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | | | 16.500.000 | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 7.499.760.050 | 7.692.710.050 | 7.962.710.050 | | | 23.155.180.150 | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | | | 66.000.000 | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 14.700.000 | 15.435.000 | 16.206.750 | | | 46.341.750 | | | Kecamatan Campaka |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 30.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | | | 75.000.000 | | | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.03 | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | 17.000.000 | 18.300.000 | 19.500.000 | | | 54.800.000 | | | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| V.2.2 | | | | | Sasaran 17 : Meningkatkan Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | | | | | 7.645.920.922 | 7.779.405.211 | 7.746.796.656 | | | 23.172.122.789 | | | |
| | | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | | | | 81,45 | | |
| 1.05.02 | | | | | Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | | | | 932.423.187 | 1.027.423.187 | 932.423.187 | | | 2.892.269.561 | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|---------|---------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|-----|--|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 8.01.02 | | | | | | Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | | | | 1.150.000.000 | 1.151.000.000 | 1.154.000.000 | | 3.455.000.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 | | | | | | Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | 3.170.763.489 | 3.189.831.074 | 3.235.222.519 | | 9.595.817.082 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 | | | | | | Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | | | | | | 250.000.000 | 252.000.000 | 254.000.000 | | 756.000.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | | | | | 500.000.000 | 505.500.000 | 510.000.000 | | 1.515.500.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.06 | | | | | | Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | | | | | | 1.350.000.000 | 1.357.000.000 | 1.362.000.000 | | 4.069.000.000 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 7.01.04 | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | | 26.500.000 | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|-----------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | | 10.500.000 | Kecamatan Sukasari |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | | 17.500.000 | Kecamatan Maniis |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 13.450.000 | 14.000.000 | 14.700.000 | | 42.150.000 | Kecamatan Tegalwaru |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | | 5.000.000 | Kecamatan Plered |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | | 26.500.000 | Kecamatan Sukatani |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | | 25.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | | 24.000.000 | Kecamatan Bojong |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 18.000.000 | Kecamatan Wanayasa |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 15.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | Kecamatan Pasawahan |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 8.000.000 | 9.500.000 | 10.100.000 | | 27.600.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 151.884.246 | 154.650.950 | 164.650.950 | | 471.186.146 | Kecamatan Purwakarta |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN (Rp.) | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|--|------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 30.000.000 | | | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | | | 43.200.000 | | | Kecamatan Campaka |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | | | 75.000.000 | | | Kecamatan Cibatu |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.04 | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | 10.000.000 | 10.600.000 | 10.800.000 | | | 31.400.000 | | | Kecamatan Bungursari |
| | | | | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| JUMLAH | 1 | 5 | 8 | 17 | 281 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 311 | 311 | 311 | 785 | 311 | 996 |
| UNIQUE | 1 | 5 | 8 | 17 | 150 | 631 | 38 | 327 | 287 | 265 | 270 | 270 | 237 | 248 | 253 | 270 | 280 | 47 |

Sumber : Perangkat Daerah terkait, 2023

Tabel 6.8

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH | | | | |
|---|-------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 | | | | | |
| Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | | Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah | | | | | | | 215.183.101.295 | 218.215.674.912 | 226.748.111.316 | | | | | |
| I.1 | | | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing | | | | | | | 215.183.101.295 | 218.215.674.912 | 226.748.111.316 | | | | |
| I.1.1 | | | | Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | 205.798.645.983 | 209.786.219.600 | 217.543.828.833 | | | |
| I.1.1.1 | | | | | Strategi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan, dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas | | | | | | | 200.966.434.637 | 204.901.219.600 | 212.638.828.833 | | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM | | | | | | 200.966.434.637 | 204.901.219.600 | 212.638.828.833 | | |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah/kesetaraan dan PAUD | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mengembangkan pengelolaan kurikulum berbasis kearifan lokal | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan | | | | | | 200.966.434.637 | 204.901.219.600 | 212.638.828.833 | |
| 1.01.02 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Pendidikan | 199.986.134.737 | 203.876.219.600 | 211.613.828.833 | Dinas Pendidikan | | | | |
| 1.01.03 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kurikulum | 380.300.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | Dinas Pendidikan | | | | |
| 1.01.04 | | | | | | | | Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinas Pendidikan | | | | |
| 1.01.05 | | | | | | | | Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan | 199.999.900 | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinas Pendidikan | | | | |
| 1.01.06 | | | | | | | | Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra | 200.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | Dinas Pendidikan | | | | |
| I.1.1.2 | | | | | Strategi 2 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan | | | | | | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | | | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM | | | | | | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | | |
| | | | | | | Mengembangkan kebudayaan daerah dan kesenian tradisional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mengelola dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan aset cagar budaya | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan | | | | | | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|--|---|--|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.22.02 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kebudayaan | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.03 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kesenian Tradisional | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.04 | | | | | | | | Program : Pembinaan Sejarah | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.05 | | | | | | | | Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.06 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Permuseuman | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| I.1.1.3 | | | | | Strategi 3 : Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Masyarakat | | | | 457.211.346 | 510.000.000 | 530.000.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM | | | 457.211.346 | 510.000.000 | 530.000.000 | |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian referensi nasional dan naskah kuno | | | | | | |
| | | | | | | Mengembangkan inovasi dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan | | | 457.211.346 | 510.000.000 | 530.000.000 | |
| 2.23.02 | | | | | | | | Program : Pembinaan Perpustakaan | 407.211.346 | 460.000.000 | 480.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.23.03 | | | | | | | | Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| I.1.2 | | | | Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat | | | | | 9.384.455.312 | 8.429.455.312 | 9.204.282.483 | |
| I.1.2.1 | | | | | Strategi 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat | | | | 9.384.455.312 | 8.429.455.312 | 9.204.282.483 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas SDM | | | 9.384.455.312 | 8.429.455.312 | 9.204.282.483 | |
| | | | | | | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi tenaga kerja | | | | | | |
| | | | | | | Menciptakan iklim kerja yang harmonis dan berkeadilan | | | | | | |
| | | | | | | Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan kapasitas dan produktivitas bagi para calon transmigran | | | | | | |
| | | | | | | Mengembangkan potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan | | | 9.384.455.312 | 8.429.455.312 | 9.204.282.483 | |
| 2.07.03 | | | | | | | | Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.07.04 | | | | | | | | Program : Penempatan Tenaga Kerja | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.05 | | | | | | | | Program : Hubungan Industrial | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.19.02 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.19.03 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 4.024.455.312 | 3.024.455.312 | 3.075.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.19.04 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 620.000.000 | 620.000.000 | 1.039.282.483 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.32.02 | | | | | | | | Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | | | | | | | | Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 225.000.000 | 225.000.000 | 275.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.04 | | | | | | | | Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 5.04.02 | | | | | | | | Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.425.000.000 | 1.470.000.000 | 1.725.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| II. | | Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | 137.127.808.186 | 140.625.922.321 | 143.980.807.508 | |
| II.1 | | | Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | | | 131.027.833.200 | 133.337.922.321 | 136.045.807.508 | |
| II.1.1 | | | | Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana | | | | | 131.027.833.200 | 133.337.922.321 | 136.045.807.508 | |
| II.1.1.1 | | | | | Strategi 5 : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan | | | | 115.235.261.215 | 117.227.237.286 | 119.511.640.973 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | | | 115.235.261.215 | 117.227.237.286 | 119.511.640.973 | |
| | | | | | | Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC | | | | | | |
| | | | | | | Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | | 115.235.261.215 | 117.227.237.286 | 119.511.640.973 | |
| 1.02.02 | | | | | | | | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 86.109.252.055 | 87.281.228.126 | 88.825.631.813 | Dinas Kesehatan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|----------|-------------------------|-------------------------|--|---------|---|-------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.02.02 | | | | | | | | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 13.500.000.000 | 14.150.000.000 | 14.750.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.03 | | | | | | | | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 13.201.009.160 | 13.201.009.160 | 13.201.009.160 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03 | | | | | | | | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 625.000.000 | 725.000.000 | 800.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.04 | | | | | | | | Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 620.000.000 | 685.000.000 | 740.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 680.000.000 | 685.000.000 | 695.000.000 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| II.1.1.2 | | | | | Strategi 6 : Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera | | | | 15.792.571.985 | 16.110.685.035 | 16.534.166.535 | |
| | | | | | Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | | | | 15.792.571.985 | 16.110.685.035 | 16.534.166.535 | |
| | | | | | Menerapkan rencana pengendalian penduduk | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatkan pelayanan dan akseptor KB | | | | | | | |
| | | | | | Mendorong dan memperluas pembentukan kampung KB disemua wilayah | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan ketahanan keluarga sehat sejahtera | | | | | | | |
| | | | | | Prioritas Pembangunan 2 : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB | | | | 15.792.571.985 | 16.110.685.035 | 16.534.166.535 | |
| 2.14.02 | | | | | | | | Program : Pengendalian Penduduk | 349.385.450 | 429.969.750 | 474.969.750 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 | | | | | | | | Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 9.017.281.650 | 9.254.810.400 | 9.633.291.900 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 6.425.904.885 | 6.425.904.885 | 6.425.904.885 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| II.2 | | | Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | | | | | 6.099.974.986 | 7.288.000.000 | 7.935.000.000 | |
| II.2.1 | | | Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | 3.455.000.000 | 4.573.000.000 | 5.123.000.000 | |
| II.2.1.1 | | | Strategi 7 : Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup | | | | | | 3.030.000.000 | 4.123.000.000 | 4.623.000.000 | |
| | | | Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | | | | | | 3.030.000.000 | 4.123.000.000 | 4.623.000.000 | |
| | | | Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan hidup | | | | | | | | | |
| | | | Menerapkan rencana pembangunan berbasis ramah lingkungan | | | | | | | | | |
| | | | Memperluas penyediaan ruang terbuka hijau | | | | | | | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|----------|----------------------|----------------------|--------|---------|----------|----------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan serta pengelolaan limbah B3 | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pengembangan pengelolaan dan pelayanan persampahan | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 3.030.000.000 | 4.123.000.000 | 4.623.000.000 | |
| 2.11.02 | | | | | | | | Program : Perencanaan Lingkungan Hidup | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 | | | | | | | | Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 1.275.000.000 | 1.333.000.000 | 1.533.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.05 | | | | | | | | Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 250.000.000 | 325.000.000 | 375.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.07 | | | | | | | | Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | 100.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 | | | | | | | | Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Persampahan | 955.000.000 | 1.890.000.000 | 2.090.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| II.2.1.2 | | | | | | | | Strategi 8 : Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan | 425.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | |
| | | | | | | | | Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 425.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan masyarakat sadar dan peduli lingkungan | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 425.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | |
| 2.11.08 | | | | | | | | Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 300.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 | | | | | | | | Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | 125.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| II.2.2 | | | | | | | | Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana | 2.644.974.986 | 2.715.000.000 | 2.812.000.000 | |
| II.2.2.1 | | | | | | | | Strategi 9 : Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana | 2.644.974.986 | 2.715.000.000 | 2.812.000.000 | |
| | | | | | | | | Arah Kebijakan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 2.644.974.986 | 2.715.000.000 | 2.812.000.000 | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana dan penyelamatan | | | | |
| | | | | | | | | Mengembangkan sistem peringatan dini dan reformasi kebencanaan | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan hubungan koordinasi yang harmonis dalam upaya penanganan bencana dengan instansi terkait baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun stakeholder (swasta. Komunitas dan masyarakat) | | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 3 : Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 2.644.974.986 | 2.715.000.000 | 2.812.000.000 | |
| 1.05.03 | | | | | | | | Program : Penanggulangan Bencana | 1.076.000.000 | 1.090.000.000 | 1.117.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 | | | | | | | | Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1.355.000.000 | 1.405.000.000 | 1.455.000.000 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.06.06 | | | | | | | | Program : Penanganan Bencana | 213.974.986 | 220.000.000 | 240.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| III. | | Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal | | | | | | | 21.643.250.806 | 21.969.884.508 | 22.748.841.597 | |
| III.1 | | | Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat | | | | | | 19.189.950.806 | 19.392.884.508 | 20.068.841.597 | |
| III.1.1 | | | | Sasaran 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | 1.150.000.000 | 1.215.000.000 | 1.365.000.000 | |
| III.1.1.1 | | | | | Strategi 10 : Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi | | | | 625.000.000 | 657.500.000 | 732.500.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | 625.000.000 | 657.500.000 | 732.500.000 | |
| | | | | | | Mendorong pengembangan usaha perkoperasian yang berbasis inovasi dan kemitraan | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas SDM perkoperasian | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM | | 625.000.000 | 657.500.000 | 732.500.000 | |
| 2.17.02 | | | | | | | | Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 50.000.000 | 52.500.000 | 60.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.03 | | | | | | | | Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 185.000.000 | 195.000.000 | 222.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.04 | | | | | | | | Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 290.000.000 | 307.500.000 | 345.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.05 | | | | | | | | Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | 100.000.000 | 102.500.000 | 105.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|----------------------|----------------------|--------|---------|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III.1.1.2 | | | | | Strategi 11 : Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital | | | | 525.000.000 | 557.500.000 | 632.500.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | 525.000.000 | 557.500.000 | 632.500.000 | |
| | | | | | | Mengembangkan usaha dan pemasaran produk UMKM berbasis digital dan standar nasional | | | | | | |
| | | | | | | Mendorong dan memfasilitasi pemberian modal usaha | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pertumbuhan wira usaha baru UMKM | | | | | | |
| | | | | | | Menyediakan Sistem Data Base UMKM | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 4 : Pengembangan Koperasi dan UMKM | | 525.000.000 | 557.500.000 | 632.500.000 | |
| 2.17.07 | | | | | | | Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | | 375.000.000 | 382.500.000 | 432.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.08 | | | | | | | Program : Pengembangan UMKM | | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| III.1.2 | | | | | Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian | | | | 3.018.320.100 | 3.193.320.100 | 3.420.062.508 | |
| III.1.2.1 | | | | | Strategi 12 : Membangun Iklim Investasi yang Kondusif | | | | 1.393.320.100 | 1.393.320.100 | 1.445.062.508 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | 1.393.320.100 | 1.393.320.100 | 1.445.062.508 | |
| | | | | | | Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah diakses | | | | | | |
| | | | | | | Menyiapkan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan | | 1.393.320.100 | 1.393.320.100 | 1.445.062.508 | |
| 2.18.02 | | | | | | | Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | 99.989.800 | 99.989.800 | 99.989.800 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | | | | | | | Program : Promosi Penanaman Modal | | 199.950.000 | 199.950.000 | 199.950.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.04 | | | | | | | Program : Pelayanan Penanaman Modal | | 299.986.500 | 299.986.500 | 299.986.500 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.05 | | | | | | | Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | 393.394.000 | 393.394.000 | 393.394.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.06 | | | | | | | Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | 399.999.800 | 399.999.800 | 451.742.208 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|--|-------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III.1.2.2 | | | | | Strategi 13 : Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri | | | | 1.625.000.000 | 1.800.000.000 | 1.975.000.000 | |
| | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | | 1.625.000.000 | 1.800.000.000 | 1.975.000.000 | |
| | | | | | Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran yang representatif dan strategis | | | | | | | |
| | | | | | Mempermudah perolehan ijin usaha dan perdagangan secara transparan dan tepat waktu | | | | | | | |
| | | | | | Mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatkan pengawasan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan ketersediaannya di pasaran termasuk pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatkan upaya standarisasi dan perlindungan konsumen | | | | | | | |
| | | | | | Prioritas Pembangunan 5 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan | | | | 1.625.000.000 | 1.800.000.000 | 1.975.000.000 | |
| 3.30.02 | | | | | | | | Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.03 | | | | | | | | Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 20.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.04 | | | | | | | | Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 295.000.000 | 330.000.000 | 345.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.05 | | | | | | | | Program : Pengembangan Ekspor | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.06 | | | | | | | | Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 275.000.000 | 350.000.000 | 375.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.07 | | | | | | | | Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 75.000.000 | 75.000.000 | 135.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.02 | | | | | | | | Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 450.000.000 | 475.000.000 | 600.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.03 | | | | | | | | Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|----------------------|----------------------|--------|--|--|---|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.31.04 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 150.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| III.1.3 | | | | Sasaran 8 : Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | | | | 4.450.000.000 | 4.450.000.000 | 4.450.000.000 | |
| III.1.3.1 | | | | | Strategi 14 : Mengembangkan Potensi Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata | | | | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | |
| | | | | | | Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan akses dan sarana prasarana pariwisata sesuai standar | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masarakat sadar wisata | | | | | | |
| | | | | | | Mendorong pengembangan usaha pariwisata berbasis inovasi dan kemitraan | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | |
| 3.26.02 | | | | | | | | Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.03 | | | | | | | | Program : Pemasaran Pariwisata | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| III.1.3.2 | | | | | Strategi 15 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang berbasis Inovasi | | | | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | |
| | | | | | | Mendorong pemberdayaan wirausaha mandiri dan ekonomi kreatif masyarakat berbasis wisata | | | | | | |
| | | | | | | Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital dan perlindungan HAKI | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat | | | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | |
| 3.26.04 | | | | | | | | Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.05 | | | | | | | | Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| III.1.4 | | | | Sasaran 9 : Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | | | 10.571.630.706 | 10.534.564.408 | 10.833.779.089 | |
| III.1.4.1 | | | | | Strategi 16 : Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan | | | | 7.198.511.000 | 7.198.272.000 | 7.487.895.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | | | 7.198.511.000 | 7.198.272.000 | 7.487.895.000 | |
| | | | | | | Meningkatkan pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan daerah | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan produksi dan pengawasan hasil pangan dan pertanian | | | | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | Meningkatkan produksi dan pengawasan budidaya hasil perikanan dan peternakan | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tanaman pertanian | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan perlindungan hewan ternak | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan | 7.198.511.000 | 7.198.272.000 | 7.487.895.000 | |
| 2.09.02 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.03 | | | | | | | | Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.065.000.000 | 1.065.000.000 | 1.125.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.04 | | | | | | | | Program : Penanganan Kerawanan Pangan | 60.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.05 | | | | | | | | Program : Pengawasan Keamanan Pangan | 200.000.000 | 200.000.000 | 240.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.25.03 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap | 596.986.000 | 605.487.000 | 616.877.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.04 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2.925.452.000 | 2.891.669.000 | 2.923.591.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.05 | | | | | | | | Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | 41.632.000 | 42.226.000 | 43.020.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.06 | | | | | | | | Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 399.851.000 | 405.543.000 | 413.173.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.04 | | | | | | | | Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 552.488.000 | 564.289.000 | 576.396.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.05 | | | | | | | | Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.06 | | | | | | | | Program : Perizinan Usaha Pertanian | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.07 | | | | | | | | Program : Penyuluhan Pertanian | 600.000.000 | 600.000.000 | 700.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.07 | | | | | | | | Program : Penyuluhan Pertanian | 137.102.000 | 144.058.000 | 159.838.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| III.1.4.2 | | | | | | | | Strategi 17 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian | 3.373.119.706 | 3.336.292.408 | 3.345.884.089 | |
| | | | | | | | | Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah | 3.373.119.706 | 3.336.292.408 | 3.345.884.089 | |
| | | | | | | | | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang efektif dan merata | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pengelolaan pengawasan dan penyediaan ketersediaan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan | 3.373.119.706 | 3.336.292.408 | 3.345.884.089 | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH | | |
|-----------|----------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 3.27.02 | | | | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian | | |
| 3.27.03 | | | | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1.880.970.706 | 1.835.854.408 | 1.834.342.089 | Dinas Pangan dan Pertanian | | |
| 3.27.02 | | | | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 519.701.000 | 527.101.000 | 537.014.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan | | |
| 3.27.03 | | | | | | | | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 62.448.000 | 63.337.000 | 64.528.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan | | |
| III.2 | | | Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | | | | 2.453.300.000 | 2.577.000.000 | 2.680.000.000 | | | |
| III.2.1 | | | | Sasaran 10 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | 1.663.300.000 | 1.759.000.000 | 1.820.000.000 | | |
| III.2.1.1 | | | | | Strategi 18 : Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin | | | | | | 1.663.300.000 | 1.759.000.000 | 1.820.000.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | 1.663.300.000 | 1.759.000.000 | 1.820.000.000 | | | |
| | | | | | | Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | |
| | | | | | | Memperluas perlindungan dan jaminan sosial masyarakat | | | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan koordinasi pelaksanaan ATENSI Penyandang Disabilitas | | | | | | | | |
| | | | | | | Menyediakan sistem informasi database masyarakat miskin sesuai kriteria penerima manfaat | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 1.663.300.000 | 1.759.000.000 | 1.820.000.000 | | | |
| 1.06.02 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Sosial | 255.000.000 | 271.000.000 | 275.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| 1.06.03 | | | | | | | | Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| 1.06.04 | | | | | | | | Program : Rehabilitasi Sosial | 778.300.000 | 833.000.000 | 860.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| 1.06.05 | | | | | | | | Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 600.000.000 | 620.000.000 | 650.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| III.2.2 | | | | Sasaran 11 : Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | 790.000.000 | 818.000.000 | 860.000.000 | | |
| III.2.2.1 | | | | | Strategi 19 : Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak | | | | | | 790.000.000 | 818.000.000 | 860.000.000 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | | | 790.000.000 | 818.000.000 | 860.000.000 | | | |
| | | | | | | Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | | | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, remaja dan anak | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 8 : Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 790.000.000 | 818.000.000 | 860.000.000 | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|-----------------|----------------------|--|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.08.02 | | | | | | | | Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 260.000.000 | 273.000.000 | 288.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 | | | | | | | | Program : Perlindungan Perempuan | 205.000.000 | 220.000.000 | 227.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 | | | | | | | | Program : Peningkatan Kualitas Keluarga | 120.000.000 | 120.000.000 | 130.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 40.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 | | | | | | | | Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 140.000.000 | 140.000.000 | 145.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 | | | | | | | | Program : Perlindungan Khusus Anak | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| IV. | | Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah | | | | | | | 218.565.377.589 | 222.246.791.143 | 227.341.245.009 | |
| IV.1 | | | Tujuan 6 : Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah | | | | | | 218.565.377.589 | 222.246.791.143 | 227.341.245.009 | |
| IV.1.1 | | | | Sasaran 12 : Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | | | | | 125.107.053.199 | 126.394.975.699 | 129.150.595.017 | |
| IV.1.1.1 | | | | | Strategi 20 : Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mantap | | | | 88.490.000.000 | 89.500.000.000 | 91.550.000.000 | |
| | | | | | Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah | | | | 88.490.000.000 | 89.500.000.000 | 91.550.000.000 | |
| | | | | | Meningkatkan kualitas kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata | | | | | | | |
| | | | | | Mempercepat pembangunan dan peningkatan akses jalan wilayah lingkaran timur dan lingkaran barat | | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah | | | 88.490.000.000 | 89.500.000.000 | 91.550.000.000 | |
| 1.03.10 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Jalan | 88.490.000.000 | 89.500.000.000 | 91.550.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| IV.1.1.2 | | | | | Strategi 21 : Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata | | | | 33.042.053.199 | 33.301.615.994 | 33.625.595.017 | |
| | | | | | Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah | | | | 33.042.053.199 | 33.301.615.994 | 33.625.595.017 | |
| | | | | | Meningkatkan penyediaan dan distribusi sumber daya air dan SPAM yang merata | | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah | | | 33.042.053.199 | 33.301.615.994 | 33.625.595.017 | |
| 1.03.02 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 19.730.000.000 | 19.800.000.000 | 19.870.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|----------|----------------------|----------------------|--------|---------|----------|----------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.03.03 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 13.312.053.199 | 13.501.615.994 | 13.755.595.017 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| IV.1.1.3 | | | | | | | | Strategi 22 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal | 3.575.000.000 | 3.593.359.705 | 3.975.000.000 | |
| | | | | | | | | Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah | 3.575.000.000 | 3.593.359.705 | 3.975.000.000 | |
| | | | | | | | | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan pelayanan jasa perhubungan | | | | |
| | | | | | | | | Memperluas penataan lahan parkir yang tertib dan aman | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah | 3.575.000.000 | 3.593.359.705 | 3.975.000.000 | |
| 2.15.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 3.325.000.000 | 3.343.359.705 | 3.725.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.03 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Pelayanan | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | Dinas Perhubungan |
| IV.1.2 | | | | | | | | Sasaran 13 : Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien | 93.458.324.390 | 95.851.815.444 | 98.190.649.992 | |
| IV.1.2.1 | | | | | | | | Strategi 23 : Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata | 93.458.324.390 | 95.851.815.444 | 98.190.649.992 | |
| | | | | | | | | Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Infrastruktur Daerah | 93.458.324.390 | 95.851.815.444 | 98.190.649.992 | |
| | | | | | | | | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana umum masyarakat | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan ketaatan penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan penyediaan rumah layak huni | | | | |
| | | | | | | | | Revitalisasi sistem saluran irigasi jalan dan drainase lingkungan | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah | 93.458.324.390 | 95.851.815.444 | 98.190.649.992 | |
| 1.03.06 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 5.570.000.000 | 5.570.000.000 | 5.570.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.08 | | | | | | | | Program : Penataan Bangunan Gedung | 30.100.000.000 | 31.800.000.000 | 33.020.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.09 | | | | | | | | Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.11 | | | | | | | | Program : Pengembangan Jasa Konstruksi | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.12 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang | 3.278.815.235 | 3.303.036.264 | 3.520.172.959 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.04 | | | | | | | | Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|----------------------|---|--|---|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.10.05 | | | | | | | | Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 5.050.000.000 | 5.050.000.000 | 5.050.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.08 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Tanah Kosong | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.05 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 15.985.175.450 | 16.212.803.333 | 16.517.782.529 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.06 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 985.483.039 | 999.516.254 | 1.018.318.164 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.07 | | | | | | | | Program : Pengembangan Permukiman | 25.920.667.622 | 26.289.776.283 | 26.784.313.511 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 | | | | | | | | Program : Pengembangan Perumahan | 309.146.029 | 313.548.249 | 319.446.408 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 | | | | | | | | Program : Kawasan Permukiman | 1.975.893.394 | 2.004.029.990 | 2.041.727.817 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.05 | | | | | | | | Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 1.823.143.621 | 1.849.105.071 | 1.883.888.604 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.06.07 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 190.000.000 | 190.000.000 | 195.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| V. | | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | | | | | 1.897.069.744.509 | 1.921.982.602.790 | 1.951.720.437.813 | |
| V.1 | | | Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | | | | 1.872.400.149.190 | 1.897.072.332.529 | 1.926.861.287.026 | |
| V.1.1 | | | | Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE | | | | | 1.464.311.156.189 | 1.479.066.590.562 | 1.498.140.133.978 | |
| V.1.1.1 | | | | | Strategi 24 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | | | | 1.444.677.371.739 | 1.458.993.440.562 | 1.477.282.418.978 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi | | | 1.444.677.371.739 | 1.458.993.440.562 | 1.477.282.418.978 | |
| | | | | | | Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pelayanan dukungan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | | 1.444.677.371.739 | 1.458.993.440.562 | 1.477.282.418.978 | |
| 1.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 478.193.521.597 | 483.929.931.283 | 489.149.931.283 | Dinas Pendidikan |
| 1.02.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 106.523.567.079 | 108.231.163.570 | 110.573.640.704 | Dinas Kesehatan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.02.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 194.749.458.648 | 196.980.937.644 | 200.300.567.176 | RSUD Bayu Asih |
| 1.03.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 42.437.697.001 | 42.437.697.001 | 42.637.697.001 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.04.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 19.853.212.538 | 20.135.921.022 | 20.514.698.022 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.05.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 19.233.250.000 | 19.425.407.905 | 19.905.146.303 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.147.973.206 | 5.222.602.189 | 5.314.348.608 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13.831.494.622 | 13.997.749.341 | 14.237.490.603 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.06.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.599.000.000 | 7.618.171.677 | 7.689.665.661 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.07.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 10.156.905.340 | 10.337.708.465 | 10.529.951.160 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.09.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 16.074.497.122 | 16.424.497.122 | 16.624.497.122 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.11.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 37.125.305.302 | 36.585.166.273 | 36.809.392.924 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.12.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 17.242.960.689 | 17.400.302.479 | 17.441.791.879 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.13.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 12.459.426.756 | 12.867.855.618 | 13.581.093.156 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.14.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.862.690.484 | 6.867.186.933 | 6.875.942.398 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.15.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 18.333.385.684 | 18.627.000.000 | 18.663.347.100 | Dinas Perhubungan |
| 2.16.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 9.330.482.106 | 9.405.449.632 | 9.462.933.875 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.17.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 14.154.207.120 | 14.155.277.954 | 14.153.268.214 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.18.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 11.801.503.096 | 11.989.396.541 | 12.189.396.541 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.19.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 18.565.000.000 | 20.043.596.509 | 20.215.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.23.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 10.218.858.281 | 10.282.692.115 | 10.535.935.383 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 3.25.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 11.195.629.263 | 11.421.559.779 | 11.644.323.325 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 4.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum | 63.243.130.002 | 63.389.097.528 | 63.427.981.770 | Sekretariat Daerah |
| 4.02.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota | 46.876.175.032 | 47.335.987.309 | 47.769.737.665 | Sekretariat DPRD |
| 5.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 10.617.741.053 | 10.687.724.816 | 10.723.966.937 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.02.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 58.106.644.072 | 55.723.000.000 | 55.723.000.000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 28.912.578.527 | 29.330.539.558 | 29.407.520.650 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.03.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 32.358.428.518 | 32.855.654.010 | 33.360.631.091 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 6.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 25.699.030.316 | 26.039.994.595 | 26.525.727.263 | Inspektorat |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.386.324.995 | 3.429.057.225 | 3.486.055.220 | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.130.982.955 | 3.159.416.055 | 3.186.417.055 | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.861.568.444 | 2.887.549.050 | 2.931.200.000 | Kecamatan Maniis |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.283.584.092 | 3.322.567.225 | 3.371.352.422 | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.391.924.995 | 3.452.415.207 | 3.480.055.220 | Kecamatan Plered |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.881.427.939 | 3.934.804.743 | 4.010.030.920 | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.523.383.923 | 3.581.561.313 | 3.629.809.164 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.562.383.923 | 3.611.561.313 | 3.677.809.164 | Kecamatan Bojong |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.617.383.923 | 3.655.061.313 | 3.701.309.164 | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.445.424.995 | 3.494.057.225 | 3.556.555.220 | Kecamatan Kiarapedes |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|---------|----------|----------------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.182.916.067 | 3.195.789.446 | 3.236.664.076 | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.327.552.609 | 3.371.291.225 | 3.432.279.792 | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 14.829.743.173 | 14.946.793.173 | 15.046.263.434 | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.151.551.305 | 3.190.553.138 | 3.229.270.074 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.358.024.995 | 3.403.157.225 | 3.464.930.245 | Kecamatan Campaka |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.783.342.851 | 3.845.065.429 | 3.971.063.109 | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.143.466.067 | 3.185.953.138 | 3.245.651.276 | Kecamatan Bungursari |
| 8.01.01 | | | | | | | | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.088.634.734 | 4.192.328.341 | 4.317.681.309 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4.02.02 | | | | | | | | Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 24.823.996.300 | 25.385.189.910 | 26.319.398.300 | Sekretariat DPRD |
| V.1.1.2 | | | | | | | | Strategi 25 : Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik | 19.633.784.450 | 20.073.150.000 | 20.857.715.000 | |
| | | | | | | | | Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi | 19.633.784.450 | 20.073.150.000 | 20.857.715.000 | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital | | | | |
| | | | | | | | | Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat, aman dan akuntabel | | | | |
| | | | | | | | | Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan tertib administrasi data kependudukan | | | | |
| | | | | | | | | Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | 19.633.784.450 | 20.073.150.000 | 20.857.715.000 | |
| 2.12.02 | | | | | | | | Program : Pendaftaran Penduduk | 210.000.000 | 210.000.000 | 215.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 | | | | | | | | Program : Pencatatan Sipil | 160.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 785.000.000 | 980.000.000 | 1.280.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Profil Kependudukan | 25.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.16.02 | | | | | | | | Program : Informasi Dan Komunikasi Publik | 5.970.000.000 | 5.995.000.000 | 6.300.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16.03 | | | | | | | | Program : Aplikasi Informatika | 10.370.000.000 | 10.570.000.000 | 10.570.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.20.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 675.000.000 | 735.000.000 | 800.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.21.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1.040.000.000 | 1.070.000.000 | 1.165.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 12.784.450 | 14.500.000 | 16.500.000 | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 40.500.000 | 42.500.000 | 44.500.000 | Kecamatan Maniis |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 7.500.000 | 7.800.000 | 6.500.000 | Kecamatan Plered |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.600.000 | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 20.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 23.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | Kecamatan Bojong |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 7.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 0 | 0 | 16.000.000 | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 42.500.000 | 44.050.000 | 44.250.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.615.000 | Kecamatan Campaka |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000 | Kecamatan Cibatuh |
| 7.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 20.000.000 | 21.000.000 | 21.250.000 | Kecamatan Bungursari |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---|---|--|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| V.1.2 | | | | Sasaran 15 : Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | 408.088.993.001 | 418.005.741.967 | 428.721.153.048 | |
| V.1.2.1 | | | | | Strategi 26 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance) | | | | 403.171.678.939 | 412.988.009.599 | 423.532.573.659 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi | | | 403.171.678.939 | 412.988.009.599 | 423.532.573.659 | |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan koordinasi percepatan penerapan kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta mendorong penggunaan produk dalam negeri | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berbasis elektronik/digital | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, konsisten, selaras dan berkelanjutan | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran | | | | | | |
| | | | | | | Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif | | | | | | |
| | | | | | | Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan penerapan kajian dan inovasi daerah yang tepat guna | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian secara profesional | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | | | 403.171.678.939 | 412.988.009.599 | 423.532.573.659 | |
| 4.01.02 | | | | | | | | Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 13.870.000.000 | 14.240.000.000 | 14.610.000.000 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 | | | | | | | | Program : Perekonomian Dan Pembangunan | 5.439.152.029 | 6.047.267.719 | 7.134.835.634 | Sekretariat Daerah |
| 2.24.02 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Arsip | 850.000.000 | 900.000.000 | 850.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.24.03 | | | | | | | | Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 5.01.02 | | | | | | | | Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.175.000.000 | 1.200.000.000 | 1.300.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.03 | | | | | | | | Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 750.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.02.02 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Keuangan Daerah | 366.210.000.000 | 374.666.502.002 | 382.803.006.627 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.03 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.04 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.950.000.000 | 4.000.000.000 | 4.550.000.000 | Badan Pendapatan Daerah |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.05.02 | | | | | | | | Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.275.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.06.02 | | | | | | | | Program : Pengelolaan Perbatasan | 600.000.000 | 660.000.000 | 750.000.000 | Sekretariat Daerah |
| 5.03.02 | | | | | | | | Program : Kepegawaian Daerah | 6.050.000.000 | 6.075.000.000 | 6.075.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 25.000.000 | 26.000.000 | 27.000.000 | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 26.914.762 | 34.177.083 | 51.334.221 | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 26.000.000 | 27.000.000 | 28.000.000 | Kecamatan Maniis |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 64.050.000 | 70.250.000 | 82.582.798 | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 35.500.000 | 32.000.000 | 66.000.000 | Kecamatan Plered |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 54.600.000 | 55.230.000 | 55.330.000 | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 120.000.000 | 122.000.000 | 122.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | Kecamatan Bojong |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 35.000.000 | 42.500.000 | 50.000.000 | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 10.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 30.000.000 | 21.000.000 | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 57.372.386 | 58.200.000 | 60.965.428 | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 53.875.000 | 63.717.795 | 106.484.499 | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 34.914.762 | 40.000.000 | 63.031.202 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 69.300.000 | 72.765.000 | 76.403.250 | Kecamatan Campaka |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.05 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 40.000.000 | 40.400.000 | 40.600.000 | Kecamatan Bungursari |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|--|--|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| V.1.2.2 | | | | | Strategi 27 : Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas | | | | 4.917.314.062 | 5.017.732.368 | 5.188.579.389 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 7 : Reformasi Birokrasi | | | 4.917.314.062 | 5.017.732.368 | 5.188.579.389 | |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan kapasitas dan integritas APIP | | | | | | |
| | | | | | | Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 10 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | | 4.917.314.062 | 5.017.732.368 | 5.188.579.389 | |
| 6.01.02 | | | | | | | | Program : Penyelenggaraan Pengawasan | 3.280.000.000 | 3.378.000.000 | 3.477.000.000 | Inspektorat |
| 6.01.03 | | | | | | | | Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1.145.000.000 | 1.135.000.000 | 1.125.000.000 | Inspektorat |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 30.000.000 | 31.000.000 | 34.000.000 | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 41.079.150 | 47.060.000 | 60.050.000 | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | Kecamatan Maniis |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 50.870.000 | 53.220.000 | 55.830.000 | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 25.500.000 | 17.842.018 | 25.000.000 | Kecamatan Plered |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 21.314.912 | 22.030.658 | 22.102.189 | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 41.000.000 | 33.000.000 | 50.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 31.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | Kecamatan Bojong |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 51.000.000 | 57.000.000 | 73.500.000 | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 23.550.000 | 24.763.692 | 35.637.200 | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 45.000.000 | 46.516.000 | 47.960.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH | | | | |
|---------|-------------------------|-------------------------|---|--|---|--|---|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | Kecamatan Campaka | | | | |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 45.000.000 | 45.000.000 | 35.000.000 | Kecamatan Cibatu | | | | |
| 7.01.06 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 6.000.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | Kecamatan Bungursari | | | | |
| V.2 | | | Tujuan 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | | | | | | 24.669.595.319 | 24.910.270.261 | 24.859.150.787 | | | | | |
| V.2.1 | | | | Sasaran 16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | | | | | | 17.023.674.397 | 17.130.865.050 | 17.112.354.131 | | | | |
| V.2.1.1 | | | | | Strategi 28 : Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa | | | | | | 17.023.674.397 | 17.130.865.050 | 17.112.354.131 | | | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | | | | | 17.023.674.397 | 17.130.865.050 | 17.112.354.131 | | |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prioritas Pembangunan 11 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | 17.023.674.397 | 17.130.865.050 | 17.112.354.131 | |
| 2.13.02 | | | | | | | | Program : Penataan Desa | 1.100.000.000 | 900.000.000 | 700.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 2.13.03 | | | | | | | | Program : Peningkatan Kerja Sama Desa | 1.550.000.000 | 1.750.000.000 | 1.850.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 2.13.04 | | | | | | | | Program : Administrasi Pemerintahan Desa | 4.350.000.000 | 4.250.000.000 | 4.050.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 2.13.05 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 29.600.000 | 31.000.000 | 33.500.000 | Kecamatan Jatiluhur | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 21.704.750 | 23.900.000 | 26.000.000 | Kecamatan Sukasari | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 29.438.694 | 37.000.000 | 41.847.331 | Kecamatan Maniis | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 37.970.903 | 39.020.000 | 40.590.000 | Kecamatan Tegalwaru | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | Kecamatan Plered | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 10.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | Kecamatan Sukatani | | | | |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 20.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | Kecamatan Darangdan | | | | |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|----------------------|----------------------|--------|--|---|--|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Bojong |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 30.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 7.499.760.050 | 7.692.710.050 | 7.962.710.050 | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 14.700.000 | 15.435.000 | 16.206.750 | Kecamatan Campaka |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 30.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.03 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 17.000.000 | 18.300.000 | 19.500.000 | Kecamatan Bungursari |
| V.2.2 | | | | Sasaran 17 : Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat | | | | | 7.645.920.922 | 7.779.405.211 | 7.746.796.656 | |
| V.2.2.1 | | | | | Strategi 29 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | 7.645.920.922 | 7.779.405.211 | 7.746.796.656 | |
| | | | | | | Arah Kebijakan 8 : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | | | 7.645.920.922 | 7.779.405.211 | 7.746.796.656 | |
| | | | | | | Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila | | | | | | |
| | | | | | | Prioritas Pembangunan 12 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | | | 7.645.920.922 | 7.779.405.211 | 7.746.796.656 | |
| 1.05.02 | | | | | | | | Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 932.423.187 | 1.027.423.187 | 932.423.187 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 8.01.02 | | | | | | | | Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 1.150.000.000 | 1.151.000.000 | 1.154.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 | | | | | | | | Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 3.170.763.489 | 3.189.831.074 | 3.235.222.519 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8.01.04 | | | | | | | | Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat | 250.000.000 | 252.000.000 | 254.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 | | | | | | | | Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 500.000.000 | 505.500.000 | 510.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.06 | | | | | | | | Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 1.350.000.000 | 1.357.000.000 | 1.362.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | Kecamatan Maniis |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 13.450.000 | 14.000.000 | 14.700.000 | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | Kecamatan Plered |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 8.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | Kecamatan Bojong |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 8.000.000 | 9.500.000 | 10.100.000 | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 151.884.246 | 154.650.950 | 164.650.950 | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | Kecamatan Campaka |

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PRIORITAS PEMBANGUNAN | PROGRAM | PAGU ANGGARAN | | | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.04 | | | | | | | | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 10.000.000 | 10.600.000 | 10.800.000 | Kecamatan Bungursari |
| JUMLAH | 1 | 5 | 8 | 17 | 29 | 129 | 29 | 281 | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 | 281 |
| UNIQUE | 1 | 5 | 8 | 17 | 29 | 8/100 | 12 | 150 | 258 | 267 | 273 | 47 |

Sumber : Perangkat Daerah terkait, 2023

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024 - 2026. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi rencana program pembangunan Kabupaten Purwakarta berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Pelaksanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahannya, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 untuk mendanai pelaksanaan program pembangunan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan pagu indikatif dan target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 Kabupaten Purwakarta

| KODE REKENING | URAIAN | PROYEKSI 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.955.085.354.777 | 1.970.743.893.225 | 2.003.231.802.963 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 995.261.945.631 | 994.691.735.221 | 995.691.735.221 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 908.632.645.891 | 921.651.823.691 | 949.860.491.560 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 45.698.163.255 | 46.888.972.328 | 46.888.972.328 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.492.600.000 | 7.511.361.985 | 10.790.603.854 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 162.486.404.445 | 182.005.946.954 | 196.389.605.672 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.237.828.888 | 1.361.982.438 | 1.591.637.826 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.964.513.876 | 75.951.602.386 | 78.332.961.485 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40.631.694.266 | 47.331.694.266 | 52.218.933.269 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 35.953.645.869 | 43.661.946.318 | 49.145.809.867 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.698.721.546 | 13.698.721.546 | 15.100.263.225 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 |

| KODE REKENING | URAIAN | PROYEKSI 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 23.348.210.605 | 23.511.954.478 | 23.708.989.850 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 23.348.210.605 | 23.511.954.478 | 23.708.989.850 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 348.669.312.558 | 348.779.081.017 | 349.209.044.758 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 44.927.822.558 | 44.962.193.106 | 44.692.156.847 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 303.741.490.000 | 303.816.887.911 | 304.516.887.911 |
| KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 |

Sumber: Analisis Tim, 2023

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | 2.489.589.282.385 | 2.525.040.875.674 | 2.572.539.443.243 | | 7.587.169.601.302 | |
| 1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 1.417.701.946.305 | 1.437.962.893.143 | 1.465.104.323.363 | | 4.320.769.162.811 | |
| 2. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 258.262.780.723 | 261.893.949.793 | 266.614.061.278 | | 786.770.791.794 | |
| 3. | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | 26.612.259.969 | 26.976.124.187 | 27.613.102.414 | | 81.201.486.570 | |
| 4. | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | 154.252.453.363 | 156.397.542.466 | 159.261.953.369 | | 469.911.949.198 | |
| 5. | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | 513.455.392.170 | 520.818.420.386 | 530.693.125.305 | | 1.564.966.937.861 | |
| 6. | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | 30.124.030.316 | 30.552.994.595 | 31.127.727.263 | | 91.804.752.174 | |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | 78.671.021.316 | 79.791.291.689 | 81.292.246.423 | | 239.754.559.428 | |
| 8. | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 10.509.398.223 | 10.647.659.415 | 10.832.903.828 | | 31.989.961.466 | |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | | 679.159.956.234 | 688.831.150.883 | 701.788.760.116 | | 2.069.779.867.233 | Dinas Pendidikan |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | 679.159.956.234 | 688.831.150.883 | 701.788.760.116 | | 2.069.779.867.233 | Dinas Pendidikan |
| 1.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 478.193.521.597 | 483.929.931.283 | 489.149.931.283 | | 1.451.273.384.163 | Dinas Pendidikan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.02 | Program : Pengelolaan Pendidikan | | | | | | | | 199.986.134.737 | 203.876.219.600 | 211.613.828.833 | | 615.476.183.170 | Dinas Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 72,83 | 0,00 | 74,29 | 75,74 | 77,20 | | | | 77,20 | | Dinas Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 99,30 | 0,00 | 99,50 | 99,70 | 99,90 | | | | 99,90 | | Dinas Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 94,13 | 0,00 | 94,33 | 94,53 | 94,73 | | | | 94,73 | | Dinas Pendidikan |
| | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,52 | 0,00 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | | | | 0,56 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang | Persen | 98,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | berpartisipasi dalam pendidikan dasar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,52 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | | | | 0,48 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Persen | 1,72 | 0,00 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | | | | 1,82 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Persen | 72,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 72,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka partisipasi kasar | Persen | 23,40 | 23,40 | 24,30 | 24,80 | 25,30 | | | | 25,30 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka pendidikan yang ditamatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Murni | Persen | 21,90 | 21,90 | 22,80 | 23,20 | 23,70 | | | | 23,70 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 99,60 | 99,60 | 99,61 | 99,62 | 99,63 | | | | 99,63 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 83,80 | 83,80 | 84,00 | 84,10 | 84,20 | | | | 84,20 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | Persen | 99,30 | 99,30 | 99,50 | 99,60 | 99,70 | | | | 99,70 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | Persen | 94,13 | 94,10 | 94,30 | 94,40 | 94,50 | | | | 94,50 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | | | | 0,30 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 5,90 | 5,90 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | | | | 5,50 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 21,13 | 22,61 | 24,19 | 24,67 | 25,15 | | | | 25,15 | | Dinas Pendidikan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | Persen | 39,20 | 41,95 | 44,88 | 47,63 | 50,38 | | | | 50,38 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Persen | 41,53 | 0,00 | 41,55 | 41,56 | 41,57 | | | | 41,57 | | Dinas Pendidikan |
| | | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) | % | 58,41 | 59,51 | 59,10 | 59,17 | 59,24 | | | | 59,24 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 97,66 | 99,58 | 98,86 | 98,98 | 99,10 | | | | 99,10 | | Dinas Pendidikan |
| | | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) | % | 5,18 | 9,58 | 7,93 | 8,21 | 8,48 | | | | 8,48 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 48,95 | 54,69 | 52,54 | 52,90 | 53,26 | | | | 53,26 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional | nilai | 37,08 | 42,99 | 40,77 | 41,14 | 41,51 | | | | 41,51 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 59,00 | 61,92 | 60,83 | 61,01 | 61,19 | | | | 61,19 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 52,94 | 53,57 | 53,33 | 53,37 | 53,41 | | | | 53,41 | | Dinas Pendidikan |
| | | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 44,83 | 42,90 | 43,50 | 43,62 | 43,87 | | | | 43,87 | | Dinas Pendidikan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 | % | 63,52 | 2,59 | 21,63 | 25,44 | 33,05 | | | | 33,05 | | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Iklim Keamanan SD | nilai | 75,34 | 85,48 | 81,68 | 82,31 | 82,95 | | | | 82,95 | | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Iklim Kebinekaan SD | nilai | 62,83 | 89,14 | 79,27 | 80,92 | 82,56 | | | | 82,56 | | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Inklusivitas SD | nilai | 70,98 | 78,46 | 75,66 | 76,12 | 76,59 | | | | 76,59 | | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Iklim Keamanan SMP | nilai | 77,48 | 78,96 | 78,41 | 78,50 | 78,59 | | | | 78,59 | | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | nilai | 62,41 | 74,48 | 69,95 | 70,71 | 71,46 | | | | 71,46 | | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Inklusivitas SMP | nilai | 65,28 | 73,32 | 70,31 | 70,81 | 71,31 | | | | 71,31 | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.03 | Program : Pengembangan Kurikulum | | | | | | | | 380.300.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.180.300.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.04 | Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Persen | 38,67 | 38,67 | 38,77 | 38,87 | 38,97 | | | | 38,97 | | Dinas Pendidikan |
| | | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Persen | 41,60 | 41,70 | 41,80 | 41,90 | 42,00 | | | | 42,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 95,88 | 96,00 | 96,06 | 96,12 | 96,18 | | | | 96,18 | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.05 | Program : Pengendalian Perizinan Pendidikan | | | | | | | | 199.999.900 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 599.999.900 | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |
| 1.01.06 | Program : Pengembangan Bahasa Dan Sastra | | | | | | | | 200.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | | 650.000.000 | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pendidikan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | 207.133.828.294 | 210.083.400.856 | 214.035.281.677 | | 631.252.510.827 | Dinas Kesehatan |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | 207.133.828.294 | 210.083.400.856 | 214.035.281.677 | | 631.252.510.827 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 106.523.567.079 | 108.231.163.570 | 110.573.640.704 | | 325.328.371.353 | Dinas Kesehatan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.02 | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | 86.109.252.055 | 87.281.228.126 | 88.825.631.813 | | 262.216.111.994 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 36,37 | 36,36 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | | | | 65,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 97,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 98,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 71,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 39,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 81,46 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 65,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 59,94 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 93,58 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 79,31 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 98,43 | 92,20 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 97,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 71,47 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 39,94 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 81,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 66,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 60,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 94,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 79,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98,43 | 92,20 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio posyandu per satuan balita | Poin | 16,68 | 16,82 | 17,34 | 17,60 | 17,86 | | | | 17,86 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 97,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 98,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 0,00 | 77,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 85,31 | 81,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Persen | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | Persen | 50,00 | 37,49 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 92,48 | 82,20 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 246,95 | 282,78 | 245,65 | 208,52 | 171,39 | | | | 171,39 | | Dinas Kesehatan |
| | | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 6,07 | 2,90 | 2,58 | 2,26 | 1,94 | | | | 1,94 | | Dinas Kesehatan |
| | | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Persen | 92,48 | 82,20 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Persen | 93,73 | 86,53 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Penderita diare yang ditangani | Persen | 76,26 | 56,58 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | Rasio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan puskesmas | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pelayanan nifas | Persen | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 75,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pelayanan anak balita | Persen | 61,91 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.03 | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | 13.201.009.160 | 13.201.009.160 | 13.201.009.160 | | 39.603.027.480 | Dinas Kesehatan |
| | | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | Persen | 50,00 | 85,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan | Persen | 68,00 | 75,46 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 68,20 | 73,50 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 68,20 | 73,50 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio dokter per satuan penduduk | Poin | 0,06 | 0,07 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Poin | 0,08 | 0,10 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 | Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | | | | | | | | 620.000.000 | 685.000.000 | 740.000.000 | | 2.045.000.000 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Persen | 70,75 | 79,67 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|---|--------|--------------|-------|----------------|-------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.05 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina | Persen | 83,40 | 77,20 | 89,00 | 96,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kesehatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|------|----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RSUD BAYU ASIH | | | | | | | | 209.374.458.648 | 212.355.937.644 | 216.350.567.176 | | 638.080.963.468 | RSUD Bayu Asih |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | 209.374.458.648 | 212.355.937.644 | 216.350.567.176 | | 638.080.963.468 | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 194.749.458.648 | 196.980.937.644 | 200.300.567.176 | | 592.030.963.468 | RSUD Bayu Asih |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | RSUD Bayu Asih |
| | | Rasio Keuangan BLUD | Skor | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional BLUD | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | Skor | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.02 | Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | 13.500.000.000 | 14.150.000.000 | 14.750.000.000 | | 42.400.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| | | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Tingkat Pengendalian Infeksi di RS | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Capaian Indikator Medik | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Prosedur Penanganan Sampel Uji | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Pengendalian Mutu | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Bed Occupancy Rate (BOR) | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Ketepatan Waktu Pelayanan | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Temuan Yang di Tindaklanjuti | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Tingkat Kehandalan Sumber Daya | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.03 | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | 625.000.000 | 725.000.000 | 800.000.000 | | 2.150.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| | | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| | | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | RSUD Bayu Asih |
| 1.02.05 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | | | | | | | | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 1.500.000.000 | RSUD Bayu Asih |
| | | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | NUI | NUI | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | RSUD Bayu Asih |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|-------|----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.2.10.0.00.02.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | | | | | | | | 196.926.512.236 | 199.730.733.265 | 203.487.869.960 | | 600.145.115.461 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | 190.626.512.236 | 193.430.733.265 | 197.187.869.960 | | 581.245.115.461 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 42.437.697.001 | 42.437.697.001 | 42.637.697.001 | | 127.513.091.003 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | - | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.02 | Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | | | | | | | | 19.730.000.000 | 19.800.000.000 | 19.870.000.000 | | 59.400.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | - | - | 37,60 | 37,60 | 37,60 | | | | 37,60 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 37,56 | - | 84,71 | 84,71 | 84,71 | | | | 84,71 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.06 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | | | | 5.570.000.000 | 5.570.000.000 | 5.570.000.000 | | 16.710.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.08 | Program : Penataan Bangunan Gedung | | | | | | | | 30.100.000.000 | 31.800.000.000 | 33.020.000.000 | | 94.920.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat | Persen | 54,55 | 8,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara | Persen | - | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.09 | Program : Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | | | | | | | | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | | 810.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Persen | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|--|--------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------|------------------------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.03.10 | Program : Penyelenggaraan Jalan | | | | | 88.490.000.000 | 89.500.000.000 | 91.550.000.000 | | | 269.540.000.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | - | 84,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 68,76 | - | 68,00 | 68,00 | 68,00 | | | | 68,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 72,79 | - | 72,00 | 71,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan | Persen | 6,87 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | | | 7,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi | Persen | 2,74 | 4,11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.11 | Program : Pengembangan Jasa Konstruksi | | | | | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | | | 2.250.000.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | 0,10 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persen | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 1.03.12 | Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | 3.278.815.235 | 3.303.036.264 | 3.520.172.959 | | | 10.102.024.458 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persen | 5,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | Persen | 54,25 | 54,25 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | 6.300.000.000 | | | 18.900.000.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.04 | Program : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | | 1.200.000.000 | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi | Persen | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.10.05 | Program : Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | | | | | | | 5.050.000.000 | 5.050.000.000 | 5.050.000.000 | | 15.150.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 2.10.08 | Program : Pengelolaan Tanah Kosong | | | | | | | | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | | 2.550.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| | | Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan | Persen | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|--|---|--------|--------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.04.1.03.0.00.01.0000 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | 80.164.774.892 | 81.306.316.196 | 82.835.770.072 | | 244.306.861.160 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | 56.203.379.310 | 57.003.711.864 | 58.076.009.221 | | 171.283.100.395 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.03 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | | | | | | | 13.312.053.199 | 13.501.615.994 | 13.755.595.017 | | 40.569.264.210 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Persen | 60,65 | 61,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | | | | 63,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 94,55 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | | | | 97,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | Persen | 79,76 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | | | 82,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari | Persen | 0,39 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Tingkat jaringan SPAM yang dibangun | Persen | 96,24 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.05 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | | | | | | | | 15.985.175.450 | 16.212.803.333 | 16.517.782.529 | | 48.715.761.312 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 67,69 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | | | | 71,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 81,02 | 81,5 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | | | | 84,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki | Persen | 98,45 | 80,5 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | | | | 83,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.06 | Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | | | | | | | | 985.483.039 | 999.516.254 | 1.018.318.164 | | 3.003.317.457 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan | Persen | 0,05 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--|----------|--------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Yang Dibangun / Diperbaiki | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.07 | Program : Pengembangan Permukiman | | | | | | | | 25.920.667.622 | 26.289.776.283 | 26.784.313.511 | | 78.994.757.416 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase areal kawasan kumuh | Persen | 31,55 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Poin | 25,82 | 27,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | 23.961.395.582 | 24.302.604.332 | 24.759.760.851 | | 73.023.760.765 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 19.853.212.538 | 20.135.921.022 | 20.514.698.022 | | 60.503.831.582 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.02 | Program : Pengembangan Perumahan | | | | | | | | 309.146.029 | 313.548.249 | 319.446.408 | | 942.140.686 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 15,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | | | | 40,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Persen | 7,60 | 2,61 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | | | | 11,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 46,90 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.03 | Program : Kawasan Permukiman | | | | | | | | 1.975.893.394 | 2.004.029.990 | 2.041.727.817 | | 6.021.651.201 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Rasio rumah layak huni | Persen | 31,55 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Rasio permukiman layak huni | Persen | 22,87 | 23,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 94,68 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | | | | 98,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persen | 90,91 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | | | | 94,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase permukiman yang tertata | Persen | 16,11 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.05 | Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | | | | | | | | 1.823.143.621 | 1.849.105.071 | 1.883.888.604 | | 5.556.137.296 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|---|--------|--------------|------|----------------|------|------|---------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | 20.165.673.187 | 20.452.831.092 | 20.837.569.490 | | 61.456.073.769 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 20.165.673.187 | 20.452.831.092 | 20.837.569.490 | | 61.456.073.769 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 19.233.250.000 | 19.425.407.905 | 19.905.146.303 | | 58.563.804.208 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.02 | Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 932.423.187 | 1.027.423.187 | 932.423.187 | | 2.892.269.561 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Satuan Polisi Pamong Praja |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | 6.223.973.206 | 6.312.602.189 | 6.431.348.608 | | 18.967.924.003 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 6.223.973.206 | 6.312.602.189 | 6.431.348.608 | | 18.967.924.003 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 5.147.973.206 | 5.222.602.189 | 5.314.348.608 | | 15.684.924.003 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | | | | B | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.03 | Program : Penanggulangan Bencana | | | | | | | | 1.076.000.000 | 1.090.000.000 | 1.117.000.000 | | 3.283.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | | | | | | 15.186.494.622 | 15.402.749.341 | 15.692.490.603 | | 46.281.734.566 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 15.186.494.622 | 15.402.749.341 | 15.692.490.603 | | 46.281.734.566 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.05.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 13.831.494.622 | 13.997.749.341 | 14.237.490.603 | | 42.066.734.566 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | | | | B | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.05.04 | Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | | | | | 1.355.000.000 | 1.405.000.000 | 1.455.000.000 | | 4.215.000.000 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 95,76 | 90,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | | | | 18,14 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | - | 89,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Persen | 95,76 | 90,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|--|---------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Layanan | 543,00 | 808,00 | 800,00 | 750,00 | 700,00 | | | | 700,00 | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.06.2.08.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | 10.456.274.986 | 10.605.171.677 | 10.804.665.661 | | 31.866.112.324 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | 9.666.274.986 | 9.787.171.677 | 9.944.665.661 | | 29.398.112.324 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 7.599.000.000 | 7.618.171.677 | 7.689.665.661 | | 22.906.837.338 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | | | | B | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.02 | Program : Pemberdayaan Sosial | | | | | | | | 255.000.000 | 271.000.000 | 275.000.000 | | 801.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.03 | Program : Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | | | | | | | | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 100.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04 | Program : Rehabilitasi Sosial | | | | | | | | 778.300.000 | 833.000.000 | 860.000.000 | | 2.471.300.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 471,00 | 402,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | | | | | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 260,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Persen | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 400,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 76,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.05 | Program : Perlindungan Dan Jaminan Sosial | | | | | | | | 600.000.000 | 620.000.000 | 650.000.000 | | 1.870.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase anak terlantar yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1.06.06 | Program : Penanganan Bencana | | | | | | | | 213.974.986 | 220.000.000 | 240.000.000 | | 673.974.986 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.07 | Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | | | | | 190.000.000 | 190.000.000 | 195.000.000 | | 575.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | 790.000.000 | 818.000.000 | 860.000.000 | | 2.468.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.02 | Program : Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | 260.000.000 | 273.000.000 | 288.000.000 | | 821.000.000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|---------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.08.03 | Program : Perlindungan Perempuan | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Poin | 5,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 17,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persen | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 | Program : Peningkatan Kualitas Keluarga | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga | Persen | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 | Program : Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | Data Gender Anak | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|---------|------------------------------------|--|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.08.06 | Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase Pemenuhan Hak Anak | Persen | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 | Program : Perlindungan Khusus Anak | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 8,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | 12.696.905.340 | 12.877.708.465 | 13.119.951.160 | | 38.694.564.965 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | 12.271.905.340 | 12.452.708.465 | 12.644.951.160 | | 37.369.564.965 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 10.156.905.340 | 10.337.708.465 | 10.529.951.160 | | 31.024.564.965 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.03 | Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | 1.070.000.000 | | 3.210.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 0,00 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | | | | 69,06 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | 0,40 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan | Persen | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | | | | 3,40 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | | | | 0,57 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | | | 0,11 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Persen | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | 0,07 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.04 | Program : Penempatan Tenaga Kerja | | | | | | | | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 | | 2.235.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Persen | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | | | | 5,81 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 2.07.05 | Program : Hubungan Industrial | | | | | | | | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | 900.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Persen | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | | | 0,64 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 0,00 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | | | | 38,88 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | 425.000.000 | 425.000.000 | 475.000.000 | | 1.325.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.02 | Program : Perencanaan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 225.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.03 | Program : Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | 225.000.000 | 225.000.000 | 275.000.000 | | 725.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase transmigran swakarsa | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase transmigran yang diberangkatkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 3.32.04 | Program : Pengembangan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | | 375.000.000 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|-------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.09.3.27.0.00.01.0000 | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN | | | | | | | | 21.410.467.828 | 21.715.351.530 | 22.123.839.211 | | 65.249.658.569 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | 17.729.497.122 | 18.079.497.122 | 18.389.497.122 | | 54.198.491.366 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 16.074.497.122 | 16.424.497.122 | 16.624.497.122 | | 49.123.491.366 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.02 | Program : Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | | | | | | | | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 | | 990.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan | Persen | 75,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.03 | Program : Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | 1.065.000.000 | 1.065.000.000 | 1.125.000.000 | | 3.255.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.04 | Program : Penanganan Kerawanan Pangan | | | | | | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | | 190.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2.09.05 | Program : Pengawasan Keamanan Pangan | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 240.000.000 | | 640.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | 3.680.970.706 | 3.635.854.408 | 3.734.342.089 | | 11.051.167.203 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.02 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | | | | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 | | 2.730.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Persen | 6,00 | 6,20 | 6,25 | 6,26 | 6,26 | | | | 6,26 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Pertumbuhan Produksi Pertanian | Persen | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Persen | 25,00 | 26,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | | | | 73,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Produksi Padi | Ton | 270,54 | 0,00 | 270.808,00 | 271.079,00 | 271.350,00 | | | | 271.350,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | Persen | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | Persen | 60,00 | 65,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | | | | 77,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Pengembangan Tanaman Manggis | Persen | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--|--------|--------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.27.03 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | 1.880.970.706 | 1.835.854.408 | 1.834.342.089 | | 5.551.167.203 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persen | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 48,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.05 | Program : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | | | | | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 750.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase Pengendalian Serangan OPT | Persen | 3,00 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | Persen | 3,00 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.06 | Program : Perizinan Usaha Pertanian | | | | | | | | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 120.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin | Persen | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3.27.07 | Program : Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | 600.000.000 | 600.000.000 | 700.000.000 | | 1.900.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Cakupan bina kelompok petani | Persen | 70,00 | 70,00 | 73,00 | 74,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | Dinas Pangan dan Pertanian |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | |
|------------------------|---|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | 40.580.305.302 | 41.158.166.273 | 41.932.392.924 | 123.670.864.499 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | 40.580.305.302 | 41.158.166.273 | 41.932.392.924 | 123.670.864.499 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 37.125.305.302 | 36.585.166.273 | 36.809.392.924 | 110.519.864.499 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2.11.02 | Program : Perencanaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 600.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2.11.03 | Program : Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | 1.275.000.000 | 1.333.000.000 | 1.533.000.000 | 4.141.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim | Persen | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | Skor/ Kategori | 63,33 / Sedang | 50 / Sedang | 60 / Sedang | 65 / Sedang | 70 / Baik | | | | 70 / Baik | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara | Skor/ Kategori | 73,47 / Baik | 68,74 / Sedang | 70 / Baik | 75 / Baik | 80 / Baik | | | | 80 / Baik | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| | | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Skor/ Kategori | 35,46 | 36,45 | 37,18 | 37,55 | 37,93 | | | | 37,93 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2.11.04 | Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | | | | | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun | Dokumen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2.11.05 | Program : Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | | | | | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Kg | 18.922.101.000,00 | 16.591.264.000,00 | 15.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | | | | 11.000.000.000,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2.11.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | | | | | | | | | | | 250.000.000 | 325.000.000 | 375.000.000 | 950.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan | Persen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.07 | Program : Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | | | | | | | | 100.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 350.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Penetapan hak MHA | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.08 | Program : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | | | | | 300.000.000 | 300.000.000 | 350.000.000 | 950.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 | Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | | | | | | | | 125.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 425.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Kali | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 | Program : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | | | | | | | | 100.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | | 350.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.11 | Program : Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | 955.000.000 | 1.890.000.000 | 2.090.000.000 | | 4.935.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 60,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | Persen | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | | | | 32,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 73,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Skor | 71,00 | 71,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | | | 72,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | Persen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Lingkungan Hidup |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | 18.422.960.689 | 18.685.302.479 | 19.036.791.879 | | 56.145.055.047 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | 18.422.960.689 | 18.685.302.479 | 19.036.791.879 | | 56.145.055.047 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 17.242.960.689 | 17.400.302.479 | 17.441.791.879 | | 52.085.055.047 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 | Program : Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | 210.000.000 | 210.000.000 | 215.000.000 | | 635.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Perekaman KTP elektronik | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Kategori | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | | | | Sudah | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 26,98 | 48,22 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 | Program : Pencatatan Sipil | | | | | | | | 160.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | | 285.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Kepemilikan akta kelahiran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Rasio bayi berakte kelahiran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Rasio pasangan berakte nikah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 81,61 | 85,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 | Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | 785.000.000 | 980.000.000 | 1.280.000.000 | | 3.045.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persen | 53,33 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | | | | 57,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 | Program : Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | | | | | 25.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | | 95.000.000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Profil data kependudukan | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | 21.659.426.756 | 21.967.855.618 | 22.381.093.156 | | 66.008.375.530 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | 21.659.426.756 | 21.967.855.618 | 22.381.093.156 | | 66.008.375.530 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 12.459.426.756 | 12.867.855.618 | 13.581.093.156 | | 38.908.375.530 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.02 | Program : Penataan Desa | | | | | | | | 1.100.000.000 | 900.000.000 | 700.000.000 | | 2.700.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.03 | Program : Peningkatan Kerja Sama Desa | | | | | | | | 1.550.000.000 | 1.750.000.000 | 1.850.000.000 | | 5.150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase kerjasama desa yang difasilitasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,74 | 11,48 | | | | 11,48 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase pembangunan kawasan perdesaan | Persen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.04 | Program : Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | 4.350.000.000 | 4.250.000.000 | 4.050.000.000 | | 12.650.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase peningkatan status desa mandiri | Persen | 2,86 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase desa tertib administrasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase pembinaan BUM Desa | Persen | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase penertiban aset desa | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase kepala desa yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase aparaturnya desa yang dibina | Persen | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 2.13.05 | Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | | 6.600.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase LSM aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Persentase PKK aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|---|--------|--------------|------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Persentase Posyandu aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|-----------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.14.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | 22.655.262.469 | 22.977.871.968 | 23.410.108.933 | | 69.043.243.370 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | 22.655.262.469 | 22.977.871.968 | 23.410.108.933 | | 69.043.243.370 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 6.862.690.484 | 6.867.186.933 | 6.875.942.398 | | 20.605.819.815 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.02 | Program : Pengendalian Penduduk | | | | | | | | 349.385.450 | 429.969.750 | 474.969.750 | | 1.254.324.950 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | TFR (Angka Kelahiran Total) | Persen | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | | | 2,50 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 37.890,00 | 37.890,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | | | 36,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | Persen | 29,89 | 29,89 | 30,00 | 30,00 | 31,11 | | | | 31,11 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 | Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | | | | | | | | 9.017.281.650 | 9.254.810.400 | 9.633.291.900 | | 27.905.383.950 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 12.263,00 | 81,27 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 33,52 | 34,05 | 35,22 | 36,30 | 38,40 | | | | 38,40 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | | | | 94,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------|-----------------------|--|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Ratio Akseptor KB | Persen | 26.717,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | | | | 25.521,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | Persen | 81,27 | 82,27 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | | | | 83,28 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) | Poin | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | | | | 25,71 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 533,83 | 533,83 | 534,83 | 534,83 | 534,83 | | | | 534,83 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 35,54 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | | | | 46,24 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 17,72 | 17,73 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | | | | 17,78 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 681.167,00 | 681.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | | | | 691.167,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 151.153,00 | 151.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | | | | 161.153,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 623.471,00 | 623.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | | | | 624.471,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 23,53 | 23,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa | Persen | 51,71 | 51,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persen | 98,00 | 115,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | | | 126,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 22,80 | 22,80 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | | | | 23,90 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|---|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan | Persen | 21,57 | 21,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 149.900,00 | 274.920,00 | 272.476,00 | 325.980,00 | 391.178,00 | | | | 391.178,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | | | 135,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 | Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | | | | | | | | 6.425.904.885 | 6.425.904.885 | 6.425.904.885 | | 19.277.714.655 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persen | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | | | | 15,65 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | | | | 3.314,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | Persen | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | | | | 674,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | | | | 15,65 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persen | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | | | | 53,71 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Persen | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | | 19,00 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | | 21.908.385.684 | 22.220.359.705 | 22.638.347.100 | | 66.767.092.489 | Dinas Perhubungan |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | 21.908.385.684 | 22.220.359.705 | 22.638.347.100 | | 66.767.092.489 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 18.333.385.684 | 18.627.000.000 | 18.663.347.100 | | 55.623.732.784 | Dinas Perhubungan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02 | Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | | | | 3.325.000.000 | 3.343.359.705 | 3.725.000.000 | | 10.393.359.705 | Dinas Perhubungan |
| | | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Persen | 98,00 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota | Poin | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan) | Unit | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | | | | 311.378,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Rasio ijin trayek | Persen | 56,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan) | Unit | 300,00 | 300,00 | 307,00 | 310,00 | 310,00 | | | | 310,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | | | | 1.397,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 884,00 | 884,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | | | | 881,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Pemasangan Rambu-rambu | Persen | 60,00 | 61,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | | | | 0,002 | | Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | | | | 576.262,00 | | Dinas Perhubungan |
| | | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun | Orang | 490.776,00 | 490.776,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | | | | 539.548,00 | | Dinas Perhubungan |
| 2.15.03 | Program : Pengelolaan Pelayaran | | | | | | | | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 750.000.000 | Dinas Perhubungan |
| | | Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin | Persen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Perhubungan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | 27.385.482.106 | 27.775.449.632 | 28.297.933.875 | | 83.458.865.613 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | 25.670.482.106 | 25.970.449.632 | 26.332.933.875 | | 77.973.865.613 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 9.330.482.106 | 9.405.449.632 | 9.462.933.875 | | 28.198.865.613 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16.02 | Program : Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | | | | | 5.970.000.000 | 5.995.000.000 | 6.300.000.000 | | 18.265.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 | 11,76 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 67,00 | 66,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | - | 90,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | 53,30 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | Persen | - | - | 95,00 | 97,00 | 99,00 | | | | 99,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.16.03 | Program : Aplikasi Informatika | | | | | | | | 10.370.000.000 | 10.570.000.000 | 10.570.000.000 | | 31.510.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | Persen | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | 675.000.000 | 735.000.000 | 800.000.000 | | 2.210.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.20.02 | Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | | 675.000.000 | 735.000.000 | 800.000.000 | | 2.210.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 69,50 | 36,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 69,50 | 25,50 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Data | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Buku kabupaten dalam angka (ada/tidak ada) | Buku | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | Persen | - | - | 85,00 | 90,00 | 95,00 | | | | 95,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | 1.040.000.000 | 1.070.000.000 | 1.165.000.000 | | 3.275.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.21.02 | Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | | | | | 1.040.000.000 | 1.070.000.000 | 1.165.000.000 | | 3.275.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | Persen | - | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | 16.929.207.120 | 17.170.277.954 | 17.493.268.214 | | 51.592.753.288 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | 15.304.207.120 | 15.370.277.954 | 15.518.268.214 | | 46.192.753.288 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 14.154.207.120 | 14.155.277.954 | 14.153.268.214 | | 42.462.753.288 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.02 | Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | | | | | | | | 50.000.000 | 52.500.000 | 60.000.000 | | 162.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 90,00 | 91,67 | | | | 91,67 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.03 | Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | | | | | | | | 185.000.000 | 195.000.000 | 222.500.000 | | 602.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | | | | 90,05 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.04 | Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | | | | | | | | 290.000.000 | 307.500.000 | 345.000.000 | | 942.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,25 | | | | 90,25 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian | Persen | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | | | | 18,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.05 | Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | | | | | | | | 100.000.000 | 102.500.000 | 105.000.000 | | 307.500.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian | Persen | 69,90 | 71,66 | 72,82 | 73,71 | 74,60 | | | | 74,60 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|--|--------|--------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|------|------|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.17.07 | Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | | 375.000.000 | 382.500.000 | 432.500.000 | | | | 100,00 | 1.190.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 47,85 | 0,00 | 85,23 | 92,24 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha | Persen | 55,06 | 0,00 | 56,46 | 56,93 | 57,39 | | | | 57,39 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha | Persen | 53,00 | 0,00 | 75,23 | 86,45 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Tingkat Wirausaha Baru (WUB) | Persen | 1,00 | 0,00 | 2,53 | 2,78 | 3,85 | | | | 3,85 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan / sosialisasi kewirausahaan | Persen | 52,20 | 0,00 | 57,90 | 60,42 | 63,22 | | | | 63,22 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 2.17.08 | Program : Pengembangan UMKM | | | | | 150.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | | | | 28,04 | 525.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 10,00 | 0,00 | 20,56 | 24,30 | 28,04 | | | | 28,04 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya | Persen | 6,82 | 0,00 | 9,63 | 10,56 | 11,50 | | | | 11,50 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 975.000.000 | 1.100.000.000 | 1.200.000.000 | | | | 97,86 | 3.275.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.02 | Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan | | | | | 110.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | | | | 97,86 | 350.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 93,00 | 0,00 | 95,32 | 96,53 | 97,86 | | | | 97,86 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.03 | Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | 20.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 70.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.04 | Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | | | | | | | | 295.000.000 | 330.000.000 | 345.000.000 | | 970.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 34,84 | 0,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | | | | 39,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.05 | Program : Pengembangan Ekspor | | | | | | | | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 600.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Tingkat Nilai Export bersih | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang | Persen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,94 | 3,22 | | | | 3,22 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.30.06 | Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | | | | | | | | 275.000.000 | 350.000.000 | 375.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 62,61 | 0,00 | 64,62 | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.30.07 | Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.02 | Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 47,52 | 0,00 | 83,33 | 90,48 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.03 | Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Persen | 18,68 | 0,00 | 20,71 | 21,19 | 21,45 | | | | 21,45 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | | | | | | | | | | | | Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 3.31.04 | Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | | | | | | | | 150.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | | 375.000.000 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| | | Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan | Kegiatan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | 13.194.823.196 | 13.382.716.641 | 13.634.459.049 | | 40.211.998.886 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 13.194.823.196 | 13.382.716.641 | 13.634.459.049 | | 40.211.998.886 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 11.801.503.096 | 11.989.396.541 | 12.189.396.541 | | 35.980.296.178 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | A | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.02 | Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | | | | | 99.989.800 | 99.989.800 | 99.989.800 | | 299.969.400 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | Persen | 6,78 | 11,19 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | | | | 6,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp. | 4,73 | 5,88 | 6,73 | 7,20 | 7,70 | | | | 7,70 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 550,00 | 604,00 | 730,00 | 803,00 | 884,00 | | | | 884,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Persen | 27,74 | 28,00 | 28,50 | 29,00 | 29,5 | | | | 29,5 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 | Program : Promosi Penanaman Modal | | | | | | | | 199.950.000 | 199.950.000 | 199.950.000 | | 599.850.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan | Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun) | Rp. | 6,00 | 6,50 | 7,40 | 7,90 | 8,40 | | | | 8,40 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.04 | Program : Pelayanan Penanaman Modal | | | | | | | | 299.986.500 | 299.986.500 | 299.986.500 | | 899.959.500 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Rasio daya serap tenaga kerja | Persen | 16,95 | 17,30 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | | | | 19,50 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan | Persen | 93,79 | 90,58 | 94,58 | 95,58 | 96,58 | | | | 96,58 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 87,78 | 91,26 | 92,50 | 93,00 | 93,50 | | | | 93,50 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.18.05 | Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala | Persen | 6,67 | 6,67 | 7,14 | 8,70 | 8,70 | | | | 8,70 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.06 | Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | |
|------------------------|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2.19.2.22.3.26.01.0000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | 32.809.455.312 | 33.288.051.821 | 33.929.282.483 | | 100.026.789.616 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | 23.984.455.312 | 24.463.051.821 | 25.104.282.483 | | 73.551.789.616 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan |
| 2.19.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 18.565.000.000 | 20.043.596.509 | 20.215.000.000 | | 58.823.596.509 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 2.19.02 | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | | | | | | | | | | 775.000.000 | 775.000.000 | 775.000.000 | | 2.325.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | 0,0043 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | | | | 0,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 0,95 | 0,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | 0,01 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 0,26 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | | | | 0,41 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 0,33 | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,84 | | | | 0,84 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Persentase Pembinaan Kepemudaan | Persen | 0,26 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | | | | 0,41 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| 2.19.03 | Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | | | | | | | | | | 4.024.455.312 | 3.024.455.312 | 3.075.000.000 | | 10.123.910.624 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Tingkat prestasi olahraga | Persen | 50,00 | 66,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 25,00 | 49,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | | | | 65,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Persen | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | Tingkat atlet berprestasi | Persen | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 52,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|---|--------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga | Persen | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.19.04 | Program : Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | | | | | | | | 620.000.000 | 620.000.000 | 1.039.282.483 | | 2.279.282.483 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | 4.375.000.000 | | 13.125.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.02 | Program : Pengembangan Kebudayaan | | | | | | | | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | | 7.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina | Persen | 36,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.03 | Program : Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | | | | | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | | 825.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 12,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Kelompok/Komunitas Seni/Kesenian yang dibina | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.04 | Program : Pembinaan Sejarah | | | | | | | | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | | 1.350.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|---|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.22.05 | Program : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | | | | | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | | 1.800.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | Persen | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Buah | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.06 | Program : Pengelolaan Permuseuman | | | | | | | | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | | 1.650.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat | Persen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | 4.450.000.000 | 4.450.000.000 | 4.450.000.000 | | 13.350.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.02 | Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | | | | | | | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 | | 9.450.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Persen | -35,81 | -44,84 | 6,53 | 3,33 | 4,84 | | | | 4,84 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Persen | -18,24 | 32,35 | 0,42 | 2,38 | 2,78 | | | | 2,78 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Tingkat hunian akomodasi | Persen | 17,54 | 16,89 | 19,87 | 24,84 | 31,05 | | | | 31,05 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Kunjungan wisata | Persen | 53,01 | 69,89 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi | Persen | 4,44 | 4,44 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | | | | 0,31 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat | Persen | 4,44 | 4,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | | | | 0,43 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|--|--------|--------------|-------|----------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan | Persen | 13,33 | 15,56 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | | | | 0,31 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.03 | Program : Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.200.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan | Event | 40,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentase destinasi wisata yang diminati | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | | | 0,32 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.04 | Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 1.500.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan | Persen | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.05 | Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 1.200.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina | Persen | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | 11.701.069.627 | 11.867.692.115 | 12.090.935.383 | | 35.659.697.125 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | 10.676.069.627 | 10.792.692.115 | 11.065.935.383 | | 32.534.697.125 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.23.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 10.218.858.281 | 10.282.692.115 | 10.535.935.383 | | 31.037.485.779 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.23.02 | Program : Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | 407.211.346 | 460.000.000 | 480.000.000 | | 1.347.211.346 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Persen | 63,90 | 63,90 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah | Persen | 84,60 | 2,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | 1,07 | 0,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | | | | 1,07 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Laju pengunjung perpustakaan | Persen | 39,25 | 409,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Orang | 12.381,00 | 63.035,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | | | | 0,80 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | | | 0,16 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Laju Anggota Perpustakaan | Persen | 0,15 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | | | | 51,52 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | 0,32 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | | | | 0,08 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.23.03 | Program : Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 150.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | Persen | 40,00 | 42,86 | 50,00 | 53,00 | 61,00 | | | | 61,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | 1.025.000.000 | 1.075.000.000 | 1.025.000.000 | | 3.125.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.24.02 | Program : Pengelolaan Arsip | | | | | | | | 850.000.000 | 900.000.000 | 850.000.000 | | 2.600.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Persentase Pembinaan Kearsipan OPD | Persen | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib | Persen | 28,57 | 0,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | | | | 39,10 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|--|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan | Persen | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | | | | 27,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Persentase Penyusutan Arsip | Persen | 9,50 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Arsip Aktif | Persen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Arsip Inaktif | Persen | 5,28 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Arsip Vital | Persen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan | Persen | 73,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan | Persen | 2,67 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | | | | 4,70 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2.24.03 | Program : Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | | | | | | | | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | | 525.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Tingkat Penyelamatan Arsip Statis | Persen | 33,04 | 6,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis | Persen | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | | | | 19,99 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | Tingkat Pelestarian Arsip Statis | Persen | 1,75 | 13,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | | 1,75 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.25.3.27.0.00.01.0000 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | | | | | | | | 16.431.289.263 | 16.665.269.779 | 16.978.760.325 | | 50.075.319.367 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | 15.159.550.263 | 15.366.484.779 | 15.640.984.325 | | 46.167.019.367 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 11.195.629.263 | 11.421.559.779 | 11.644.323.325 | | 34.261.512.367 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.03 | Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap | | | | | | | | 596.986.000 | 605.487.000 | 616.877.000 | | 1.819.350.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 1.371,25 | 1.474,09 | 1.635,30 | 1.692,54 | 1.751,77 | | | | 1.751,77 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi perikanan | Persen | 10,50 | 10,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | | | | 5,25 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Konsumsi ikan | Persen | 20,00 | 32,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | | | | 35,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 11,76 | 16,98 | 18,97 | 19,67 | 20,31 | | | | 20,31 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi perikanan kelompok nelayan | Persen | 0,17 | 9,16 | 3,32 | 3,40 | 3,48 | | | | 3,48 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | Persen | 68,56 | 74,25 | 76,85 | 79,54 | 82,33 | | | | 82,33 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | | | 3,50 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.04 | Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya | | | | | | | | 2.925.452.000 | 2.891.669.000 | 2.923.591.000 | | 8.740.712.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 108.037,89 | 14.735,00 | 16.351,74 | 17.496,36 | 18.721,11 | | | | 18.721,11 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Poduksi Ikan Konsumsi | Ton | 15.646,00 | 16.205,00 | 17.987,00 | 19.189,00 | 20.473,00 | | | | 20.473,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi Benih Ikan UPR | Ekor | 554.013.000,00 | 1.067.364.864,00 | 1.078.038.512,00 | 1.088.818.897,00 | 1.100.000.000,00 | | | | 1.100.000.000,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi Benih Ikan BBI | Ekor | 6.630.833,00 | 6.740.000,00 | 8.100.000,00 | 9.150.000,00 | 10.200.000,00 | | | | 10.200.000,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi Ikan Hias | Ton | 239.090,00 | 194.918,00 | 608.990,00 | 627.259,00 | 646.076,00 | | | | 646.076,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi Perikanan budidaya | Ton | 39,58 | 0,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | | | | 38,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.05 | Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | | | | | | | | 41.632.000 | 42.226.000 | 43.020.000 | | 126.878.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Perikanan Budidaya yang diawasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.25.06 | Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | | | | | | | 399.851.000 | 405.543.000 | 413.173.000 | | 1.218.567.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produksi Olahan Produk Perikanan | Ton | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 | | | | 550,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan | Kelompok | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | | | | 16,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Unit | 112,00 | 121,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | | | | 150,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | 1.271.739.000 | 1.298.785.000 | 1.337.776.000 | | 3.908.300.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.02 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | | | | | | | 519.701.000 | 527.101.000 | 537.014.000 | | 1.583.816.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Pertumbuhan Produksi Peternakan | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | | 1,50 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Cakupan Akseptor IB | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | | | | 85,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase bibit ternak bersertifikat | Persen | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | | | | 15,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia | Persen | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | | | | 3,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.03 | Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | 62.448.000 | 63.337.000 | 64.528.000 | | 190.313.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase RPH sesuai standar | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.04 | Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | 552.488.000 | 564.289.000 | 576.396.000 | | 1.693.173.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik | Persen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) | Kasus | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---------------------------------------|--|--------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan | Lokasi | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | | | | 17,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) | Ekor | 57.983,00 | 39.574,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) | Persen | - | - | 79,00 | 84,00 | 87,50 | | | | 87,50 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 633,00 | 696,00 | 828,00 | 908,00 | 992,00 | | | | 992,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 13,00 | 14,30 | 16,20 | 18,00 | 19,80 | | | | 19,80 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Liter | 32,00 | 35,20 | 38,80 | 41,00 | 42,70 | | | | 42,70 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3.27.07 | Program : Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | 137.102.000 | 144.058.000 | 159.838.000 | | 440.998.000 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | Cakupan bina kelompok petani (peternakan) | Persen | 15,00 | 13,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 12,00 | | Dinas Perikanan dan Peternakan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.01.5.06.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 83.152.282.031 | 84.336.365.247 | 85.922.817.404 | | 253.411.464.682 | Sekretariat Daerah |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 82.552.282.031 | 83.676.365.247 | 85.172.817.404 | | 251.401.464.682 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Program : Administrasi Umum | | | | | | | | 63.243.130.002 | 63.389.097.528 | 63.427.981.770 | | 190.060.209.300 | Sekretariat Daerah |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | A | A | A | | | | A | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 | Program : Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | 13.870.000.000 | 14.240.000.000 | 14.610.000.000 | | 42.720.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten | Persen | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online | Persen | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif | Persen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 | Program : Perekonomian Dan Pembangunan | | | | | | | | 5.439.152.029 | 6.047.267.719 | 7.134.835.634 | | 18.621.255.382 | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun | Dokumen | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |
| | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 44,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | 55,00 | | Sekretariat Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|---|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.06 | PENGELOLAAN PERBATASAN | | | | | | | | 600.000.000 | 660.000.000 | 750.000.000 | | 2.010.000.000 | Sekretariat Daerah |
| 5.06.02 | Program : Pengelolaan Perbatasan | | | | | | | | 600.000.000 | 660.000.000 | 750.000.000 | | 2.010.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | 71.700.171.332 | 72.721.177.219 | 74.089.135.965 | | 218.510.484.516 | Sekretariat DPRD |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | 71.700.171.332 | 72.721.177.219 | 74.089.135.965 | | 218.510.484.516 | Sekretariat DPRD |
| 4.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Program : Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota | | | | | | | | 46.876.175.032 | 47.335.987.309 | 47.769.737.665 | | 141.981.900.006 | Sekretariat DPRD |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | D | B | B | B | B | | | | B | | Sekretariat DPRD |
| | | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 | Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | | | | | | | | 24.823.996.300 | 25.385.189.910 | 26.319.398.300 | | 76.528.584.510 | Sekretariat DPRD |
| | | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Sekretariat DPRD |
| | | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Sekretariat DPRD |
| | | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Sekretariat DPRD |
| | | Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat DPRD |
| | | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Sekretariat DPRD |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | 13.692.741.053 | 13.887.724.816 | 14.148.966.937 | | 41.729.432.806 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | 12.542.741.053 | 12.737.724.816 | 12.873.966.937 | | 38.154.432.806 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| 5.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 10.617.741.053 | 10.687.724.816 | 10.723.966.937 | | 32.029.432.806 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | AA | AA | AA | AA | AA | | | | AA | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.01.02 | Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | | | | 1.175.000.000 | 1.200.000.000 | 1.300.000.000 | | 3.675.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | | | Ada | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Capaian Kinerja RKPd | Persen | 88,64 | 88,75 | 89,00 | 89,25 | 89,50 | | | | 89,50 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|--|---|--------|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.01.03 | Program : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 750.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 | | | | 100,00 | 2.450.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.275.000.000 | | | | | 3.575.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5.05.02 | Program : Penelitian Dan Pengembangan Daerah | | | | | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.275.000.000 | | | | | 3.575.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persen | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | Persen | 10,87 | 25,53 | 42,55 | 53,19 | 53,19 | | | | 53,19 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|---|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | 426.466.644.072 | 432.539.502.002 | 440.676.006.627 | | 1.299.682.152.701 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | | 426.466.644.072 | 432.539.502.002 | 440.676.006.627 | | 1.299.682.152.701 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 58.106.644.072 | 55.723.000.000 | 55.723.000.000 | | 169.552.644.072 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | A | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02 | Program : Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | 366.210.000.000 | 374.666.502.002 | 382.803.006.627 | | 1.123.679.508.629 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | Persen | 15,65 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 15,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Persen | 81,83 | 0,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | | | | 89,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | WTP | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | 75,24 | 0,00 | 75,54 | 75,84 | 76,14 | | | | 76,14 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Persen | 2,18 | 0,00 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | | | | 2,03 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 2,16 | 2,68 | 1,74 | 1,69 | 1,58 | | | | 1,58 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 30,85 | 0,00 | 32,00 | 34,00 | 35,00 | | | | 35,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 19,05 | 0,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 1,25 | 14,84 | 1,80 | 1,78 | 1,74 | | | | 1,74 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | | | Tepat Waktu | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Kesesuaian Dokumen Penganggaran | Skor | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | 6 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD | Skor | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | Skor | 7,76 | 7,76 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Penyerapan Anggaran | Skor | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | 20 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Kondisi Keuangan Daerah | Skor | 3,06 | 3,06 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 4 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|----------------|--|---|---------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.02.03 | Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 | | 6.450.000.000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak) | Dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | | | | Ya | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat | Persen | 21,79 | 23,66 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persen | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase pengolah BMD yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Persentase penyusutan/ penghapusan BMD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Administrasi BMD yang Andal | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | | | | 3 (Baik) | | Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | 32.862.578.527 | 33.330.539.558 | 33.957.520.650 | | 100.150.638.735 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | | 32.862.578.527 | 33.330.539.558 | 33.957.520.650 | | 100.150.638.735 | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.02.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 28.912.578.527 | 29.330.539.558 | 29.407.520.650 | | 87.650.638.735 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | A | | Badan Pendapatan Daerah |
| 5.02.04 | Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | | | 3.950.000.000 | 4.000.000.000 | 4.550.000.000 | | 12.500.000.000 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Rasio PAD | Persen | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | | | | 0,93 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | 11,95 | 12,30 | 12,65 | 13,00 | 13,35 | | | | 13,35 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Rasio Pajak daerah | Persen | 48,84 | 49,34 | 49,84 | 50,34 | 50,84 | | | | 50,84 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Rasio retribusi daerah | Persen | 3,92 | 4,23 | 4,53 | 4,84 | 5,14 | | | | 5,14 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Persentase capaian PAD | Persen | 88,05 | 88,50 | 88,95 | 89,40 | 89,85 | | | | 89,85 | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah | Persen | 8,80 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | | | | 10,50 | | Badan Pendapatan Daerah |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | |
|------------------------|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | 39.833.428.518 | 40.400.654.010 | 41.160.631.091 | | 121.394.713.619 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | 38.408.428.518 | 38.930.654.010 | 39.435.631.091 | | 116.774.713.619 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 32.358.428.518 | 32.855.654.010 | 33.360.631.091 | | 98.574.713.619 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | | A | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02 | Program : Kepegawaian Daerah | | | | | | | | | 6.050.000.000 | 6.075.000.000 | 6.075.000.000 | | 18.200.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 78,59 | 80,16 | 80,88 | 81,74 | 82,67 | | | | | 82,67 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 8,40 | 16,66 | 16,99 | 17,33 | 17,67 | | | | | 17,67 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 29,76 | 39,68 | 49,80 | 54,86 | 59,92 | | | | | 59,92 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | | | | | 34,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | | | | | 172,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 249,00 | 494,00 | 504,00 | 514,00 | 524,00 | | | | | 524,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai | Persen | 0,41 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | | | | | 0,21 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase Pemberhentian ASN | Persen | 6,04 | 7,02 | 5,73 | 5,94 | 6,16 | | | | | 6,16 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa | Persen | 1,76 | 2,59 | 2,15 | 2,03 | 1,93 | | | | | 1,93 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|---------|--|---|--------|--------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | 1.425.000.000 | 1.470.000.000 | 1.725.000.000 | | 4.620.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04.02 | Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | 1.425.000.000 | 1.470.000.000 | 1.725.000.000 | | 4.620.000.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | | | | 1,15 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 37,25 | 47,34 | 51,01 | 56,51 | 63,85 | | | | 63,85 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis | Persen | 2,61 | 5,49 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | | | | 2,86 | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|------------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT | | | | | | | | 30.124.030.316 | 30.552.994.595 | 31.127.727.263 | | 91.804.752.174 | Inspektorat |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | 30.124.030.316 | 30.552.994.595 | 31.127.727.263 | | 91.804.752.174 | Inspektorat |
| 6.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 25.699.030.316 | 26.039.994.595 | 26.525.727.263 | | 78.264.752.174 | Inspektorat |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | | | | A | | Inspektorat |
| 6.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pengawasan | | | | | | | | 3.280.000.000 | 3.378.000.000 | 3.477.000.000 | | 10.135.000.000 | Inspektorat |
| | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | | Inspektorat |
| | | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 70,09 | 84,79 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | | 80,00 | | Inspektorat |
| | | Jumlah temuan BPK | Laporan | 16,00 | 15,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | | | | 8,00 | | Inspektorat |
| | | Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Inspektorat |
| 6.01.03 | Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | | | | | | | | 1.145.000.000 | 1.135.000.000 | 1.125.000.000 | | 3.405.000.000 | Inspektorat |
| | | Capaian MCP KPK | Persen | 74,00 | 100,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | | | | 83,00 | | Inspektorat |
| | | Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas | Perangkat Daerah | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | | Inspektorat |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN JATILUHUR | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | CC | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Jatiluhur |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 51,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Jatiluhur |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN SUKASARI | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | | | | B | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukasari |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukasari |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN MANIIS | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | | | | B | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Maniis |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Maniis |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN TEGALWARU | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Tegalwaru |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Tegalwaru |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN PLERED | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | CC | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Plered |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Plered |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Plered |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Plered |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KECAMATAN SUKATANI | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | A | A | A | | | | A | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Sukatani |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Sukatani |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KECAMATAN DARANGDAN | | | | | | | | | | | 3.734.383.923 | 3.787.561.313 | 3.858.809.164 | 11.380.754.400 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | 3.734.383.923 | 3.787.561.313 | 3.858.809.164 | 11.380.754.400 | Kecamatan Darangdan |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 3.523.383.923 | 3.581.561.313 | 3.629.809.164 | 10.734.754.400 | Kecamatan Darangdan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Darangdan | | |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | 20.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 69.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Darangdan | | |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | 20.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 64.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan | | |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan | | |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | 120.000.000 | 122.000.000 | 122.000.000 | 364.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan | | |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | 41.000.000 | 33.000.000 | 50.000.000 | 124.000.000 | Kecamatan Darangdan |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Darangdan | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KECAMATAN BOJONG | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bojong |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bojong |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|--------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KECAMATAN WANAYASA | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Wanayasa |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Wanayasa |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KECAMATAN KIARAPEDES | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | CC | B | B | B | | | | B | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Kiarapedes |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Kiarapedes |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|---------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | KECAMATAN PASAWAHAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pasawahan |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pasawahan |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|-----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | KECAMATAN PONDOKSALAM | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | A | A | | | | A | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Pondoksalam |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Pondoksalam |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | KECAMATAN PURWAKARTA | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Purwakarta |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Purwakarta |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH | | |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | KECAMATAN BABAKAN CIKAO | | | | | | | | | | | 3.236.466.067 | 3.282.553.138 | 3.344.301.276 | 9.863.320.481 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | 3.236.466.067 | 3.282.553.138 | 3.344.301.276 | 9.863.320.481 | Kecamatan Babakan Cikao |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 3.151.551.305 | 3.190.553.138 | 3.229.270.074 | 9.571.374.517 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Babakan Cikao | | |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Babakan Cikao | | |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 66.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | | |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | | |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | 34.914.762 | 40.000.000 | 63.031.202 | 137.945.964 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | | |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 28.000.000 | Kecamatan Babakan Cikao |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Babakan Cikao | | |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.15.0000 | KECAMATAN CAMPAKA | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Campaka |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Campaka |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.16.0000 | KECAMATAN CIBATU | | | | | | | | 3.983.342.851 | 4.040.065.429 | 4.116.063.109 | | 12.139.471.389 | Kecamatan Cibatu |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | 3.983.342.851 | 4.040.065.429 | 4.116.063.109 | | 12.139.471.389 | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3.783.342.851 | 3.845.065.429 | 3.971.063.109 | | 11.599.471.389 | Kecamatan Cibatu |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | A | A | | | | A | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000 | | 120.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | 30.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | | 75.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 | | 75.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | | 145.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 45.000.000 | 45.000.000 | 35.000.000 | | 125.000.000 | Kecamatan Cibatu |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Cibatu |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|------|------|---------------|-----|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.01.0.00.0.00.17.0000 | KECAMATAN BUNGURSARI | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | | | | BB | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01.02 | Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | | | Baik | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01.03 | Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01.04 | Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01.05 | Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |
| 7.01.06 | Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | Kecamatan Bungursari |
| | | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 51,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Kecamatan Bungursari |

| KODE | BIDANG URUSAN PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | PAGU ANGGARAN | | | KONDISI AKHIR | | PERANGKAT DAERAH |
|------------------------|--|--|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | Kinerja | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.01.0.00.0.00.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | 10.509.398.223 | 10.647.659.415 | 10.832.903.828 | | 31.989.961.466 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | 10.509.398.223 | 10.647.659.415 | 10.832.903.828 | | 31.989.961.466 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 4.088.634.734 | 4.192.328.341 | 4.317.681.309 | | 12.598.644.384 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | | | | A | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.02 | Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | 1.150.000.000 | 1.151.000.000 | 1.154.000.000 | | 3.455.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 | Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | | | | 3.170.763.489 | 3.189.831.074 | 3.235.222.519 | | 9.595.817.082 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 | Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | 250.000.000 | 252.000.000 | 254.000.000 | | 756.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 | Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | | | | | | | 500.000.000 | 505.500.000 | 510.000.000 | | 1.515.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.06 | Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | 1.350.000.000 | 1.357.000.000 | 1.362.000.000 | | 4.069.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| JUMLAH | 47 | 63 | 281 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 391 | 391 | 391 | 715 | 391 | 1.106 |
| UNIQUE | 47 | 41 | 150 | 584 | 38 | 290 | 251 | 232 | 235 | 235 | 270 | 281 | 284 | 235 |

Sumber : Perangkat Daerah terkait, 2023

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah,

yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Kepala Daerah dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya daerah.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 yang terdiri dari berbagai indikator disajikan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Pelayanan Umum; dan (3) Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator kinerja kunci pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator pada tingkat dampak atau *impact*. Indikator tingkat *impact* ini merupakan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan

indikator kinerja pada Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja daerah tingkat hasil (*outcome*).

Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

A. IKU PEMKAB PURWAKARTA

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | 74,11 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,10 | 8,11 | 9,23 | 9,75 | 10,24 | 10,24 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,12 | 12,13 | 13,85 | 14,63 | 15,38 | 15,38 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 4 | Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | 5,68 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,13 | 65,21 | 82,22 | 89,58 | 96,43 | 96,43 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 7 | Persentase Pemuda Berprestasi | Persen | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 8 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,47 | 72,01 | 72,32 | 72,64 | 72,64 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 9 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,82 | 1,69 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 10 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | 70,69 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 11 | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 12 | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Predikat | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 13 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | 6,39 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 14 | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | 90,05 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 15 | Pertumbuhan UMKM | Persen | 1,00 | 0,00 | 11,86 | 13,16 | 14,69 | 14,69 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 16 | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 17 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | 90,54 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 18 | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) | Rp. | 48,83 | 51,24 | 56,08 | 58,49 | 60,91 | 60,91 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 19 | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) | Rp. | 74,50 | 82,83 | 93,32 | 99,89 | 106,66 | 106,66 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 20 | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,82 | 10,41 | 10,41 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 22 | Nilai Tukar Petani | Poin | 97,84 | 99,13 | 101,71 | 103,00 | 104,29 | 104,29 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 23 | Skor Pola Pangan Harapan | Poin | 78,30 | 91,40 | 95,70 | 97,80 | 100,00 | 100,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 24 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | Persen | 6,57 | 6,57 | 6,39 | 6,34 | 6,29 | 6,29 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 25 | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | 6,44 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 26 | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | 0,255 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 27 | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 11,67 | 12,19 | 12,64 | 12,91 | 13,18 | 13,18 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 28 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 86,70 | 86,93 | 87,38 | 87,60 | 87,83 | 87,83 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 29 | Indeks Perberdayaan Gender (IDG) | Poin | 74,39 | 77,89 | 79,92 | 80,93 | 81,94 | 81,94 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 30 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 31 | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 79,76 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 32 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 33 | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 88,35 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 34 | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 37,56 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 35 | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 73,64 | 73,64 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 36 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 37 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 61,41 | 64,41 | 67,41 | 70,41 | 73,41 | 73,41 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 38 | Indeks SPBE | Poin | 2,37 | - | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 39 | Indeks Profesionalitas ASN | Predikat | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Rendah | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 40 | Sistem Merit Kabupaten | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 41 | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 42 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 43 | Indeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,1950 | 0,2120 | 0,2280 | 0,2370 | 0,2450 | 0,25 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 44 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Poin | 77,52 | 79,16 | 82,45 | 84,09 | 85,74 | 85,74 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 45 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 2,636 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 46 | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,38 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | 50,74 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 47 | Indeks Desa Membangun | Predikat | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 48 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | 81,45 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Makro Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|----------|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | 74,11 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | 5,68 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | 6,39 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 4 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | 90,54 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 5 | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | 6,44 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 6 | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | 0,255 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

B. IKU PERANGKAT DAERAH KAB. PURWAKARTA

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|------------------------------|---|----------|--------------|--------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dinas Pendidikan | | | | | | | | | |
| 1 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,10 | 8,11 | 8,12 | 8,13 | 8,14 | 8,14 | IKU Dinas Pendidikan |
| 2 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,12 | 12,13 | 12,14 | 12,15 | 12,16 | 12,16 | IKU Dinas Pendidikan |
| 3 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Dinas Pendidikan |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Pendidikan |
| Dinas Kesehatan | | | | | | | | | |
| 5 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,29 | 71,51 | 71,62 | 71,73 | 71,73 | IKU Dinas Kesehatan |
| 6 | Cakupan Pelayanan SPM Kesehatan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IKU Dinas Kesehatan |
| 7 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Dinas Kesehatan |
| 8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Kesehatan |
| Rumah Sakit Bayu Asih | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase ketercapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 10 | Pencapaian Standar Akreditasi | Opini | Madya | Madya | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 11 | Presentase pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan | Persen | 75,00 | 80,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 12 | Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian Kompetensi | Persen | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 92,00 | 93,00 | 93,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 13 | Dokumen Kinerja Rumah Sakit | Dokumen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 14 | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dalam Kondisi Baik | Persen | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan operasional Penunjang Pelayanan Kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 16 | Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan | Persen | 80,00 | 85,00 | 87,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 17 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| 18 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Rumah Sakit Bayu Asih |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | | | | | |
| 19 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Km | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 20 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 21 | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 37,56 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 22 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | - | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| 24 | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 79,76 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 25 | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 88,35 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 26 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 27 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | | |
| 28 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Satuan Polisi Pamong Praja |
| 29 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Satuan Polisi Pamong Praja |
| 30 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Satuan Polisi Pamong Praja |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | |
| 31 | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 32 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 33 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | | | | | | | | | |
| 34 | Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 35 | Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 36 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 37 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | BAIK | IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | |
| 38 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,38 | 8,18 | 8,08 | 7,99 | 7,99 | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 40 | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 41 | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan | Juta Rp. | 11,67 | 11,78 | 12,11 | 12,28 | 12,44 | 12,44 | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 42 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 86,70 | 86,93 | 87,38 | 87,60 | 87,83 | 87,83 | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 43 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Poin | 74,39 | 77,89 | 79,92 | 80,93 | 81,94 | 81,94 | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 44 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 45 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | | | | | | | | | |
| 46 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 0,00 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 47 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 0,00 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 48 | Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 49 | Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 50 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 51 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|--|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dinas Pangan dan Pertanian | | | | | | | | | |
| 52 | Persentase kecukupan bahan pangan | Persen | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Pangan dan Pertanian |
| 53 | Laju produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Persen | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKU Dinas Pangan dan Pertanian |
| 54 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Pangan dan Pertanian |
| 55 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Pangan dan Pertanian |
| Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 56 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | 70,69 | IKU Dinas Lingkungan Hidup |
| 57 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | Persen | 60 % | 74 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | IKU Dinas Lingkungan Hidup |
| 58 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Lingkungan Hidup |
| 59 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Lingkungan Hidup |
| 60 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Lingkungan Hidup |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | |
| 61 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 62 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 63 | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 64 | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|--|--------------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 65 | Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Instansi/Lembaga lainnya | Persen | 24,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | |
| 66 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 67 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 68 | Indeks Desa Membangun | Poin/ Status | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | |
| 69 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,82 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 70 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 71 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Dinas Perhubungan | | | | | | | | | |
| 72 | Tersedianya sarana prasarana layanan publik Perhubungan | Persen | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKU Dinas Perhubungan |
| 73 | Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota | Pon | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKU Dinas Perhubungan |
| 74 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Perhubungan |
| 75 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Perhubungan |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| 76 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|--|---|----------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 78 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 2,37 | - | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 79 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Persen | - | 84,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 80 | Cakupan pelayanan data statistik sectoral | Persen | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 81 | Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian | | | | | | | | | |
| 82 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 4,88 | 5,31 | 5,72 | 5,72 | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 83 | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | 90,05 | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 84 | Pertumbuhan UMKM | Persen | 1,00 | 0,00 | 11,86 | 13,16 | 14,69 | 14,69 | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 85 | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 86 | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB | Rp. | 0,00 | 0,00 | 46.782.449.072,00 | 47.737.192.933,00 | 48.711.421.360,00 | 48.711.421.360,00 | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 87 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 88 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | | | | | |
| 89 | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN | Rp. (Triliun) | 4,73 | 5,88 | 6,73 | 7,20 | 7,70 | 7,70 | IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 90 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 91 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan | | | | | | | | | |
| 92 | Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 93 | Persentase Pemuda Berprestasi | Persen | 0,057 | 0,058 | 0,061 | 0,063 | 0,066 | 0,066 | IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 94 | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 95 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,82 | 10,41 | 10,41 | IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 96 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 97 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | | | | | | | | |
| 98 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Persen | 63,90 | 63,90 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 99 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 100 | Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah | Persen | 84,60 | 2,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 101 | Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | 1,07 | 0,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 102 | Laju pengunjung perpustakaan | Persen | 39,25 | 409,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 103 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Orang | 12.381,00 | 63.035,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 104 | Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 105 | Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 106 | Laju Anggota Perpustakaan | Persen | 0,15 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 107 | Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | 0,32 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 108 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 109 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 110 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan | Poin | 30,80 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---------------------------------------|---|----------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | | | | | | |
| 111 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Poin | 20,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 112 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | Persen | 47,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 113 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 47,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 114 | Persentase arsip dinamis | Persen | 30,80 | 58,00 | 20,20 | 85,20 | 100,00 | 100,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 115 | Persentase arsip statis | Persen | 47,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Dinas Perikanan dan Peternakan | | | | | | | | | |
| 116 | Persentase peningkatan usaha perikanan | Persen | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | IKU Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 117 | Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | IKU Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 118 | Pertumbuhan Produksi Peternakan | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | IKU Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 119 | Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) | kasus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IKU Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 120 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 121 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Dinas Perikanan dan Peternakan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|--|----------------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sekretariat Daerah | | | | | | | | | |
| 122 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | A | A | A | A | IKU Sekretariat Daerah |
| 123 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Sekretariat Daerah |
| 124 | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | IKU Sekretariat Daerah |
| 125 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Poin | 2,64 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKU Sekretariat Daerah |
| Sekretariat DPRD | | | | | | | | | |
| 126 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | D | B | B | B | B | B | IKU Sekretariat DPRD |
| 127 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Sekretariat DPRD |
| Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | | | | | | | | | |
| 128 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | AA | AA | AA | AA | AA | AA | IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 129 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 130 | Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan | Persen | 90,45 | 91,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 131 | Indeks Inovasi Daerah | Skor/ Kategori | 50,38 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | 50,74 | IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | | | | | |
| 132 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 133 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|---|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 134 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Predikat | Perlu Perbaikan | Cukup | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 135 | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah | Predikat | Cukup | Cukup | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Badan Pendapatan Daerah | | | | | | | | | |
| 136 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKU Badan Pendapatan Daerah |
| 137 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Badan Pendapatan Daerah |
| 138 | Indeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,195 | 0,212 | 0,228 | 0,237 | 0,245 | 0,245 | IKU Badan Pendapatan Daerah |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | |
| 139 | Tingkat Profesionalitas ASN | Katagori | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Rendah | IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 140 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | 0,00 | IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 141 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | 0,00 | IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 142 | Indeks Sistem Merit Kabupaten | Kategori | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | 0,00 | IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Inspektorat | | | | | | | | | |
| 143 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKU Inspektorat |
| 144 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Inspektorat |
| 145 | Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | Perangkat Daerah | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKU Inspektorat |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|----------------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 146 | Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM) | Level | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKU Inspektorat |
| 147 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKU Inspektorat |
| 148 | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 70,09 | 84,79 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | IKU Inspektorat |
| 149 | Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B | Persen | 89,13 | 0,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 90,00 | IKU Inspektorat |
| Kecamatan Jatiluhur | | | | | | | | | |
| 150 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | CC | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Jatiluhur |
| 151 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Jatiluhur |
| 152 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | IKU Kecamatan Jatiluhur |
| Kecamatan Sukasari | | | | | | | | | |
| 153 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | B | IKU Kecamatan Sukasari |
| 154 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Sukasari |
| 155 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | IKU Kecamatan Sukasari |
| Kecamatan Maniis | | | | | | | | | |
| 156 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | B | IKU Kecamatan Maniis |
| 157 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Maniis |
| 157 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Maniis |
| Kecamatan Tegalwaru | | | | | | | | | |
| 159 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Tegalwaru |
| 160 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Tegalwaru |
| 160 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Tegalwaru |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kecamatan Plered | | | | | | | | | |
| 162 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKU Kecamatan Plered |
| 163 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Plered |
| 164 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Plered |
| Kecamatan Sukatani | | | | | | | | | |
| 165 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Sukatani |
| 166 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Sukatani |
| 167 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Sukatani |
| Kecamatan Darangdan | | | | | | | | | |
| 168 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Darangdan |
| 169 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Darangdan |
| 170 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Darangdan |
| Kecamatan Bojong | | | | | | | | | |
| 171 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Bojong |
| 172 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Bojong |
| 173 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | IKU Kecamatan Bojong |
| Kecamatan Wanayasa | | | | | | | | | |
| 174 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Wanayasa |
| 175 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Wanayasa |
| 175 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status Mandiri | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Wanayasa |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kecamatan Kiarapedes | | | | | | | | | |
| 177 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | CC | B | B | B | B | IKU Kecamatan Kiarapedes |
| 178 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Kiarapedes |
| 179 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Kiarapedes |
| Kecamatan Pasawahan | | | | | | | | | |
| 180 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Pasawahan |
| 181 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Pasawahan |
| 182 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | IKU Kecamatan Pasawahan |
| Kecamatan Pondoksalam | | | | | | | | | |
| 183 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | A | A | A | A | IKU Kecamatan Pondoksalam |
| 184 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Pondoksalam |
| 184 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | IKU Kecamatan Pondoksalam |
| Kecamatan Purwakarta | | | | | | | | | |
| 186 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Purwakarta |
| 187 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Purwakarta |
| 188 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | IKU Kecamatan Purwakarta |
| Kecamatan Babakan Cikao | | | | | | | | | |
| 189 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Babakan Cikao |
| 190 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Babakan Cikao |
| 191 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Babakan Cikao |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kecamatan Campaka | | | | | | | | | |
| 192 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKU Kecamatan Campaka |
| 193 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Campaka |
| 193 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Predikat | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU Kecamatan Campaka |
| Kecamatan Cibatu | | | | | | | | | |
| 195 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | C | B | A | A | A | IKU Kecamatan Cibatu |
| 196 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Cibatu |
| 196 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | Berkembang | IKU Kecamatan Cibatu |
| Kecamatan Bungursari | | | | | | | | | |
| 198 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKU Kecamatan Bungursari |
| 199 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Kecamatan Bungursari |
| 200 | Indeks Desa Membangun Kecamatan | Poin/ Status | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | Mandiri | IKU Kecamatan Bungursari |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | |
| 201 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 202 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 203 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | 81,45 | IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| JUMLAH | 47 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 202 | 202 |
| UNIQUE | 47 | 96 | 21 | 69 | 63 | 69 | 68 | 67 | 48 |

Sumber : Analisa Tim dan Perangkat Daerah terkait, 2023

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 1 | Indek Pembangunan Manusia | Poin | 70,98 | 71,56 | 72,99 | 73,55 | 74,11 | 74,11 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 8,10 | 8,11 | 9,23 | 9,75 | 10,24 | 10,24 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,12 | 12,13 | 13,85 | 14,63 | 15,38 | 15,38 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka / Angka Pengangguran | Persen | 10,70 | 8,75 | 7,00 | 6,30 | 5,68 | 5,68 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 5 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,13 | 65,21 | 82,22 | 89,58 | 96,43 | 96,43 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 6 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,18 | 71,47 | 72,01 | 72,32 | 72,64 | 72,64 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 7 | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | Persen | 1,82 | 1,69 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 8 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 3,42 | 5,24 | 5,80 | 6,10 | 6,39 | 6,39 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 9 | Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB (Juta) | Rp. | 69,98 | 74,35 | 82,77 | 86,73 | 90,54 | 90,54 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 10 | Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB (Trilyun) | Rp. | 48,83 | 51,24 | 56,08 | 58,49 | 60,91 | 60,91 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 11 | Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Trilyun) | Rp. | 74,50 | 82,83 | 93,32 | 99,89 | 106,66 | 106,66 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 12 | Nilai Tukar Petani | Poin | 97,84 | 99,13 | 101,71 | 103,00 | 104,29 | 104,29 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 13 | Skor Pola Pangan Harapan | Poin | 78,30 | 91,40 | 95,70 | 97,80 | 100,00 | 100,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 14 | Angka Kemiskinan | Persen | 8,83 | 8,70 | 7,25 | 6,83 | 6,44 | 6,44 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Indeks Gini/ Ketimpangan Pendapatan | Poin | 0,388 | 0,367 | 0,306 | 0,280 | 0,255 | 0,255 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 16 | Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Juta) | Rp. | 11,67 | 12,19 | 12,64 | 12,91 | 13,18 | 13,18 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

B. ASPEK PELAYANAN UMUM

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|----------|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 72,83 | 0,00 | 74,29 | 75,74 | 77,20 | 77,20 | IKK Dinas Pendidikan |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 99,30 | 0,00 | 99,50 | 99,70 | 99,90 | 99,90 | IKK Dinas Pendidikan |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 94,13 | 0,00 | 94,33 | 94,53 | 94,73 | 94,73 | IKK Dinas Pendidikan |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,52 | 0,00 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | IKK Dinas Pendidikan |
| 5 | Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 98,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 6 | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 0,52 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | IKK Dinas Pendidikan |
| 7 | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Persen | 1,72 | 0,00 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,82 | IKK Dinas Pendidikan |
| 8 | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Persen | 72,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 72,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 10 | Angka partisipasi kasar | Persen | 23,40 | 23,40 | 24,30 | 24,80 | 25,30 | 25,30 | IKK Dinas Pendidikan |
| 11 | Angka pendidikan yang ditamatkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 12 | Angka Partisipasi Murni | Persen | 21,90 | 21,90 | 22,80 | 23,20 | 23,70 | 23,70 | IKK Dinas Pendidikan |
| 13 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | Persen | 99,60 | 99,60 | 99,61 | 99,62 | 99,63 | 99,63 | IKK Dinas Pendidikan |
| 14 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | Persen | 83,80 | 83,80 | 84,00 | 84,10 | 84,20 | 84,20 | IKK Dinas Pendidikan |
| 15 | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | Persen | 99,30 | 99,30 | 99,50 | 99,60 | 99,70 | 99,70 | IKK Dinas Pendidikan |
| 16 | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | Persen | 94,13 | 94,10 | 94,30 | 94,40 | 94,50 | 94,50 | IKK Dinas Pendidikan |
| 17 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | Persen | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | IKK Dinas Pendidikan |
| 18 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | Persen | 5,90 | 5,90 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | IKK Dinas Pendidikan |
| 19 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 20 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 21 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 22 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 23 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | Persen | 21,13 | 22,61 | 24,19 | 24,67 | 25,15 | 25,15 | IKK Dinas Pendidikan |
| 24 | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | Persen | 39,20 | 41,95 | 44,88 | 47,63 | 50,38 | 50,38 | IKK Dinas Pendidikan |
| 25 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | Persen | 41,53 | 0,00 | 41,55 | 41,56 | 41,57 | 41,57 | IKK Dinas Pendidikan |
| 26 | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | menamatkan sekolah dasar | | | | | | | | |
| 27 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 28 | Penduduk yang berusia lebih dari 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 29 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) | % | 58,41 | 59,51 | 59,10 | 59,17 | 59,24 | 59,24 | IKK Dinas Pendidikan |
| 30 | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 97,66 | 99,58 | 98,86 | 98,98 | 99,10 | 99,10 | IKK Dinas Pendidikan |
| 31 | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) | % | 5,18 | 9,58 | 7,93 | 8,21 | 8,48 | 8,48 | IKK Dinas Pendidikan |
| 32 | Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 48,95 | 54,69 | 52,54 | 52,90 | 53,26 | 53,26 | IKK Dinas Pendidikan |
| 33 | Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional | nilai | 37,08 | 42,99 | 40,77 | 41,14 | 41,51 | 41,51 | IKK Dinas Pendidikan |
| 34 | Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 59,00 | 61,92 | 60,83 | 61,01 | 61,19 | 61,19 | IKK Dinas Pendidikan |
| 35 | Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | nilai | 52,94 | 53,57 | 53,33 | 53,37 | 53,41 | 53,41 | IKK Dinas Pendidikan |
| 36 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 44,83 | 42,90 | 43,50 | 43,62 | 43,87 | 43,87 | IKK Dinas Pendidikan |
| 37 | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 | % | 63,52 | 2,59 | 21,63 | 25,44 | 33,05 | 33,05 | IKK Dinas Pendidikan |
| 38 | Indeks Iklim Keamanan SD | nilai | 75,34 | 85,48 | 81,68 | 82,31 | 82,95 | 82,95 | IKK Dinas Pendidikan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | Indeks Iklim Kebinekaan SD | nilai | 62,83 | 89,14 | 79,27 | 80,92 | 82,56 | 82,56 | IKK Dinas Pendidikan |
| 40 | Indeks Inklusivitas SD | nilai | 70,98 | 78,46 | 75,66 | 76,12 | 76,59 | 76,59 | IKK Dinas Pendidikan |
| 41 | Indeks Iklim Keamanan SMP | nilai | 77,48 | 78,96 | 78,41 | 78,50 | 78,59 | 78,59 | IKK Dinas Pendidikan |
| 42 | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | nilai | 62,41 | 74,48 | 69,95 | 70,71 | 71,46 | 71,46 | IKK Dinas Pendidikan |
| 43 | Indeks Inklusivitas SMP | nilai | 65,28 | 73,32 | 70,31 | 70,81 | 71,31 | 71,31 | IKK Dinas Pendidikan |
| 44 | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 45 | Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 46 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | Persen | 38,67 | 38,67 | 38,77 | 38,87 | 38,97 | 38,97 | IKK Dinas Pendidikan |
| 47 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | Persen | 41,60 | 41,70 | 41,80 | 41,90 | 42,00 | 42,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 48 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Persen | 95,88 | 96,00 | 96,06 | 96,12 | 96,18 | 96,18 | IKK Dinas Pendidikan |
| 49 | Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 50 | Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 51 | Persentase karya bahasa dan sastra yang dikembangkan | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pendidikan |
| 52 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya Budaya | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 53 | Persentase Kelompok/Komunitas Kebudayaan yang dibina | Persen | 36,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | Persentase Festival Kebudayaan Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 55 | Persentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 56 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Event | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 57 | Persentase Kelompok/ Komunitas Seni/Kesenian yang dibina | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 58 | Persentase Festival Kesenian Tradisional yang diselenggarakan | Persen | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 59 | Persentase Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 60 | Terlestarikannya Cagar Budaya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 61 | Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | Persen | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 62 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 63 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Buah | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 64 | Persentase pertumbuhan pemanfaatan museum oleh masyarakat | Persen | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 65 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Persen | 63,90 | 63,90 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 66 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Poin | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 67 | Tingkat koleksi buku perpustakaan daerah | Persen | 84,60 | 2,17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 68 | Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital | Persen | 1,07 | 0,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 69 | Laju pengunjung perpustakaan | Persen | 39,25 | 409,13 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 70 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Orang | 12.381,00 | 63.035,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 71 | Persentase Perpustakaan Umum Dan Sekolah yang dibina | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 72 | Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik | Persen | 0,76 | 0,78 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 73 | Laju Anggota Perpustakaan | Persen | 0,15 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | 51,52 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 74 | Tingkat Layanan Perpustakaan Keliling | Persen | 0,32 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 75 | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | Persen | 40,00 | 42,86 | 50,00 | 53,00 | 61,00 | 61,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 76 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 0,00 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | 69,06 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 77 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 78 | Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan | Persen | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 79 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 80 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | Persen | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 81 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | Persen | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 82 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Persen | 0,00 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 83 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 84 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | Persen | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 85 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Persen | 0,00 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | 38,88 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 86 | Keselamatan dan perlindungan | Persen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 87 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 88 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | 0,0043 | 0,0049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 89 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 0,9500 | 0,9600 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,01 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 90 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 0,26 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 91 | Persentase Wirausaha Muda | Persen | 0,33 | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 92 | Persentase Pembinaan Kepemudaan | Persen | 0,26 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 93 | Tingkat prestasi olahraga | Persen | 50,00 | 66,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 94 | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 25,00 | 49,00 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 95 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 96 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Persen | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 97 | Tingkat atlet berprestasi | Persen | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 52,00 | 55,00 | 55,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 98 | Tingkat penyediaan Sarana Prasarana Olahraga | Persen | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 99 | Persentase organisasi kepramukaan yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 100 | Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 101 | Persentase transmigran swakarsa | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 102 | Persentase calon transmigran yang dibina/dilatih | Persen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 103 | Persentase transmigran yang diberangkatkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 104 | Persentase kemandirian transmigran di satuan permukiman | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 105 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 106 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,15 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Manusia |
| 107 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 37,25 | 47,34 | 51,01 | 56,51 | 63,85 | 63,85 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 108 | Persentase ASN Yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis | Persen | 2,61 | 5,49 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 109 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi | Persen | 36,37 | 36,36 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 110 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 111 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 97,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 112 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 98,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 113 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 71,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 114 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 39,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 115 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 81,46 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 116 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 65,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 117 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 59,94 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 118 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 93,58 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 119 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 79,31 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 120 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Persen | 98,43 | 92,20 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 121 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 122 | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 123 | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 97,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 124 | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 125 | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 71,47 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 126 | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 39,94 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 127 | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 81,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 128 | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 66,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 129 | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang | Persen | 60,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | mendapatkan pelayanan kesehatan | | | | | | | | |
| 130 | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 94,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 131 | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 79,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 132 | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 98,43 | 92,20 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 133 | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 134 | Rasio posyandu per satuan balita | Poin | 16,68 | 16,82 | 17,34 | 17,60 | 17,86 | 17,86 | IKK Dinas Kesehatan |
| 135 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | Persen | 97,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 136 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen | 98,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 137 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | Persen | 0,00 | 77,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 138 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 139 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | Persen | 85,31 | 81,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 140 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Persen | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 141 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | Persen | 50,00 | 37,49 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 142 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 92,48 | 82,20 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 143 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 246,95 | 282,78 | 245,65 | 208,52 | 171,39 | 171,39 | IKK Dinas Kesehatan |
| 144 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Poin | 6,07 | 2,90 | 2,58 | 2,26 | 1,94 | 1,94 | IKK Dinas Kesehatan |
| 145 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Persen | 92,48 | 82,20 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 146 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Persen | 93,73 | 86,53 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 147 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 148 | Penderita diare yang ditangani | Persen | 7626,00% | 56,58 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 149 | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | Rasio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 150 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persen | 79,40 | 41,60 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 151 | Cakupan kunjungan bayi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 152 | Cakupan puskesmas | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 153 | Cakupan pelayanan nifas | Persen | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 154 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | Persen | 75,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 155 | Cakupan pelayanan anak balita | Persen | 61,91 | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 156 | Cakupan pelayanan gawat darurat level | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|---------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | | | | | | | | |
| 157 | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 158 | Tingkat Pengendalian Infeksi di RS | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 159 | Capaian Indikator Medik | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 160 | Prosedur Penanganan Sampel Uji | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 161 | Pengendalian Mutu | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 162 | Bed Occupancy Rate (BOR) | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 163 | Ketepatan Waktu Pelayanan | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 164 | Temuan Yang di Tindaklanjuti (Temuan ketidakterersediaan Media dan Reagensia dan Temuan Hasil Telusur) | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 165 | Tingkat Kehandalan Sumber Daya | Persen | - | - | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 166 | Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan | Persen | 50,00 | 85,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 167 | Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan | Persen | 68,00 | 75,46 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 168 | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 68,20 | 73,50 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 169 | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 68,20 | 73,50 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 170 | Rasio dokter per satuan penduduk | Poin | 0,06 | 0,07 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 171 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | Poin | 0,08 | 0,10 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 172 | Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | IKK RSUD Bayu Asih |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|-----------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 173 | Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan | Persen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 174 | Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 175 | Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina | Persen | 70,75 | 79,67 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 176 | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 177 | Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina | Persen | 83,40 | 77,20 | 89,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kesehatan |
| 178 | Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan | Persen | NU1 | NU1 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 179 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Persen | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 180 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 181 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Persen | 37.890,00 | 37.890,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 182 | Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE | Persen | 29,89 | 29,89 | 30,00 | 30,00 | 31,11 | 31,11 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 183 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 12.263,00 | 81,27 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 184 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 33,52 | 34,05 | 35,22 | 36,30 | 38,40 | 38,40 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 185 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 186 | Ratio Akseptor KB | Persen | 26.717,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | 25.521,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 187 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | Persen | 81,27 | 82,27 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 188 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) | Poin | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 189 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | Persen | 533,83 | 533,83 | 534,83 | 534,83 | 534,83 | 534,83 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 190 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persen | 35,54 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | 46,24 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 191 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | Persen | 17,72 | 17,73 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 192 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | Persen | 681.167,00 | 681.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | 691.167,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 193 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | Persen | 151.153,00 | 151.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | 161.153,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 194 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | Persen | 623.471,00 | 623.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | 624.471,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 195 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | Persen | 23,53 | 23,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 196 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Persen | 51,71 | 51,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 197 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB | Persen | 98,00 | 115,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | | | | | | | | |
| 198 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persen | 22,80 | 22,80 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 199 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | Persen | 21,57 | 21,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 200 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | Persen | 149.900,00 | 274.920,00 | 272.476,00 | 325.980,00 | 391.178,00 | 391.178,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 201 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | Persen | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 202 | Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Persen | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 203 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | Persen | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 204 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | Persen | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 205 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | Persen | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 206 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan | Persen | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | | | | | | | | |
| 207 | Rata-rata usia kawin pertama wanita | Persen | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 208 | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 209 | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 210 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 211 | Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim | Persen | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 212 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | Skor/ Kategori | 63,33 / Sedang | 50 / Sedang | 60 / Sedang | 65 / Sedang | 70 / Baik | 70 / Baik | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 213 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara | Skor/ Kategori | 73,47 / Baik | 68,74 / Sedang | 70 / Baik | 75 / Baik | 80 / Baik | 80 / Baik | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 214 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Skor/ Kategori | 35,46 | 36,45 | 37,18 | 37,55 | 37,93 | 37,93 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 215 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun | Dokumen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 216 | Jumlah limbah B3 yang dikelola | Kg | 18.922.101.00 0,00 | 16.591.264.00 0,00 | 15.000.000.00 0,00 | 13.000.000.00 0,00 | 11.000.000.00 0,00 | 11.000.000.00 00,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 217 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 218 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | | | | | | | | |
| 219 | Peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 220 | Peningkatan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 221 | Persentase pembinaan/sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan | Persen | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 222 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 223 | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 224 | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 225 | Penetapan hak MHA | MHA | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 226 | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 227 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 228 | Timbulan sampah yang ditangani | Persen | 60,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 229 | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | Persen | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 230 | Persentase cakupan area pelayanan | Persen | 73,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 231 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Skor | 71,00 | 71,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 232 | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | Persen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 233 | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 234 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 235 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Kali | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 236 | Persentase peraih PROPER kategori Taat/Biru | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 237 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 238 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 239 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 240 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 95,76 | 90,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 241 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 242 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | Persen | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 243 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persen | - | 89,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 244 | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Persen | 95,76 | 90,16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 245 | Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 246 | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah | Layanan | 543,00 | 808,00 | 800,00 | 750,00 | 700,00 | 700,00 | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 247 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 248 | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 249 | Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 90,00 | 91,67 | 91,67 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|-------|----------------|-------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 250 | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | 90,05 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 251 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,25 | 90,25 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 252 | Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian | Persen | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 253 | Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian | Persen | 69,90 | 71,66 | 72,82 | 73,71 | 74,60 | 74,60 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 254 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 47,85 | 0,00 | 85,23 | 92,24 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 255 | Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha | Persen | 55,06 | 0,00 | 56,46 | 56,93 | 57,39 | 57,39 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 256 | Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha | Persen | 53,00 | 0,00 | 75,23 | 86,45 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 257 | Tingkat Wirausaha Baru (WUB) | Persen | 1,00 | 0,00 | 2,53 | 2,78 | 3,85 | 3,85 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 258 | Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan | Persen | 52,20 | 0,00 | 57,90 | 60,42 | 63,22 | 63,22 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 259 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 10,00 | 0,00 | 20,56 | 24,30 | 28,04 | 28,04 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 260 | Persentase UMKM yang terfasilitasi | Persen | 6,82 | 0,00 | 9,63 | 10,56 | 11,50 | 11,50 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|-------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | dalam pengembangan usahanya | | | | | | | | Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 261 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | Persen | 6,78 | 11,19 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,00 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 262 | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Trilyun Rp. | 4,73 | 5,88 | 6,73 | 7,20 | 7,70 | 7,70 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 263 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 550,00 | 604,00 | 730,00 | 803,00 | 884,00 | 884,00 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 264 | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | Persen | 27,74 | 28,00 | 28,50 | 29,00 | 29,5 | 29,5 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 265 | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan | Kegiatan | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 266 | Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Trilyun) | Rp. | 6,00 | 6,50 | 7,40 | 7,90 | 8,40 | 8,40 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 267 | Rasio daya serap tenaga kerja | Persen | 16,95 | 17,30 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 19,50 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 268 | Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan | Persen | 93,79 | 90,58 | 94,58 | 95,58 | 96,58 | 96,58 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 269 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 87,78 | 91,26 | 92,50 | 93,00 | 93,50 | 93,50 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 270 | Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala | Persen | 6,67 | 6,67 | 7,14 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 271 | Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 272 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Persen | 93,00 | 0,00 | 95,32 | 96,53 | 97,86 | 97,86 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 273 | Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 274 | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 275 | Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 276 | Persentase kinerja realisasi pupuk | Persen | 34,84 | 0,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 39,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 277 | Tingkat Nilai Export bersih | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 278 | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang | Persen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,94 | 3,22 | 3,22 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 279 | Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 62,61 | 0,00 | 64,62 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 280 | Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 281 | Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 282 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | | | | | | | | Perindustrian |
| 283 | Cakupan bina kelompok pengrajin | Persen | 47,52 | 0,00 | 83,33 | 90,48 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 284 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi | Persen | 18,68 | 0,00 | 20,71 | 21,19 | 21,45 | 21,45 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 285 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 286 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 287 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 288 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 289 | Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan | Kegiatan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 290 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per | Persen | -35,81 | -44,84 | 6,53 | 3,33 | 4,84 | 4,84 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | kebangsaan | | | | | | | | |
| 291 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | Persen | -18,24 | 32,35 | 0,42 | 2,38 | 2,78 | 2,78 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 292 | Tingkat hunian akomodasi | Persen | 17,54 | 16,89 | 19,87 | 24,84 | 31,05 | 31,05 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 293 | Kunjungan wisata | Persen | 53,01 | 69,89 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 294 | Lama kunjungan Wisata | Hari | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 295 | Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi | Persen | 4,44 | 4,44 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 296 | Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata yang bersertifikat | Persen | 4,44 | 4,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 297 | Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan | Persen | 13,33 | 15,56 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 298 | Jumlah Event Promosi pariwisata yang diselenggarakan | Event | 40,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 299 | Persentase destinasi wisata yang diminati | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 300 | Cakupan sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang disediakan | Persen | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 301 | Persentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina | Persen | 40,00 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 302 | Persentase Pengisian Gudang Cadangan Pangan | Persen | 75,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 303 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 304 | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 305 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 306 | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 1.371,25 | 1.474,09 | 1.635,30 | 1.692,54 | 1.751,77 | 1.751,77 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 307 | Produksi perikanan | Persen | 10,50 | 10,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 308 | Konsumsi ikan | Persen | 20,00 | 32,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 309 | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 11,76 | 16,98 | 18,97 | 19,67 | 20,31 | 20,31 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 310 | Produksi perikanan kelompok nelayan | Persen | 0,17 | 9,16 | 3,32 | 3,40 | 3,48 | 3,48 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 311 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | Persen | 68,56 | 74,25 | 76,85 | 79,54 | 82,33 | 82,33 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 312 | Produksi Perikanan Tangkap | Persen | 7,50 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 313 | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 108.037,89 | 14.735,00 | 16.351,74 | 17.496,36 | 18.721,11 | 18.721,11 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 314 | Poduksi Ikan Konsumsi | Ton | 15.646,00 | 16.205,00 | 17.987,00 | 19.189,00 | 20.473,00 | 20.473,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 315 | Produksi Benih Ikan UPR | Ekor | 554.013.000,00 | 1.067.364.864,00 | 1.078.038.512,00 | 1.088.818.897,00 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 316 | Produksi Benih Ikan BBI | Ekor | 6.630.833,00 | 6.740.000,00 | 8.100.000,00 | 9.150.000,00 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 317 | Produksi Ikan Hias | Ton | 239.090,00 | 194.918,00 | 608.990,00 | 627.259,00 | 646.076,00 | 646.076,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 318 | Produksi Perikanan budidaya | Ton | 39,58 | 0,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 319 | Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 320 | Persentase Wilayah Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 321 | Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 322 | Produksi Olahan Produk Perikanan | Ton | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 323 | Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan | Kelompok | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 324 | Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Unit | 112,00 | 121,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 325 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 326 | Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik | Persen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 327 | Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) | Kasus | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 328 | Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan | Lokasi | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 329 | Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak) | Ekor | 57.983,00 | 39.574,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 330 | Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) | Persen | - | - | 79,00 | 84,00 | 87,50 | 87,50 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 331 | Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 633,00 | 696,00 | 828,00 | 908,00 | 992,00 | 992,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 332 | Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Ton | 13,00 | 14,30 | 16,20 | 18,00 | 19,80 | 19,80 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 333 | Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) | Liter | 32,00 | 35,20 | 38,80 | 41,00 | 42,70 | 42,70 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 334 | Persentase Pengendalian Serangan OPT | Persen | 3,00 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 335 | Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim | Persen | 3,00 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 336 | Persentase usaha pertanian yang memiliki ijin | Persen | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 337 | Cakupan bina kelompok petani | Persen | 70,00 | 70,00 | 73,00 | 74,00 | 80,00 | 80,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 338 | Cakupan bina kelompok petani (peternakan) | Persen | 15,00 | 13,00 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 339 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Persen | 6,00 | 6,20 | 6,25 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 340 | Pertumbuhan Produksi Pertanian | Persen | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 341 | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian | Persen | 25,00 | 26,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 342 | Produksi Padi | Ton | 270,54 | 0,00 | 270.808,00 | 271.079,00 | 271.350,00 | 271.350,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 343 | Tingkat Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi | Persen | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 344 | Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat | Persen | 60,00 | 65,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 345 | Pengembangan Tanaman Manggis | Persen | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 346 | Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persen | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 347 | Pertumbuhan Produksi Peternakan | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 348 | Cakupan Akseptor IB | Persen | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 349 | Persentase bibit ternak bersertifikat | Persen | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 350 | Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia | Persen | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 351 | Persentase RPH sesuai standar | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 352 | Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 353 | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 354 | Persentase pemulangan warga migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 355 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 471,00 | 402,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 356 | Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 357 | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 260,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 358 | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 359 | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Persen | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 360 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 400,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 361 | Persentase PMKS yang tertangani | Persen | 76,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 362 | Persentase anak terlantar yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 363 | Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 364 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 365 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 366 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 367 | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 368 | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 369 | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 370 | Persentase lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 371 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Poin | 5,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 372 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Persen | 17,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 373 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 374 | Cakupan perempuan dan anak korban | Persen | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|---------|--------------|-------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | | | | | | | | Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 375 | Persentase pembinaan lembaga yang bergerak dalam peningkatan kualitas keluarga | Persen | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 376 | Data Gender Anak | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 377 | Persentase Pemenuhan Hak Anak | Persen | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 378 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | 8,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 379 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | - | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 380 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Persen | 68,76 | - | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 381 | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 72,79 | - | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 70,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 382 | Persentase pemeliharaan jalan (km) yang dilaksanakan | Persen | 6,87 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 383 | Persentase jembatan yang di tingkatkan/direhabilitasi | Persen | 2,74 | 4,11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 384 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | - | - | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 385 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 37,56 | - | 84,71 | 84,71 | 84,71 | 84,71 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 386 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan | Persen | 60,65 | 61,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | | | | | | | | |
| 387 | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 94,55 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 388 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | Persen | 79,76 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 82,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 389 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari | Persen | 0,39 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 390 | Tingkat jaringan SPAM yang dibangun | Persen | 96,24 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 391 | Rasio konektivitas kabupaten/kota | Persen | 98,00 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 392 | Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota | Poin | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 393 | Jumlah arus penumpang angkutan umum (kendaraan) | Unit | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | 311.378,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 394 | Rasio ijin trayek | Persen | 56,00 | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 395 | Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan) | Unit | 300,00 | 300,00 | 307,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 396 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 397 | Persentase layanan angkutan darat | Persen | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 398 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Persen | 884,00 | 884,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 399 | Pemasangan Rambu- rambu | Persen | 60,00 | 61,00 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 400 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | IKK Dinas Perhubungan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 401 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | 576.262,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 402 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Orang | 490.776,00 | 490.776,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | 539.548,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 403 | Persentase usaha angkutan laut/sungai yang berijin | Persen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | IKK Dinas Perhubungan |
| 404 | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 405 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 406 | Tingkat bangunan gedung daerah yang dipelihara/dirawat | Persen | 54,55 | 8,33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 407 | Persentase bangunan gedung daerah yang terawat/ terpelihara | Persen | - | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 408 | Persentase penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Persen | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 409 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 410 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 411 | Tingkat peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persen | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 412 | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | Persen | 5,00 | 11,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 413 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | Persen | 54,25 | 54,25 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 414 | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 44,00 | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 415 | Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi | Persen | - | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 416 | Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 417 | Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan | Persen | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 418 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 67,69 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 71,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 419 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 81,02 | 81,5 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 84,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 420 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 0,5 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 421 | Tingkat sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun / diperbaiki | Persen | 98,45 | 80,5 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 422 | Tingkat Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki | Persen | 0,05 | 0,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 423 | Persentase areal kawasan kumuh | Persen | 31,55 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 424 | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | Poin | 25,82 | 27,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 425 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Persen | 15,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 40,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 426 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Persen | 7,60 | 2,61 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 427 | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persen | 46,90 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 428 | Rasio rumah layak huni | Persen | 31,55 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 429 | Rasio permukiman layak huni | Persen | 22,87 | 23,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 430 | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | Persen | 94,68 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 431 | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | Persen | 90,91 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 432 | Persentase pemukiman yang tertata | Persen | 16,11 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 433 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 434 | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | Persen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 435 | Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 436 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK Dinas Pendidikan |
| 437 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK Dinas Kesehatan |
| 438 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK RSUD Bayu Asih |
| 439 | Rasio Keuangan BLUD | Skor | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 80,00 | IKK RSUD Bayu Asih |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|----------|--------------|------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 440 | Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional BLUD | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 441 | Nilai Kepatuhan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | Skor | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | IKK RSUD Bayu Asih |
| 442 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | - | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 443 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 444 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 445 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 446 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 447 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | B | IKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 448 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 449 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Pangan dan Pertanian |
| 450 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Lingkungan Hidup |
| 451 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 452 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 453 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 454 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Perhubungan |
| 455 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 456 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian |
| 457 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 458 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan |
| 459 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 460 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 461 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | A | A | A | A | A | IKK Sekretariat Daerah |
| 462 | Persentase analisis jabatan yang sudah dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 463 | Persentase PD/Unit pelayanan publik yang melaksanakan penilaian survey kepuasan masyarakat | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 464 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | D | B | B | B | B | B | IKK Sekretariat DPRD |
| 465 | Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat DPRD |
| 466 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | AA | AA | AA | AA | AA | AA | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 467 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 468 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKK Badan Pendapatan Daerah |
| 469 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 470 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | A | A | A | A | A | IKK Inspektorat |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|----------|--------------|------|----------------|------|------|---------------|---------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 471 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | CC | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Jatiluhur |
| 472 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | B | IKK Kecamatan Sukasari |
| 473 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | B | B | B | IKK Kecamatan Maniis |
| 474 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Tegalwaru |
| 475 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | CC | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Plered |
| 476 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | A | A | A | A | IKK Kecamatan Sukatani |
| 477 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Darangdan |
| 478 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Bojong |
| 479 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Wanayasa |
| 480 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | CC | B | B | B | B | IKK Kecamatan Kiarapedes |
| 481 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Pasawahan |
| 482 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | A | A | A | IKK Kecamatan Pondoksalam |
| 483 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Purwakarta |
| 484 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Babakan Cikao |
| 485 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Campaka |
| 486 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | B | B | A | A | A | IKK Kecamatan Cibatu |
| 487 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | IKK Kecamatan Bungursari |
| 488 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | A | A | A | A | A | A | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 489 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Sekretariat DPRD |
| 490 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Sekretariat DPRD |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak ada) | | | | | | | | |
| 491 | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Sekretariat DPRD |
| 492 | Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat DPRD |
| 493 | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat DPRD |
| 494 | Perekaman KTP elektronik | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 495 | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 496 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Kategori | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 497 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Persen | 99,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 498 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Persen | 26,98 | 48,22 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 499 | Kepemilikan akta kelahiran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 500 | Rasio bayi berakte kelahiran | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|---------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 501 | Rasio pasangan berakate nikah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 502 | Cakupan penerbitan akta kelahiran | Persen | 81,61 | 85,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 503 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persen | 53,33 | 54,00 | 55,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 504 | Profil data kependudukan | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 505 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | 100,00 | 11,76 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 506 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | 67,00 | 66,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 507 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | - | 90,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 508 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | 53,30 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 509 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 510 | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | Persen | - | - | 95,00 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 511 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|-----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 512 | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | Persen | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 513 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 69,50 | 36,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 514 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 69,50 | 25,50 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 515 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 516 | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada/tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 517 | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | Persen | - | - | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 518 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 519 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 520 | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | Persen | - | 3,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | IKK Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 521 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Jatiluhur |
| 522 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Sukasari |
| 523 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Maniis |
| 524 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Tegalwaru |
| 525 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Plered |
| 526 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Sukatani |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 527 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Darangdan |
| 528 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Bojong |
| 529 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Wanayasa |
| 530 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Kiarapedes |
| 531 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Pasawahan |
| 532 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Pondoksalam |
| 533 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Purwakarta |
| 534 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Babakan Cikao |
| 535 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Campaka |
| 536 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Cibatuh |
| 537 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKK Kecamatan Bungursari |
| 538 | Rata-rata pencapaian SPM Kabupaten | Persen | 62,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 539 | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 540 | Persentase produk hukum daerah yang dapat diakses secara online | Persen | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 541 | Persentase kerja sama daerah yang berjalan efektif | Persen | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 542 | Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 543 | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 544 | Dokumen administrasi pembangunan daerah yang disusun | Dokumen | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 545 | Persentase jumlah total proyek | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama | | | | | | | | |
| 546 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 547 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 44,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 548 | Persentase Pembinaan Kearsipan OPD | Persen | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 549 | Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib | Persen | 28,57 | 0,00 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | 39,10 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 550 | Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan | Persen | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 551 | Persentase Penyusutan Arsip | Persen | 9,50 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 552 | Arsip Aktif | Persen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 553 | Arsip Inaktif | Persen | 5,28 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 554 | Arsip Vital | Persen | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 555 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan | Persen | 73,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 556 | Laju Pengunjung Diorama/Museum Kearsipan | Persen | 2,67 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 557 | Tingkat Penyelamatan Arsip Statis | Persen | 33,04 | 6,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 558 | Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis | Persen | 19,99 | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 559 | Tingkat Pelestarian Arsip Statis | Persen | 1,75 | 13,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | IKK Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 560 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 561 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 562 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 563 | Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 564 | Tersedianya dokumen profil pembangunan daerah (ada/tidak ada) | Dokumen | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 565 | Capaian Kinerja RKPD | Persen | 88,64 | 88,75 | 89,00 | 89,25 | 89,50 | 89,50 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 566 | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 567 | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 568 | Persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 569 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan | Persen | 15,65 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | tenaga kesehatan | | | | | | | | Daerah |
| 570 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Persen | 81,83 | 0,00 | 85,00 | 87,00 | 89,00 | 89,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 571 | Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 572 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Persen | 75,24 | 0,00 | 75,54 | 75,84 | 76,14 | 76,14 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 573 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | Persen | 2,18 | 0,00 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | 2,03 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 574 | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 2,16 | 2,68 | 1,74 | 1,69 | 1,58 | 1,58 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 575 | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 30,85 | 0,00 | 32,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 576 | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 19,05 | 0,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 577 | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | Persen | 1,25 | 14,84 | 1,80 | 1,78 | 1,74 | 1,74 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 578 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 579 | Kesesuaian Dokumen Penganggaran | Skor | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 580 | Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD | Skor | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 581 | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah | Skor | 7,76 | 7,76 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 582 | Penyerapan Anggaran | Skor | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 583 | Kondisi Keuangan Daerah | Skor | 3,06 | 3,06 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|---------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Daerah |
| 584 | Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak) | Dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 585 | Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 586 | Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat | Persen | 21,79 | 23,66 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 587 | Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persen | 50,00 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 588 | Persentase pengolah BMD yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 589 | Persentase penyusutan/ penghapusan BMD | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 590 | Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 591 | Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 592 | Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 593 | Administrasi BMD yang Andal | Indeks | 2 (cukup) | 2 (cukup) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | 3 (Baik) | IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 594 | Rasio PAD | Persen | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,93 | IKK Badan Pendapatan Daerah |
| 595 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | Persen | 11,95 | 12,30 | 12,65 | 13,00 | 13,35 | 13,35 | IKK Badan Pendapatan Daerah |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 596 | Rasio Pajak daerah | Persen | 48,84 | 49,34 | 49,84 | 50,34 | 50,84 | 50,84 | IKK Badan Pendapatan Daerah |
| 597 | Rasio retribusi daerah | Persen | 3,92 | 4,23 | 4,53 | 4,84 | 5,14 | 5,14 | IKK Badan Pendapatan Daerah |
| 598 | Persentase capaian PAD | Persen | 88,05 | 88,50 | 88,95 | 89,40 | 89,85 | 89,85 | IKK Badan Pendapatan Daerah |
| 599 | Rasio Ketertagihan Piutang Pajak Daerah | Persen | 8,80 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | IKK Badan Pendapatan Daerah |
| 600 | Persentase implementasi rencana kelitbangan | Persen | 3,00 | 2,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 601 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 602 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | Persen | 10,87 | 25,53 | 42,55 | 53,19 | 53,19 | 53,19 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 603 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 604 | Persentase tanda batas wilayah yang terpelihara | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Sekretariat Daerah |
| 605 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 78,59 | 80,16 | 80,88 | 81,74 | 82,67 | 82,67 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 606 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 8,40 | 16,66 | 16,99 | 17,33 | 17,67 | 17,67 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 607 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Persen | 29,76 | 39,68 | 49,80 | 54,86 | 59,92 | 59,92 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 608 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Manusia |
| 609 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 610 | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 249,00 | 494,00 | 504,00 | 514,00 | 524,00 | 524,00 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 611 | Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai | Persen | 0,41 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 612 | Persentase Pemberhentian ASN | Persen | 6,04 | 7,02 | 5,73 | 5,94 | 6,16 | 6,16 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 613 | Persentase Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa | Persen | 1,76 | 2,59 | 2,15 | 2,03 | 1,93 | 1,93 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 614 | Persentase pengadaan ASN sesuai formasi pegawai | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 615 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Jatiluhur |
| 616 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukasari |
| 617 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Maniis |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 618 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Tegalwaru |
| 619 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Plered |
| 620 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukatani |
| 621 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Darangdan |
| 622 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bojong |
| 623 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Wanayasa |
| 624 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Kiarapedes |
| 625 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pasawahan |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|---------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 626 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pondoksalam |
| 627 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Purwakarta |
| 628 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Babakan Cikao |
| 629 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Campaka |
| 630 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Cibatu |
| 631 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bungursari |
| 632 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | IKK Inspektorat |
| 633 | Persentase tindak lanjut temuan | Persen | 70,09 | 84,79 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | IKK Inspektorat |
| 634 | Jumlah temuan BPK | Laporan | 16,00 | 15,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | IKK Inspektorat |
| 635 | Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Inspektorat |
| 636 | Capaian MCP KPK | Persen | 74,00 | 100,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | IKK Inspektorat |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|------------------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 637 | Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas | Perangkat Daerah | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKK Inspektorat |
| 638 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 51,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Jatiluhur |
| 639 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukasari |
| 640 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Maniis |
| 641 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Tegalwaru |
| 642 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Plered |
| 643 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukatani |
| 644 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Darangdan |
| 645 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bojong |
| 646 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Wanayasa |
| 647 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Kiarapedes |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | administrasi desa yang dilaksanakan | | | | | | | | |
| 648 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pasawahan |
| 649 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pondoksalam |
| 650 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Purwakarta |
| 651 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Babakan Cikao |
| 652 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Campaka |
| 653 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Cibatu |
| 654 | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 51,00 | 51,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bungursari |
| 655 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 656 | Persentase kerjasama desa yang difasilitasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,74 | 11,48 | 11,48 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 657 | Persentase pembangunan kawasan perdesaan | Persen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 658 | Persentase peningkatan status desa | Persen | 2,86 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | mandiri | | | | | | | | dan Desa |
| 659 | Persentase desa tertib administrasi | Persen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 660 | Persentase pembinaan BUM Desa | Persen | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 661 | Persentase penertiban aset desa | Persen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 662 | Persentase kepala desa yang dibina | Persen | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 663 | Persentase aparatur desa yang dibina | Persen | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 664 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 665 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 666 | Persentase LSM aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 667 | Persentase PKK aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 668 | Persentase Posyandu aktif | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 669 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 670 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Jatiluhur |
| 671 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukasari |
| 672 | Persentase kegiatan pemberdayaan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Maniis |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|---|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | masyarakat yang dilaksanakan | | | | | | | | |
| 673 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Tegalwaru |
| 674 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Plered |
| 675 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukatani |
| 676 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Darangdan |
| 677 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bojong |
| 678 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Wanayasa |
| 679 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Kiarapedes |
| 680 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pasawahan |
| 681 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pondoksalam |
| 682 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Purwakarta |
| 683 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Babakan Cikao |
| 684 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Campaka |
| 685 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Cibatu |
| 686 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bungursari |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 687 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 688 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 689 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 690 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 691 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 692 | Persentase Penegakan PERDA | Persen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Satuan Polisi Pamong Praja |
| 693 | Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 694 | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 695 | Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 696 | Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 697 | Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 698 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 699 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Jatiluhur |
| 700 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukasari |
| 701 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Maniis |
| 702 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Tegalwaru |
| 703 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Plered |
| 704 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Sukatani |
| 705 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Darangdan |
| 706 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bojong |
| 707 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Wanayasa |
| 708 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Kiarapedes |
| 709 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pasawahan |
| 710 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Pondoksalam |
| 711 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Purwakarta |
| 712 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Babakan Cikao |
| 713 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Campaka |
| 714 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Cibatuh |
| 715 | Tingkat penyelesaian konflik sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKK Kecamatan Bungursari |
| | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |

Sumber : Analisa Tim dan Perangkat Daerah terkait, 2023

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|----------|--|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | |
| 1 | Persentase seni budaya daerah yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 2 | Persentase Pemuda Berprestasi | Persen | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota | Poin | 61,07 | 64,28 | 67,49 | 69,09 | 70,69 | 70,69 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 4 | Indeks Ketahanan Daerah | Persen | 0,66 | 0,44 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 5 | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) | Predikat | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 6 | Persentase Koperasi Aktif dan Sehat | Persen | 89,65 | 0,00 | 89,70 | 89,80 | 90,05 | 90,05 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 7 | Pertumbuhan UMKM | Persen | 1,00 | 0,00 | 11,86 | 13,16 | 14,69 | 14,69 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 8 | Inflasi | Persen | 1,81 | 4,86 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 9 | Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 10 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Persen | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 9,82 | 10,41 | 10,41 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 11 | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | Persen | 6,57 | 6,57 | 6,39 | 6,34 | 6,29 | 6,29 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 12 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Poin | 86,70 | 86,93 | 87,38 | 87,60 | 87,83 | 87,83 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 13 | Indeks Perberdayaan Gender (IDG) | Poin | 74,39 | 77,89 | 79,92 | 80,93 | 81,94 | 81,94 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 14 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | 83,25 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 15 | Cakupan Layanan Air Bersih | Persen | 79,76 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 16 | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota | Persen | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 17 | Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | Persen | 88,35 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 18 | Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persen | 37,56 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 19 | Nilai SAKIP Kabupaten | Poin | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 73,64 | 73,64 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 20 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU PEMKAB PURWAKARTA |

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | KETERANGAN |
|-----|--|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 61,41 | 64,41 | 67,41 | 70,41 | 73,41 | 73,41 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 22 | Indeks SPBE | Poin | 2,37 | - | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 23 | Indeks Profesionalitas ASN | Predikat | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Rendah | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 24 | Sistem Merit Kabupaten | Predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 25 | Nilai LPPD Kabupaten | Poin | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 26 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 27 | Indeks Kemandirian Fiskal | Poin | 0,1950 | 0,2120 | 0,2280 | 0,2370 | 0,2450 | 0,25 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 28 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Poin | 77,52 | 79,16 | 82,45 | 84,09 | 85,74 | 85,74 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 29 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | 2,636 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,00 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 30 | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 50,38 | 50,50 | 50,62 | 50,68 | 50,74 | 50,74 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 31 | Indeks Desa Membangun | Predikat | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | Maju | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| 32 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 72,70 | 74,45 | 77,95 | 79,70 | 81,45 | 81,45 | IKU PEMKAB PURWAKARTA |
| | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Sumber : Analisa Tim, 2023

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2023.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program-program teknis pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, serta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024.

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026. Guna mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPD sebagai berikut :

1. RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dan RKPD Tahun 2024, 2025 dan 2026;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPD Tahun 2024

- 2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
- 3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seyogyanya harus memperhatikan dan mempedomani RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, serta mengerahkan semua potensi dan kemampuan daerah guna tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- 4. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;
- 6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024 - 2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 merupakan pedoman transisi dalam menyusun dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah tahun 2024 - 2026, sebelum dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dilaksanakan di tahun 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2023 merupakan tahun terakhir berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, sehingga penyusunan dokumen perencanaan daerah tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 dan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Selanjutnya RKPD tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan

penyusunan KUA PPAS serta Rancangan APBD Kabupaten Purwakarta pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2025 atau setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mulai menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2030. Namun demikian penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2026, masih berpedoman pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, sampai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2030 ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maka kebijakan perencanaan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 tetap tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2030. Hal ini untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan dokumen perencanaan sebelumnya.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kabupaten Purwakarta demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

